



**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING
SETELAH DI KELUARKAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH
DI SUMATERA BARAT**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

DESWITA ROSRA

NIM : B4A 001 250

**Dosen Pembimbing
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UNIP

**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING
SETELAH DIKELUARKAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH
DI SUMATERA BARAT**

TESIS

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2106/1mH/01
di.	29 Jpt'03

Oleh :

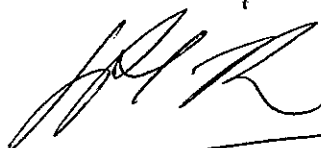
DESWITA ROSRA
NIM : B4A 001 250

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Juni 2003**

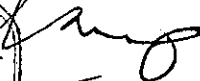
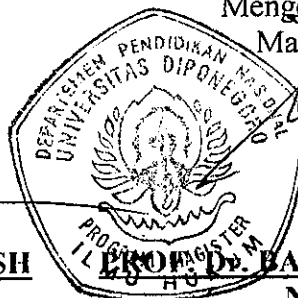
Tesis ini Telah Diterima Sebagai
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH
NIP. 130 354 857



PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian dan menuangkannya ke dalam tesis ini yang berjudul pelaksanaan penanaman modal asing setelah dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka penyelesaian rangkaian studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan dorongan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak, baik moril maupun material. Untuk itu pada kesempatan yang tepat ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat dalam.

Pertama-tama teruntuk Ibunda tercinta Hj. Roslina A. yang berjuang dengan kesendiriannya membesarkan dan memberikan kesempatan penulis untuk memperoleh penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum ini. Tak lupa rasa hormat dan kasih sayang yang dalam buat Ayahanda Rabinan (Alm) yang telah lebih dahulu menghadap Khaliq.

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tertinggi kepada Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. Selaku Pembimbing yang telah membekali penulis dengan falsafah hidup dan kehidupan serta menempa dan mengasah ketajaman berfikir dan kritik membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih yang tak terhingga atas pengertian dan dukungan serta doa restu kepada suami tercinta Aguswir dan Ananda Fauzyyah Adilah yang selalu setia menemani Bunda saat penyelesaian tesis ini.

Ucapan terimakasih dan hormat penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Budiharto, SH, MS., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah memberikan izin kesempatan dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Yayasan Pengelola Beasiswa Universitas Bung Hatta yang telah memberikan beasiswa selama penulis menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, dan Ibu Etty S. Soehardo, SH, MS., yang telah memberikan pengarahan dan masukan-masukan pada saat review proposal maupun saat ujian tesis.
6. Para Guru Besar dan staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bimbingan dalam memperluas wawasan keilmuan sebagai akademisi selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf Administrasi yang telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis menempuh studi hingga penyelesaiannya pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
9. Bapak Drs. H. Syahril Syarif, MBA., selaku Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah yang telah memberi izin untuk penelitian pada Kantor BKPPMD Propinsi Sumatera Barat.
10. Bapak Ir. Zaenal Arifin selaku Direktur Utama dan Karyawan pada PT. Incasi Raya dan PT. Sumbar Andalas Rencana yang telah memberi izin dan informasi untuk memperoleh data dalam rangka penulisan tesis ini.

11. Bapak Budi Haryoko selaku BM dan Legal Manager dan Karyawan pada PT. AMP Plantation dan PT. Permata Hijau Pasaman, PT. Gersindo Minang Plantation di Simpang Empat Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat yang telah memberi izin dan membantu dalam penelitian untuk memperoleh data yang digunakan dalam penulisan tesis ini.
12. Rekan-rekan HET angkatan 2001 atas kebaikan dan rasa persaudaraan yang tidak akan pernah terlupakan khususnya Woro, Novi, Lisa, Ichlan dan Mbak Lita.
13. Ibu dan Bapak Agus Dwimantoro serta rekan-rekan kos Farida dan Icha yang selalu memberi dukungan dan dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
14. Kakak-kakak dan Adikku tersayang Ardeyesi Rosra yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam doa maupun perbuatan selama penulis mengikuti pendidikan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih perlu penyempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam pengembangan Ilmu Hukum.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Semarang, Juni 2003

DESWITA ROSRA

ABSTRAK

Untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dengan mendatangkan modal asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu hal yang wajar. Karena keterbatasan pihak dalam negeri Indonesia di bidang modal, teknologi, keahlian dan manajemen sedangkan pihak asing memiliki keunggulan dalam bidang tersebut. Indonesia tetap menganggap PMA sebagai modal pelengkap di samping modal dalam negeri. Pengaturan PMA bagi Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1967. UUPMA memberikan peluang yang sangat berarti bagi negara-negara berkembang.

Dengan adanya globalisasi ekonomi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan negara saat ini ada beberapa pasal UUPMA perlu direvisi. Apalagi dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah diberi kekuasaan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pemikiran diatas merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka permasalahan pokok yang diajukan dalam tesis yang berjudul "Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat". Permasalahan tersebut meliputi : Bagaimana pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat, manfaat apakah yang diperoleh dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat serta kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

Permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tesis ini dipecahkan melalui suatu penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif, induktif dan fenomenologis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis diperoleh beberapa kesimpulan : bahwa pelaksanaan PMA di Sumatera Barat diatur dengan SK Meninves/Kepala BKPM No. 38 Tahun 1999 berlaku secara nasional. Dengan dikeluarkannya UU Otonomi Daerah adanya kemudahan dalam pelaksanaan PMA, dimana sebelum UU Otonomi Daerah tidak adanya kemudahan dalam pelaksanaan PMA. UU Otonomi Daerah merupakan suatu momentum untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas dan inisiatif dalam melaksanakan proses pemberdayaan potensi kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara lebih efektif dan produktif yang terdapat pada daerah Sumatera Barat. Manfaat yang diperoleh sebelum dan sesudah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat pada prinsipnya sama, cuma dibedakan dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien setelah UU Otonomi Daerah, disamping manfaat bagi Pemda Sumatera Barat, kuantitas pembangunan, pengembangan dunia usaha dan tenaga kerja.

Dengan analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss dan Seidman) ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat yaitu : di bidang perencanaan dan promosi, birokrasi yang tidak efektif dan efisien, rendahnya penguasaan informasi dan teknologi, skala potensi yang kurang ekonomis, rendahnya jaminan keamanan atas penanaman modal dan perlindungan hukum, ketidakpastian hukum, adat istiadat, nilai budaya dan kebiasaan masyarakat serta sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Pemerintah Daerah Sumatera Barat menyatukan tekad untuk meningkatkan fungsi, kinerja dan mutu pelayanan pelaksanaan PMA ke arah sistim pelayanan one stop service sehingga memberikan pelayanan dengan cara yang cepat dan efisien.

ABSTRACT

To develop economics of Indonesia, representing a fair matter by delivering foreign capital through Cultivation of Foreign Capital (PMA). Because limitation of domestic party of Indonesia in capital Local, technological, skill and management, while foreign party have excellence in the field of Indonesia remains to assume PMA as complement capital beside domestic capital. Arrangement of PMA to Indonesia is Law No. 1. 1967. PMA Law gives opportunity, which is very mean for all nations expand.

With existence of economic globalisation and adapted for by situation and condition growth of state in this time there are some section of PMA Law require to revisc. More than anything else legislated Local Autonomy Law No. 22, 1999. Local Government was given plenipotentiary to manage its own house hold. Pursuant to idea above constitute a piquancy research. Hence fundamental problems, which were raised in thesis entitling : "Execution Of Foreign Capital Cultivation After Releasing Local Autonomy Law in West Sumatra". The Problems cover : How execution of PMA after released by Local Autonomy Law in West Sumatra, benefit what is obtained in execution of PMA after released by Local Autonomy Law in West Sumatra and also constraints what is arise in execution of PMA after released by Local Autonomy Law in West Sumatra.

Problems which is raised in this thesis is solved to through a research with approach of normative juridical supported by approach of empirical juridical with method analyse qualitative, inductive and phenomenology.

Pursuant to result of research which have been analysed to be obtained by some conclusion : that execution of PMA in West Sumatra arranged with SK Meninves/Lead BKPM No. 38 year 1999 going into effect nationally. Released Local Autonomy Law there is amenity in execution of PMA, where before theirs Local Autonomy Law no amenity in execution of PMA. Local Autonomy Law represent a momentum to be able to develop and improve initiative and creativity in executing process enable Ness of potency properties of Natural Resources, Human Resource and other resource more effective and productive found on West Sumatra Local. Obtained Benefit before and after released by Local Autonomy Law in is same West Sumatra in principle, is merely differentiated with service which quickly, effective and efficient after Local Autonomy Law, beside benefit to Local government of West Sumatra, development amount, development of corporate world and labour.

With analysis to working of Law of in society (Chambliss and of Seidman) found by some constraint in execution of PMA after released by Local Autonomy Law in West Sumatra that is : in local planning and promotion, bureaucracy which is not effective and efficient, lower him domination of information and technology, less economic potency scale, lower security guarantee of capital cultivation and Law protection, uncertainty of Law, mores, cultural value and habit of society and also human resource. To overcome the constraints of Local Government of West Sumatra unite intention to increase function, performance and quality service of PMA execution up at systems service of one stop service so that give service by expeditious.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Belanja Daerah
APEC	: Asia Pacific Economic Confiration
APIT	: Akte Pelaku Importir Terbatas
ASEAN	: Association
BITs	: Bilateral Investment Traties
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPMD	: Badan Koo:dinasi Penanaman Modal Daerah
BKPPMD	: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
BOO	: Build Of Operation
BOT	: Build Of T ransfer
BPN	: Badan Pertahanan Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DICS	: Debt Investment Conversion Scheme
DNI	: Daftar Negatif Investasi
DSP	: Daftar Skala Prioritas
FDI	: Foreign Direct Investment
GATT	: General Agreement of Tariff and Trade
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
HO	: Hinder Ordonantie

ICSID	: International Center for Settlement of Investment
IGA	: Investment Guaranteed Agreement
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IMT-GT	: Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle
IMS-GT	: Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle
IPMK	: Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
IPMP	: Investasi Penanaman Modal Propinsi
IPS	: Investment Policy Statement
ISIC	: International Standard Industrial Classification
IUT	: Izin Usaha Tetap
KDH	: Kedudukan Kepala Daerah
Keppres	: Keputusan Presiden
KKI	: Klasifikasi Komoditi Indonesia
KSO	: Kerja Sama Operasional
KTI	: Kawasan Timur Indonesia
LKPM	: Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Meninves	: Menteri Negara Investasi
MIGA	: Multilateral Investment Guaranty Agreement
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
P4M	: Persetujuan Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto

PERC	: Political and Economic Risk Consultancy
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PROPENAS	: Program Pembangunan Nasional
PT	: Perseroan Terbatas
Renstra	: Rencana Strategis
RPTKA	: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang
SPPMA	: Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing
SPRTKA	: Surat Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
TRIMS	: Trade Related Investment Measures
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UUG	: Undang-Undang Gangguan
UUPMA	: Undang-Undang Penanaman Modal Asing
UUPMDN	: Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri
WTO	: World Trade Organization
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR TABEL

- TABEL 1 : Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 1996 – 2002.
- TABEL 2 : Persetujaun dan Realisasi Penanaman Modal Asing Beberapa Sekot Investasi Sampai Desember.
- TABEL 3 : Penyerapan Tanaga Kerja Pada Proyek PMA Tahun 1998 - 2002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Kerangka Pemikiran	7
D. Tujuan Penelitian	17
E. Kontribusi Penelitian	17
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penanaman Modal Asing Pada Umumnya	25
1. Pengertian Penanaman Modal Asing	25
2. Latar Belakang dan Tujuan Adanya Penanaman Modal Asing	27

3. Pengaturan Penanaman Modal Asing	31
3.1. Dasar Hukum Pengaturan Penanaman Modal Asing	31
3.1.1. Undang-Undang PMA	31
3.1.2. Undang-Undang PMDN	34
3.2. Dasar-Dasar Pengaturan Kebijakan Penanaman Modal Asing	38
3.2.1. Macam-macam Kebijakan Penanaman Modal Asing	38
3.2.2. Dampak Kebijakan Dalam Kegiatan PMA.....	49
4. Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing	55
4.1. Penanaman Modal Langsung	55
4.2. Penanaman Modal Tidak Lansung	61
5. Pembentukan Perusahaan Penanaman Modal Asing	62
5.1. Konsep Tentang Perusahaan PMA	62
5.2. Prosedur Pendirian Perusahaan PMA	65
5.3. Bentuk Hukum, Kedudukan, dan Daerah Berusaha Perusahaan PMA	72
5.4. Kontrak Penanaman Modal Asing	75
5.5. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing	80

6. Pengertian Kebijakan Penanaman Modal Asing	84
6.1. Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal Asing	84
6.2. Mekanisme Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal Asing	87
6.3. Strategi Kebijakan Peningkatan Investasi dalam Rangka Penanaman Modal Asing	89
B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah dan Kebijakan Penanaman Modal Asing di Daerah	93
1. Pengertian dan Dasar Hukum Otonomi Daerah	93
2. Urgensi Otonomi Daerah	104
3. Sistem Otonomi	110
3.1. Sistem Otonomi Materiil	110
3.2. Sistem Otonomi Formil	110
3.3. Sistem Otonomi Riil	113
4. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	114
4.1. Asas Desentralisasi	114
4.2. Asas Dekonsentrasi	119
4.3. Asas Tugas Pembantuan (Medebewind)	120
5. Penyelenggara Pemerintah Daerah Berdasarkan UU Otonomi Daerah	120
5.1. Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	120
5.2. Hubungan Pusat-Daerah dan Antar Daerah	124
5.3. Mekanisme Pengawasan	127

6. Kebijakan Penanaman Modal Asing di Daerah	130
6.1. Kebijakan BKPM Mengenai Penanaman Modal Asing di Daerah	130
6.2. Kebijakan Pemerintahan Daerah Tentang Penanaman Modal Asing	135
6.3. Pilihan Bidang Usaha Sehubungan Dengan Kebijakan Penanaman Modal Asing di Daerah	141
C. Kebijaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Keluar Undang-Undang Otonomi Daerah	149
1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia	149
1.1. Kehadiran Penanaman Modal Asing di Indonesia	149
1.2. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia	152
1.3. Konsep Dasar Dari Beberapa Negara Berkembang Berkaitan Dengan Adanya Pelaksanaan Penanaman Modal Asing	155
2. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Dengan Adanya UU Otonomi Daerah	161
2.1. Peranan PMA Sehubungan Dengan Otonomi Daerah	161
2.2. Perkembangan PMA dengan adanya UU Otonomi Daerah	165
2.3. Kesiapan Daerah dalam Rangka Penanaman Modal Asing	171

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	175
1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat	175
1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Penanaman Modal Asing	175
1.1. Tata Cara dan Prosedur Penanaman Modal Asing	175
1.2. Perizinan Penanaman Modal Asing	178
1.3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Asing	182
2. Kebijaksanaan Penanaman Modal di Sumatera Barat	189
2.1. Perkembangan Penanaman Modal di Sumatera Barat	189
2.2. Peluang dan Prospek Penanaman Modal di Sumatera Barat	198
2.3. Peningkatan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat	204
3. Pengembangan Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Dikeluarkan Undang-undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat	208
3.1. Pemberdayaan Potensi Ekonomi Daerah Sumatera Barat	208

3.2. Pemberdayaan Penanaman Modal Asing dalam Otonomi Daerah	212
3.3. Strategi Penanaman Modal Asing Sehubungan Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat	216
2. Manfaat yang Diperoleh dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing setelah dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat	220
3. Kendala-kendala yang Timbul Dalam Pelaksanaan PMA Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat	225
B. Pembahasan	232
1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat	232
1. Tata cara dan prosedur penanaman modal asing di Sumatera Barat	232
2. Perijinan penanaman modal asing di Sumatera Barat	238
3. Kebijaksanaan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat	244
3.1. Perkembangan Penanaman Modal di Sumatera Barat	244

3.2. Peluang dan Prospek Penanaman Modal di Sumatera Barat	249
3.3. Peningkatan Penanaman Modal di Sumatera Barat	260
4. Pengembangan Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat	272
4.1. Pemberdayaan Potensi Ekonomi Daerah Sumatera Barat	272
4.2. Pemberdayaan Penanaman Modal Asing dalam Otonomi Daerah	287
4.3. Strategi Penanaman Modal Asing sehubungan dengan dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat.....	294
2. Manfaat yang Diperoleh dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat	299
1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat	300
2. Manfaat Penanaman Modal Asing Bagi Kuantitas Pembangunan	303
3. Manfaat Bagi Pengembangan Dunia Usaha	304
4. Manfat Bagi Tenaga Kerja	306

3.	Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan PMA Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat	308
1.	Bidang Perencanaan dan Promosi	308
2.	Birokrasi yang Tidak Efektif dan Efisien	310
3.	Rendahnya Penguasaan Informasi dan Teknologi	311
4.	Skala Potensi yang Kurang Ekonomis	312
5.	Rendahnya Jaminan Keamanan Atas Penanaman Modal dan Perlindungan Hukum	313
6.	Ketidakpastian Hukum dan Ketidak Stablan Politik	314
7.	Adat Istiadat, Nilai Budaya Dan Kebiasaan Masyarakat Sumber Daya Alam	315
8.	Sumber Daya Manusia	316
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	319
B.	Rekomendasi	325

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian Indonesia tidak cukup dengan modal dalam negeri saja. Maka perlu mengundang dan membuka kesempatan untuk mendatangkan modal asing melalui Penanaman Modal Asing. Hal ini dilakukan sebab negara Indonesia keterbatasan dalam bidang modal, teknologi, keterampilan dan manajemen, karena investor asing mempunyai keunggulan dan kemajuan yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri, selama hal tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan memajukan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Dengan latar belakang pertimbangan tersebut, untuk lebih menarik minat dan meningkatkan peran Penanaman Modal Asing atau investasi asing dalam pembangunan di bidang ekonomi serta untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut UU PMA) sebagai langkah untuk mewujudkan iklim yang memadai dalam usaha Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Adanya UU PMA berarti perkembangan kegiatan ekonomi yang relatif lebih pesat selama ini perlu diikuti dengan perkembangan pengaturan hukumnya. Sebab beberapa kegiatan ekonomi yang baru banyak yang belum ada penerapan peraturan perundangan karena peraturan yang ada tidak lagi memberi kepastian secara mantap. Dengan kelengkapan perangkat hukum akan memberikan kepastian hukum

bagi pelaksanaan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum pada umumnya serta dalam hubungan kegiatan ekonomi pada khususnya.¹

Dalam membangun perekonomian nasional, sejak tahun 1967-an hingga sekarang ini tetap menganggap penting sektor Penanaman Modal Asing, yang mana Penanaman Modal Asing adalah tetap sebagai modal pelengkap di samping penanaman modal dalam negeri untuk pembangunan, hal tersebut berlaku terus sehingga arus Penanaman Modal Asing sangat meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang melebihi 8,5 Milyar Dollar Amerika. Pemasukan modal asing ini berlangsung karena relokasi industri Jepang, Taiwan, Hongkong, Singapura ditambah dengan Penanaman Modal Asing dari negara-negara Eropa dan Amerika.²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi atau relokasi industri sekarang ini. Semakin banyak mendapat saingan terutama dari negara-negara yang dulunya tertutup untuk Penanaman Modal Asing, namun bagi Amerika, Jepang dan Eropa, kawasan Indonesia tetap dinilai sebagai tujuan investasi yang menarik karena faktor tenaga kerja yang banyak dan relatif murah, geografis yang luas dan penyediaan potensi sumber daya alam yang banyak. Sehingga dilihat dari aspek bisnisnya semakin besar kepercayaan pihak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini merupakan keadaan yang sangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kegiatan melalui Penanaman Modal Asing atau investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara PMA murni 100% dan secara patungan (*Joint Venture*). Kegiatan secara PMA murni 100 % dikenal dengan investasi secara

1. Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 26.

2. Amrizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 77.

langsung diharapkan dapat membawa keuntungan bagi pihak Indonesia dari negara-negara yang menanamkan modal asing ke Indonesia. Secara PMA murni 100% dalam arti seluruh modal dimiliki oleh warga negara atau badan hukum asing.

Untuk menarik investor asing ke Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah dan ditambah daya saing yang meningkat, tapi pada kenyataan sering timbulnya kendala dan tantangan dalam pelaksanaan atau prakteknya. Meskipun demikian negara Indonesia menyadari hal tersebut, maka untuk itu negara Indonesia memberi kelonggaran dalam Penanaman Modal Asing tersebut menjadi daya tarik untuk mendorong masuknya investor asing dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA (selanjutnya disebut PP No.20 tahun 1994) yang merupakan suatu kebijakan yang paling berani dan liberal dalam kegiatan investasi di Indonesia serta memberikan peluang yang sangat luas kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia tidak hanya menyangkut banyak sektor yang terbuka, tetapi juga dalam komposisi kepemilikan. Kelonggaran yang diberikan seperti kepemilikan saham untuk investasi langsung, perizinan yang disederhanakan, masa izin usaha yang lebih panjang serta keleluasaan mendirikan tempat usaha serta tidak diadakan pembedaan antara PMA, PMDN dan perusahaan non PMA atau PMDN.

Mengenai jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka Penanaman Modal Asing baik dalam kerjasama secara patungan atau joint venture maupun Penanaman Modal Asing langsung tidak ada ukuran yang pasti, tetapi dalam Peraturan Pemerintah hanya ditentukan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan

usahanya.³ Dalam praktek disarankan agar modal minimal yang ditanamkan tidak kurang dari 250.000 dollar Amerika Serikat sebab setiap penanam modal asing harus dapat persetujuan Presiden.⁴

Dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat yang memberikan keuntungan lebih besar, bagi dunia usaha dalam meningkatkan modal, alih teknologi dan kemampuan managerial dalam perdagangan nasional serta semakin mampu meningkatkan pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Untuk pengaturan pelaksanaan PMA ini tunduk pada hukum nasional, dimana perusahaan itu didirikan.

Apabila kegiatan PMA murni 100% yang dilakukan dengan suatu kerjasama atau perjanjian di bidang-bidang tertentu maka di samping adanya ketentuan di dalam Anggaran Dasar perusahaan, harus ada perjanjian khusus yang mengikat kedua belah pihak yang berhubungan dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut memuat kehendak para pihak secara lebih rinci yang diuraikan secara lengkap dalam pembuatan *Memorandum of Understanding* (MOU). Dalam hal ini pengaturannya tunduk kepada hukum nasional maupun hukum internasional, sehingga terdapatnya semacam pilihan hukum mana yang akan dilaksanakan tergantung pada masing-masing pihak.

Sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan maupun fenomena-fenomena dalam kegiatan PMA, maka perekonomian nasional tidak tinggal diam dalam menghadapi laju pertumbuhan perekonomian Internasional. Apalagi perkembangan ekonomi berjalan dengan pesatnya seringkali perkembangan hukum

3. Pasal 2 PP No.20 Tahun 1994.

4. Pasal 3 PP No.17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA.

tidak maju dengan pesatnya, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan deregulasi-deregulasi dalam bidang perekonomian pada umumnya dan PMA pada khususnya.

Begitu juga sekarang ini adanya suatu hal yang baru mengenai penyatuan PMA dan PMDN, atau tidak adanya diskriminasi PMA dan PMDN, yang mana pelaksanaan PMA maupun PMDN dikelola atau dikepalai oleh suatu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Institusi terkaitnya. Meskipun keluarnya UU PMA merupakan suatu bukti bahwa pengaturan memang sangat diperlukan dan faktor penting untuk menarik para investor asing dalam memberikan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Apabila adanya interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi saling menunjang dan melengkapi, maka kajian dan analisis hukum ekonomi dapat memberikan implikasi bagi pengaturan dan penyelesaian masalah-masalah yang ada dalam bidang ekonomi seperti PMA, PMDN, Joint Venture, pertanahan, badan hukum (PT) dan berbagai bentuk persaingan curang atau tidak sehat di bidang bisnis.⁵

UU PMA memberikan suatu peluang yang sangat berarti bagi negara-negara berkembang, apabila dilihat dengan adanya globalisasi ekonomi dan pembangunan sekarang ini. UU PMA sangat perlu dalam beberapa pasal untuk direvisi yang mana disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan negara saat ini. Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi kekuasaan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian bagaimana pelaksanaan PMA setelah adanya UU tersebut menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti.

⁵. *Ibid*, hal. 16.

Arti dan peranan hukum PMA bagi negara yang sedang berkembang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya yang membawa implikasi pada bidang perekonomian. Dalam hal ini PMA merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengelola potensi alam yang tersedia di daerah-daerah Sumatera Barat. Kesemuanya ini membawa implikasi positif dan negatif baik bagi para investor itu sendiri maupun bagi negara domestik atau penerima modal.

Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang melakukan kegiatan PMA, yang mana perusahaan PMA Joint Venture lebih banyak dibandingkan perusahaan murni, walaupun kegiatan PMA di Indonesia lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa terutama di bidang industri. Hal yang paling mendorong adanya pelaksanaan investor asing ke Sumatera Barat disebabkan karena Sumatera Barat memiliki banyak potensi alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan, di samping itu Sumatera Barat banyak memiliki objek wisata yang menarik investor asing untuk menanamkan modalnya serta timbulnya implikasi terhadap perekonomian di Sumatera Barat dan perubahan-perubahan tertentu.

Banyaknya potensi alam yang tersedia yang dapat diolah maka meningkatkan kegiatan usaha PMA, yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian semakin baik. Apalagi berkaitan dengan keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat. Untuk itu perlu suatu penelitian lebih lanjut, dalam penyusunan tesis ini penulis mengambil judul : "PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING SETELAH DIKELUARKAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT".

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang tersebut di atas, dengan adanya peluang investasi melalui Penanaman Modal Asing di negara Indonesia pada umum dan Sumatera Barat pada khususnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penanaman Modal Asing setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
2. Manfaat apakah yang diperoleh dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
3. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?

C. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan GBHN sebagai penciptaan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri positif dan negatif, untuk dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata maka ditegaskan dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan dari :

1. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

2. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Dalam meningkatkan dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berencana, berkesinambungan dan maju, maka tidak bisa terlepas dari adanya Penanaman Modal Asing. Pelaksanaan PMA merupakan faktor penting dalam mengembangkan perekonomian baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah, untuk itu diperlukan aturan-aturan hukum yang menunjang.

Sehubungan dengan pengaturan hukum yang tidak diimbangi dengan perubahan-perubahan yang terjadi maka William J. Chambliss dan Robert B. Seidman mengemukakan konsep mengenai fungsi hukum dalam perubahan sosial. Bahwa tuntutan dari masyarakat agar lembaga pembuat peraturan membuat sebuah peraturan hukum, sekaligus menuntut kepada hakim agar memberikan sanksi bilamana peraturan hukum itu dilanggar oleh seorang anggota masyarakat. Model ini menggambarkan arah tuntutan yang diajukan kepada negara oleh golongan-golongan masyarakat dan tuntutan yang dibuat oleh lembaga pembuat peraturan terhadap pemegang peran serta terhadap lembaga penerap sanksi.⁶

Sedangkan Roscoe Pound dalam teorinya berpendapat bahwa penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat (*social engineering by law*), sebagai langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai

⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, 1989, hal. 25.

dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya.⁷ Hal yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur semua persoalan yang berkaitan dengan PMA dengan mengeluarkan UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA di Indonesia. Walaupun PMA adalah tetap sebagai modal pelengkap untuk pembangunan, maka dengan adanya pengaturan tentang PMA banyak para investor asing melakukan pelaksanaan PMA di Indonesia.

Sistem ekonomi suatu negara akan mempengaruhi UU PMA yang mempunyai prinsip utama yaitu memaksimalkan modal asing untuk membantu pembangunan nasional selama kemampuan nasional belum tersedia. Untuk itu diperlukan pengaturan yang memberi pengarah jaminan dan menghindari ketidakpastian. Di samping UU PMA masih harus dipertimbangkan adanya peraturan perundangan lain yang terkait seperti di bidang perdagangan internasional, lalu lintas devisa, pembatasan oleh pemerintah, pemilikan tanah, keuangan, dan lain-lain. Dalam UU PMA mencakup secara eksplisit dan implisit mengenai tujuan UU tersebut dan beberapa ketentuan umum seperti persyaratan, aplikasi, benefit yang ditawarkan, prioritas yang ditetapkan, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, ketentuan partisipasi usaha nasional, pembatasan repatriasi dan sebagainya.

Bahwa UU PMA disusun untuk mengusahakan agar potensi ekonomi dapat diolah menjadi ekonomi riil dengan menggunakan modal, keahlian dan teknologi asing. Berbicara mengenai teknologi merupakan hal penting dalam pengembangan perekonomian, yang mana empat puluh tahun setelah Perang Dunia II tampak adanya perkembangan baru yaitu adanya ekspansi produksi dan produktivitas yang

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 208.

perkembangan dan loncaca ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menghasilkan berbagai pembaharuan di semua bidang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap pembaharuan yang terjadi dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang ekonomi. Dengan demikian pada sisi lain dapat dikatakan bahwa teknologi baru merupakan juga suatu komoditi baru.⁸

Mengenai pengertian Penanaman Modal Asing atau investasi mempunyai arti yang berbeda-beda. Perbedaan penggunaan istilah investasi terletak pada cakupan dari mana yang dimaksudkan, bahwa ada 3 (tiga) pengertian PMA atau investasi, yaitu :

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.
2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal.
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.⁹

Sedangkan pengertian Penanaman Modal Asing menurut pasal 1 UU PMA adalah :

Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Memperhatikan pengertian Penanaman Modal Asing menurut pasal 1 UU PMA, terdapatnya beberapa hal yang menarik dalam PMA yaitu :

1. Bahwa UU PMA tidak mengatur perihal kredit atau peminjaman modal, melainkan hanya mengatur tentang PMA, yang berkaitan dengan kemungkinan pembangunan perusahaan di tanah air kita.

⁸. Sri Rejeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada FH UNIP, Semarang, 1995, hal. 4 – 5.

⁹. Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 47.

2. Memberi kemungkinan perusahaan tersebut dijalankan dengan modal asing sepenuhnya atau *direct investment, joint venture* dan *joint enterprise*.
3. *Direct Investment*, dalam hal bukan hanya modal tetapi kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya diperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia dan sejauh kebijaksanaannya tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
4. *Joint Venture* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional.
5. *Joint Enterprise*, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional dengan perusahaan asing atau bentuk kerjasama antar perusahaan.
6. Berbeda daripada kredit yang risiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam, sedang dalam penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam.¹⁰

Dalam setiap aspek ekonomi yang salah satunya terdapat kegiatan Penanaman Modal Asing, yang tidak akan terlepas dari kemungkinan adanya risiko, sebab setiap pekerjaan yang dilakukan pasti mengandung risiko, apa itu risiko untung atau rugi tergantung dari pada orang yang menjalankan atau melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang mana menanggung risiko secara langsung erat kaitannya dengan penggunaan modal itu sendiri yaitu karena penggunaan modal dipergunakan secara langsung oleh penanam modal asing, maka risiko ditanggung oleh penanam

¹⁰. G. Kartasapoetra dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Bandung, 1985. hal. 15.

modal secara langsung. Untuk menghindari supaya risiko tidak terjadi diperlukan suatu kecakapan dalam berusaha, pengalaman dan kejelian serta melakukan tindakan dengan cermat dan tepat, dalam bidang-bidang tertentu dan mungkin saja bisa memperoleh kesempatan pengembangan dan berhasil dalam bidang tertentu yang lain. Agar bisa meminimalisasikan kemungkinan risiko karena luasnya ruang lingkup bidang investasi para investor asing mempunyai banyak pilihan dalam melaksanakan investasi.

Dalam kegiatan investasi asing di Indonesia dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan secara patungan atau joint venture, yang mana kegiatan investasi secara langsung lebih dikenal dengan PMA murni 100% menjadi suatu hal yang menarik dikaji, terutama setelah keluarnya deregulasi PP No.20 Tahun 1994 yang merupakan suatu kebijaksanaan paling berani dan liberal dalam kegiatan investasi di Indonesia. Bahwa investasi merupakan kegiatan menanam modal baik langsung maupun tidak langsung yang diharapkan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil Penanaman Modal Asing tersebut.¹¹

Pelaksanaan PMA murni 100% mempunyai suatu keunggulan yaitu sifat permanen karena berlaku untuk jangka panjang, membuka lapangan kerja baru dan alih teknologi. Bahwa alih teknologi sangat berkaitan dengan kegiatan investasi, di samping modal investasi banyak dipengaruhi oleh teknologi yang semakin canggih terutama teknologi-teknologi baru. Maka banyak perusahaan maju ditentukan oleh peranan teknologi sebab teknologi merupakan hal yang pokok sedang faktor

¹¹. Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 15.

produksi yang lain sekedar sebagai penunjang dalam pelaksanaan penanaman modal asing. Dalam melakukan PMA mengenai alih teknologi atau perburuan dari perusahaan PMA murni 100% adanya suatu perjanjian khusus dilaksanakan antara perusahaan tersebut, sehingga timbullah suatu pilihan hukum sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan PMA tersebut.

Ketentuan yang mengatur pelaksanaan PMA murni 100% sudah ada sejak tahun 1967 dengan keluarnya UU No.1 Tahun 1967, tetapi pada tahun 1974 terjadi peristiwa Malari ketentuan PMA murni 100% dihapus, yang boleh hanya PMA dalam bentuk Joint Venture dengan komposisi saham 25% Indonesia 75% dan setelah 10 tahun komposisi tersebut berubah menjadi 49% asing dan Indonesia 51% kemudian tahun 1986 ditentukan lagi bahwa persyaratan modal nasional sekurang-kurangnya 20% dan meningkat menjadi 51% dalam waktu 10 tahun sejak dimulainya produksi komersial perusahaan. Tetapi pada saat Indonesia hendak mengembangkan kawasan Pulau Batam kembali pemerintah Indonesia mengizinkan dilakukan PMA murni 100% dan ketentuan mengenai adanya PMA murni 100% ini ditegaskan kembali dengan deregulasi-deregulasi seperti PP No.20 Tahun 1994.¹²

Indonesia sangat membutuhkan pelaksanaan PMA baik langsung maupun secara Joint Venture sebagai modal pelengkap dalam pembangunan perekonomian. Salah satu hal yang dapat menarik untuk mendatangkan investor asing adanya kejelasan dan kepastian hukum. Dengan kepastian hukum itu adanya UU PMA No.1 Tahun 1967, tetapi dunia hukum Indonesia sekarang ini menghadapi kendala dan tantangan yang berat, di mana perkembangan arus globalisasi menyebabkan

¹² Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi I*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1995, hal. 33.

perkembangan hukum tidak semaju perkembangan ekonomi, seharusnya perkembangan hukum seiring dengan perkembangan ekonomi yang memadai agar tidak terjadi kekacauan-kekacauan dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang baik, sehat, dan dinamis.

Yang mana kondisi hukum sekarang ini di satu pihak merupakan tuntunan hukum yang lama berasal dari hukum kolonial dan hukum adat bahkan hukum yang dibentuk setelah kemerdekaan banyak yang telah usang dan di pihak lain tatanan alternatif dari hukum baru belum juga terbentuk, sedangkan sektor ekonomi pertumbuhannya sangat cepat, sehingga terciptalah distorsi dalam bidang hukum bisnis yang juga terefleksi ke dalam sektor bisnis dan ekonomi itu sendiri.¹³ Dalam suatu sistem perekonomian yang baik, unsur kepastian hukum merupakan asas yang memberikan jaminan yang kuat bagi bisnis mereka. Sebab kepastian hukum merupakan suatu keharusan dalam semua transaksi bisnis yang dilakukan dalam sistem perekonomian yang telah modern dan maju, karena besarnya nilai-nilai transaksi bisnis dalam hukum ekonomi.

Pengaturan pelaksanaan PMA atau investasi di Indonesia diatur dengan UU PMA, walaupun hampir selama tiga dasawarsa sejak diundangkan tahun 1967 berlaku. Kalau dilihat situasi dan kondisi sekarang ini dengan perkembangan perekonomian yang maju dan pesat dan adanya perubahan-perubahan di segala bidang terutama mengenai keluarnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah serta menanggulangi masalah hukum. Maka sarana yang ditempuh pemerintah mengeluarkan serangkaian deregulasi di bidang ekonomi sehubungan

¹³. Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 9.

dalam pelaksanaan PMA. Yang mana deregulasi atau kebijaksanaan tersebut menggeser perundang-undangan positif seperti yang tampak dalam UU PMA dan PMDN.

Menurut UU PMA dan UU PMDN suatu perusahaan PMDN tidak bisa dialihkan statusnya menjadi PMA namun sekarang berdasarkan kebijaksanaan BKPM, status PMDN dapat beralih menjadi status PMA. Sedangkan menurut perundang-undangan PMA hanya boleh mengekspor produknya sendiri tetapi kenyataan sekarang ini PMA dapat mengekspor produk perusahaan lain, berarti sudah ada transaksi dagang antara suatu perusahaan PMA dengan suatu perusahaan lain, maka dalam hal ini PMA telah melakukan kegiatan perdagangan di dalam negeri, sehingga bertentangan dengan UU PMDN No. 1 tahun 1968 jo UU No.12 tahun 1970 dan PP No.36 tahun 1977 yang secara tegas melarang PMA untuk berdagang di dalam pasar domestik Indonesia.¹⁴

Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang PMA melalui keputusan ketua BKPM sebenarnya merupakan suatu revisi atas UU tentang PMA. Seharusnya hal ini telah dipikirkan adanya penyempurnaan UU yang lama agar terciptanya kepastian hukum dan kepastian berusaha. Tetapi secara teori jika putusan perundang-undangan yang dirubah itu bentuknya Undang-Undang, maka perubahannya harus dilakukan dengan Undang-Undang, tidak cukup dengan sekedar keputusan Ketua BKPM. Hal ini perlu mendapat perhatian dan pemikiran agar para investor asing merasa aman dan terlindungi dalam melakukan pelaksanaan PMA.

¹⁴. Amirizal, *Op.Cit.* hal. 66.

Bahwa pelaksanaan PMA baik dilakukan di negara-negara berkembang maupun di daerah-daerah banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang mana faktor internal seperti potensi alam, demografi, sosial budaya dan berbagai deregulasi sedangkan faktor eksternal dapat menyebabkan turunnya jumlah modal yang direlokasi dari negara-negara maju ke negara berkembang. Hal ini disebabkan banyaknya negara-negara berkembang memberi kesempatan bagi para investor untuk melakukan PMA dan kurangnya potensi alam yang dimiliki negara tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat, yang mana dalam UU tersebut juga mengatur mengenai PMA. Otonomi Daerah mempunyai kewenangan mengurus daerahnya sendiri, dengan kata lain pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol pihak lain terhadap fungsi daerah atau minoritas suatu bangsa.

Potensi alam daerah Sumatera Barat mendukung sekali untuk melakukan investasi dan banyaknya hal-hal yang menarik para investor asing terutama objek wisata di samping sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah Sumatera Barat. Oleh karena itu di Sumatera Barat lebih banyak para investor asing melakukan perusahaan PMA secara patungan atau *Joint Venture* dari pada PMA murni 100%, sebab potensi alamnya memungkinkan. Dengan pelaksanaan PMA, akan memberi implikasi terhadap perekonomian bagi negara Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya.

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat apakah yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

E. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan ini dapat digunakan untuk :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya pengetahuan tentang pelaksanaan Penanaman Modal Asing setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah sehingga hasil penelitian ini dapat menambah informasi pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini pada garis besarnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pemikiran untuk penyempurnaan peraturan dan pengambilan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauhmana inventarisasi hukum positif, menemukan hukum *in concreto* dan sistematik hukum diterapkan yang bertumpu pada data sekunder. Bahwa data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier.

Selain digunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga dilengkapi pendekatan yuridis empiris. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah kualitatif, induktif dan fenomenologis. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila beradapan dengan kenyataan ganda.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Bahwa berdasarkan judul penelitian, rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang telah diuraikan di atas, maka spesifikasi penelitian ini tidak saja penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

¹⁵. Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 5.

dilakukan dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tetapi juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan disiplin bidang ilmu hukum ekonomi pada umumnya dan khususnya ilmu hukum investasi mengenai Penanaman Modal Asing dan pelaksanaannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Bahan hukum yang digunakan :

- 1). Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan atau ide.¹⁶

Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- UU No. 1 Tahun 1968 tentang PMDN.
- PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham dalam rangka Penanaman Modal Asing.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 43.

- PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan PMA.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia.
 - Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan Penanaman Modal Asing.
- 2). Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.¹⁷
- Adapun Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah :
- Kepustakaan atau berbagai buku mengenai Penanaman Modal Asing
 - Buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang Penanaman Modal Asing.
 - Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan Penanaman Modal Asing.
 - Makalah-makalah seminar tentang Penanaman Modal Asing.
 - Naskah tulisan atau berbagai artikel di media massa, arsip data Penanaman Modal Asing yang dipublikasikan.
- 3). Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari :
- Kamus Hukum Ekonomi oleh AF. Elly Erawaty dan JS. Badudu.
 - Black's Law Dictionary Sixth Edition oleh Henry Cambell Black.
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1988, hal. 12.

b. Penelitian Lapangan

Bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan instrumen utama teknik yang dipergunakan dengan wawancara secara langsung dalam bentuk dialog melalui pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, baik wawancara terstruktur (terpimpin) maupun wawancara tak terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data mengenai karakteristik umum pelaksanaan Penanaman Modal Asing untuk mengungkapkan motivasi, maksud atau penjelasan dari responden dan informan secara mendalam dan lebih luas mengenai permasalahan tersebut. Para responden dalam penelitian ini antara lain pengusaha Penanam Modal Asing yang mengadakan pelaksanaan Penanaman Modal Asing di wilayah Sumatera Barat, dan informannya adalah aparat BKPPMD. Sedangkan wawancara tak terstruktur dilakukan pada keadaan peneliti hendak meneliti bagian-bagian tertentu yang tidak normal mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi atau keadaan tertentu dan pewawancara berhubungan dengan orang “penting”.¹⁸

Untuk mendapat sampel dalam penelitian ini dilakukan pada institusi yang berhubungan dengan Penanaman Modal Asing khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal Asing :

1. Kantor Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat.
2. Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat.
3. Institusi yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat.

¹⁸. Lexy J. Moleong, *Op. cit*, hal. 139.

Dari sampel yang berasal dari responden atau informan ditentukan secara *purposive sampling* atau berdasarkan keterangan *key person*, dalam arti bahwa tidak semua pihak yang terkait dipilih sebagai informan atau responden, yang mana sampel dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian dengan menggunakan teknik bola salju atau *snow ball*.

4. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk mengetahui data yang diperoleh akurat atau pengecekan keakuratan data, maka teknik yang dipergunakan adalah teknik Triangulasi data melalui triangulasi sumber, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, dengan tujuan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, yang mana pengecekan dilakukan dengan cara:¹⁹

- a. Membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara.
- b. Melakukan pengamatan secara langsung terjun ke lapangan selama penelitian.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan informan atau responden di depan umum dengan apa yang dikatakan menurut pribadi.
- d. Membandingkan apa yang dikatakan pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- e. Membandingkan keadaan dengan perspektif sosialnya.
- f. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

¹⁹. Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation Methods Sage Publications*, Beverly Hills, 1987 dalam Lexy J. Moleong, *Op.cit*, hal. 178.

5. Teknik Analisa Data

Dari data yang telah berhasil dikumpulkan dalam melakukan penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Bahwa pengertian analisis dimaksud sebagai suatu penjelasan dan penafsiran secara logis, sistematis dan konsisten, dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci, jelas dan mendalam.

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian adalah analisa taksonomis yang dilakukan penelaahan yang lebih rinci, jelas dan mendalam yang difokuskan kepada masalah-masalah atau domain-domain tertentu pada saat pengumpulan data di lapangan. Dan fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran penelitian serta domain-domain dipilih untuk diteliti secara mendalam lagi, merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci, jelas dan mendalam terhadap struktur internalnya masing-masing domain yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I: merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya Bab II : yang dibahas merupakan tinjauan pustaka yang di dalamnya diuraikan tinjauan umum tentang PMA dan pelaksanaan PMA di

Indonesia serta pengaturan PMA dalam meningkatkan pembangunan Indonesia. Berdasarkan bab ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan analisis permasalahan yang diajukan dalam tesis ini.

Pada Bab III : merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang diuraikan tentang pelaksanaan PMA di Sumatera Barat dan manfaat pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan PMA setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat. Sedangkan Bab IV : merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanaman Modal Asing Pada Umumnya.

1. Pengertian Penanaman Modal Asing

Pengertian dari suatu ketentuan tentang penanaman modal asing perlu dijelaskan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam prakteknya. Pengertian dari penanaman modal asing menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 (UU PMA) menyebutkan :

“Pengertian penanaman modal asing didalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal tersebut menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”.

Sehubungan dengan pengertian diatas maka ada beberapa unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu :

a. Penanaman Modal Secara Langsung

Didalam UU No. 1 Tahun 1967 tidak membelikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penanaman modal secara langsung, namun secara umum terdapat dua pengertian mengenai penanaman modal atau investement yaitu direct investment dan portofolio investment, yang dimaksud dengan direct investment adalah penanaman modal secara langsung merupakan perolehan kekuasaan yang cukup dalam usaha untuk memastikan pelaksanaan pengawasan oleh penanaman modal. Dengan kata lain memberikan kesempatan bagi penanam modal asing untuk dengan leluasa mengusahakan dan menyelenggarakan pimpinan dalam perusahaan yang dijalankan di Indonesia dengan modal asingnya.

b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan UU PMA hanya mengatur hal penanaman modal asing yang mana pembuat Undang-Undang melihat penanaman modal asing dari segi penggunaannya karena pembuat Undang-Undang berpangkal tolak atas pendapat bahwa dalam penggunaan inilah terlekat suatu risiko, sedangkan justru itu PMA bermaksud meniadakan risiko atas penggunaan modal asing, modal asing dalam bentuk penanaman modal ini dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang diperuntukkan buat menjalankan perusahaan.

c. Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal

Bahwa risiko yang dikaitkan untuk menegaskan bahwa Undang-Undang tidak mengatur hal kredit, dengan kata lain kredit tidak termasuk dalam objek UU PMA ini tetapi tidaklah menutup adanya kemungkinan untuk menjalankan kredit luar negeri itu menjadi penanaman modal asing dalam arti Pasal 1 UU PMA.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana risiko itu ditanggung oleh si pemilik modal bagi perusahaan yang dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan yang dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, sedangkan perusahaan itu berbentuk badan hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang penanaman modal adalah berstatus Perseroan Terbatas, modal asing diatur dalam Pasal 2 UU PMA yaitu :

Pasal 2 UU PMA yaitu :

- 1). Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia.

- 2). Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- 3). Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Dengan demikian pengertian modal asing dalam UU PMA tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang atau Badan asing yang diperlukan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia²⁰ yang mana modal asing yang ditanam di Indonesia untuk menjalankan perusahaan sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, dikehendaki dalam bentuk saham-saham.

2. Latar Belakang dan Tujuan Adanya Penanaman Modal Asing

Melihat kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap sekali lima tahun yang dimulai sejak tahun 1974, dimana pada waktu itu panitia pemikir sosial ekonomi di Yogyakarta telah berhasil menyusun rancangan termasuk golongan *planning by direction* yang berdasarkan UUD 1945²¹. Dalam bidang perekonomian Indonesia di bagi oleh tiga bidang, yaitu :

a. Bidang Negara

Yang akan melaksanakan proyek besar-besar dimana sering disebut public utilities.

²⁰. CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hal. 262.

²¹. G. Kartasapoetra dkk, *op cit* hal. 51.

b. Bidang Koperasi

Yang akan mengerjakan proyek kecil-kecil mulai dari bawah.

c. Bidang Swasta

Yang akan bertindak diantara dua bidang diatas, swasta nasional atau swasta nasional bekerja sama dengan luar negeri dalam garis yang telah ditentukan oleh pemerintah.²²

Rencana pembangunan ini tidak dapat dilaksanakan karena negara kita dalam keadaan perang melawan Belanda namun negara Indonesia dapat mengetahui bahwa kerjasama dengan pihak luar negeri dalam usaha menanggulangi kekurangan modal untuk melaksanakan pembangunan adalah merupakan garis kebijaksanaan pemerintah, sehingga bantuan modal dari berbagai negara pada waktu itu sangat diperlukan untuk mengatasi keadaan perekonomian yang hancur akibat perang.

Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo, SH tahun 1953 pernah mengajukan rencana pembangunan dalam bentuk penanaman modal asing, akan tetapi karena kabinet ini tidak panjang, maka rencana tersebut mengalami kegagalan.

“Kabinet Ali Sastroamidjojo (1952) mempersiapkan peraturan untuk penanaman modal asing ke Indonesia atau peraturan mana belum sampai diajukan ke parlemen oleh karena jatuhnya kabinet ini, maka kabinet Ali yang kedua dalam tahun 1956 mengajukan rancangan Undang-Undang penanaman modal asing yang mengandung syarat-syarat sedemikian rupa jangan sampai penanaman modal asing menghambat pembangunan masyarakat Indonesia atau rancangan Undang-Undang tidak memperoleh persetujuan parlemen”.²³

Ternyata dalam merencanakan pembangunan semesta berencana tetap pula masih memerlukan bantuan luar negeri untuk mengatasi kekurangan :

a. Modal

b. Tenaga-tenaga ahli

²². M. Hatta, *Ekonomi Berencana*, Gunung Agung, Jakarta, 1971, hal. 35.

²³. C.S Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1972, hal. 3.

- c. Tenaga kejuruan
- d. Pengalaman-pengalaman

Menurut Presiden Soekarno, kekurangan tersebut harus segera diatasi, tetapi kebijaksanaannya dipengaruhi oleh kaum Kiri yang mendorong kepada politik konfrontasi yang berakhir kepada hubungan sangat fatal yaitu keluarnya Republik Indonesia dari PBB, maka bantuan luar negeri tertutup.²⁴

Pembangunan Orde Lama walaupun telah ada garis kebijaksanaan untuk melakukan pembangunan yang menurut rencana sesuai dengan amanat penderitaan rakyat dapat diwujudkan pemerintah orde baru dengan kebijaksanaan untuk merealisasikan pembangunan jangka panjang secara bertahap.

Dalam mengelola pembangunan penanaman modal asing merupakan salah satu pilihan, hal ini dilatar belakangi dengan tujuan :

“Bahwa kekuatan ekonomi potensial yang dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak diseluruh wilayah tanah air, yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi”.

Dengan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam membina sistem ekonomi Indonesia senantiasa membuka peluang bagi investasi asing untuk mengelola potensi alam yang dimilikinya yang harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi.

²⁴. Presiden Soekarno, *Haluan Politik Pembangunan Negara Departemen Penerangan RI*, 1961, hal. 2.

Menurut penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dengan penanaman modal asing, kekuatan ekonomi potensial diubah menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penggunaan teknologi penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Divisi lain bangsa Indonesia juga harus menanggulangi kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dan potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan tidak boleh menimbulkan kesegaran, untuk memanfaatkan potensi-potensi, modal, teknologi, keahlian yang tersedia dari luar negeri selama segala sesuatu itu benar-benar diabdikan untuk kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri, karena Indonesia mempunyai keterbatasan dalam bidang tersebut.

Dengan demikian tujuan penanaman modal asing adalah untuk dapat memanfaatkan dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh keahlian teknologi serta keterampilan yang dimiliki bangsa Indonesia setelah berakhirnya proses penanaman modal asing.

Maka untuk menghilangkan keragu-raguan luar negeri dalam membuka bantuan atau menanamkan modalnya kepada Indonesia, maka lahirlah UU No.1 Tahun 1967 yang dalam konsiderannya point 9 menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keraguan dari pihak asing”.

Dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional yang mendesak, yaitu untuk menanggulangi keadaan ekonomi seperti halnya yang dikemukakan oleh Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri adalah sebagai berikut :

“Kebijaksanaan politik luar negeri ditujukan untuk membantu usaha menanggulangi keadaan ekonomi dan keuangan yang parah, dalam waktu sesingkat-singkatnya khusus dalam rangka program stabilitas ekonomi dan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional maka Indonesia menyambut baik bantuan ekonomi dari luar negeri manapun asal dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak”.²⁵

Untuk melaksanakan diperlukan modal yang tidak sedikit walaupun dalam hal bantuan modal atau investasi dari pihak luar negeri hanya merupakan pelengkap dari modal nasional yang tersedia, apalagi untuk mengolah sumber-sumber kekayaan yang terkandung dalam bumi Indonesia yang dengan sendirinya diperlukan peralatan yang serba mutakhir dan jasa-jasa profesional dan keterampilan.

3. Pengaturan Penanaman Modal Asing

3.1. Dasar Hukum Pengaturan Penanaman Modal Asing

3.1.1. Undang-Undang PMA

Keadaan ekonomi Indonesia selama tahun 1966 ditandai oleh kemerosotan daya beli secara terus menerus dan perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol. Keadaan yang menyedihkan ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan harus segera dihentikan, maka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) ditetapkan bahwa masalah perbankan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal nasional lainnya.

²⁵. Panitia Penulisan Sejarah Departemen Luar Negeri Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri, Penerbit Yayasan Kesejahteraan Karyawan DEPLU, Jakarta, 1973, hal. 302.

Dengan ketentuan MPRS ini maka segera harus diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat, sebab masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa serta masalah mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi, untuk diperlukan peningkatan produksi yang semaksimal mungkin.

Bahwa pembahasan kebijakan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan tersebut dituangkan dalam Pasal 9 ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 yang menentukan sebagai berikut :

“Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal penggunaan teknologi penambahan pengetahuan peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen”.

Sedangkan dalam Pasal 10 ketetapan MPRS disebutkan bahwa :

“Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri, akan tetapi asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan keahlian yang tersedia diluar negeri, selama segala bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri”.

Dalam ketetapan MPRS juga ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi itu harus didukung oleh pemerataan/ penyebarannya ke daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 yang berbunyi :

“Pembangunan ekonomi adalah pembangunan potensi-potensi ekonomi (*Economic Resources*), oleh karena potensi ekonomi terdapat didaerah-daerah maka pembangunan nasional adalah identik dengan pembangunan daerah.”

Berdasarkan pangkal tolak yang rasional dan realistis sebagaimana diuraikan di atas maka ditetapkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Ada beberapa dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) yaitu :

- a. Kekuatan ekonomi potensial yang dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal pengalaman dan teknologi.
- b. Pancasila adalah landasan idiil dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi.
- c. Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan berorganisasi dan manajemen.
- d. Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri.
- e. Dalam pada itu asas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

- f. Penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.
- g. Sehubungan dengan itu dirasa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keraguan dari pihak modal asing.

3.1.2. Undang-Undang PMDN

Pembangunan tidak akan terlaksana tanpa adanya pemupukan modal dalam negeri sendiri secara besar-besaran, sedangkan penggunaan modal tersebut harus diatur dan disalurkan hingga timbul kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien.

Setiap negeri yang belum maju mengalami kemerosotan perkembangan ekonomi karena kelemahan masyarakat untuk memupuk modalnya sendiri dan kemampuan pada penguasa baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah, hal ini perlu segera diatasi agar pembangunan ekonomi terlaksana dengan lancar dan baik.

Untuk mengatasi keadaan dan situasi yang telah berlangsung berabad-berabad lamanya dan sekarang tiba waktunya untuk mengakhiri keadaan ini maka perlu diadakan ketentuan-

ketentuan dan peraturan-peraturan yang dapat memperbesar kemampuan masyarakat Indonesia untuk bekerja dan berusaha secara produktif.

Dalam memperbaiki keadaan ini, pihak asing atas perekonomian Indonesia harus dilaksanakan dengan cara memanfaatkan orang asing dan modalnya tanpa meninggalkan realitas-realitas yang berlaku, apalagi sesuai dengan semangat Pancasila yang selalu diutamakan dan dipentingkan diatas segala-galanya adalah perbaikan nasib rakyat agar tercapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Pada prinsipnya orang asing tidak dibolehkan berusaha dengan modal dalam negeri, akan tetapi mengingat keadaan perekonomian dan masyarakat Indonesia, maka orang-orang asing dengan modalnya perlu dimanfaatkan dengan memberikan kepada mereka ketentuan-ketentuan dan kepastian atas dasar mana mereka dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.²⁶

Diadakan ketentuan-ketentuan dan kepastian tentang modal maka perusahaan asing akan lebih percaya melakukan penanaman modalnya di negara-negara maupun di daerah-daerah hal ini juga memberi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja dan daya kreatif, sehingga pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik.

²⁶. Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999 hal. 4.

Bahwa pemerintah memegang peranan yang sangat vital dalam hal ini yaitu sebagai pemimpin dan pelopor dari pembangunan. Dengan penanaman-penanaman modal secara berencana dalam jumlah yang cukup besar maka pemerintah dapat merintis dan merangsang penanaman-penanaman modal dari pihak masyarakat pada umumnya. Pembangunan yang sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh rakyat hanya dapat dicapai dengan mobilisasi dari seluruh masyarakat.

Berdasarkan hal diatas, maka titik tolak pertimbangan diudangkannya Undang-Undang N0.6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN) yaitu :

- a. Didalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan.
- b. Berhubung dengan itu perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitas, pembaharuan perluasan dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang-barang dan jasa-jasa.
- c. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik dan ditetapkan ketentuan-ketentuan perangsang bagi para penanaman modal dalam negeri.
- d. Didalam sistem ekonomi nasional yang idiil, berdasarkan Pancasila, kecuali bidang-bidang yang dikhususkan bagi usaha negara di dalam batas-batas ketentuan dan jiwa Undang Undang Dasar 1945, terbuka lapangan yang luas bagi usaha swasta.

- e. Pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus disandarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri.
- f. Dalam hal itu pada khususnya tingkat perkembangan ekonomi dan potensi nasional dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing (domestik), sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional.
- g. Dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri yang dimaksudkan itu, selain diberikan ketentuan-ketentuan perangsang, perlu ditetapkan pula batas waktu berusaha bagi perusahaan-perusahaan asing atau domestik yang menggunakan modal dalam negeri agar diperoleh pegangan yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga dengan pembatasan itu tertampung pula jiwa dari PP 10 tahun 1959.

Dengan diundangkan UU PMDN banyak mengandung berbagai ketentuan-ketentuan yang dapat merangsang dan menjamin pemupukan modal baru yang kecil maupun yang besar, diantaranya dengan cara tabungan-tabungan, deposito berjangka, pembelian kertas-kertas berharga, mendapat perangsang-perangsang supaya makin lama makin menjadi sumber-sumber modal yang berarti.

Dalam UU PMDN yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunannya tidak hanya mengatur modal dalam negeri saja, akan tetapi juga mengatur modal dalam garis besar penguasaan-penguasaan perusahaan-perusahaannya.

3.2. Dasar-Dasar Kebijakan Penanaman Modal Asing

3.2.1. Macam-macam Kebijakan Penanaman Modal Asing

Bahwa berbagai macam kebijakan PMA telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga telah mencakup beberapa sektor seperti sektor angkutan laut, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perpajakan dan penanaman modal, khusus untuk kepentingan para pengusaha PMA dan PMDN telah banyak sekali dilakukan penyederhanaan yang berkenaan dengan jumlah maupun jenis perizinan atas sektor-sektor tersebut diatas.²⁷

Menurut Erman Raja Gukguk, Tola Simanungkat dan juga mulai berdasarkan hasil penelitian mengenai penanaman modal asing yang telah dibukukan,²⁸ maka ada beberapa kebijakan dibidang penanaman modal asing yang penting dikemukakan mulai dari tahun 1986 sampai tahun 2001 yaitu :

1. Keputusan presiden RI No. 17 tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman modal asing untuk diberi perlakuan yang sama seperti perusahaan modal dalam negeri.

Keputusan Presiden ini lebih dikenal dengan Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 atau Paket Mei 1986 mengenai penanaman modal kawasan berkat pembebasan dan pengembangan bea masuk. Pada paket ini dijelaskan mengenai hal PMA yang sahamnya 75% dimiliki oleh negara atau swasta nasional atau minimal 45% sahamnya dijual melalui pasar modal atau minimal 45% sahamnya ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal sebesar 20% akan diberi perlakuan sama seperti perusahaan PMDN.

^{27.} Amrizal, *Op cit*, hal. 3.

^{28.} Erman Rajagukgukan, *Hukum Investasi di Indonesia*, FHUI, Jakarta, 1996.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 tahun 1987 tanggal 22 Desember 1987, tentang perubahan keputusan Presiden No. 17 Tahun 1986 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing untuk diberi perlakuan sama seperti perusahaan PMDN, dikenal dengan paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 atau paket Desember 87.

Paket ini merupakan upaya lanjutan mengurangi berbagai non tarif selain beberapa penyederhanaan izin dan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham pada perusahaan PMA yang mana 51% sahamnya dimiliki oleh negara atau swasta nasional atau minimal 45% sahamnya. Syarat 20% dijual melalui pasar modal sebagai saham atas nama yang diperlakukan sama dengan perusahaan PMDN.

Dengan adanya perubahan ini berarti perusahaan PMA yang telah dipersamakan dengan perusahaan PMDN dan berhak menggunakan semua fasilitas yang diberikan pemerintah kepada perusahaan PMDN, misalnya masuk bidang usaha yang sudah tertutup bagi PMA, tetapi masih terbuka bagi PMDN memperoleh kredit dari bank pemerintah dan langsung mendistribusikan hasil produksinya dipasar-pasar domestik.²⁹

3. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5/SK/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan PMA, dikenal dengan Paket Kebijakan Desember 1987 atau Paket Desember 87.

²⁹. Amrizal, *Op cit*, hal. 53.

Dalam paket ini adanya batas waktu untuk peningkatan saham nasional dari 20% menjadi 51% dalam waktu 15 tahun sejak dimulainya produksi komersial perusahaan dan padanya kemungkinan untuk diperpanjang 5 tahun dan pada paket ini juga diatur mengenai kemungkinan suatu perusahaan PMA baru terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Keputusan Ketua BKPM No. 5/SK/ 1987 tanggal 23 Desember 1987.

Bahwa kebijaksanaan ini dianggap memberikan kepastian dan ketenangan berusaha bagi para investor asing, karena dalam praktek investasi selama ini jangka waktu 10 tahun untuk peningkatan saham nasional dan ternyata ada beberapa partner investor atau mitra usaha nasional yang belum mampu mengambil alih saham-saham dalam waktu yang telah ditentukan, sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundangan di bidang PAM.

4. Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi penanaman modal No. 08/SK/1988 tentang pelaksanaan penetapan jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing.

Bahwa jangka waktu izin perusahaan PMA yang diberikan dalam surat keputusan adalah selama 30 tahun terhitung segala tanggal akte pendirian perusahaan sebagai badan hukum, tetapi apabila PMA memperluas usahanya, maka diberi perpanjangan waktu usaha selama 30 tahun. Jadi jangka waktu izin PMA menjadi 60 tahun. Kalau dibandingkan dengan jangka waktu PMA di Malaysia yang mengeluarkan izin usaha dalam jangka waktu 99 tahun, Indonesia masih digolongkan relatif singkat.

5. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 16/SK/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan PMA.

Pada paket ini diadakan kembali saham 100% dimiliki oleh peserta asing yang pada tahun 1974 saham 100% tersebut dilarang. Karena terjadinya peristiwa Malari. Bahwa adanya PMA yang dapat didirikan 100% asing dengan syarat berlokasi di pulau Batam yang merupakan kawasan berikat dan 100% produksinya untuk ekspor serta dalam waktu 5 tahun sesudah berproduksi secara komersial paling sedikit 5% sahamnya dijual kepada mitra usaha Indonesia.

6. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 747/KMK.04/1990, 28 Juni 1990 tentang perlakuan Pajak Penghasilan bagi Investasi di Wilayah tertentu.

Adanya dorongan dalam meningkatkan iklim PMA di wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Timor-Timur, Maluku dan Irian Jaya dan diberikan kemudahan dalam memperlakukan pajak penghasilan bagi wajib pajak serta dapat pula melakukan kompensasi kerugian tidak lebih dari 8 tahun mulai dihitung sejak tahun pertama sesudah kerugian yang dialami oleh penderita.

7. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 748/KMK.04/1990, 28 Juni 1990 tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan bagi investasi di wilayah tertentu.

Dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 peraturan kebijaksanaan ini menyebutkan bahwa bagi investasi dibidang usaha-usaha pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan,

perindustrian, real estate dan perhotelan serta jasa pengembangan kepariwisataan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB Timor Timur, Maluku, Irian Jaya, diberikan fasilitas kemudahan berupa pengurangan dalam hal pajak PBB selama 8 tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah, sebesar 50%.

8. Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman modal No. 21/SK/1991 tentang persyaratan investasi minimal bagi perusahaan PMA.

Bahwa jumlah investasi dalam rangka PMA tidak boleh lebih kecil dari \$ 1.000.000 dan untuk kegiatan dibidang usaha jasa diberikan kemudahan dengan dimungkinkan didirikan perusahaan dengan investasi sekurang-kurangnya sebesar US\$ 250.000,-

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 291/Men/1991 tentang Pemberian kemudahan menggunakan Tenaga Kerja Karya Negara Asing Pendatang Bagi Perusahaan yang menanam modal di wilayah Indonesia bagian timur yang hasil produksinya sebagian besar untuk diekspor.

Bahwa adanya kemudahan yang diberikan oleh peraturan ini dalam menggunakan tenaga kerja warga asing pendatang baik mengenai jumlah, jangka waktu dan jawaban yang akan diisi oleh tenaga kerja warga negara asing pendatang yang prosedur penggunaan dan pemberian izinya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Men/1990 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 461/Men/1990.

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1992

tentang pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan untuk usaha dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka PMA.

Bahwa pemanfaatan tanah yang dapat diberikan dalam rangka penanaman modal asing adalah dengan hak guna usaha dan hak guna bangunan. Yang mana hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan apabila masih menjalankan usahanya dengan baik jangka waktu tersebut dapat diperbaiki lagi.

Dalam suatu perusahaan PMA kemungkinan dapat diberikan sampai waktu 60 tahun bahkan mungkin lebih, dengan tujuan untuk lebih merangsang minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Tetapi apabila dilihat di negara Malaysia lebih jauh jangka waktunya dari Indonesia, walaupun di Indonesia telah diberikan jangka waktu yang relatif panjang.

11. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 1992, tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan PMA. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa investor asing berhak menguasai 100% saham dalam setiap proyek PMA yang bernilai modal disetor minimal US\$ 50 Juta tanpa harus menyatakan lagi penguasa Indonesia sebagai mitra lokalnya, tetapi dalam UU PMA sebenarnya tidak terdapat ketentuan mewajibkan perusahaan PMA memiliki mitra lokal dan tidak

pula melarang keberadaan suatu perusahaan yang sahamnya 100% modal asing. Namun dalam UU tersebut memang ada pengaturan tentang *joint venture* antara modal asing dengan modal dalam negeri atau mitra lokal.

Adanya ketentuan mengenai perusahaan PMA yang berbentuk usaha patungan / *joint venture* dengan saham oleh mitra lokal sekurang-kurangnya 50% dalam waktu 20 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial. PP ini juga memberi kelonggaran terhadap investasi asing dari suatu PMA yang sudah beroperasi, juga diberi peluang untuk mendirikan perusahaan PMA baru atau membeli saham perusahaan lain di Indonesia, baik yang baru maupun yang sudah lama berdiri. Dengan adanya kelonggaran ini untuk mengembangkan usaha termasuk membeli saham perusahaan Indonesia baik PMA maupun PMDN dimungkinkan dengan syarat sepanjang bidang usahanya tetap terbuka untuk PMA.

Sedangkan mengenai pengembangan perusahaan adalah dalam rangka PMDN yang sudah beroperasi dari total saham PMDN tersebut syaratnya bahwa dalam tempo 20 tahun setelah saham-saham itu disetujui untuk dibeli, harus dikembalikan kepada pihak Indonesia minimal 51%. Maksudnya agar PMDN yang beralih menjadi PMA itu bisa kembali menjadi PMDN lagi lewat program diventasi setelah saham tersebut dikuasai PMA selama jangka waktu 20 tahun.

12. Paket kebijaksanaan 20 Oktober 1993 atau Pakto 93.

Pakto 93 ini pengaturannya mencakup tata cara penanaman modal, persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan PMA dan perizinan dan dalam paket ini pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket diregulasi diantaranya PP No. 50 tahun 1993 yang menyatakan PP No. 17 tahun 1992 tidak berlaku lagi.

Dalam PP No. 50 tahun 1993 mengatur mengenai PMA dapat didirikan secara *joint venture* modal Indonesia sekurang-kurangnya 5% dan ditingkatkan menjadi 20% dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial dan kemudian saham Indonesia ditingkatkan lagi menjadi 51% dalam waktu 20 tahun.

13. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1994 tanggal 19 Mei tentang Pemilikan saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.

Adanya PP No. 20 tahun 1994 dimungkinkan untuk mendirikan perusahaan PMA di seluruh wilayah Indonesia yang 100% sahamnya asing dan PMA yang saham nasionalnya sekurang-kurangnya 5% dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1a jo Pasal 5 dan Pasal 6 PP no. 20 tahun 1994.

Dikeluarkannya PP tersebut merupakan suatu yang luar biasa dan hampir-hampir sulit untuk dipercayai karena melalui paket ini dibolehkan perusahaan domestik menjual sahamnya sampai 95% kepada pemilik modal asing dan ijin usaha dapat diberikan untuk sarana-sarana yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perangsang dan kemudahan-kemudahan yang lebih menarik terhadap pelaksanaan penanaman modal asing diberikan untuk meningkatkan daya saing dalam dunia investasi, memasuki minat para investasi dan alih teknologi

14. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman modal nomor 21/SK/1996 tentang tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan kembali tata cara permohonan dan penyelesaian penanaman modal untuk dapat lebih mempercepat dan lebih mengembangkan iklim investasi yang mana kembali mempertegas mengenai kemungkinan dibolehkannya perubahan status dari PMDN menjadi PMA sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham.

Dalam hal ini juga diatur mengenai perusahaan PMA patungan atau PMA langsung yang telah berproduksi komersial dibolehkan membeli saham perusahaan PMDN dan perusahaan PMDN/Non PMDN yang dibeli sahamnya masih dalam tahap

pembangunan yang memerlukan fasilitas untuk pengimporan barang modal, perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMA kepada meninves/ Ketua BKPM dan tidak perlu meminta persetujuan Presiden lagi.

Adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam rangka penanaman modal asing adalah bahan baku atau bahan penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi untuk keperluan 2 tahun pertama dengan menggunakan izin APIT atau Angka Pengenal Importir Terbatas, ketentuan dikeluarkan oleh Ketua BKPM.

15. Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2000 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA.

Dengan adanya perubahan PP No. 20 tahun 1994 ke PP No. 83 tahun 2000 merupakan suatu kebijakan pemerintah yang cukup liberal untuk PMA, diperbolehkan investasi PMA langsung atau 100% modal asing kecuali 9 bidang usaha peningkatan saham yang lebih ringan atau *flexible*, dimungkinkannya jangka waktu usaha lebih lama dan penyertaan modal asing dan status investasi yang lebih longgar serta divesting program setelah 15 tahun sejak berproduksi komersial.

16. Keppres No. 96 tahun 2000 Jo Keppres No. 188 tahun 2000

tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

Terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal.

Ketentuan ini mengatur mengenai bidang usaha yang boleh dilakukan dalam penanaman modal asing yaitu :

- a. Bidang usaha yang tertutup mutlak bagi penanaman modal mencakup 11 bidang usaha.
- b. Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing atau badan hukum asing, mencakup 8 bidang usaha.
- c. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan, antara modal asing dan modal dalam negeri, mencakup 9 bidang usaha.
- d. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, mencakup 20 bidang usaha.

17. Keppres No. 127 tahun 2001 tentang bidang/jenis usaha yang

dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang jenis usaha yang

terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat

kemitraan dengan mencabut Keppres No. 99 tahun 1998.

Usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh

usaha sebagai bagian dari produksi bidang/jenis yang

dicanangkan usaha kecil mencakup 9 bidang/jenis usaha,

sedangkan usaha menengah/besar merupakan membeli

komponen dari usaha kecil untuk keperluan produksinya, dan memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memiliki saham usaha yang menengah/besar dengan harga yang wajar dan sistem pembayaran yang ringan. Bidang/jenis usaha yang terbuka bagi usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan 9 bidang jenis usaha.

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di bidang penanaman modal asing ini bertujuan agar dapat menciptakan iklim investasi yang bersifat konduktif, meningkatkan minat para investor asing untuk menanamkan modalnya.

3.2.2. Dampak Kebijakan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing

Dalam upaya pengembangan kegiatan penanaman modal asing, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat mendorong dan merangsang minat para investor untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman modal asing yang mana kebijakan-kebijakan tersebut telah tertuang dalam paket-paket deregulasi dan debirokratisasi serta iklim investasi yang bersifat kondusif seperti insentif dalam bidang perpajakan, kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal asing.

Bahwa dalam realitanya paket deregulasi di bidang PMA tidak langsung mempunyai dampak yang dapat dirasakan karena memiliki karakteristik yang lebih tenang, apabila dibandingkan

dengan paket deregulasi di bidang moneter sebab dalam waktu singkat dapat mengejutkan dunia perbankan. Bidang PMA ini merupakan paket deregulasi sektor riil yang mempunyai dampak terhadap kegiatan PMA dalam jangka waktu yang panjang baru dapat dilaksanakan. Dampak kebijakan ini dalam kegiatan PMA dapat membawa kemungkinan-kemungkinan pada dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif kebijakan dalam kegiatan PMA yang dapat dirasakan adalah :

1. Adanya PMA dapat menambah pendapatan devisa negara melalui penanaman modal produksi ekspor, sedangkan disektor Industri PMA mengurangi kebutuhan devisa untuk import.
2. PMA juga menambah pendapatan negara berupa pajak dan royalty dari perusahaan-perusahaan asing.
3. Mengarahkan para investor, khususnya investor luar negeri yang menanamkan modalnya ke Indonesia, karena asumsi *Ceteris Parebus* para ivestor tersebut akan banyak datang ke Indonesia, sebab dengan investasi US\$ 2 juta, para investor dapat mendirikan perusahaan dibidang bahan baku, bahan setengah jadi dan komponen-komponen industri lainnya. Bagi perusahaan yang telah berdiri, tentu akan berusaha mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

4. PMA membuka peluang kesempatan kerja yang cukup luas. Bahwa secara tidak langsung dengan banyaknya perusahaan baru atau pengembangan perusahaan, berarti semakin meningkatkan daya serap tenaga kerja yang mana dengan adanya PMA tersebut menambah bidang usaha yang sangat membantu mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, sebab membuka lapangan kerja baru.
5. PMA menggairahkan kegiatan sektor usaha kecil, menengah dan sektor usaha informal, sebab dengan berdirinya pabrik baru perusahaan-perusahaan baru selain dapat menyerap tenaga kerja juga dapat membuka kesempatan kerja misalnya masyarakat di sekitar lokasi perusahaan mendapatkan pekerjaan dengan berjualan makanan, minuman, barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari, membuka tempat penginapan dan lain-lainnya. Dengan adanya usaha tersebut, secara tidak langsung juga turut menggairahkan sektor usaha kecil dan menengah.
6. Adapun PMA menaikkan keterampilan dari tenaga yang bekerja pada perusahaan tersebut dan memberikan pengaruh modernisasi dengan melalui adanya perusahaan-perusahaan asing yang besar dan modern.
7. Khususnya di sektor industri PMA menambah arus barang, di negara Indonesia terdapat gejala :
 - Produksi kecil dan penawaran
 - Produksi tidak dapat diperbanyak dengan cepat.

Untuk inilah peranan modal asing dapat menambah elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri perusahaan asing tersebut. Maka apresiasi konsumen menjadi lebih meningkat dalam mengkonsumsi barang karena dengan banyaknya perusahaan yang berdiri, konsumen semakin mempunyai banyak pilihan dengan keragaman harga dan kualitas serta para produsen akan berlomba memproduksi barang dengan kualitas serta para produsen akan berlomba memproduksi barang dengan kualitas yang berdaya saing tinggi agar tidak ditinggalkan oleh konsumen.

8. PMA mendatangkan keuntungan banyak bagi mereka yang berhubungan dengan modal asing dan meningkatkan sumber daya manusia dikalangan birokrat ataupun para pengusaha.

Dampak kebijakan pada deregulasi sektor riil di bidang PMA memberikan sebagian besar wewenang kepada para pejabat daerah tingkat I dan II dalam pengambilan keputusan. Yang mana sebelum paket kebijaksanaan 1993 masalah pemberian ijin ditangani secara sentralisasi, tetapi sekarang ini telah berubah dan sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 menjadi desentralisasi. Untuk itu perubahan ini diharapkan pemerintah daerah berperan aktif mencari investor baru dan berani dalam mengambil keputusan serta para pejabat harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu membuat keputusan yang objektif.

Sedangkan dampak negatif kebijakan dalam kegiatan penanaman modal asing adalah :

1. Adanya modal asing datang dengan motif mencari untung sebesar-besarnya. Dalam hal ini yang menjadi tujuan primer adalah memperbesar modal sebab semakin besar tingkat pendapatan atau *rate of profit*, baru tujuan sekunder adalah memperhatikan mutu produksi barang, yang mana dalam dunia usaha yang kompetitif akan menguntungkan para pengusaha yang bermodal besar, tetapi para konsumen di Indonesia masih kebanyakan mengkonsumsi berdasarkan kemampuan, belum berorientasi pada mutu produk.
2. Hasil-hasil yang diperoleh modal asing adalah :
 - a. Keuntungan akan ditransfer ke luar negeri kepada para pemegang sahamnya.
 - b. Depresiasi sering dipakai untuk mengembangkan keuntungan agar tidak atau terhindar dari pajak.
 - c. Bahan dan alat-alat kebanyakan didatangkan dari luar negeri dan pelaksanaannya pemerintah yang harus menyediakan valuta asingnya.
3. Apabila jumlah modal asing sedikit maka arti kuantitatifnya pada efek pembangunan tidak banyak karena negara penerima modal sedikit mendapatkan manfaat dari modal asing tersebut. Tetapi, kalau jumlah modal asing besar maka kekuasaan ekonomi modal asing tersebut juga besar, sehingga timbul masalah bagaimana menjamin keselamatan investasi modal asing tersebut. Hal ini bersangkutan dan bergantung pada politik pemerintah dan Undang-Undang PMA yang ada.

4. Bahwa aparat pemerintah didalam memberikan izin pendirian PMA semata-mata karena faktor wewenang dan kekuasaan saja, tanpa melalui prosedur yang seharusnya, maka keberadaan perusahaan-perusahaan PMA justru akan mematikan perusahaan-perusahaan PMDN terutama perusahaan menengah dan kecil. Apalagi pemberian wewenang dan kekuasaan aparat pemerintah daerah tingkat I dan II, apabila tidak diperhatikan dan dibarengi dengan sistem pemantauan ada kemungkinan untuk disalah-gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5. Keberadaan perusahaan baru belum tentu menjamin kebutuhan tenaga kerja yang banyak sebab sebagian besar PMA yang berdiri adalah padat modal dan bukan padat karya serta para investor datang membawa peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih, maka membutuhkan tenaga kerja yang sedikit dan terlatih, sedangkan pengangguran di Indonesia kebanyakan belum memiliki keahlian, maka akan terdapat tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dituangkan melalui paket deregulasi di sektor riil membawa dampak positif dan negatif dalam kegiatan PMA. Apalagi sekarang ini dunia dilanda globalisasi yang semakin banyaknya negara-negara mengadakan kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Hal ini memiliki arti penting bagi kegiatan ekonomi pada umumnya seperti perdagangan dan investasi.

Pada saat ini dalam dunia ekonomi diharapkan bagi setiap negara termasuk Indonesia untuk ikut serta dalam perekonomian dunia yang aturannya tertuang dalam GATT dan APEC yang mana tujuan kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) adalah mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat Asia Pasifik melalui peningkatan dan perluasan kegiatan perdagangan dan investasi serta telah ditetapkan tahun 2020 sebagai batas waktu pelaksanaan perdagangan dan investasi yang bebas dan adil dikawasan Asia – Pasifik.

Dalam kerjasama WTO yang merupakan organisasi perdagangan dunia yang bersifat multilateral yang mana Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menanda tangani WTO dan telah pula meratifikasi persetujuan WTO tersebut dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994.

4. Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing

4.1. Penanaman Modal Langsung

Bahwa penanaman modal asing dalam berapa tahun mendatang masih perlu dipertahankan untuk memacu perkembangan laju pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor industri. Penanaman modal asing ini dapat dilakukan dengan penanaman modal langsung atau investasi langsung dan tidak langsung. Di Indonesia mengenai investasi langsung atau *direct investment* mulai berkembang sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Pasal 1 UU PMA menyebutkan :

“Pengertian penanaman modal asing didalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”.

Penanaman modal secara langsung dalam Pasal 1 adalah seperti pengertian yang diberikan oleh organisasi for European Economic Cooperation, yaitu :

"Direct investment is meant acquisition of sufficient in an undertaking to ensure its control by investor".

Bahwa investasi langsung atau penanaman modal langsung merupakan salah satu cara yang biasa ditempuh oleh para pengusaha asing ataupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya disuatu negara atau daerah tertentu.

Dalam melakukan penanaman modal langsung ini adanya negara-negara berkembang menarik modal langsung dari luar negeri, faktor-faktor yang mendorong hal tersebut adalah :³⁰

1. Hal itu disebabkan oleh kesadaran bahwa bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri masih belum cukup untuk mengatasi masalah "jurang ganda", "jurang tabungan" dan "jurang mata uang asing" yang dihadapi. Penanaman modal asing langsung dapat membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia mengatasi masalah kekurangan tabungan dan kekurangan mata uang asing. Maka dari pinjaman ini, penanaman modal asing akan mempertinggi tingkat pembangunan ekonomi.
2. Penanaman modal asing langsung bukan saja akan menyediakan dana modal dan mata uang asing yang diperlukan untuk penanaman modal yang direncanakan, tetapi juga membawa bersamanya tenaga management, keahlian keusahawanan, keahlian teknik dan pengetahuan mengenai pasar dan pemasaran dari barang yang mereka hasilkan.

³⁰. Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, FEUI, Jakarta, 1987, hal. 379.

3. Dalam jangka panjang penanaman modal asing langsung dapat melatih pribumi mendapat keahlian dalam bidang-bidang yang diusahakan oleh modal asing.
4. Perusahaan-perusahaan asing dapat mempercepat pengenalan teknologi baru atau *transfer of technology* ke negara-negara berkembang itu, teknologi yang akan digunakan mereka adalah teknologi yang jauh lebih baik dari pada yang ada di negara-negara berkembang tersebut.

Dengan kehadiran modal asing ini akan mendapatkan keuntungan kepada masyarakat, pemerintah dan perusahaan-perusahaan nasional. Bagi masyarakat adanya penanaman modal asing langsung akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran yang dihadapi pemerintah serta kemampuan, perusahaan-perusahaan asing menggunakan teknologi yang lebih tinggi menyebabkan tingkat produktivitasnya tinggi, maka mereka membayar gaji lebih tinggi daripada yang dibayar oleh perusahaan nasional.

Keuntungan yang dapat diambil pemerintah dengan adanya modal asing adalah sumber penghasilan atau pendapatan, berupa pajak dan royalti yang dibayar perusahaan-perusahaan asing untuk memperoleh konsensi pengusahaan kekayaan alam yang dimiliki negara tersebut sedangkan bagi perusahaan nasional keuntungan yang dapat diperoleh adalah untuk menggunakan teknologi yang lebih baik, lebih mudah memperoleh bahan baku mentah dan dapat menjual hasil-hasil usahanya kepada perusahaan asing.

Disamping adanya keuntungan, ada juga kerugian dengan kehadiran penanaman modal asing langsung yang akibatnya dapat memperburuk kondisi keuangan Indonesia apabila hasil-hasil usaha mereka tidak diekspor atau tidak menggantikan barang-barang import dan mereka mengimpor bahan mentah dari luar negeri dan mengirimkan keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan-perusahaan induk diluar negeri. Serta adanya perusahaan asing juga menghambat perkembangan perusahaan nasional terutama perusahaan tersebut sejenis dengan perusahaan asing, begitu juga terhadap pengetahuan teknologi, keahlian management dan keahlian pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing akan melemahkan persaingan dari perusahaan nasional yang kurang memiliki keahlian tersebut.

Dalam investasi langsung terdapatnya 3 variasi yaitu :

1. Suatu perusahaan luar negeri yang 100% dimiliki oleh perusahaan dalam negeri dan bergerak sebagai perwakilan untuk perusahaan dalam negeri.
2. Suatu perusahaan diluar negeri yang dimiliki 100% oleh warga negara investor, tetapi dibentuk untuk bekerja luar negeri.
3. Pemilikan bersama atas perusahaan diluar negeri antara warga negara investor dan warga negara asing dimana investasi dilakukan.

Bahwa PMA murni 100% asing dimungkinkan untuk dilaksanakan, tetapi PMA *joint venture* atau usaha patungan bagi pemerintah Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk PMA yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia daripada PMA langsung atau *straight foreign investment* karena sebagian dari keuntungan perusahaan akan diperoleh oleh pihak Indonesia.

Perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA baik dalam bentuk PMA murni 100% asing maupun PMA *joint venture* dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai kebaikan dan keburukan, tetapi kebaikan PMA langsung atau investasi langsung tersebut diantaranya yaitu :³¹

1. Investasi langsung tidak mendatangkan beban yang harus dibayar dalam bentuk bunga, deviden atau pembayaran kembali.
2. Investasi langsung dapat mengkombinasikan keahlian teknologi dan modal.
3. Investasi langsung dapat mengatasi masalah transfer uang.
4. Adanya penanaman kembali dari keuntungan investasi yang sudah ada.
5. Investasi langsung dapat menciptakan oleh teknologi dan keterampilan.

Meskipun adanya kebaikan investasi langsung dalam pelaksanaannya ditemukan kesulitan investasi langsung yaitu :

1. Kesulitan ekonomis dan politis, kedudukan politis yang kuat dengan negara investor
2. Persyaratan waktu lokasi kedudukan dalam personalia dan manajemen atau pengaturan hukum harus diterima kedua belah pihak ada unsur risiko dalam waktu perjanjian atau nasionalisasi dalam waktu perjanjian atau nasionalisasi bagi pemerintah yang menerima nasionalisasi.
3. Negara atau daerah penerima investasi terlampau lama terikat kepada persyaratan yang lama-lama merugikan.

³¹. Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Brigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hal 83.

Adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh negara dalam melaksanakan penanaman modal asing langsung atau investasi langsung, baik bagi pihak investor maupun bagi pihak penerima investasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah :

a. Bagi investor

- Adanya jaminan keamanan.
- Fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan ke negara asal.
- Prospek rentabilitas, tak ada beban pajak yang berlebihan.
- Adanya kemungkinan repatrisasi modal atau pengambil alihan modal oleh pemerintah pusat atau daerah atau kompensasi lain apabila keadaan memaksa.
- Adanya jaminan hukum yang mencegah kesewenang-wenangan.

b. Bagi pihak penerima investasi

- Pihak penerima investasi harus sadar bahwa kondisi sosial politik ekonomi negaranya menjadi pusat perhatian investor.
- Dicegah tindakan yang merugikan negara penerima investasi dalam segi ekonomis jangka panjang dan pendek.
- Transfer teknologi dari para investor.
- Pelaksanaan investasi langsung atau tidak langsung betul-betul dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan atau menguntungkan atau *mutual benefit* dan terutama pembangunan bagi negara atau daerah penerima.

4.2. Penanaman Modal Asing Tidak Langsung

Penanaman modal asing tidak langsung disebut juga dengan portopolio yang merupakan penanaman modal dalam bentuk pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang atau *bond* dan saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang terdapat dinegara-negara berkembang. Sebab peranan penanaman modal asing tidak langsung dalam pembangunan ekonomi hanya terbatas pada penyediaan modal yang diperlukan untuk mengembangkan perusahaan dan kegiatan modern lainnya serta penanaman modal tidak menyediakan sumber-sumber daya lain seperti pengetahuan teknik usahawan teknik modern dan lain-lainnya.

Bahwa penanaman modal portofolio hanya berupa penyertaan dalam pemilikan perusahaan dan bukan merupakan penguasaan kegiatan perusahaan sehari-hari, serta tidak akan merubah corak penanaman modal yang sedang berlaku dan tidak menimbulkan saingan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Apalagi bila suatu negara sudah mempunyai tenaga usahawan, tenaga ahli dan pengetahuan teknologi yang diperlukan. Modal portofolio lebih berguna dari pada penanaman modal asing langsung. Apabila terjadi penarik tersebut bisa mengurangi peranan penanaman modal asing langsung dan dapat menghindari akibat buruk yang ditimbulkan oleh penanaman modal asing langsung.³²

Penanaman modal portofolio lebih menguntungkan daripada penanaman modal asing langsung, tetapi peranannya dalam melancarkan pembangunan ekonomi dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia lebih terbatas daripada penanaman modal asing langsung.

³². Sadono Sukirno, *Opini*, hal. 381.

Karena kemampuan negara-negara berkembang untuk menyerap modal portofolio sangat terbatas atau kecil yang disebabkan oleh :³³

1. Terdapatnya keraguan dikalangan investor mengenai kemampuan perusahaan dinegara-negara berkembang membayar hutang-hutang mereka dan membayar deviden saham-saham yang mereka keluarkan.
2. Ketidakstabilan politik dan ekonomi dinegara-negara berkembang yang berakibat tingginya risiko atau *high risk*.
3. Banyak negara berkembang yang pasar modalnya belum berkembang dengan baik.
4. Kekurangan penyebaran informasi yang akurat tentang potensi penanaman modal.

Dalam pelaksanaan baik itu penanaman modal asing langsung maupun portofolio, pihak investor asing sering mengeluhkan mengenai prosedur dan perizinan yang masih berbelit dan adanya persoalan di bidang hukum kontrak. Adanya kelemahan yang dihadapi Indonesia adalah menarik modal asing terletak dalam penyediaan infra struktur dengan kapasitas energi listrik, telepon, kawasan industri, kebijakan fiskal, fasilitas perbankan yang masih terbatas, praktek monopoli dan oligopoli serta berbagai kendala birokratis.³⁴

5. Pembentukan Perusahaan Penanaman Modal Asing

5.1. Konsep Tentang Perusahaan Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing yang dilaksanakan di suatu negara termasuk Indonesia pada umumnya harus dalam bentuk perusahaan baik itu perusahaan PMA dalam bentuk perusahaan PMA yang berbentuk *joint*

³³. Sadono Sukirno, *Opcit*, hal. 382.

³⁴. Pandji Anoraga, *Opcit*, hal. 143.

venture sesuai dengan pengertian PMA dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 (UU PMA). Istilah perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang dijalankan untuk keseluruhannya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagian kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan bentuk badan hukum bagi perusahaan PMA tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada pihak asing tentang modal yang ditanamkan di Indonesia. Perusahaan PMA dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan melibatkan tiga pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Pemerintah negara penerima modal sebagai mitra yang mengkomodasikan kehendak politik dan landasan hukum.
2. Perusahaan-perusahaan nasional sebagai mitra usaha.
3. Masyarakat sebagai penerima manfaat.

Ketiga pihak ini dalam menjalankan tugas harian secara selaras dan seimbang dengan tuntutan perkembangan dalam kegiatan perusahaan di negara penerima modal, jangan sampai ada kesenjangan antara negara asal modal dengan negara penerima modal.

Pengelolaan perusahaan diharapkan secara lebih terarah dan tepat guna sesuai dengan paket yang tersedia pada perusahaan dan alternatif program pembangunan yang dapat mengontrol dan mengkoordinasikannya. Bagi Indonesia hal ini membawa implikasi dan perhatian khusus yang terkait dengan pelaksanaan jiwa Pasal 33 UUD 1945.

Dalam perusahaan penanaman modal asing, pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan siapa yang ditunjuk menjadi direksi perusahaan. Sedangkan untuk memenuhi tenaga kerja perusahaan tersebut harus menggunakan tenaga kerja warga negara asing hanya diizinkan bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.³⁵

Sedangkan bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional. Dalam hal ini pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk dan cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa.

Suatu perusahaan yang seluruh modalnya adalah modal asing, wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika partisipasi tersebut dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada, maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.³⁶

Pada zaman penjajahan, apabila terjadi dominasi terhadap modal asing dengan sendirinya harus dicegah, sebab perusahaan-perusahaan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing. Untuk itu pemerintah harus sepenuhnya memperhatikan kekuatan modal nasional yang ada dan rencana-rencana pembangunan yang akan disusun oleh pemerintah.³⁷

35. Pasal 9, 10 dan 11 No. 1 Tahun 1967.

36. Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967.

37. Pasal 5 UU No. 1 tahun 1967.

Dengan adanya ketentuan Pasal 5 UU PMA merupakan perlindungan terhadap bangsa dan negara Indonesia, hal ini hendaknya benar-benar terwujud dalam praktek. Apabila tidak memperhatikan amanat yang terkandung dalam ketentuan tersebut berarti mengembalikan bangsa dan negara Indonesia ke dalam cengkraman penjajah, terutama penjajahan di bidang ekonomi.

Bahwa tanah, air, kekayaan alam dan itikad baik negara dan bangsa Indonesia tidak bisa dilupakan karena hal ini dapat juga diperhitungkan sebagai modal yang berharga. Pembentukan perusahaan PMA menurut UU PMA dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan yang semula penanaman modalnya seratus persen yang terdiri dari modal asing ataupun dalam bentuk kerja sama antara modal asing dengan modal dalam negeri.

5.2. Prosedur Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing

Dalam UU No. 1 Tahun 1967 (UU PMA) menetapkan prosedur pendirian perusahaan bagi penanam modal asing adalah :

1. Mengenal Bentuk Perusahaan

Bahwa perusahaan dalam rangka penanaman modal asing harus berbentuk Badan Hukum Indonesia atau PT yang tunduk pada Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Maka dengan ketentuan ini bagi pihak asing yang akan menanamkan modalnya atau investor asing kedalam negara Indonesia, tidak bisa berkedudukan sebagai perseorangan tapi harus berbentuk suatu Badan Hukum Indonesia atau PT.

Bagi para pihak yang akan mendirikan perusahaan harus mengajukan *project proposal* penanaman modal asing yang

berdasarkan UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA dengan memberikan persyaratan dan data-data sebagai berikut .³⁸

- a. Akte pendirian perusahaan Indonesia, apabila berbentuk perusahaan atau badan hukum seperti PT Z, PT Y dan identitas pribadi jika perorangan dalam PT. X.
- b. Akte pendirian perusahaan asing.
- c. Posisi keuangan dari kedua belah pihak.
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari pihak investor Indonesia.
- e. Program Produksi dan Pemasaran tahunan.
- f. Mengisi daftar isian penyajian informasi lingkungan.
- g. Referensi dari bank.
- h. Izin pencadangan tanah dari Gubernur, Kepala Tingkat Daerah Tingkat I dan atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- i. Draft perjanjian *joint venture*, apabila perusahaan tersebut didirikan berbentuk PMA *joint venture*.

Kemudian surat pengajuan permohonan penanaman modal asing ditujukan kepada BKPM yang akan memberikan penilaian terhadap perusahaan PMA tersebut setelah itu BKM akan direkomendasikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.

Apabila permohonan tersebut disetujui oleh Presiden maka para pihak asing menghadap notaris untuk meresmikan atau otentikasi kontrak-kontraknya dan kemudian kontrak-kontrak tersebut diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk disyahkan sebagai badan hukum.

³⁸. Amirizal, *Op cit*, hal. 113.

Bahwa mendirikan Badan Hukum PT. Dalam rangka penanaman modal asing tidak lepas pula dari persyaratan pengesahan oleh Menteri Kehakiman, pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan PT. tersebut dan pengumuman dalam berita Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (KUHD). Bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1982 (UU WDP) yang mempunyai tujuan sebagai kontrol dari pihak pemerintah terhadap perusahaan yang ada, jenis usahanya dan tingkat solvabilitasnya.³⁹

Dalam memberikan keputusan pengesahan oleh Menteri Kehakiman menyebutkan bahwa PT yang bersangkutan adalah suatu badan hukum sejak tanggal penetapan tersebut. Persetujuan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman tersebut harus memperhatikan tiga unsur penilaian yaitu :

- a. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 38 sampai pasal 55 KUHD.
- c. Tidak adanya keberatan lain yang penting atau *geen gewichtig bedenking* terhadap pendirian atau perubahan Anggaran Dasar PT.

Dengan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka lahirlah suatu badan hukum. Hasil atau status badan hukum (perusahaan) harus dilaporkan ke BKPM/BKPMD dengan disertai :

- a. Izin lokasi.
- b. Surat tanda bukti pembebasan tanah apabila menggunakan tanah milik.

³⁹. Soedjono Dirdjosisworo, *Op cit*, hal. 236.

- c. Izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat.
- d. Surat pernyataan mengenai *Hinder Ordonantie* (HO) dari Pemerintah Daerah setempat.
- e. Hak Guna Usaha (HGU) apabila menggunakan tanah negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam UU No. 1/1967 jo PP No. 9/1993 dan PP No. 20/1994 serta SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM SK No. 15/SK/1994 ditentukan hal-hal sebagai berikut :⁴⁰

- a. Bagi perusahaan PMA yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 diberi izin selama 30 tahun terhitung sejak perusahaan tersebut berproduksi komersial.
- b. Bagi perusahaan PMA yang telah melaksanakan investasinya sesuai dengan persetujuan pemerintah, dapat mengajukan permohonan untuk memperluas usahanya.
- c. Dalam izin perluasan bagi perusahaan yang mengadakan perluasan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan selamanya 30 tahun sejak perluasan usaha yang dimaksud berproduksi komersial.
- d. Dalam izin usaha dapat diperbaiki oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Ketua BKPM, apabila perusahaan tersebut masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

⁴⁰. Amirizal, *Op cit.* hal. 114.

- e. Oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM melalui SK no.15/SK/1994 pembaruan izin sebagaimana dimaksud diatas diberi perpanjangan jangka waktu selama 30 tahun.

Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan diatas oleh BKPM menetapkan tentang kapan mulai terhitung jangka waktu 30 tahun adalah pada saat perusahaan itu mulai beroperasi secara komersial. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran serta kepastian kepada pengurusan, bahwa calon investor yang dapat diterima sebagai investor asing adalah yang berbentuk badan hukum (asing) dan atau perorangan, sebelum PP No. 20/1994 hal ini berlaku, tetapi investor perorangan tidak diperkenankan.⁴¹

2. Mengenai Tenaga Kerja

Dengan adanya kerjasama antara asing dan modal nasional, maka timbulnya dua pemilik modal, sehingga untuk menetapkan pengurus seperti direksi harus dilakukan secara bersama-sama, sebab direksi adalah orang disertai tugas untuk mengurus modal atau perusahaan oleh pemilik modal, karena pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanamkan. Sedangkan tenaga ahli dan tenaga pimpinan merupakan jabatan tertentu dalam perusahaan modal asing.

Bagi orang asing yang bekerja pada perusahaan penanaman modal asing dan orang yang menjalankan pekerjaan bebas harus memiliki izin bekerja secara tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan hal ini bisa dilakukan perpanjangan waktu dengan suatu perseroan, pada satu atau dua bulan sebelum jangka waktu bekerja berakhir.⁴²

⁴¹. Pasal 2 ayat (1) b. PP No. 20/1994.

⁴². Sadjono Dirdjosisworo, *loc cit*, hal. 236.

Dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa meletakkan suatu kewajiban kepada negara untuk mengusahakan agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan pekerjaan. Sedangkan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, perusahaan modal asing tersebut harus dapat melakukan yaitu :

- a. Wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia
 - b. Diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan atau tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.
 - c. Berkewajiban menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan didalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 UU PMA.
 - d. Terhadap penggunaan tenaga kerja warga negara asing tersebut pemerintah mengawasi pelaksanaannya.
3. Mengenai Ketentuan Perpajakan

Perusahaan-perusahaan modal asing diberi kelonggaran-kelonggaran modal asing dan keringanan dalam bidang perpajakan dan pungutan lainnya. Hal ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan modal asing tidak dapat disamaratakan diantara perusahaan yang ada dan harus melihat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama melihat kepada bidang usaha apa perusahaan tersebut bergerak.

Dikeluarkannya pembebasan pajak bagi perusahaan modal asing adalah untuk memberikan kesempatan dalam waktu yang layak agar dapat mencapai produksi yang tidak dipasarkan. Sedangkan pemberian keringanan pada pokoknya dilakukan kepada perusahaan asing dalam waktu terbatas sejak tercapainya produksi pertama, agar masih melanjutkan usaha-usahanya dengan lancar dan objektif.

Pemberian yang dilakukan terhadap fase pembebasan yang diikuti oleh fase keringanan dalam jangka waktu tertentu. Kelonggaran-kelonggaran diberikan, harus ditetapkan sesuai dengan prioritas mengenai bidang-bidang usaha dan berat ringannya usaha yang dijalankan.

Pemerintah dapat memberi tambahan mengenai kelonggaran perpajakan dan pungutan lain apabila perusahaan modal asing yang dijalankan bagi pertumbuhan ekonomi serta memberikan investasi yang memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Tetapi pemerintah baru bisa memberikan tambahan hal tersebut apabila pengusaha atau pimpinan perusahaan modal asing dapat membuktikan bahwa kelonggaran yang telah diberikan belum cukup untuk menjalankan usaha secara efektif dan efisien.

4. Pemakaian Tanah

Menurut Pasal 14 UU PMA bahwa :

“Untuk keperluan perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Maksud dari Undang-Undang tersebut adalah bagi perusahaan modal asing diberikan tanah bukan saja untuk hak pakai melainkan juga untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.

Hak Guna Bangunan adalah merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama tiga puluh tahun yang diatur dalam Pasal 35 UU PMA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang mana jangka waktu tiga puluh tahun dapat diperpanjang paling lama dua puluh tahun. Tetapi dengan adanya Pasal 18 UU PMA bahwa :

“Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktunya selama tiga puluh tahun dan tidak boleh melebihinya”.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka perpanjangan jangka waktu HGB bagi perusahaan modal asing tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bisa dengan syarat-syarat tertentu.

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu 25 tahun atau 35 tahun bagi usaha pertanian, peternakan atau perikanan. Sedangkan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dana³ dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain.

5.3. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha Perusahaan Penanaman Modal Asing

Menurut Pasal 3 ayat 1 menyebutkan :

“Perusahaan PMA yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”.

Dari bunyi pasal tersebut memberikan 2 kemungkinan pada perusahaan yang dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan yang tersendiri yaitu :

1. Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya di Indonesia.
2. Perusahaan yang dijalankan untuk bagian terbesar di Indonesia

Bahwa sebagai kesatuan perusahaan tersendiri haruslah perusahaan tersendiri haruslah perusahaan modal asing itu berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Selain dan pada itu badan hukum mengambil bagian didalam lalu lintas hukum dengan menggunakan organnya. Dalam perseroan terbatas organ itu adalah pengurusnya.

Bentuk hukum (*Rechtsvorm*) dari perusahaan modal asing, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU PMA yang menjelaskan bahwa perusahaan modal asing terbagi dalam saham-saham badan hukum Indonesia itu merupakan Perseroan Terbatas (PT) dalam arti kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dalam rangka penanaman modal asing, tempat kedudukan dari perusahaan modal asing yang berbentuk badan hukum adalah sangat penting untuk menentukan hukum yang harus diberlakukan, dalam UU PMA telah menjelaskan bahwa hukum yang berlaku bagi badan hukum Indonesia yaitu hukum Indonesia.

Bahwa berbagai negara menganut suatu sistim hukum perdata Internasional, dimana di dalamnya ditentukan bahwa tempat kedudukan dari pusat administrasi sebuah badan hukumlah yang menentukan personil badan hukum itu. Sebagai tempat pusat administrasi pada umumnya

adalah tempat kedudukan dari badan hukum yang bersangkutan, maka faktor yang menentukan hukum yang diberlakukan adalah tempat pusat administrasi badan hukum itu.

UU PMA tidak secara jelas mengatur mengenai daerah berusaha, tetapi UU PMA akan melihat pada perkembangan ekonomi nasional dan daerah serta menentukan kebijaksanaan bagi PMA-PMA untuk berusaha di daerah. Dalam menetapkan daerah berusaha, pemerintah memberlakukan asas penyebarluasan dan pemerataan penanaman modal sehingga rencana pembangunan nasional dan daerah sudah lebih dulu diarahkan. Kalau hal ini diabaikan, maka akan terjadi dampak sosial yang bermacam-macam yang bisa merusak iklim penanaman modal dengan demikian bisa menjadi kontra produktif.⁴³

Daerah berusaha merupakan daerah didalam wilayah Indonesia yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai daerah dimana perusahaan modal asing dapat melakukan kegiatan usahanya. Daerah berusaha perusahaan modal asing itu berbeda-beda dengan bidang usaha perusahaan modal asing. Bahwa penetapan daerah berusaha adalah sangat penting untuk dapat mengusahakan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia dengan modal asing, seperti daerah minus diusahakan sedemikian rupa sehingga menjadi daerah yang surplus.

Pemerintah dalam memperhatikan daerah berusaha perusahaan modal asing melihat kepada perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

⁴³. T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 32.

5.4. Kontrak Penanaman Modal Asing

Bahwa penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yaitu :

1. Pihak asing (perseorangan atau badan hukum) ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing.
2. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional.

Secara yuridis cara pertama tidak menimbulkan persual yang terlalu rumit, karena sudah jelas bahwa modal kekuasaan dan pengambil keputusan (*decision making*) dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia dan selama kebijaksanaan-kebijaksanaannya tidak boleh melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

Mengenai kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan mengingat ketentuan mengenai bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha yang berlaku, maka pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa. Ada beberapa macam kerja sama antara modal asing dengan modal nasional yang berdasarkan UU PMA yaitu :

a. *Joint Venture*

Joint Venture adalah suatu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian kerjasama ini tidak membentuk suatu Badan Hukum baru, sehingga kerja sama ini bersifat kontraktuil atau *cooperative*, misalnya

perjanjian kerjasama antara *Nansicle Associates* yakni suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware, Amerika Serikat dengan PT. Kalimantan Playwood Factory yang berbadan hukum Indonesia untuk bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerja sama ini disebut *Contract of cooperation*, yang mana kerjanya tidak mencari keuntungan belaka melainkan juga untuk memberikan pengalaman kerja bagi pihak nasional.

b. *Joint Enterprise*

Merupakan penanaman modal asing yang berbentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional. Yang kemudian membentuk perusahaan baru di Indonesia yaitu PT. (Badan Hukum Indonesia) yang modalnya terdiri dari modal dalam nilai rupiah dan modal yang dinyatakan dalam valuta asing. Pengelolaannya ditangani oleh kedua perusahaan tersebut dan risiko ditanggung bersama menurut perjanjiannya.

Bentuk kerjasama *joint venture enterprise* ini paling disenangi pemerintah maupun penanam modal asing karena :⁴⁴

1. Setiap usaha di Indonesia memerlukan uang rupiah untuk pembayaran barang-barang yang lebih murah, mudah didapat di Indonesia, pembayaran gaji pegawai dan lain-lain pengeluaran dimana penanam modal asing perlu uang dengan nilai rupiah.
2. Penanam modal asing tidak perlu menanamkan modalnya dalam bentuk valuta asing, tetapi modal asing tersebut dapat berbentuk mesin-mesin atau hasil produksi yang lain. Sehingga penanam

⁴⁴. Soedjono Dirdjosisworo, *op cit.* hal. 230.

modal asing di Indonesia akan mendapatkan keuntungan tidak hanya keuntungan dimasa yang akan datang, tetapi juga pada saat diizinkan untuk memasukkan mesin-mesinnya (modal asing) ke Indonesia dengan bebas bea masuk yang berarti dia telah mengekspor barang-barangnya ke Indonesia (luar negeri) tanpa dengan membayar pajak untuk itu.

3. Kerjasama yang dilakukan dengan pengusaha nasional apalagi yang telah berpengalaman lama, akan mengecilkan risiko bagi penanam modal asing. Sehingga penanaman modalnya di Indonesia telah merupakan pemberian kredit dari pada penanaman modal asing secara langsung. Akan tetapi kemungkinan untuk mengadakan *joint enterprice* semacam ini sangat terbatas, karena para pengusaha Indonesia jarang yang memiliki modal besar.

c. Kontrak Karya atau *Working Contract*

Kerjasama ini terjadi apabila penanaman modal asing membentuk Badan Hukum Indonesia, badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Dengan kerjasama ini ada persatuan modal asing dengan modal nasional dengan batas waktu tertentu untuk beberapa tahun. Dengan kata lain kerjasama tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau berdasar kontrak, apabila waktunya telah habis maka kontrak tersebut berakhir.

Adanya bentuk kontrak karya dalam hal penanaman modal asing adalah bahwa modal perusahaan negara tidak dapat dibagi-bagi dalam saham-saham tetapi merupakan satu keseluruhan yang

dipisahkan dari kekayaan negara, kerja sama ini dapat terjadi antara perusahaan negara dengan penanam modal asing, misalnya kontrak kerja antara PT. Pertamina dengan PT. Caltex Pacific Indonesia. Tetapi apabila perusahaan swasta dengan perusahaan nasional tidak diperbolehkan.

d. Production Sharing

Kerjasama ini merupakan sistem bagi hasil antara perusahaan negara dengan perusahaan asing yang sifatnya kontrak. Apabila kontrak telah habis maka mesin-mesin yang dibawa pihak asing tetap tinggal di Indonesia. Kerjasama *Production Sharing* merupakan suatu kredit luar negeri dimana pembayarannya dilakukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Lapangan usaha daripada kredit atas dasar *production sharing* ini pada umumnya ialah lapangan produksi dari kekayaan alam Indonesia yang mempunyai kemungkinan-kemungkinan untuk diperdagangkan di luar negeri. Dalam persetujuan kredit atas dasar *production sharing* dapat dilakukan pula persetujuan bantuan tehknik (*technical assistance agreement*) akan tetapi haruslah di masukkan sebagai ketentuan yaitu keharusan ahli-ahli Indonesia sedangkan pembayaran kembali kredit atas dasar *production sharing* dimulai setelah proyek menghasilkan hasil produksi atau tambahan hasil produksi.

e. Penanaman Modal dengan *DICS* Rupiah

Debt Investment conversion scheme (DICS) dengan *production sharing* penanaman modal asing merupakan suatu bentuk campuran antara kredit dengan penanaman modal. DICS adalah hutang, merupakan tagihan-tagihan kreditur yang dirubah menjadi investasi atau penanaman modal asing menurut UU PMA. Hal ini terjadi karena Indonesia belum mampu untuk melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya dalam waktu dekat dan hutang-hutang tersebut dijamin oleh pemerintah asing.

Dengan kebijaksanaan ini diadakan DICS, maka berarti hutang pada kreditur asing menjadi lunas yang semula dalam bentuk mata uang atau valuta asing dapat dibayar dengan rupiah. Hal ini terjadi dengan DICS rupiah yang merupakan kertas perbendaharaan negara berbunga 3% setahun atau berdasarkan kurs yang ditetapkan dalam UU PMA.

Dalam melaksanakan penanaman modal asing di negara berkembang dianggap terlalu banyak mengandung risiko, oleh karena keadaan politik, sosial dan ekonominya belum stabil jika dibandingkan dengan negara maju. Untuk itu penanaman modal asing hendaknya dilakukan dengan modal-modal yang kecil saja apa lagi penanaman modal asing lebih suka bekerja sama dengan pengusaha nasional yang sudah ternama dan pengalaman yang cukup di Indonesia.

5.5. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing

Secara garis besar penyelesaian suatu sengketa dapat digolongkan kedalam tiga proses yaitu :

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik negosiasi yang bersifat langsung (*negoisasi simplisiter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (*mediasi dan Konsiliasi*)
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional.
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang terlembaga.

Dasar yang dijadikan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing adalah konvensi ICSID 1965 (*International Centre for The Setfement of Investment Dispute*) sebagai konvensi yang dibentuk khusus dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal asing dengan menyediakan dia fasilitas yaitu konsiliasi dan arbitrase (Kemudian dengan *Additional Facility Rule 1978* ditambah dengan *Fact Finding*).

1. Konsiliasi

Bahwa konsiliasi termasuk kepada negosiasi yang menyertakan pihak ketiga yang mana peran pihak ketiga adalah untuk menguraikan fakta-fakta sehubungan dengan pokok persengketaan diantara mereka, setelah masalahnya teratasi para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara bersama-sama.

Menurut *Openheim – Lauterpacht*, yang dimaksud dengan konsiliasi adalah :⁴⁵

“The process of setting dipute by refering it to a comission of person whose taks as to elucidate the facts, after hearing the parties and endeavouring to bring them to an agreement, and to make a report containg the proposal for a settlement the proposals do not have the binding character of an a ward of judgement”.

⁴⁵. Oppenheim-Lauterpacht International Law, *A Treaty Vol.1 Disputes was and Neutrality*, hal. 12.

Dalam arti tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa konsiliator tidak bertugas mengadili, tetapi lebih bersifat menengahi sengketa melalui penguraian fakta-fakta dan mengusahakan agar pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan usulan konsiliator sepakat untuk suatu penyelesaian tertentu.

Dalam konvensi ICSID 1965 pengaturan tentang konsiliasi terdapat pada bab III Pasal 28-35. Bagi negara peserta atau warga negara peserta yang membutuhkan jasa konsiliasi mengajukan permohonan tertulis kepada sekretaris Jenderal ICSID yang kemudian mengirim salinannya kepada pihak lain.

Permohonan tersebut memuat tentang masalah yang dipersengketakan, identitas para pihak dan consent untuk mengajukan sengketanya kepada konsiliasi. Selama sengketa tersebut tidak berada di luar kewenangan ICSID, maka sekretaris jenderal harus meregistrasi permohonan itu.

Komisi konsiliasi dapat terdiri dari konsiliator tunggal atau berjumlah ganjil sesuai kesepakatan, maka komisi konsiliasi terdiri dari tiga konsiliator. Masing-masing pihak menunjuk satu orang, sedangkan yang ketiga sekaligus menjadi Ketua Komisi ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak.

Tugas komisi konsiliasi lebih mengutamakan untuk menjernihkan permasalahan (clarify) dan mengusahakan agar tercapai antara pihak yang bersengketa. Apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan, komisi membuat laporan bahwa telah terjadi kesepakatan, tetapi apabila komisi menganggap tidak mungkin tercapai kesepakatan maka komisi harus menghentikan persidangan.

2. Arbitrase

Kata Arbitrase berasal dari bahasa latin “arbitrase” yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan (*ex aequo et bono*). Bila dihubungkannya artikel arbitrase dengan kebijaksanaan ini dapat menimbulkan salah pengertian, karena timbul kesan bahwa penyelesaian sengketa tidak berdasarkan norma-norma hukum dan mengandalkan keputusan hanya kepada kebijaksanaan saja. Tetapi hal ini tidak benar karena arbitrase juga menerapkan hukum sebagaimana hakim dipengadilan.

Menurut Frank Elkouri dan Edna Elkouri, yang dimaksud dengan arbitrase adalah :⁴⁶

“A Simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge if their own mutual selection, whosw decision based in the merits of the case, they agreed in advance to accept final and binding”.

Dalam hal ini perlu diperhatikan tentang peristilahan yang digunakan untuk hakim arbitrase yaitu pihak yang tidak memihak yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mendengar keterangan (bukti, saksi dan lain-lain) memberi putusan.

Dalam kata hakim arbitrase masih terdapat dualisme istilah yang dipakai. Ada sebagian penulis yang memakai *arbiter* dan ada sebagian lagi memakai *arbitor*. Kedua isitilah ini sama mengandung pengertian yang mengarah kepada hakim dalam forum arbitrase. Istilah kata arbitrase dipakai untuk menyelesaikan atau memperbaiki syarat-syarat yang tidak terselesaikan dalam suatu kontrak.⁴⁷ Sedangkan istilah kata arbiter tidak hanya mengandung pengertian

⁴⁶. Frank Elkouri dan Edna Elkouri, *Arbitration works*, Washington DC, 1974 dalam R. Soebekti, *Abitrasi Perdagangan Bina Cipta Bandung*, 1981, hal. 1.

⁴⁷. Rene David, *Arbitration in International Trade Netherlands*, Kluwer, 1985, hal. 102-103.

arbiter tetapi juga dipakai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum. Tetapi kata yang paling tepat untuk dijadikan batasan dari kedua istilah tersebut dan yang bisa memenuhi tujuan dan misi hakim arbitrase adalah arbitrator.

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa internasional yang tertua dan prakteknya telah ada pada zaman Yunani kuno dan berkembang pula pada zaman keemasan Romawi dan Yahudi serta terus berkembang terutama di negara-negara dagang di Eropa. Seperti Inggris, dan Belanda.⁴⁸ Bahkan sekarang ini setiap negara telah mempunyai badan arbitrasenya yang bersifat nasional sebagai pusat arbitrase nasional dinegaranya.

Pada mulanya badan arbitrase ini hanya dimiliki oleh negara-negara maju, tetapi sekarang ini karena kemajuan dan perkembangan perekonomian internasional, banyak negara berkembang termasuk Indonesia telah mempunyai badan arbitrase sendiri. Di Indonesia terdapatnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi wilayah Republik Indonesia.

Badan arbitrase dianggap lebih menguntungkan dalam penyelesaian sengketa komersial termasuk sengketa penanaman modal. Diantaranya keuntungan menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yaitu :

1. Para pihak secara langsung dapat menentukan komposisi mahkamah arbitrase, sehingga dapat mengetahui bahwa mahkamah yang menangani sengketa tersebut adalah orang-orang yang ahli dalam bidang yang sedang dipersengketakan.

⁴⁸. Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal. 33.

2. Dalam pemeriksaan maupun putusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan dengan pintu tertutup, maka rahasia para pihak yang bersengketa akan tersimpan baik-baik dan tidak diketahui oleh umum. Sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang tertutup kecuali kalau para pihak mengizinkan diucapkan putusan dalam sidang dengan pintu terbuka.

6. Pengertian Kebijakan Penanaman Modal Asing

6.1. Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal Asing

Bertitik tolak pada Rencana Strategis (Renstra) BKPM tahun 2001-2004 yang merupakan upaya untuk meningkatkan arus investasi, dibutuhkan penajaman visi dan misi yang jelas bagi BKPM sebagai lembaga sentral yang menangani investasi. Bahwa investasi merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bahwa visi BKPM adalah terwujudnya peningkatan investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berbasis pada sumber daya nasional serta mendukung sistem ekonomi kerakyatan. Sedangkan misi BKPM adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Mewujudkan kegiatan penanaman modal yang lebih adil, merata dan berwawasan lingkungan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya daerah.
2. Mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif dan stabil untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan.

⁴⁹. Pusat Penelitian dan Pelatihan BKPM, *Materi Pelatihan Pelayanan Penanaman Modal, Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal*, (Selanjutnya Bagian I), Jakarta, 2002, hal. 3.

3. Memberdayakan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi terutama pengusaha kecil, menengah serta koperasi (PKMK), melalui peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
4. Mewujudkan supremasi hukum yang menjamin tegaknya kepastian hukum bagi bidang penanaman modal.
5. Mewujudkan otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah.
6. Mewujudkan hubungan antar lembaga dan kerjasama internasional yang mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka meningkatkan penanaman modal yang didukung kegiatan promosi yang proaktif.
7. Mewujudkan aparatur penanaman modal yang profesional.

Dalam kegiatan penanaman modal, fungsi-fungsi manajemen tetap diperlukan terutama dalam rangka mengembangkan kegiatan penanaman modal. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut akan dapat ditetapkan kriteria tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada jangka waktu tertentu serta upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaiannya. Proses penetapan kriteria tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian sasaran inilah yang disebut dengan perencanaan.

Perencanaan penanaman modal menjadi hal yang sangat penting, karena kegiatan ini merupakan langkah awal dari keseluruhan kegiatan dibidang penanaman modal, yang sangat menentukan masa depan perekonomian nasional, bahwa kegiatan tersebut mempunyai peran yang sangat strategis dan krusial dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa, oleh karena itu agar kegiatan penanaman modal dapat tepat sasaran diperlukan kegiatan perencanaan penanaman modal.

Untuk mencapai sasaran maupun target dari perencanaan yang telah ditetapkan diperlukan penetapan strategi pendukungnya yang mana dalam perencanaan penanaman modal strategis ini lebih dikenal dengan strategi kebijakan terutama untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif bagi kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan baik di negara-negara maupun di daerah-daerah.

Bahwa perencanaan merupakan suatu proses kreatifitas dan motivasi untuk menetapkan sasaran-sasaran pada masa yang akan datang berdasarkan hasil analisis dan peninjauan masa lalu dan sekarang dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan yang telah dan mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu kebijakan dan perekonomian penanaman modal asing maupun penanaman modal asing maupun penanaman modal daerah perlu dilakukan oleh pemerintah dalam membangun perekonomian nasional maupun perekonomian daerah dengan memperhatikan kebijakan nasional dibidang penanaman modal khususnya dan kebijakan pembangunan nasional umumnya.

Pelaksanaan perencanaan penanaman modal secara nasional dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menangani penanaman modal atau BKPM dan bekerja sama dengan instansi teknis yang terkait dengan memperhatikan saran-saran dan usulan-usulan daerah. Yang mana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penanaman modal secara nasional mempunyai maksud dan tujuan yaitu :⁵⁰

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mempercepat pemulihan nasional melalui kegiatan penanaman modal.

^{50.} *Ibid*, hal. 2.

2. Meningkatkan peran usaha kecil dan menengah dalam perekonomian nasional sehingga menjadi pelaku ekonomi yang andal dan mandiri.
3. Menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja lebih luas lagi.
4. Mempercepat pemerataan kegiatan ekonomi keseluruhan wilayah nusantara khususnya KTI.
5. Penghematan dan peningkatan penerimaan devisa.
6. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan investasi yang semakin bergairah. Kegiatan investasi yang dimaksud disini adalah yang berkorelasi dengan investasi langsung atau *Foreign Direct Investment / FDI*, bukan dalam bentuk investasi tidak langsung atau *portfolio*.

6.2. Mekanisme Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal Asing

Dalam mengantisipasi era globalisasi dan upaya mempercepat pemulihan ekonomi, dilakukan reformasi kebijakan dan perencanaan penanaman modal asing yang mana lebih banyak dilakukan reformasi kebijakan penanaman modal dari pada perencanaan penanaman modal seperti :⁵¹

1. Perumusan dan penetapan kebijakan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal atau sering disebut kebijakan Daftar Negatif.

Investasi atau DNI. DNI dikeluarkan dengan keputusan Presiden atau terakhir keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000 jo No. 118 Tahun 2000, dimaksudkan untuk memberikan peluang yang lebih baik dalam negeri maupun asing dengan mengurangi bidang usaha yang tertutup mutlak bagi penanaman modal asing. Penyusunan kebijaksanaan ini

⁵¹. *Ibid*, hal. 4.

merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 masuk dalam kategori kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan secara makro dibidang penanaman modal. Kebijakan tentang bidang usaha yang tertutup bagi para investor dan calon investor dalam memilih bidang usaha yang diminati untuk kegiatan penanaman modalnya. Bahwa DNI dirumuskan dan ditetapkan melalui proses koordinasi dengan instansi sektoral yang terkait dengan menampung saran dan usulan dari pemerintah daerah dan akan selalu dievaluasi dan dilakukan pemutakhiran untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan lingkungan yang terjadi atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana kegiatan penanaman modal dilaksanakan.

2. Kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001 menggantikan Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998. Dikeluarkan kebijakan ini guna untuk mendukung usaha kecil dan menengah dengan mendukung usaha kecil dan menengah dengan mengatur alokasi bidang-bidang usahanya. Perumusan dan penetapan bidang-bidang usaha yang wajib dimitrakan dengan pengusaha kecil atau koperasi, jika dilakukan oleh pengusaha besar dan menengah. Dalam perumusan dan penetapan bidang-bidang usaha ini juga tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena masuk dalam kategori penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro yang mana perumusan kebijakan ini ditetapkan berdasarkan koordinasi BKPM dengan instansi teknis terkait dengan memperhatikan usulan maupun saran-saran pemerintah daerah.

Bahwa kebijakan yang dimaksud adalah untuk memberikan ruang dan peluang kepada pengusaha kecil dan koperasi untuk mengembangkan kreasi dalam bisnis dan usahanya secara mandiri terlepas dari campur tangan dan persaingan pengusaha besar dan menengah serta memberikan peluang kepada pengusaha kecil dan koperasi untuk berkembang secara nyata bersama-sama dengan pengusaha besar dan menengah melalui kerja sama saling menguntungkan dan saling memperkuat dalam bentuk kemitraan usaha.

6.3. Strategis Kebijakan Peningkatan Investasi

Menyadari bahwa kemampuan penanaman modal domestik saat ini tengah kehilangan kekuatannya. Sedangkan di lain pihak negara sangat memerlukan penanaman modal lebih mengarah kepada bagaimana dapat menarik PMA. Hal tersebut menjadi lebih penting didorong oleh situasi persaingan yang semakin ketat antar negara-negara dalam memperebutkan arus investasi global. Oleh karena itu pemerintah menetapkan pokok-pokok kebijakan di bidang investasi atau penanaman modal. Salah satu diantaranya adalah *Investment Policy Statement*.

Sebagai acuan penyusunan kebijaksanaan investasi atau penanaman modal pemerintah pada tanggal 11 September 2001 telah mengumumkan *Investment Policy Statement* (IPS) atau pernyataan kebijakan Investasi pada dasarnya IPS ini mengisyaratkan bahwa kebijakan investasi ke depan sejauh mungkin akan mengadopsi prinsip-prinsip investasi yang telah disepakati dalam kerangka kerjasama APEC

(APEC Non Binding Investment Principles) dan WTO (Trade Related Investment Measures/TRIMS) diantaranya adalah:⁵²

1. Undang-Undang Penanaman Modal, Pemerintah menyiapkan Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatukan dan menyempurnakan UU PMDN dan UU PMA serta meregulasi ketentuan Investasi pada seluruh sektor.

Undang-Undang baru ini antara lain akan berorientasi pasar dan menerapkan jaminan-jaminan yang mendasar seperti perlakuan sama antara PMA dan PMDN apabila dimungkinkan, serta proteksi atas pengambil alihan investasi. Adanya hak untuk melakukan repatriasi atas modal dalam valuta asing beserta keuntungannya. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal akan di sederhanakan dan disempurnakan meliputi pengurangan bidang usaha yang tercantum dalam DNI serta pengurangan hambatan investasi didalam negeri.

2. *Freedom to Invest*. Pada dasarnya perusahaan dapat melakukan investasi disetiap sektor ekonomi kecuali apabila kegiatan tersebut tercantum dalam daftar negatif investasi. Tidak ada batasan-batasan jumlah investasi, asal modal ataupun tujuan ekspor. Investor asing yang sudah ada boleh melakukan perluasan atau diversifikasi bidang usaha kecuali bidang usaha tersebut tercantum dalam DNI.

⁵². Direktur Deregulasi Penanaman Modal, *Kebijaksanaan Penanaman Modal Mendukung Penerapan Otonomi Daerah, Makalah Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat*, BKPM, Padang, 2002. hal. 3.

3. *Company Formation*, persetujuan dan perizinan penanaman modal yang diberikan kepada perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, sederhana, cepat serta melalui mekanisme dan prosedur yang transparan.
4. *Taxes and Duties*, yaitu pemerintah sepakat untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan daya saing internasional dengan mengurangi dan menyederhanakan peraturan perpajakan dan kepastian dalam rangka pelaksanaan program reformasi kebijakan di bidang perpajakan dan perdagangan.
5. *Availability of Foreign Exchange*, Pemerintah tetap menjamin bahwa sesuai dengan kriteria dan prosedur tertentu, mata uang asing untuk transaksi impor dan untuk membayar deviden tersedia dengan bebas dan pemerintah sepakat pula untuk mempermudah repatriasi modal serta pelaksanaan pembayaran transaksi bisnis.
6. *Access to local funding*, pemerintah apabila memungkinkan dapat memberikan akses penanaman modal dalam negeri kepada perusahaan asing.
7. *Labour Practices*, berdasarkan Undang-Undang perburuhan Indonesia pada dasarnya perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu sepanjang jabatan itu belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
8. *Investment Services*, Pemerintah menjamin bahwa pelayanan perizinan dalam era otonomi daerah tidak akan lebih buruk dibanding sebelumnya, oleh karena itu pemerintah mendorong agar sistem pelayanan satu atap diterapkan di daerah.

9. *Investment Protection*, Pemerintah tetap terikat dengan perjanjian IGA yang telah dibuat dan MIGA untuk melindungi aset-aset investasi.
10. *Double Taxation Avoidance* atau Penghindaran Pajak Berganda, dalam rangka meningkatkan hubungan dagang dan ekonomi dengan negara-negara lainnya. Indonesia dalam waktu dekat akan menetapkan ketentuan tentang hak-hak perpajakan pengaturan tersebut bertujuan untuk peningkatan tercapainya kepatuhan hukum, penghindaran pajak berganda dan perlindungan atas usaha pengampunan pajak. Dalam kerangka kerja dan substansi dari perjanjian ini didasarkan oleh konvensi Internasional dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan juga peraturan perpajakan yang berlaku di masing-masing negara.
11. *Arbitration*, Pemerintah menyadari tentang diperlukannya suatu forum yang sesuai untuk penyelesaian sengketa. Dalam kasus-kasus tertentu investor dapat melakukan *extra judicial adjudication* dan memilih forum yang sesuai termasuk lembaga arbitrase nasional atau internasional.

Selain *Investment Policy Statement*, strategi kebijakan peningkatan investasi dalam rangka PMA dapat ditentukan oleh arah kebijakan investasi yang ditetapkan pemerintah dalam pokok-pokok kebijakan di bidang PMA dalam menentukan arah kebijakan investasi tersebut mengacu kepada IPS yang telah diumumkan pemerintah yang mana kebijakan investasi atau penanaman modal kedepan akan mengarah pada, yaitu :⁵³

1. Lebih memperlonggar ketentuan/persyaratan penanaman modal yang ada bukan malah menjadikannya lebih restriktif.

⁵³. *Ibid*, hal. 5.

2. Meningkatkan transparansi dan kepastian hukum.
3. Menghapus/meniadakan perbedaan perlakuan antara investor asing atau investor nasional.
4. Lebih menyederhanakan berbagai prosedur perizinan dan pelaporan dan sekaligus menetapkan "Pelayanan satu Pintu" atau *one Stop Service*.
5. Memberikan perlindungan atau jaminan investasi.
6. menghapus segala ketentuan yang menghambat investasi.
7. Meningkatkan kembali sistem insentif penanaman modal termasuk insentif fiskal.

Bahwa arah kebijaksanaan investasi atau penanaman modal ini sejalan dengan jiwa rancangan Undang-Undang penanaman modal yang saat ini tengah disiapkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah dan Kebijakan Penanaman Modal Asing di Daerah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dari sudut terminologi, otonomi daerah berasal dari dua kata, "otonomi" dan "daerah". Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* atau *autonomia*, *auto* = sendiri dan *nomos* = Undang-Undang atau peraturan, yang dapat diartikan sebagai perundang-undang sendiri atau keputusan sendiri (*self ruling*). Disamping pengertian perundang-undang sendiri atau *zelfbestuur*, bahasa Belanda. Maka dengan dilihat dari sudut bahasa otonomi daerah berarti kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya.

Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*.

Secara terperinci otonomi dapat mengandung beberapa pengertian adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar
2. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self government*) yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government, self determination*).
3. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
4. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*).
5. Pemerintahan otonomi memiliki supremasi / dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*reele*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

⁵⁴. Sidik Jatmika, *Op cit*, hal. 1.

Dalam rangka menyongsong dilakukannya otonomi daerah maka pemerintah mengeluarkan UU no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang tersebut adalah :

“Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁵⁵

Pengertian otonomi daerah mengandung pemahaman bahwa otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan seluruh masyarakat didaerahnya. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengurus sendiri kepentingannya harus melibatkan sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberdayakan sumber perekonomian didaerahnya secara mandiri dan optimal. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah kemandirian pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi politik (demokrasi) rasa keadilan masyarakat dan pemerataan serta dapat terpeliharanya hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶

^{55.} Pasal 1 huruf h UU No. 22 Tahun 1999.

^{56.} Penjelasan Umum Angka 1 huruf h, UU No. 22 tahun 1999.

Bahwa otonomi daerah yang telah dikenal sejak 50-an tahun yang lalu pada era sekarang ini telah menjanjikan perubahan distribusi kekuasaan secara vertikal dan horizontal demi mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam membangun dirinya. Sekaligus juga telah menjadi sumber ancaman dan momok bagi kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya terusik. Tapi secara sosiologi gejala ini merupakan gejala yang alami, sebab setiap perubahan cenderung memancing intervensi kekuatan-kekuatan pendorong ke arah perubahan dan ada juga kekuatan-kekuatan yang berusaha menghalangi terjadinya perubahan tersebut.

Perubahan yang paling jelas terjadi pada pelaksanaan otonomi daerah, karena kedudukan DPRD tidak lagi menjadi bagian pemerintah daerah, tapi sebagai badan legislatif daerah, hal ini berarti bahwa peluang untuk menciptakan demokrasi di daerah terbuka lebar. Kepentingan masyarakat setempat dapat lebih terwadahi dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal serta campur tangan pusat sudah banyak dikurangi, sehingga daerah lebih mandiri.

Apalagi otonomi daerah menyebabkan setiap daerah harus dapat membiayai dirinya. Karena dana dari pusat terbatas sekali untuk itu harus meningkatkan pendapat asli daerah (PAD)-nya yang akhirnya membebani masyarakat dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta akan merugikan masyarakat jika penggunaan dana tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Bahwa pelaksanaan otonomi daerah ternyata cenderung memindahkan korupsi dari pusat ke daerah dan menciptakan raja-raja kecil di daerah. Hal ini dimungkinkan terjadi karena kewenangan DPRD yang besar tidak digunakan

untuk kepentingan rakyat melainkan untuk diri sendiri dan praktek *money politics* bukan lagi rahasia, sehingga pertanggung jawaban Kedudukan Kepala Daerah (KDH) seringkali lolos dengan mulus dihadapan DPRD serta perilaku aji mumpung di kalangan anggota DPRD dilatar belakangi oleh rasa kurang percaya diri, akibatnya fungsi kontrol tidak berjalan dan *clean governance* di daerah sulit terwujud.

Pelaksanaan otonomi daerah juga cenderung menciptakan egoisme daerah yang tinggi dan cenderung melupakan kerangka yang lebih besar yaitu negara kesatuan yang wujudnya adalah pemerintah pusat, campur tangan pusat di daerah memang harus dibatasi tapi bukannya dihilangkan sama sekali, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengikuti peraturan yang berlaku, tetapi apabila tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan otonomi daerah maka disintegrasi akan menjadi ancaman terutama di saat pemerintah pusat lemah.⁵⁷

Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah jangan sampai merugikan masyarakat setempat dan jangan dengan adanya pelaksanaan otonomi rakyat jadi dibebani pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi serta jangan pula dengan otonomi daerah rakyat terlalu banyak diatur kehidupan kemasyarakatannya, sehingga rakyat di daerah kehilangan prakarsa dan inisiatifnya. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka dalam pelaksanaannya diperlukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang baik.

⁵⁷. Nurul Aini, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Demokratisasi Pemerintah Daerah*. Seminar Dalam Rangka Loka Karya (Workshop), kerjasama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan partnership for government in Indonesia dan UNDIP, Semarang, 2002, hal. 24.

Sejak diberlakukan UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mulai efektif 1 Januari 2001 memang membawa angin surga dan membawa berkah yang mengajukan bagi berbagai kelompok dalam masyarakat dan dalam pelaksanaan pemerintah daerah di Republik ini yang mana Undang-Undang tersebut diharapkan mampu memacu daerah-daerah untuk menggali potensi daerahnya masing-masing dan mampu memberdayakan masyarakatnya. Namun dalam pelaksanaan Undang-Undang ini menimbulkan masalah dan kendala.

Beberapa permasalahannya baru berkaitan dengan dilaksanakannya Undang-Undang tersebut. Konsekwensi baik bersifat administratif, politis maupun permasalahan yang berhubungan dengan upaya-upaya penguatan otonomi daerah tetapi juga telah melahirkan pertentangan dan konflik horizontal pada tingkat daerah, beberapa hal yang mengemukakan, yaitu:⁵⁸

1. Memperkuat dimensi kultural dan primordial di setiap daerah dalam implementasi otonomi daerah.
2. Meningkatkan eskalasi politik yang sangat berlebihan dari anggota-anggota DPRD sebagai hasil reformasi politik yang pada akhirnya berdampak pada gangguan kinerja pemerintah baru.
3. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia potensial yang tersedia di daerah untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan kepada daerah.
4. Membengkaknya struktur organisasi dan perangkat di daerah sebagai konsekwensi pengalihan perangkat dekosentrasi Kanwil dan Kandip kepada Dinas Daerah, yang menyebabkan meningkatnya organisasi tanpa fungsi.

⁵⁸. Irham Badrussaman, *Paradigma Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Persepektif Kekinian*, Seminar Bersama Bidang Ilmu Hukum, Kerjasama Fakultas Hukum Eka Sakti dengan APTISI Wilayah, Padang, 2002, hal. 64.

5. Dalam pelaksanaan otonomi daerah belum lengkap keseluruhan peraturan pemerintah yang dikehendaki oleh UU tersebut.
6. Meningkatnya beban pajak dan retribusi kepada masyarakat yang diakibatkan oleh pengerahan kompetisi oleh pemerintah pusat yang tidak diiringi dengan pertimbangan dan pembiayaan keuangan yang layak.

Bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang kini sedang berjalan pada hakekatnya berupaya untuk memberdayakan kemampuan masyarakat di daerah dalam segala aspek kehidupan yang mana usaha kearah itu bisa dicapai dengan baik jika pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan. Maka penerapan otonomi daerah merupakan salah satu sarana untuk melakukan demokratisasi dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada daerah. Dalam proses pembangunan ke depan akan lebih banyak dibutuhkan inisiatif dan peran dari masyarakat, yang mana untuk ini sangat besar diberikan oleh hukum dasar negara Indonesia.

Mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari hubungan penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks bentuk negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik. Ketentuan dasar hukum ini memberikan pesan bahwa Republik Indonesia dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (*Unitary*) dan bukan berbentuk Federasi (*serikat*). Dengan demikian adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang harus dilakukan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan.

Ketentuan hukum yang mengatur masalah otonomi daerah dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur organisasi negara Republik Indonesia baik sebelum dilakukan amandemen maupun sesudah amandemen, terdapat pada Pasal 18 UUD 1945 atau Pasal 18 ayat 1 sampai 7, 18A ayat 1,2 dan Pasal 18 ayat 1,2 sesudah amandemen. Sebagai konsekuensi atas pemahaman Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 maka dalam Pasal 18 UUD 1945 dirumuskan dengan judul babnya "Pemerintah Daerah" yang isin pasalnya adalah :

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Selanjutnya didalam salah satu isi penjelasan pasal di katakan :

"Daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka".

Sedangkan dibagian lain dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan :

"Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil".

Yang pada prinsipnya membagi negara kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil yang disebut sebagai daerah Propinsi, Kabupaten dan kota, dimana Pemerintahan Daerah tersebut diberi kekuasaan menjalankan otonomi daerah tersebut diberi kekuasaan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Dalam Pasal 18 UUD 1945 sesudah amandemen menyebutkan :

"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diakui dalam Undang-Undang".

Oleh karena itu UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. sedangkan dalam sejarah otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat atau hirarki dan sebagaimana tercermin dalam sebutan Daerah Tingkat I, II dan III.

Selain UUD 1945 dasar hukum otonomi daerah, juga diatur dalam beberapa perundang-undangan daerah yang dapat dilihat pada perkembangan sejarah pelaksanaan otonomi daerah sejak awal Republik Indonesia didirikan diantaranya :

Undang-Undang No.1 Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Undang-Undang No. 10 Tahun 1964, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan terakhir Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Apabila dilihat dari semua peraturan desentralisasi yang pernah berlaku di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah merupakan Undang-Undang yang paling kental muansa sentralisasinya, dapat dilihat dengan diciptakannya posisi penguasa tunggal pada setiap tingkat Kepala Pemerintahan dan besarnya porsi dekonsentrasi dibandingkan desentralisasi serta kuatnya pengawasan atau kontrol dari pusat dan menunjukkan adanya otonomi pura-pura atau otonomi semu (*Pseudo Otonomi*) bahkan otonomi daerah tidak ada sama sekali.⁵⁹

⁵⁹. Tri Ratnawati, *Desentralisasi dan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Dalam Jurnal Otonomi*, Vol. 1, 2000, hal. 23.

Melalui tuntutan demokrasi ada beberapa daerah yang merasa kecewa selama pemerintah orde baru karena tidak mempunyai kesempatan untuk menuntut hak dan kewajibannya secara penuh. Maka dengan adanya otonomi daerah tersebut masyarakat di daerah bersangkutan menuntut pelaksanaan otonomi seluas-luasnya atau mengatakan selamat berpisah (*good by republik*). Walaupun memakai etika demokrasi yaitu referendum seperti masyarakat Timor-Timur, Aceh dan Irian Jaya.⁶⁰

Pelaksanaan Pemerintah daerah sebaiknya dilaksanakan melalui prinsip-prinsip otonomi daerah yang sesuai dengan UUD 1945, apalagi semangat reformasi yang berkembang dalam masyarakat dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola kegiatan-kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing dan ruang gerak otonomi daerah harus diikuti dengan realisasi perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999.

Bila dilihat pada UU No. 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah jauh lebih baik dan unggul dibandingkan dengan UU No. 5 tahun 1974 yang mana perubahan Undang-Undang tersebut merupakan suatu perubahan yang mendasar, bahwa UU no 5 tahun 1974 yang mengatur dalam otonomi daerah adalah rumah tangganya. Maka UU no. 22 tahun 1999 yang diatur dan diurus adalah kepentingan masyarakat bukan hanya mengatur tetapi mengurus sedangkan kebaikan dan keunggulan lainnya adalah :⁶¹

1. Sistem Pemerintah Daerah Indonesia menurut UU No. 22 Tahun 1999 tetap pada dua tingkat, namun tidak lagi bersifat hirarki dalam arti Pemerintahan Tingkat II (Kabupaten dan Kota) tidak lagi merupakan subordinasi dari

⁶⁰. Evianda Ibrahim, *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum*, Seminar Bersama Dibidang Ilmu Hukum Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Ekasakti dengan APTISI, Padang, 2002, hal. 6.

⁶¹. *Ibid*, hal. 7.

Pemerintahan Tingkat I (Propinsi) terjemahannya adalah Gubernur bukan lagi membawahi Bupati atau Walikota, Bupati atau Walikota tidak lagi terikat secara struktural dengan Gubernur bahkan dengan Menteri Dalam Negeri.

2. Pemda Kabupaten dan Kota dapat melakukan apa saja yang dilakukan Pemerintah Pusat (*Reside Power* /Kewenangan Pusat).
3. Pemerintah Pusat tidak bisa lagi melakukan intervensi kepada Pemerintah di daerah, termasuk pengangkatan Kepala Daerah.
4. Kewenangan membuat Perda di daerah dilakukan sendiri bersama DPRD tanpa diperlukan persetujuan Mendagri atau Gubernur.

Walaupun dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut memberikan implikasi yang cukup jauh terhadap ruang gerak daerah-daerah kota dan Kabupaten, namun dengan besarnya ruang gerak tersebut lebih dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah juga menimbulkan dampak negatif dan kendala-kendalanya atau kekurangan terhadap Undang-Undang tersebut diantaranya adalah :

1. Masih kurangnya pemahaman terhadap konsep desentralisasi itu sendiri, sehingga muncul kecenderungan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah.
2. Kesiapan daerah terutama untuk membiayai dirinya sendiri.
3. Kesiapan sumber daya manusia dan birokrasi di daerah dalam membuat perencanaan juga merupakan persoalan yang banyak dihadapi oleh daerah-daerah otonomi.
4. Belum tegasnya kewenangan antara propinsi dan daerah.

Berbagai kekurangan tersebut diharapkan tidak akan menjadi penghalang bagi pelaksanaan otonomi daerah dan harus diingat bahwa hakekat otonomi daerah adalah “Daerah membangun” bukan “Pembangunan Daerah”. Jadi dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan terhadap masyarakat lebih dapat meningkat dan masyarakat akan lebih berdaya sehingga kontrol masyarakat terhadap birokrasi Pemerintah (di daerah) juga akan lebih nyata dan berbagai penyalahgunaan kekuasaan segera dapat dicegah oleh masyarakat serta jangan daerah sampai membuat berbagai aturan sendiri yang tidak sejalan dengan standar nasional.

2. Urgensi Otonomi Daerah

Keberadaan otonomi merupakan suatu spektrum yang luas bahwa hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain. Yang mana keperluan akan otonomi bukan hanya sebatas pada Pemerintah daerah saja, tetapi juga Pemerintahan Negara. Karena keperluan adanya otonomi dalam suatu negara dilatar belakangi oleh pengalaman masa lalu, dimana keberadaan negara hanya dianggap sebagai instrumen belaka dari kaum kapitalis, maka kondisi ini melahirkan konsepsi *Marx* tentang *Instrumental State*. Sedangkan negara-negara sosialis menghendaki adanya otonomi dari pengaruh partai-partai politik atau partai komunis yang cenderung mengintervensi kehidupan negara, maka negara menghendaki otonomi untuk memperkecil dan bahkan menghilangkan pengaruh-pengaruh maupun intervensi kaum kapitalis dan sosialis.

Pada negara kesatuan (unitarisme) keperluan otonomi dalam Pemerintah Lokal untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang pada hakikatnya untuk memperkecil intervensi Pemerintah Pusat dalam urusan rumah tangga daerah, otonomi daerah diberikan Pemerintah Pusat (*Central Government*) sedangkan Pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari Pemerintah Pusat. Bagi negara Federal, otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian, sehingga urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan, kecenderungan kewenangan yang besar berada di *Central Government*, sedangkan dalam negara federal kecenderungan kewenangan yang besar berada pada *local government*. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah (*local government*) dalam negara kesatuan seperti Indonesia lebih banyak menggantungkan otonominya pada *political will* pemerintah pusat yaitu sampai sejauh mana pemerintah pusat mempunyai niat baik untuk memberdayakan *local government* melalui pemberian wewenang yang lebih besar.⁶²

Dalam hubungan ini dikenal adanya otonomi daerah yang terbatas dan otonomi tersebut hanya dibedakan oleh kewenangan yang dimiliki, yang mana otonomi daerah terbatas hanya memiliki kewenangan yang relatif kecil, sedangkan daerah yang memiliki otonomi luas memiliki kewenangan yang besar. Indonesia pernah melaksanakan kedua bentuk otonomi tersebut. Pada

⁶². Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1999, hal 32.

masa UU No. 18 Tahun 1965 yang menganut otonomi daerah yang luas, karena pertimbangan politis tertentu, yaitu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan masa UU No. 5 Tahun 1974, otonomi luas dicabut dan diganti dengan otonomi terbatas.

Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dalam konteks Pemerintah Daerah tetap terbagi atas dua ruang lingkup, bukan tingkatan yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh berarti tidak adanya operasi Pemerintah Pusat di Daerah Kabupaten dan Kota, kecuali untuk bidang-bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis-nasional. Sedangkan untuk propinsi diberi otonomi terbatas berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di daerah propinsi. Inilah alasan mengapa Gubernur Propinsi selain berstatus Kepala Daerah Otonomi juga sebagai wakil Pemerintah Pusat. Karena sistem otonomi tidak bertingkat atau tidak ada hubungan hirarki antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, tetapi hubungan propinsi dan kabupaten dan kota bersifat kordinatif, pembinaan dan pengawasan.

Untuk itu keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, kewenangan tersebut didesentralisasikan ke daerah, artinya pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka dan jika terjadi konflik antar daerah dan masalah lain yang belum sepenuhnya selesai maka pemerintah daerah dengan berbagai produk perundangannya dipandang Urgen untuk menstabilkan suasana yang rumit ini, sebab jangkauan serta kemampuan Pemerintah Pusat juga merupakan salah satu alasan Urgennya Pemerintah Daerah.

Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang mana peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak membenci daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari Pemerintah pusat dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari Pemerintah daerah.

Berdasarkan pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah yang tercermin dalam kesamaan pendapat dan kesepakatan *The founding fathers* tentang perlunya desentralisasi dan otonomi daerah di tegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi aspek sebagai berikut :⁶³

1. Dari segi politik adalah untuk mengikut sertakan menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi dilapisan bawah.

⁶³. *Ibid*, hal. 36.

2. Dari segi manajemen Pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
3. Dari segi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian Pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
4. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dengan hadirnya satuan Pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah negara kesatuan Indonesia yaitu Pemerintah daerah, yang didalamnya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dapat dikemukakan dengan beberapa alasan yaitu : ⁶⁴

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern yang lebih menekankan pada upaya memajukan kesejahteraan umum atau *welfare state*. Peran demikian membawa konsekwensi pada semakin luasnya campur tangan negara dalam mengatur dan mengurus aktivitas warga negara demi pencapaian tujuan negara. Fakta mengemukakan (heterogenitas) masyarakat Indonesia, baik dari segi tradisional, suku, golongan agama, membawa konsekwensi kepada kompleksnya persoalan-persoalan kemasyarakatan

⁶⁴. Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 13.

yang harus dipecahkan oleh negara. Kenyataan ini mendorong negara ikut memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya yaitu dengan memberikan kesempatan kepada satuan pemerintahan teritorial terdekat dengan rakyat yaitu Pemerintah Daerah (*local government*) untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Daerah itu diberikan kewenangan-kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus aktivitas Pemerintah dan pembangunan di wilayahnya.

2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi kekuasaan, yang didalamnya terdapat lingkungan-lingkungan kekuasaan, baik pada tingkat supra struktural maupun infra struktural, cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk menghindari hal itu, diperlukan pemencaran kekuasaan (*dispersed of power*) pemencaran kekuasaan negara dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dilakukan dengan membentuk satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dan dekat dengan rakyat. Satuan teritorial tersebut dikenal dengan sebutan daerah-daerah besar dan kecil, sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 UUD 1945 dan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dikenal dengan sebutan daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum atau *welfare state*.

3. Sistem Otonomi

3.1. Sistem Otonomi Materiil

Mengenai sistem otonomi para ahli menggunakan istilah lain untuk maksud yang sama bagi penyebutan dan pengertian sistem otonomi, ada para ahli yang menggunakan dua istilah sekaligus, yakni (*begrip*) dan ajaran (*leer*) dan ada pula yang menggunakan berbagai istilah untuk maksud yang sama yaitu sistem paham dan pengertian. Dengan keanekaragaman istilah sistem otonomi dipergunakan untuk maksud yang sama dan sapat digunakan untuk keperluan acuan pengertian dari sistem otonomi yakni pedoman tentang cara penentuan batas-batas urusan rumah tangga daerah.

Dalam pengertian sistem otonomi materiil atau rumah tangga materiil/substantif (*materiele huishoudingsbegrip*), antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang diperinci dengan tegas apa saja yang yang berhak diatur dan diurusnya yang artinya otonomi daerah itu hanya meliputi tugas-tugas yang telah ditentukan satu persatu, jadi bersifat definitif dan dapat diartikan pula apa yang tidak tercantum dalam Undang-Undang pembentukan daerah, tidak termasuk urusan Pemerintah Daerah otonomi, melainkan urusan Pemerintah Pusat.

3.2. Sistem Otonomi Formil

Sistem otonomi secara formil atau rumah tangga formil (*formeel huishoudingsbegrip*) adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif, artinya tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan oleh daerah-

daerah otonom. Dapat juga diartikan apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pada prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom.

Dengan demikian daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya, sepanjang tidak memasuki urusan pemerintah pusat. Di mana pemerintah pusat lebih dulu menetapkan urusan-urusan yang dipandang lebih layak diurus pusat, setelah itu baru diserahkan kepada pemerintah daerah. Penetapan sejumlah urusan untuk ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah tersebut, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang diatur oleh pemerintah pusat.

Dalam sistim otonomi formil tidak terdapat perbedaan sifat materi yang diurus oleh daerah-daerah sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil dan negara sebagai masyarakat hukum yang lebih besar, tetapi perbedaan tugas diadakan secara formil dengan membuat bentuk-bentuk peraturan tertentu dan dalam sistem tersebut tidaklah secara apriori ditetapkan apa yang termasuk rumah tangga daerah otonom yang mana tugas dari daerah otonom secara normatif tidak terperinci didalam Undang-Undang pembentukannya, melainkan ditentukan dalam suatu rumusan yang umum saja. Bahwa rumusan umum itu hanya mengandung asas-asas saja, sedangkan pengaturan yang lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Batasnya tidak ditentukan secara pasti, tetapi bergantung dari keadaan, waktu dan tempat.⁶⁵

⁶⁵. Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Op cit.* hal. 17.

Pembatasan otonomi menurut sistem formil adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau bertitik tolak pada pengaturan yang telah dibuat oleh pemerintahan di atasnya (berdasarkan *Rangorde Regeling*). Sistem otonomi formil tidak selalu menjadi pendorong bagi daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah. Ada beberapa hal yang dapat menjadi kendala terhadap hal tersebut adalah :⁶⁶

1. Tingkat hasil guna dan daya guna sistem otonomi formil sangat bergantung pada kreativitas dan aktivitas daerah otonom.

Daerah harus mampu melihat urusan yang menurut pertimbangan mereka penting bagi daerah wajar, tepat diatur dan diurus oleh daerah. bagi daerah-daerah yang kurang mampu memanfaatkan peluang dalam kenyataannya akan banyak bergantung kepada pusat atau daerah-daerah tingkat atasnya.

2. Keterbatasan dalam hal keuangan daerah.

Meskipun mempunyai peluang yang luas untuk mengembangkan urusan rumah tangga daerah. Hal ini tidak mungkin terlaksana tanpa ditopang oleh sumber keuangan yang memadai.

3. Kemungkinan terjadi persoalan yang bersifat teknis

Daerah tidak dapat secara mudah mengetahui urusan yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

⁶⁶. Bangir Manan, *Hubungan Antar Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 27.

3.3. Sistem Otonomi Riil

Sistem otonomi riil atau rumah tangga riil (*riële huishoudingsbegrip*) merupakan gabungan antara sistem otonomi materil dengan sistem otonomi formil. Dalam Undang-Undang pembentukan otonomi ini kepada pemerintah daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah sebagai wewenang lain secara bertahap dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan kata lain sistem otonomi riil pada prinsipnya penyerahan urusan atau kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil yang sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi. Hal ini berarti pula bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang-wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.

Pemberian tugas atau urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurusnya sendiri, tetapi apabila tugas yang telah menjadi wewenang daerah pada suatu ketika, bila dipandang perlu dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

Menurut Bangir Manan, sistem otonomi riil ini mempunyai ciri-ciri khas yang membedakannya dengan kedua sistem pokok otonomi (sistem otonomi materil dan sistem otonomi formil), yaitu :⁶⁷

1. Menurut urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom, memberikan kepastian mengenai urusan rumah tangga daerah. Hal semacam ini tidak mungkin terjadi pada sistem rumah tangga formil.
2. Disamping urusan-urusan rumah tangga yang ditetapkan secara “materil”, daerah-daerah dalam rumah tangga riil dapat mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang menurut pertimbangan adalah penting bagi daerahnya sepanjang belum diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atas.
3. Otonomi dalam rumah tangga riil didasarkan pada faktor-faktor nyata suatu daerah. Hal ini memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan-urusan rumah tangga daerah sesuai dengan keadaan masing-masing.

Menurut Josef Riwu Kaho, disamping ketiga sistem ini terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, maka pemerintah daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari pemerintah pusat.⁶⁸

4. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.1. Asas Desentralisasi

Seiring dengan lahirnya era reformasi yang melakukan koreksi dan perbaikan terhadap jalannya Pemerintah di era Orde Baru. Terjadinya reformasi dibidang pelaksanaan Pemerintah Daerah pada sistem

^{67.} *Ibid*, hal. 32.

^{68.} Josef Ruwu Kaho dalam Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 19.

penyelenggaraan Pemerintah yang mengalami perubahan paradigma dari sentralistik menjadi desentralisasi atau desentralisasi kebalikan dari sentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbangnyanya keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi keanekaragaman daerah yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999. dengan prinsip-prinsip tersebut paradigma baru ini tidak lagi menempatkan daerah dan rakyat daerah sebagai penonton dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerahnya, sebagaimana yang diatur oleh UU No. 5 tahun 1974, tetapi paradigma baru ini memberikan perubahan yang mendasar ditinjau dari aspek kewenangan, dimana pemberian kewenangan daerah otonomi yang seluas-luasnya sesuai dengan asas desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam *Encyclopedia of the social sciences* disebutkan bahwa *the proces of decentralization denotes the transference of authority legislative, judicial or administrative, from higher level of government to a lower*, artinya desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif atau administratif.

Pendapat lain mengenai definisi desentralisasi dikemukakan oleh Riggs bahwa desentralisasi mempunyai dua makna, yaitu sebagai pelimpahan wewenang atau *delegation* dan pengalihan kekuasaan atau *devolution*. *Delegation* mencakup penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasar kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada ditangan pusat, kadang-kadang disebut juga dekosentrasi. Sedangkan *devolution*, mempunyai makna yang berbeda, dimana seluruh tanggung jawab untuk kegiatan tersebut diserahkan penuh kepada penerima wewenang.⁶⁹

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia berdasarkan asas desentralisasi ini lebih tegas dikatakan oleh Bagir Manan dan Kuntara Magnar ialah :⁷⁰

“Tidak dapat indikasi bahwa Pasal 18 UUD 1945 mengatur prinsip wilayah administratif (asas dekonsentrasi). Di samping desentralisasi atau otonom. Pasal 18 UUD 1945 hanya mengenal satu satuan pemerintahan daerah (pemerintahan daerah otonom). Jadi secara konstitusional hanya daerah otonom yang perlu diatur dalam Undang-Undang organik sebagaimana dikehendaki pasal 18 UUD 1945”.

Dalam Pasal 18 UUD 1945 tidak mengatur mengenai pemerintahan wilayah atau dekonsentrasi, tetapi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting, mengingat dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat didaerah.⁷¹

⁶⁹. Sarundajang, *Op cit*, hal. 48.

⁷⁰. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 273.

⁷¹. Bangir Manan, *Op Cit*, hal. 160.

Asas desentralisasi mempunyai beberapa macam sistem diantaranya :

1. Desentralisasi Politik

adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang diperoleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.

2. Desentralisasi Fungsional

adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, misalnya mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu (*waterschap* : Subak di Bali).

3. Desentralisasi kebudayaan (*cultural decentralisatie*)

adalah : pemberian hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan agama dan lain-lain). Dalam penyelenggaraan asas desentralisasi ini secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah Kabupaten dan daerah kota, dengan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing

Menurut Josef Riwu Kaho, asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari adanya kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang diperoleh dari desentralisasi antara lain :⁷²

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat.

⁷² Josef Riwu Kaho, dalam Krishna, D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Op cit*, hal. 12.

3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
 4. Dalam sistem desentralisasi dapat dibedakan, perbedaan (diferensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan atau keperluan keadaan khusus daerah.
 5. Dengan adanya desentralisasi teritorial daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.
 6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat
 7. Dari segi psikologi, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bag daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.
- Sedangkan kelemahan dari desentralisasi, antara lain :
1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
 2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
 3. Khususnya mengenai desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme.

2. Menimbulkan dualisme penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah.
 1. Menggeser satuan pemerintahan otonom yang merupakan salah satu wilayah pemerintahan administratif jangan sampai :⁷³
- Bahwa asas dekosentrasi hanya pada daerah propinsi, sehingga daerah propinsi disamping sebagai daerah otonom, juga merupakan sebagai wilayah administratif, menurut Bangir Manan, bahwa kehadiran kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif pemerintahan daerah otonom. Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakkan kepada masyarakat serta menjadi pengawas terhadap jalannya dibutuhkan agar pemerintah pusat dapat melakukan pelayanan langsung oleh propinsi dengan sumber pembiayaan dari APBN. Dekosentrasi ini daerah. Yang mana penyelenggaraan asas dekosentrasi ini dilaksanakan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau perangkat pusat di Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
- #### 4.2. Asas Dekonsentrasi
- atau uniformitas dan kesederhanaan.
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya keseragaman memerlukan perundingan yang bertele-tele.
 4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena

penyelenggaraan otonomi daerah. Kewenangan membuat Peraturan produk hukum yang utama yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah dalam Peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah merupakan

Daerah

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999

APBN.

Tugas pembantuan atau *Medebewind* adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan oleh propinsi, kabupaten/kota dan desa dengan sumber pembiayaan dari

4.3. Asas Tugas Pembantuan (*Medebewind*)

untuk beraktivitas dan mengembangkan diri secara nasional.

3. Penyediaan prasarana minimal yang diperlukan warga masyarakat
2. Menjaga standar minimum pelayanan nasional
1. Menjaga integrasi nasional

yang dapat disebutkan dalam tiga hal :

3. Menimbulkan kesimpangsiuran wewenang, tugas dan tanggung jawab dengan satuan pemerintahan otonom yang akan mempengaruhi fungsi pelayanan terhadap masyarakat.
- Dalam penyelenggaraan dekonsentrasi mempunyai nilai lebih atau kebaikan

Dapat dijelaskan bahwa paksaan pada umumnya berwujud mengambil atau memindahkan, mencegah, melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, ataupun dilakukan yang bertentangan dengan hukum. Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya dapat diambil suatu tindakan.

pemeliharaan hukum" seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. pembebanan "biaya paksaan penegakkan hukum" atau "biaya paksaan tinggi. Dalam Peraturan Daerah dapat membuat ketentuan tentang penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih rangka penyelenggaraan otonomi daerah tetapi juga dalam rangka pimpinan DPRD. Bahwa peraturan daerah ditetapkan tidak saja dalam hanya ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani oleh merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD, terhubung DPRD bukan Dari pusat tersebut dapat dijelaskan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan

"Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Dalam Pasal 69 UU No, 22 tahun 1999 menyatakan bahwa :

sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hal daerah dan pertauran daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hal otonomi dari suatu daerah dan Peraturan Daerah merupakan salah satu

Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar harus dengan tegas disertai tugas tersebut. Bahwa paksaan penegakan hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja sesuai dengan berat pelanggaran. Karena paksaan tersebut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan yang mana jumlah denda atau biaya paksaan penegakan hukum atau biaya paksaan pemeliharaan hukum dapat disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemahalan dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup.

Peraturan daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Bagi penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyidikan juga dapat dilakukan oleh pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan penugasan itu dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Disamping Peraturan Daerah, adanya keputusan Kepala Daerah sebagai produk hukum yang dapat dihasilkan oleh suatu Daerah. Keputusan Kepala Daerah ini diatur dalam Pasal 72 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa“.

“Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-perundang lain yang berlaku”.

Yang mana Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 70 dan 72 ayat 2.

Dalam Pasal 73 UU No. 22 tahun 1999 menyebutkan :

“Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat”.

Walaupun dalam hal ini berlaku fiksi hukum yang mengatakan bahwa setiap orang dianggap sudah tahu semenjak peraturan perundang-perundangan tersebut diundangkan, tetapi agar suatu Peraturan Daerah bisa berfungsi secara efektif, sebaliknya dilakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut, antara lain dengan melakukan penyuluhan dan menyebar luaskannya melalui media massa, baik media massa elektronik maupun media cetak.⁷⁴

Adanya kesamaan dalam prosedur penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah antara UU No. 22 tahun 1999 dengan UU No. 5 tahun 1974. Kesamaan yang dimaksud menyangkut badan yang berwenang membuatnya yaitu Kepala Daerah dan DPRD. Syarat materinya yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya atau lainnya. Serta syarat pengundangannya dengan menempatkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

⁷⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 43.

Jika dibandingkan mengenai prosedur penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam UU No. 22 tahun 1999 relatif sederhana dari pada UU No. 5 tahun 1974, yang mana kesederhanaan tersebut tampak dengan tidak adanya penggolongan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang memerlukan dan tidak memerlukan pengesahan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 5 tahun 1974. Sedangkan prinsip yang ada dalam UU No. 22 tahun 1999 adalah bahwa seluruh Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah efektif berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Daerah efektif berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan diundangkan dalam lembaran daerah, sehingga tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat sebelum pemberlakunya.⁷⁵

5.2. Hubungan Pusat Daerah dan Antar Daerah

Masalah yang mendasar antara hubungan Pusat dan Daerah masih menjadi isu sentral terutama di wilayah-wilayah yang relatif luas dan kehidupan masyarakatnya dilihat dari aspek sosial budaya ekonomi, hukum maupun politik sangat heterogen dan marjinal serta akhirnya berimplikasi atau desentralisasi. Karena begitu luasnya campur tangan Pemerintah Pusat dalam kegiatan kemasyarakatan termasuk dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

Dilihat dari segi politik, lahirnya UU No. 22 tahun 1999 sebenarnya telah menunjukkan perubahan politik Pemerintah Pusat yang cukup besar dalam desentralisasi pemerintah. Pemerintah Pusat hanya

⁷⁵ Krithna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Op cit*, hal. 57.

memegang kewenangan dibidang keuangan dan moneter luar negeri, peradilan, pertahanan dan keamanan, agama dan kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi yang strategis, konservasi dan Standarisasi Nasional.

Dengan masih adanya kewenangan Pemerintah Pusat dibidang tersebut diatas, maka peran Pemerintah Pusat tidak dapat dikesampingkan atau ditinggalkan dengan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, apalagi negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Untuk itu peranan Pemerintah Pusat akan tetap dan terus ada melalui kebijakan-kebijakan nasional atau *publik policy* dalam semua aspek kehidupan dan demi mewujudkan kesejahteraan yang seimbang serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat daerah.

Menurut Bangir Manan, perlunya menjaga keseimbangan peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, bahwa :⁷⁶

“Hubungan Pusat dan daerah harus diletakkan dalam hubungan sistem otonomi yang bagaimana luasnya bukanlah suatu patokan statik, tetapi dinamik. Bandul-bandul hubungan itu harus selalu berayun antara “memusat” dan “mendaerah”, untuk menemukan berbagai keseimbangan baru yang mampu mengemban tuntunan yang senantiasa berkembang baik pada sektor kemasyarakatan, kebangsaan, maupun kenegaraan”.

⁷⁶. Bangir Manan, dalam Krisna D. Daramurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Penerbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 65.

Maka dalam rangka penataan kembali hubungan Pusat Daerah ke arah yang lebih harmonis, sudah didasarkan pada relasi yang bersifat *partnership* dan *interpendensi*. Artinya meskipun secara hirarki pemerintah-pemerintah adalah berkedudukan lebih rendah, namun karena komunitas-komunitas lokal pada dasarnya sudah otonom, maka pengaturan hubungan pusat-daerah berlakunya asas kemitraan dan saling ketergantungan diantara keduanya.

Dengan adanya otonomi daerah yang luas disamping menata hubungan pusat dan daerah maka perlu juga diadakan atau diatur mekanisme hubungan antar daerah. Dalam Pasal 87 ayat UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Beberapa daerah dapat mengadakan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama”.

Untuk itu pentingnya pengaturan hubungan kerja sama antar daerah dilatar belakangi oleh kenyataan adanya ketimpangan dan perbedaan sumber daya (*resources*) yang dimiliki oleh masing-masing daerah bahwa ketimpangan dan perbedaan tersebut mungkin terjadi daya manusia yang memadai, tetapi kurang dalam sumber daya keuangan atau sebaliknya ada daerah yang sumber daya keuangannya memadai tetapi, kurang pada sumber daya manusia, bahkan ada daerah yang memiliki dengan cukup kedua sumber tersebut dan ada kekurangan kedua sumber itu.⁷⁷

Berdasarkan kenyataan, harus adanya mekanisme yang baik atas dasar *national publik policy* maupun mekanisme antar daerah, maka akan meningkatkan aliran-aliran *resources* antar daerah yang memberi manfaat sebesar-besarnya pada semua daerah. Dengan demikian kesejahteraan dan

⁷⁷. Krishna D. Danumurti dan Umbu Rauta, *Op cit*, hal. 66.

kemakmuran akan merata pada seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu sejak dini daerah harus mempersiapkan mekanisme hubungan antar daerah yang saling memberikan kemanfaatan antar daerah tersebut.⁷⁸

Bahwa otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan melainkan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepentingan rakyat tidak akan pernah tercapai apabila pada saat yang sama tidak berlangsung agenda demokratisasi. Dengan kata lain, otonomi daerah bisa meminimalisasi konflik Pusat – Daerah di satu pihak dan dilain pihak dapat menjamin cita-cita keadilan demokrasi dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, hanya dapat dicapai didalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa dibidang politik hukum dan ekonomi. Ini berarti bahwa otonomi daerah harus diagendakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari demokratisasi kehidupan bangsa seperti restrukturisasi lembaga perwakilan, restrukturisasi sistem pemulihan bagi eksekutif dan legislatif, penegakan hukum dan pembudayaan masyarakat lokal itu sendiri.

5.3. Mekanisme Pengawasan

Mengenai mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 112 sampai 114 No. 22 tahun 1999 yang diatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pembinaan lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan daerah otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan *represif* untuk memberikan kebebasan

⁷⁸. Bangir Manan dalam Krishna D. Danumurti dan Umbu Rauta, *Op cit*, hal. 67.

kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itulah peraturan daerah yang ditetapkan daerah otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa mekanisme pengawasan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 relatif sederhana dalam upaya memberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. UU no. 22 tahun 1999 memiliki pengawasan represif tentang pengawasan umum preventif dan represif dengan maksud sebagai usaha untuk menjamin adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintahan antara daerah-daerah dengan Pemerintah Pusat serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna, tetapi kenyataan Pemerintah Pusat sangat “mengekan” daerah-daerah dalam upaya pengaturan dan pengurusan kegiatan pemerintah daerah.

Dengan besarnya campur tangan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dalam mekanisme pengawasan dan hal ini tidak lepas dari politik otonomi sentralisasi yang dikembangkan dalam UU No. 5 tahun 1974 serta membawa dampak pada kepatuhan dan ketaatan yang berlebihan, sehingga kreasi dan aktivitas masyarakat daerah terhambat dengan kebijakan pemerintah pusat yang terlalu jauh dalam pemerintah daerah, menyebabkan keleluasaan dan kemandirian dari pada masyarakat daerah terbatas bahkan tidak ada sama sekali.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Bangir Manan dalam Seminar Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah mengatakan bahwa :⁷⁹

“Sistim pengawasan akan menentukan kemandirian satuan otonomi, untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi maka sistim pengawasan ditentukan secara spesifik, baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya, karena itu hal-hal seperti memberlakukan prinsip “pengawasan umum” pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah.”

Selanjutnya dikatakan olehnya :

“Bahwa tidak boleh ada sistim otonomi yang sama sekali meniadakan pengawasan. Kebebasan berotonomi dan pengawasan merupakan dua sisi dari satu lembaran dalam berotonomi untuk menjaga keseimbangan bandul antara kecendrungan desentralisasi dan sentralisasi yang dapat berayun berlebihan.”

Maksud dari pengawasan represif yang diatur oleh UU No. 22 tahun 1999 adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan perundang-undangan lainnya.

Mekanisme Pengawasan yang diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 114 UU No. 22 tahun 1999, dapat dijelaskan lebih lanjut yaitu :

1. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan, diatur Pasal 113.

⁷⁹. Bangir Manan dalam Krishna D. Danumurti dan Umbu Rauta, *Op cit*, hal. 55.

2. Pemerintah Pusat dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, diatur Pasal 114 ayat 1
3. Keputusan pembatalan tersebut diberitahukan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya, diatur Pasal 114 ayat 2.
4. Selambat-lambatnya satu minggu setelah Keputusan pembatalan tersebut, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya oleh daerah, diatur Pasal 114 ayat 3.
5. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah sebelumnya mengajukannya kepada Pemerintah Pusat. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir, dilakukan selambat-lambatnya 15 hari setelah adanya keputusan pembatalan dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah.

6. Kebijakan Penanaman Modal Asing di Daerah

6.1. Kebijakan BKPM Mengenai Penanaman Modal Asing di Daerah

Dalam upaya pengembangan kegiatan penanaman modal, pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat mendorong dan merangsang minat para investor untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman modal. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut telah tertuang dalam paket-paket deregulasi dan debirokratisasi serta iklim investasi atau penanaman modal yang bersifat kondusif seperti insentif dalam bidang perpajakan, kemudahan dalam memberikan pelayanan, perizinan dan kebijakan lainnya.

Dalam rangka itulah, selain diperlukan adanya kebijakan penanaman modal pada tingkat daerah, mengingat pada dasarnya kewenangan penanganannya penanaman modal sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000 berada ditingkat Kabupaten/Kota. Maka perlu kiranya terlebih dahulu menyamakan persepsi mengenai visi dan misi daerah di bidang pembangunan penanaman modal. Yang mana visi dan misi daerah harus memperhatikan dan mendukung visi dan misi nasional di bidang pembangunan penanaman modal.

Merumuskan visi, misi dan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Eahwa visi, misi dan kebijakan pembangunan penanaman modal daerah yang hampir sama dengan kebijakan nasional, tentunya dengan skala daerahlah dapat menyusun strategi dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan penanaman modal di daerah tersebut.

Bahwa penyusunan strategi pembangunan penanaman modal secara nasional maupun secara daerah adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang andal dan semakin mandiri melalui kegiatan investasi atau penanaman modal yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara lebih adil dan merata sehingga dalam tahun 2010 ekonomi Indonesia telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara.

Dalam usaha meningkatkan iklim penanaman modal atau investasi, pemerintah senantiasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan penanaman modal yang ditujukan guna menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :⁸⁰

1. Investor asing dapat memiliki 100% ekuitas atau kepemilikan modal dalam semua sektor penanaman modal atau investasi kecuali didalam sektor-sektor infrastruktur publik seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkitan tenaga dan telekomunikasi, namun demikian disektor-sektor tersebut, investasi asing diperbolehkan memiliki ekuitas maksimum sampai dengan 95%.
2. Investor asing Indonesia dalam mendirikan usahanya dapat berupa perusahaan atau individu yang selanjutnya membentuk sebuah perusahaan penanaman modal langsung yang baru. Investor asing dapat mendirikan proyek penanaman modal yang baru atau membeli secara langsung saham-saham dari perusahaan-perusahaan lokal yang telah ada.
3. Investor asing tidak dikenakan persyaratan jumlah penanaman modal minimum, jumlah penanaman modal yang diserahkan pihak-pihak yang akan melakukan penanaman modal dan hanya tergantung kepada kelayakan ekonomi dari proyek yang diusulkan.
4. Tidak ada persyaratan keharusan untuk divestasi, meskipun 15 tahun setelah kegiatan komersial sebuah proyek pemegang saham asing diharuskan untuk melakukan divestasi sukarela atas sebagian daripada saham-saham mereka kepada warga negara Indonesia.

⁸⁰. Direktorat Jenderal Multilateral, Keuangan dan Pembangunan, DEPLU, Seminar dan Temu Usaha Peningkatan Penanaman Modal Asing Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah, Jakarta, 2002, hal. 23.

5. Pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif yang diberikan kepada para investor asing adalah sebagai berikut dalam membantu usahanya, antara lain berupa *investment tax allowance*, pengurangan bea masuk impor untuk peralatan dan mesin-mesin, pengurangan bea masuk impor untuk bahan baku dan bahan penolong untuk 2 tahun pertama kegiatan produksi, kompensasi kerugian dan depresiasi yang dipercepat.
6. Pemerintah memberikan kesempatan kepada investor asing dalam bidang perdagangan ritel dan perdagangan besar dan mereka harus membentuk usaha patungan atau bentuk kerjasama yang serupa dengan warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia.
7. Sementara itu perusahaan penanaman modal asing dapat mengerjakan tenaga ahli asing di hampir semua posisi kecuali di posisi-posisi yang tidak terbuka untuk tenaga asing.

Pada dasarnya kebijakan umum dibidang penanaman modal asing terangkum dalam UU No. 1 tahun 1967 jo No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan UU No. 6 tahun 1968 jo No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Mengenai bidang-bidang penanaman modal yang dapat dimasuki investor asing tercakup dalam Keppres No. 96 tahun 2000 tentang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal yang kemudian diperbarui dengan Keppres No. 118 tahun 2000. Kebijakan penanaman modal lainnya mengenai ijin PMA tercakup dalam SK Meninves No. 37/SK/1999 tentang adanya hak opsi dalam mengeluarkan ijin penanaman

modal dan SK meninves No. 38/SK/1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka PMA maupun PMDN serta menghapus berbagai rekomendasi dari instansi Pusat/Daerah.⁸¹

Peningkatan jumlah penanaman modal asing berarti akan mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Adanya strategi pengembangan penanaman modal yang dilakukan secara berkelanjutan dan melihat ke luar atau *outward-looking* dengan meningkatkan pelayanan dan kemudahan yang dapat menarik calon investor strategi tersebut yang bisa dilakukan meliputi kemudahan prosedur permohonan, kemudahan perijinan, keringanan bidang perpajakan, kemudahan transfer modal, keamanan dan keselamatan berusaha dan kepastian hukum pemilikan modal.⁸²

Dengan adanya kebijakan Badan Koordinasi Penanamam Modal (BKPM) mengenai penanaman modal asing didaerah dan usaha mempercepat penanaman modal terutama dalam pelayanan perizinan penanaman modal didaerah, maka kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melimpahkan wewenang kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD), sesuai dengan keputusan Presiden No. 122 tahun 1999.⁸³

Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah merupakan Badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal

81. *Ibid*, hal. 25.

82. Sidik Jatmika, *Op-cit*, hal. 85.

83. BKPPMD Propinsi Sumatera Barat, *Op cit*, hal. 1.

daerah, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal asing dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan serta mempunyai hubungan kerjasama yang bersifat konsultatif fungsional dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dengan kemudahan pelayanan perizinan penanaman modal tersebut, para investor tidak harus mengurus izin persetujuan penanaman modalnya ketingkat pusat, tetapi cukup dengan mengurusnya di daerah dengan sistem cepat, mudah dan transparan, sehingga diharapkan perkembangan dunia usaha akan lebih cepat tumbuh dan berkembang untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6.2. Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penanaman Modal Asing

Kebijakan penanaman modal adalah merupakan langkah awal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama untuk membangun perekonomian di daerah melalui kegiatan penanaman modal baik itu penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dengan memperhatikan visi misi nasional dibidang pembangunan penanaman modal umumnya dan misi, misi daerah dibidang pembangunan penanaman modal khususnya.

Dalam upaya merumuskan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan penanaman modal asing kedaerah adalah melihat seberapa jauh minat para investor asing untuk menanamkan modalnya dan potensi kerjasama penanaman modal yang dapat dilakukan Indonesia dengan negara mitra khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerah sekaligus kesiapan daerah dalam melaksanakan

kebijakan tersebut. Peningkatan potensi kerjasama tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, khususnya dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.

Pelaksanaan penanaman modal asing di daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan potensi alam yang strategis apalagi sekarang ini adanya otonomi daerah yang mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Program kerja strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di daerah, yang secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :⁸⁴

1. Pengembangan potensi penanaman modal di daerah dalam rangka ini, daerah perlu melakukan identifikasi berbagai peluang usaha sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam (*resource based*) yang ada di daerahnya dan kemudian menuangkannya dalam bentuk Peta Investasi Daerah dan Profil-profil Proyek Investasi yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan prioritas daerah serta prospek pasar (minat investor) untuk dipromosikan lebih lanjut.
2. Penciptaan iklim penanaman modal di daerah yang lebih kondusif.
Diluar peraturan perundang-perundangan serta berbagai kebijakan di bidang fiskal, moneter dan lain-lain yang masih menjadi kewenangan dan disiapkan oleh Pemerintah Pusat, maka daerah perlu melakukan upaya-upaya :
 - a. Menciptakan dan menjaga kestabilan sosial, politik dan keamanan di daerah.

⁸⁴. Deputi Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Sambutan pada Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal (RKPPMD) se Wilayah Sumatera Barat, Padang, 2001, hal.8.

- b. Sejauh mungkin dapat menghormati dibuat oleh Pemerintah RI dengan pemerintah negara sahabat atau investor nasional dengan investor asing yang bersangkutan.
 - c. Jika mungkin memberikan fasilitas dan insentif tambahan serta kemudahan kepada investor sesuai kewenangan yang dimilikinya.
 - d. Memberikan pelayanan prima yang cepat, mudah, murah, transparan dan efisien kepada investor dan sejauh mungkin dilakukan dengan menggunakan prinsip “pelayanan satu pintu”.
 - e. Menghindari dan jika mungkin menghapus segala bentuk peraturan dan pungutan yang memberatkan investor.
 - f. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi investor baik yang selama ini sudah ada atau beroperasi maupun yang baru dengan sebaik-bainya.
3. Percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan diluar infrastruktur yang telah, sedang dan masih akan dibangun oleh Pemerintah Pusat, Daerah perlu melakukan upaya-upaya :
- a. Melakukan kajian / mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur ekonomi yang masih diperlukan dan sekaligus menyiapkan profil-profil proyek infrastruktur tersebut.
 - b. Mendorong partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur tersebut dengan sistem BOT, BOO, KSO atau bentuk kerjasama lainnya.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparat pemerintah maupun pelaku bisnis di daerah. Dalam rangka ini, daerah perlu melakukan :
 - a. Identifikasi pengusaha lokal yang profesional untuk menjalin kemitraan usaha baik dengan pengusaha pusat atau daerah lain maupun dengan pengusaha asing.
 - b. Melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kepada pengusaha dan aparat pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhannya, seperti diklat profesi, penataran dan sebagainya.
5. Peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, melalui :
 - a. Memperkaya ragam jenis dan mutu layanan informasi, seperti perkembangan indikator ekonomi, kebijakan penanaman modal, potensi dan peluang usaha serta pengusaha lokal calon mitra yang bersedia.
 - b. Menyelenggarakan dan mengikuti seminar-seminar dan pameran penanaman modal, baik didalam maupun diluar negeri.
 - c. Membangun sistem informasi modal, baik didalam maupun diluar negeri.
 - d. Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kegiatan promosi termasuk dengan Kadinda Asosiasi industri/pengusaha dan kalangan perbankan.

6. Peningkatan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antar daerah Kabupate/ kota dan dengan atau antar Propinsi atau dengan Pusat.

Peningkatan koordinasi dan sikronisasi sangat diperlukan seperti dalam bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal mengingat kemungkinan adanya kesamaan potensi sumber daya alam yang dimiliki ataupun karena keterbatasan daya tampung pasar yang ada. Sedangkan dibidang promosi penanaman modal adalah dalam rangka efisiensi pelaksanaannya, seperti dalam hal penyelenggaraan gelar potensi, seminar dan pameran penanaman modal atau investasi berskala daerah (propinsi) atau nasional ataupun dalam rangka pengiriman misi-misi promosi penanaman modal keluar negeri.

Dengan melaksanakan berbagai strategi kebijakan penanaman modal, mudah-mudahan minat para investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka memanfaatkan berbagai penanaman modal atau investasi yang ada didaerah dapat pulih kembali dan bertambah banyak, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dibidang penanaman modal dapat benar-benar memberikan makna dan dampak positif yang berarti dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat didaerah.

Mewujudkan iklim penanaman modal didaerah atau investasi yang lebih kondusif dan stabil, pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat mendorong dan merangsang minat para investor untuk menanamkan modalnya didaerah, kebijakan tersebut dapat berupa, kebijakan dibidang pemberian insentif penanaman modal yang memang menjadi kewenangan daerah, insentif penanaman modal tersebut tidak hanya berupa kebijakan pemberian pembebasan atau keringanan bea

masuk dan pajak penghasilan saja, tetapi dapat berupa kemudahan dalam pemberian pelayanan perijinan serta penyederhanaan prosedur dan tata cara permohonan penanaman modal.

Salah satu upaya untuk menyusun kebijakan penanaman modal di daerah adalah melalui kegiatan dialog secara lintas sektoral dan dialog dengan dunia usaha sebagai pelaku penanaman modal. Kegiatan dialog secara lintas sektoral akan melibatkan investasi teknis di daerah yang terkait langsung dengan penanaman modal. Sedangkan kegiatan dialog dengan dunia usaha akan melibatkan para investor itu sendiri dengan instansi yang menangani penanaman modal.⁸⁵

Dialog kebijakan penanaman modal yang bersifat lintas sektoral itu akan meliputi beberapa sektor penanaman modal yaitu mulai dari sektor primer sampai dengan sektor tersier atau mulai dari sektor primer sampai dengan sektor sekunder saja. Sebagai contoh pada sektor pertanian misalnya, bidang usaha pengolahan minyak sawit terpadu kegiatannya dari mulai perkebunan kelapa sawit sampai dengan industri pengolahan. Begitu juga dengan halnya mengenai penyediaan sarana dan prasarana penanaman modal dari dialog lintas sektoral itu dapat disusun suatu kebijakan penanaman modal daerah tentang peluang dan prioritas bidang usaha yang potensial yang akan ditawarkan kepada investor serta kebijakan daerah dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana penanaman modal.

Sedangkan dialog dengan dunia usaha diharapkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dengan kalangan dunia usaha dalam rangka mencari solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh investor. Masukan-masukan dari investor kepada pemerintah daerah

⁸⁵. Pusat Penelitian dan Pelatihan BKPM, Bagian I, *Op cit*, hal. 16.

adalah penting terutama didalam menyusun suatu kebijakan dibidang penanaman modal selanjutnya, disamping itu juga kegiatan dialog ini digunakan pemerintah daerah sebagai kegiatan sosialisasi kebijakan dibidang penanaman modal. Dengan adanya kebijakan penanaman modal melalui kegiatan dialog lintas sektoral dan dialog dengan dunia usaha tersebut diharapkan akan tercipta suatu iklim penanaman modal yang kondusif.

6.3. Pilihan Bidang Usaha Sehubungan Dengan Kebijakan Penanaman Modal Asing di Daerah.

Bahwa penanaman modal dalam negeri perlu terus didorong dan ditingkatkan peranannya, sedangkan penanaman modal asing dimungkinkan dalam sektor-sektor tertentu yang menghasilkan barang-barang yang sangat diperlukan dapat memperluas ekspor, yang memerlukan investasi atau penanaman modal yang besar dan teknologi yang cukup tinggi, yang tidak membahayakan kepentingan ekonomi, keamanan nasional serta tidak akan menghambat perkembangan perusahaan nasional.

Dengan adanya penanaman modal asing dapat membuka kesempatan kerja yang cukup besar dan memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknologi kepada bangsa Indonesia dalam waktu yang cepat dan memelihara keseimbangan mutu dan tata lingkungan serta penanaman modal asing juga diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan.

Dalam Pasal 5 UU PMA disebutkan bahwa :

“Bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing akan ditetapkan menurut urutan prioritas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap bidang usaha tersebut”.

Bidang penanaman modal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 UU PMA menyatakan.

“Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk pengusahaan penuh oleh modal asing, karena pertimbangan kepentingan negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, meliputi :

1. Pelabuhan-pelabuhan.
2. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.
3. Telekomunikasi
4. Pelayaran
5. Penerbangan
6. Air Minum
7. Kereta Api umum
8. Pembangkitan tenaga alam
9. Mass media

Pasal 6 ayat 2 UU PMA menyebutkan :

“Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesin dan alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing”.

Pasal 7 UU PMA menyatakan :

“Selain yang tersebut pada Pasal 6 ayat 1 Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tertutup bagi penanaman modal asing”.

Berdasarkan petunjuk tersebut diatas maka pada tanggal 15 Februari 1978 oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tujuannya untuk mengarahkan penanaman modal pada bidang-bidang usaha yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang mana

perencanaan penanaman modal tersebut dituangkan dalam bentuk surat keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 1978 tentang Daftar Skala Prioritas (DSP) yang mencerminkan sebagai kemungkinan penanaman modal di Indonesia.

Dalam kegiatan usaha nasional masih dimungkinkan adanya kegiatan pada bidang-bidang usaha yang dinyatakan tertutup dalam rangka Undang-Undang PMDN dan PMA, dengan menggunakan ketentuan *Bedrijfs Reglementering Ordonantie* tahun 1934, dengan ketentuan bahwa departemen yang membawahi penanaman modal tersebut memberitahukan setiap pemberian ijinnya ke pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maka kategori proyek-proyek tersebut kedalam skala prioritas didasarkan pada tingkat peranannya dalam menyesuaikan diri terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang penanaman modal.

Perkembangan DSP yang pada tahun 1987 oleh Presiden dikeluarkanlah Kepres No. 15 tahun 1987, yang dalam Keppres tersebut ditentukan DSP yang disusun menurut *International Standard Industrial Classification* (ISIC) dan Kode Departemen, khusus untuk sektor industri, selain disusun berdasarkan No. ISIC, juga berdasarkan Klasifikasi Komoditi Indonesia (KKI).⁸⁶

Daftar Skala Prioritas yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam perkembangannya diubah menjadi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang hanya memuat daftar bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN

⁸⁶. Penjelasan Umum Keppres No. 15 Tahun 1987 tentang DSP.

dan Non PMA/PMDN tertutup bagi penanaman modal dalam rangka PMA. Artinya bidang usaha yang disebutkan dalam DNI merupakan tertutup untuk penanaman modal tertentu, sedangkan yang tidak disebutkan dalam DNI justru terbuka luas bagi penanaman modal.

Penetapan Daftar Negative Investasi yang dikeluarkan oleh Presiden dengan Keppres No. 96 tahun 2000 jo No. 118 tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal. Berarti adanya kesempatan yang besar bagi para investor baik itu dalam negeri maupun asing dengan tidak meminati bidang usaha yang tertutup mutlak bagi Penanaman modal asing. Hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehubungan dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000.

Dengan adanya reformasi kebijakan penanaman modal sehubungan dengan Penetapan Kebijakan Daftar Negatif Investasi, maka dalam menentukan pemilihan bidang usaha harus memperhatikan kebijakan nasional tentang bidang usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Daftar Negative Investasi tersebut serta mengacu pada visi dan misi dari daerahnya masing-masing, sebab setiap daerah dalam melakukan kegiatan penanaman modal tidak sama atau berbeda terutama dalam masalah potensi alam yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Untuk menentukan jenis bidang usaha atau komoditi usaha unggulan yang akan dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya daerah yang bersangkutan. Maka adanya langkah-langkah pemilihan

jenis bidang usaha yang akan dikaji prospeknya dapat ditempuh melalui penyaringan bertahap sebagai berikut :⁸⁷

1. Penyusunan daftar panjang yang didasarkan kepada pendek atau pasok atau *suplay based approach*, yaitu didasarkan atas potensi sumber daya didaerah yang bersangkutan, meliputi :
 - a. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara ekonomis sebagai :
 - Bahan mentah/bahan baku untuk langsung dipasarkan atau diproses melalui kegiatan industri pengolahan beserta kegiatan-kegiatan jasa penunjangnya.
 - Bahan energi langsung maupun tidak langsung (melalui konversi).
 - Medium untuk budi dayanya.
 - b. Keunggulan geografi dapat menjadi potensi untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi, antara lain kedekatan dengan pasar kesesuaian untuk jadi pusat produksi atau infra struktur dan sebagainya.
 - c. Keunggulan sumber daya manusia yang dipunyai, dapat didayagunakan sebagai :
 - Pencipta lapangan kerja (pengusaha/wirausaha) atau
 - Tenaga kerja yang dapat dikerjakan disektor-sektor produksi dan distribusi.
 - d. Industri atau kegiatan produksi yang telah ada merupakan potensi penyediaan input (bahan baku/penolong), permintaan pasar dan bahkan dapat menciptakan peluang-peluang usaha baru kearah hulu hilir, usaha perdagangan ataupun usaha-usaha jasa penunjangnya.

⁸⁷. Pusat Penelitian dan Pelatihan BKPM, Bagian I *Op Cit*, hal. 6.

Dari pendekatan pasok tersebut (tanpa melihat peluang pasar dulu) akan dihasilkan daftar panjang sebagai ganti database yang dapat digunakan untuk kajian peluang usaha pada tahun-tahun selanjutnya.

2. Setelah daftar panjang disusun, selanjutnya dilakukan penyaringan dengan mempertimbangkan prospek adanya peluang pasar baik pasar lokal, nasional maupun ekspor.

Data untuk pengecekan peluang pasar dapat didasarkan kepada survey atau analisa pasar (*supply demand*) ditingkat daerah maupun nasional termasuk pemanfaatan data statistik impor dan data peluang ekspor. Apabila volume permintaan dapat mencapai proyek, sedangkan yang tidak memenuhi skala ekonomi tidak dicantumkan dalam daftar. Hasil penyaringan tahap ini disebut daftar sedang.

3. Penyaringan berikutnya bertujuan untuk memuat klasifikasi pentingnya proyek dan peningkatannya dari daftar sedang. Kriteria yang digunakan adalah kebijaksanaan prioritas pembangunan daerah yang dihasilkan. Daftar calon proyek yang pendek memenuhi kriteria prioritas penting untuk dibangun beserta peringkatnya, untuk kemudian dipilih sejumlah proyek dari daftar tersebut untuk dikaji prospek kelayakannya. Jumlah proyek yang akan dikaji disesuaikan dengan anggaran biaya studi yang tersedia, misalnya 5-10 proyek sisa daftar bidang usaha yang tidak terpilih bisa disimpan sebagai cadangan peluang untuk dikaji pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian sejumlah proyek yang terpilih sudah menjadi daftar pendek (*short list*).

Pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal. Atas pertimbangan moral, lingkungan, kesehatan, keamanan dan kedaulatan negara serta untuk perlindungan kepentingan nasional, maka pemerintah masih menerapkan :⁸⁸

1. Kebijakan *negative list* untuk bidang usaha.

Bahwa kebijakan ini diatur dalam bentuk Keppres yaitu Keppres No. 96 tahun 2000 jo No. 118 tahun 2000 yang memuat :

- a. Daftar bidang usaha yang dinyatakan tertutup mutlak bagi penanaman modal (PMA maupun PMDN), ada 11 bidang usaha.
- b. Daftar bidang usaha yang tertutup jika dalam perusahaan ada unsur kepemilikan saham asing (PMA), ada 7 bidang usaha plus semua bidang jasa perdagangan dan jasa penunjang perdagangan kecuali perdagangan eceran skala besar, perdagangan besar, jasa pergudangan diluar lini 1 dan pelabuhan, dan jasa pelayanan purna jual.
- c. Daftar bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing dengan syarat patungan dengan modal nasional, ada 9 bidang usaha.
- d. Daftar bidang usaha kecil nasional persyaratan tertentu, ada 20 bidang usaha.

⁸⁸. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, *Op cit*, hal. 7.

2. Kebijakan pengembangan usaha kecil nasional.

Kebijakan ini ditetapkan dalam keppres No. 127 tahun 2001, dimana dalam Keppres ini terdapat daftar bidang usaha yang terbuka untuk usaha kecil/koperasi, bidang-bidang usaha yang harus dimitrakan tersebut sebanyak 16 bidang usaha. Disamping itu dalam Keppres ini juga terdapat usaha kecil sebanyak 19 bidang usaha.

Kebijakan makro pembangunan termasuk dalam menetapkan kebijakan makro penanaman modal sampai saat ini masih menjadi kewenangan pusat, oleh karena itu apabila pemerintah daerah (kabupaten/kota) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu di wilayahnya, tidak harus menetapkan Daftar Negative Investasi tersendiri, tetapi cukup mengusulkannya kepada Pusat (BKPM) yang selanjutnya akan ditampung dalam kebijakan nasional tentang daftar negative investasi ditetapkan dalam bentuk Keppres. Begitu juga tentang bidang-bidang usaha yang harus dikerjasamakan dengan pengusaha kecil/koperasi.

Dengan adanya pilihan bidang usaha dan ditetapkan Daftar Negative Investasi akan memberi kepastian dan kemudahan bagi para investor dan calon investor untuk memilih bidang usaha yang diminati dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal baik PMDN maupun PMA, ketentuan tersebut juga dapat mempertimbangkan bidang usaha yang *fleksible* dan memberi keuntungan bagi investor Indonesia dan investor asing.

Sehubungan dengan kegiatan penanaman modal asing di daerah merupakan langkah awal dengan adanya pilihan bidang usaha atau Daftar Negatif Investasi, karena daerah tersebut dapat menyesuaikan sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dengan bidang usaha yang ada.

C. Kebijakan Penanaman Modal Asing Setelah Keluar Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia

1.1. Kehadiran Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dengan keterbatasan modal, teknologi manajemen keterampilan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman untuk memanfaatkan kekayaan alam yang banyak ini, maka diawali dengan datangnya pedagang-pedagang dari India untuk mengambil hasil-hasil tanah atau rempah-rempah guna diekspor keluar Indonesia. Usaha-usaha ini mudah ditiru oleh pedagang-pedagang pribumi, agar hasil-hasil kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi penduduk pribumi.

Majunya pedagang India dan pribumi dalam memperdagangkan hasil-hasil tanah, menyebabkan pedagang-pedagang negara lain berdatangan. Maka menyusul datangnya pedagang-pedagang Portugis, sehingga menimbulkan persaingan dalam perdagangan hasil tanah tersebut, tetapi pedagang India dan pribumi masih bertahan. Kemudian menyusul dengan datangnya pedagang Belanda dengan membentuk VOC dan timbullah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Belanda, pedagang dari India maupun pribumi.

VOC mulai menguasai daerah-daerah Indonesia dan akhirnya dapat menguasai perdagangan seluruh Indonesia. Dengan berkembangnya VOC mengakibatkan pedagang-pedagang dari India dan Portugis juga pedagang dari negeri Cina dapat bertahan, tetapi pedagang pribumi tidak dapat bertahan, sehingga hasil-hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dikuasai oleh VOC.

Keadaan Indonesia semakin sulit, karena produksi hasil tanah Indonesia mulai dikirimkan ke negeri Belanda oleh pedagang Belanda, begitu juga mengenai pajak pribumi berupa hasil bumi dikirim ke negeri Belanda. Sehubungan dengan Inggris perang melawan Perancis dan negeri Belanda menjadi bagian dari Perancis dan Perancis kalah melawan Inggris, maka Indonesia diduduki oleh Inggris yang diwakili oleh Raffles.

Pada masa Raffles menduduki Indonesia, melakukan perubahan yang mengganti pajak hasil bumi dengan pajak yang dibayar dengan uang. Hal tersebut juga dilakukan terhadap petani Indonesia, dimana petani menjadi pemilik tetapi harus membayar uang. Setelah itu Inggris menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda, maka mengenai pajak dengan uang dihapus dan diganti dengan tanam paksa. Para petani Indonesia diwajibkan menyerahkan sebagian dari tanahnya untuk ditanam tanaman yang laku dan mudah dijual di pasaran Eropa atau lebih dikenal dengan *Culture stelsel*.

Sistem tanam paksa berhasil memberikan keuntungan besar kepada pemerintahan Belanda, kemudian sistem ini dihapus karena ditentang oleh kaum liberal Negeri Belanda yang menghendaki kebebasan dalam perdagangan dunia. Kaum liberal mendatangkan modal Belanda ke Indonesia untuk ditanam dalam perkebunan besar seperti gula, teh, pala, tembakau dan karet serta perkembangan yang membutuhkan modal dari Belanda dan modal asing lainnya.

Penanaman modal besar ini ditentang oleh kaum liberalisme Indonesia karena kaum tani maupun kaum buruh Indonesia sangat dirugikan. Setelah perang pasifik pecah kemudian Indonesia di duduki oleh bala tentara Nippon dan seluruh Indonesia termasuk perkebunan

besar dikuasai Jepang sebagai sumber-sumber kekuatan angkatan perang Jepang. Kemudian Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat, maka Indonesia menggunakan kesempatan yang baik untuk itu untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Karena pihak Belanda belum mau mengakui proklamasi tersebut, maka timbul perjuangan kemerdekaan terhadap Belanda sudah tentu dalam keadaan demikian perkebunan-perkebunan besar menjadi rusak dan tiap modal asing dianggap musuh oleh pemerintah Indonesia, Republik Indonesia dibawah Presiden Soekarno meneruskan revolusi sambil membangun dan untuk itu perlu menentukan sikap terhadap modal asing serta kemungkinannya untuk ditanam di Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Sehubungan dengan adanya modal asing yang ditanam di Indonesia, maka dalam masa kabinet karya telah dikeluarkan Undang-Undang No 78 Tahun 1958 yang disingkat UPMA, kemudian pada masa kabinet Ampera telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 1960 yang tersusun menurut UUD 1945 dan diubah lagi dengan UU No 16 Tahun 1965.

Dengan meletusnya peristiwa G 30 S/ PKI, maka timbul perebutan kekuasaan yang berakhir dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret, sehingga secara legal kekuasaan pemerintah berada ditangan Jendral Soeharto. Pada saat itu perekonomian Indonesia telah mengalami kemerosotan dimana perbedaan tingkat rakyat makin meningkat. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus mengakibatkan rakyat terlantar dan kemiskinan. Untuk itu pemerintah harus segera mengambil tindakan agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia menetapkan prioritas utama diberikan dalam memperbaiki masalah ekonomi disamping masalah lainnya dan dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis serta juga mengambil ketetapan pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan seperti tercantum dalam ketetapan No. XXXIII / MPRS / 1966, bahwa menganggap perlu agar segera ditetapkan sebuah Undang-Undang mengenai modal asing.

Untuk melaksanakan dan berpegang teguh pada ketetapan MPRS tersebut, maka ditetapkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa tanah, kekayaan alam dan itikat baik negara dan Bangsa Indonesia juga dapat diperhitungkan sebagai modal yang berharga. Kemudian berdasarkan pertimbangan Pasal 15, 16 dan 17 UU No. 1 Tahun 1967 ddinyatakan tidak berlaku, maka diganti dengan UU No. 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU No. 1 Tahun 1967.

1.2. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pada tahun pertama perkembangan penanaman modal asing umumnya bergerak dibidang jenis industri termasuk industri assembling kendaraan bermotor, sepeda, alat-alat radio dan industri pembuat barang konsumsi seperti biskuit, minuman, susu dan sebagainya. Dalam tahun-tahun berikutnya jenis-jenis penanaman modal telah berubah kepada yang bersifat dasar dengan masuknya penanaman modal di bidang-bidang yang menghasilkan barang-barang untuk kebutuhan industri lain seperti industri kimia, industri yang membuat komponen yang digunakan dalam industri assembling.

Disektor tekstil, benang tenun yang semula di import kini telah dapat dibuat dalam negeri dan selanjutnya pada saat-saat mendatang serat buatan bentuknya dapat dibuat dalam negeri sehingga dapat dapat memproduksi sendiri dengan mengolah bahan-bahan buatan tersebut menjadi produksi yang siap dipasarkan terutama dinikmati oleh masyarakat lokal untuk dapat mencintai produksi dalam negeri.

Beberapa jenis hasil PMA bahkan telah dapat di ekspor berupa jenis penanaman modal lainnya bahkan telah harus meningkatkan kegiatannya sebagaimana disyaratkan seperti PMA disektor kehutanan diharuskan untuk mengadakan pengolahan hasil karya dan tidak hanya mengekspor kayu gelondongan saja. Beberapa sektor lain telah diselenggarakan seperti dalam bentuk industri estate, penyalur barang, dimana fasilitas dalam rangka penanaman modal dapat diselenggarakan dengan lebih baik dan memadai.

Kegiatan penanaman modal juga mengambil bagian pada bidang industri estate dengan tercakupnya kebutuhan perumahan atau tempat tinggal yang memadai merupakan tujuan bersama dalam usaha mencukupi kebutuhan ini. Hal ini mempunyai kaitan langsung dengan aspek pembangunan lainnya seperti planologi perkotaan, pembangunan daerah, penyediaan lapangan kerja, pembinaan jenis-jenis industri tertentu dan sebagainya.

Perkembangan penanaman modal telah menunjukkan peningkatan yang cukup mengembirakan, namun menjelang akhir Repelita perkembangan tersebut menunjukkan gejala adanya ketidakseimbangan dalam peranan penanaman modal. Dimana tampak bahwa golongan pengusaha kuat dapat berkembang dan makin kuat, sedangkan beberapa pengusaha menengah dan kecil tidak dapat ikut menikmati perkembangan yang ada. Gejala yang muncul pada waktu itu adalah berupa tuntutan agar

golongan pengusaha menengah dan kecil diikuti sertakan dan mempunyai peranan dalam ekonomi gejala tersebut disebabkan disuatu pihak kurangnya perkembangan penanaman modal mendapat pengarah dan dilain pihak kurangnya pembinaan dari pemerintahan sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya penanaman modal asing yang diatur oleh UU PMA harus berbentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia adalah perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pada saat itu penanaman modal banyak dilaksanakan dalam bentuk Joint Venture dan dengan kemajuan serta perkembangan zaman maka penanaman modal asing langsung atau murni dapat juga dilaksanakan.

Bahwa penanaman modal asing sesungguhnya mendapat tempat yang relatif aman dan subur di Indonesia, disamping itu juga menimbulkan kesan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang baik bagi PMA yang datang ke Indonesia, sehingga jumlah PMA meningkat terus tiap tahunnya. Keadaan ini dapat dilihat betapa nyatanya kehadiran PMA-PMA tersebut baik dari hasil produksinya ataupun perusahaan-perusahaannya.

Apalagi semenjak dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri jumlah modal asing yang ditanamkan dalam berbagai bidang ekonomi terus meningkat. Hal tersebut dikarenakan antara lain :

1. Oleh karena keberhasilan pemerintah memantapkan situasi politik.
2. Karena stabilitas keamanan dalam negeri.
3. Karena prospek pembangunan yang semakin mantap.
4. Karena kemampuan pemerintah Indonesia menaik dan menimbulkan kegaerahan bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Perkembangan penanaman modal asing di Indonesia akibat terjadi krisis mengalami penurunan yang tajam dan juga menghadapi masalah iklim penanaman modal atau investasi yang kurang kondusif seperti stabilitas sosial, politik dan keamanan yang masih rawan kepastian dan penegakan hukum yang masih kurang dan rendah, insentif yang diberikan kurang dibandingkan dengan negara-negara pesaing lainnya, kualitas pelayanan yang rendah dan cenderung red tipe dan peraturan dan pelaksanaannya yang belum transparan serta sarana dan prasarana yang terbatas.

Menghadapi dampak krisis tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang juga dilanda krisis, ternyata pemulihan kegiatan perekonomian Indonesia mengalami keterlambatan. Kalau krisis multidimensional yang mencakup bidang politik, sosial, keamanan dan hukum sehingga menyebabkan semakin hilangnya kepercayaan investor Indonesia maupun investor asing terhadap iklim penanaman di Indonesia.

Bahwa usaha memulihkan perekonomian nasional sangat dibutuhkan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, disamping itu dalam rangka upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sangat perlu ditunjang dengan perkembangan perekonomian, perkembangan politik dan keamanan dalam negeri yang semakin baik serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan, minat dan persetujuan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

1.3. Konsep Dasar Dari Beberapa Negara Berkembang Berkaitan Dengan Adanya Pelaksanaan Penanaman Modal Asing

Bahwa sumber-sumber modal asing itu dapat dilihat dari berbagai pihak yaitu pihak swasta, pemerintah asing maupun badan-badan internasional. Mengenai konsep dari beberapa negara berkembang di Asia

yang menyangkut penanaman modal asing yang berdasarkan pada pelaksanaan penanaman modal asing dapat dibagi :

1. Forto Folio Investment

Merupakan penanaman modal dengan jalan membeli saham-saham atau obligasi disuatu perusahaan dalam jumlah sedemikian rupa sehingga tidaklah mencukupi untuk memberikan penguasaan atas perusahaan kepadapenanaman modal asing, pengesahannya sangat mudah, oleh karena penanaman modal asing dengan bentuk ini dilakukan sesuai dengan peraturan lalu lintas devisa yang berlaku.

2. Direct Investment

Merupakan bentuk penanaman modal asing dimana disamping dipenuhi syarat-syarat formil juga syarat-syarat materil yang mana syarat-syarat formil itu meliputi ketentuan-ketentuan dari peraturan lalu lintas devisa dari pada negara-negara yang bersangkutan sedangkan syarat-syarat materil dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi perekonomian negara.

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang langsung menyangkut penanaman modal asing swasta meliputi :⁸⁹

1. Pemasukkan dan Pengesahan (*Entry and Authorization*)

Hampir disetiap negara di Asia untuk memasukkan modal asing ataupun untuk memulai dengan suatu proyek milik asing diperlukan terlebih dahulu suatu pengesahan ataupun persetujuan atau izin bisnis.

Mengenai pemasukkan modal asing kedalam suatu negara beberapa

⁸⁹. Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 22.

pemerintah negara di Asia memberikan suatu daftar dari pada bidang-bidang usaha yang khusus dapat ditanam modal asing, hal ini dapat dijumpai dari pada negara-negara berkembang seperti Burma, Afganistan, Nepal dan Pakistan. Pada umumnya negara-negara ini memberikan larangan terhadap usaha-usaha seperti industri, pertahanan dan keamanan serta menyangkut kepentingan umum.

2. Aspek-aspek Operasional (*Operational Aspects*)

Kebijaksanaan dan tindakan-tindakan mengenai penyelenggaraan perusahaan-perusahaan modal asing meliputi hal-hal tentang pemilikan (*Ownership*), pemilikan (*Management*), dalam hal ini mengenai persoalan perimbangan antara pimpinan nasional dan pimpinan asing didalam suatu perusahaan modal asing, tenaga kerja dan pendidikan (*Training*) dari warga negara dan mengenai nasionalisasi. Di India, Pakistan dan Nepal pemilikan modal harus dimiliki oleh warga negaranya tetapi di negara lainnya justru sebaliknya seperti negara Birma pengusaha modal asing maksimal hanya 40%. Didalam peraturan perundang-undangan dinegara Afganistan, Ceylon, Laos, Hongkong, Jepang, Republik Vietnam tidak ada Peraturan-peraturan mengenai ketentuan yang membatasi pemilikan dan penguasaan modal asing dalam hal prosentase dan jumlah modalnya.

Dalam bidang management modal asing dinegara Nepal, Kamboja, terdapat 50% tenaga asing, sedangkan untuk Afganistan penanaman modal asing diwajibkan untuk memperkerjakan dan mendidik sedapat mungkin pekerja-pekerja dan para ahli-ahli teknik Afganistan. Bagi negara Pakistan dan Philipina membatasi pekerja

asing dalam bidang usaha tertentu seperti perdagangan, minyak bumi, pertambangan, perbankan, pengangkutan udara dan pelayaran pantai. Dalam rangka modal asing jaminan terhadap soal nasionalisasi pada umumnya jaminan diberikan untuk jangka waktu tertentu, misalnya Burma tidak akan lebih cepat dari 10 tahun, Kamboja 10 sampai 20 tahun dan Korea 15 tahun.

Dalam hal dilakukan nasionalisasi di negara-negara tertentu pelaksanaannya setelah habisnya jangka waktu dari pada jaminan, untuk itu melakukan nasionalisasi maka pembayaran kompensasi yang layak dan patut dijamin oleh kebanyakan pemerintah negara yang bersangkutan, misalnya Burma, Kamboja, Pakistan dan Philipina jaminan khusus pemerintah Jepang dan Pakistan terhadap pengiriman uang hasil dari pada milik yang bersangkutan dalam hal dilaksanakan tindakan nasionalisasi.⁹⁰

Nasionalisasi bagi Indonesia seperti yang tercantu dalam Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1967 menyebutkan bahwa :

“Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengulangi hak menguasai dan atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan Undang-Undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian.”

Dalam pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan modal asing yang menjadi pertimbangan bagi pembuat Undang-Undang untuk tidak melakukan nasionalisasi adalah untuk menjamin ketenangan bekerja dari pada

⁹⁰. *Ibid*, hal. 26.

modal asing yang ditanam di Indonesia. Maka nasionalisasi hanya dapat dilakukan dengan :

- a. Undang-Undang, apabila kepentingan negara menghendaki, berarti bahwa nasionalisasi haruslah memperoleh persetujuan dari dewan perwakilan rakyat yang perlaksanaannya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.
 - b. Pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip internasional.
3. Transfer dari pada pendapatan dan modal (*Transfer of Income Capital*)

Yang dimaksudkan tranfer pendapatan adalah tranfer dari pada keuntungan deviden, upah dan gaji. Bahwa transfer dari pada pendapatan diperkenankan agak bebas, seangkatan tranfer dari pada modal berada dalam pengawasan yang agak keras. Di negara Kamboja dan Korea membatasi jumlah maksimal dari pada tranfer pendapatan tahunan sampai suatu persentase dari modal yang ditanam. Tapi bagi tranfer modal pembayaran kembali suatu pinjaman sesuai berdasarkan kontrak atau perjanjian dilakukan secara bebas. Di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 keuntungan berupa deviden tidak dapat dibatasi bahkan menurut Undang-Undang ini Tax holiday bagi penanaman modal asing, tapi sejak keluarnya Undang-Undang No. 7 tahun 1983 yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan yang kemudian kemudahan itupun hapus, hal tersebut mendapat tanggapan dan komentar dari berbagai pihak baik itu pengusaha maupun pejabat. Di Philipina sejak tahun 1947 justru membatasi pengiriman pendapatan modal, sedangkan modal yang baru akan ditanam baru disetujui saat memasukkan modalnya.

4. Perpajakan (*Taxation*)

Mengenai persoalan-persoalan perpajakan yang penting bagi penanaman modal asing didalam praktek yaitu pajak pendapatan orang asing dan badan hukum asing bukan penduduk, pajak deviden. Cara pengaturan dari pada keringanan atau pajak berganda (*Double Taxation*) dan peransang-peransang dalam bidang perpajakan. Dalam kekuasaan perpajakan (*Tax Jurisdiction*) yang merupakan suatu sistem umum yang terdapat dikebanyakan negara-negara berkembang dikenakan pajak terhadap orang-perorangan badan-badan secara semua pendapatan tanpa melihat asalnya.

Terhadap badan hukum bukan penduduk dikenakan setengah pendapatannya diperoleh dari negara-negara bersangkutan dinegara-negara tertentu, misalnya di India dan Pakistan, dikenakan pajak tersendiri dan pajak itu dikenakan atas sumbernya pada hakekatnya mengenai tarif perpajakan tidak diadakan diskriminasi antara penduduk dan bukan penduduk. Badan-badan hukum bukan penduduk dibeberapa negara seperti Muangthai benar-benar dikenakan pajak dengan tarif yang sama untuk badan-badan berstatus penduduk. Begitu juga mengenai hal-hal yang menyangkut perangsang-perangsang dalam bidang perpajakan tidak ada diskriminasi antara penanaman modal atau investasi yang dimiliki oleh orang asing maupun domestik.

Ada beberapa negara yang memberikan kebebasan (*Exemption*) atau keringanan (*Reduction*) atas pajak pendapatan (*Income tax*) dan pajak-pajak lainnya. Mengenai pembebasan terhadap pajak pendapatan, pada umumnya diberikan untuk jangka waktu tertentu, misalnya Ceylon jangka waktu 6 tahun dan mengenai pemulangan penanaman modal diberikan sampai batas waktu tertentu. Di Indonesia menurut UU No. 1 tahun 1967 mengenai pembebasan terhadap pajak pendapatan diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi dari 5 tahun saat mulai berproduksi.

2. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Dengan Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah.

2.1. Peranan Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Otonomi Daerah

Bahwa peranan penanaman modal asing sangat diharapkan, dan kemampuan penanaman modal asing dalam membawa proses internasionalisasi modal, management, tenaga kerja serta cakupan bidang usaha yang luas, cukup menukung untuk tercapainya suatu tujuan pembangunan di banyak negara berkembang misalnya di Indonesia yang diusahakan dengan prioritas peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pemerataan kegiatan ekonomi serta penyebaran pembangunan kedaerah dan partisipasi rakyat dalam pembangunan maka proses internasionalisasi ini juga dapat membawa modernisasi secara efektif dan mantap dapat menghubungkan negara berkembang dengan ekonomi dunia, dapat mengumpulkan berbagai keahlian teknik dan management di negara berkembang.

Bagi negara Indonesia tetap penanaman modal asing berfungsi hanya sebagai modal pelengkap. Maka peranan penanaman modal asing dalam pembangunan di Indonesia diarahkan sesuai dengan kebijaksanaan dan filsafah negara sebagai mana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu hubungan penanaman modal asing dengan negara penerima modal merupakan hubungan hukum mengenai kegiatan di bidang ekonomi dan menjadi objek peninjauan hukum ekonomi, yaitu sebagai hubungan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan yang di Indonesia secara substansil didasarkan pada sistem ekonomi yang dianut Indonesia yaitu Pasal 33 UUD 1945 dan GBHN (Demokrasi Ekonomi).⁹¹

⁹¹. Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 185.

Penyebaran pembangunan di daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan dengan adanya pemerintahan baru yang legitimate dan kredibel merupakan momentum yang tepat untuk menggalakkan kembali kegiatan penanaman modal asing di daerah. Apalagi pada era otonomi sekarang ini pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk membantu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif agar aliran penanaman modal dapat lebih meningkat lagi masuk ke daerah.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanaman modal di daerah salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan yaitu melalui pengembangan *business networking*. Jika penegakan kerja bisnis ini dapat dikembangkan secara efektif, efisien, maka pengembangan penanaman modal dapat digunakan dengan sangat rendah dan hemat untuk efektifnya suatu jaringan kerja bisnis dan penanaman modal di daerah.

Semua urusan yang menyangkut peluang usaha dan penanaman modal di daerah masih harus diputuskan oleh Pemerintah Pusat, padahal cukup diputuskan ditingkat daerah apalagi desentralisasi kewenangan melalui penyelenggaraan ekonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu harus diadakan upaya meningkatkan kinerja pemerintah dengan melakukan restrukturisasi lembaga pemerintah dan daerah yang merupakan konsekwensi logis dari adanya pelimpahan kewenangan kepada daerah dan perlu dikembangkan perangkat daerah kabupaten/kota secara konsisten.

Dalam era otonomi daerah inilah pemerintah provinsi kabupaten/kota akan memainkan peranan penting dalam menyukseskan kegiatan penanaman modal di daerah. Maka sangat perlu dilaksanakan strategi penanaman modal ditingkat daerah antara lain adalah dengan mengikut

sertakan masyarakat setempat secara nyata dan baik dalam bentuk penyediaan lapangan kerja penyertaan modal, mitra bisnis maupun bentuk kerja sama lain yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Bahwa peranan penanaman modal asing didaerah sangat diharapkan sekali karena strategi dalam bentuk penyediaan lapangan kerja memungkinkan untuk dilaksanakan, mengingat pengangguran tenaga kerja Indonesia sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, belum lagi penambahan angkatan kerja baru yang terus meningkat. Semakin meningkatnya jumlah pengangguran ini tentu akan menjadi masalah besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila tidak segera diatasi berdasarkan hitungan makro masalah pengangguran tersebut akan dapat diatasi, apabila aktivitas ekonomi dapat ditingkatkan, sehingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itulah penanaman modal didaerah dibutuhkan, karena mampu untuk meningkatkan perekonomian.

Penyelenggaraan ekonomi daerah dengan memberi kewenangan kepada daerah dalam bidang pemerintahan akan membuat daerah lebih leluasa mencari mitra untuk mengembagkan potensi ekonomi dan menetapkan iklim yang kondusif bagi penanaman modal. Tetapi masih rendahnya daya saing kerena faktor ekonomi biaya tinggi (*High Cost Economy*) ataupun faktor kualitas pelayanan publik yang tidak mendukung, bukan disebabkan faktor kesalahan manusia yang bekerja di pemerintahan akan tetapi permasalahan tersebut timbul karena tidak tepatnya sistem pemerintahan yang digunakan.⁹²

⁹². Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan DEPLU, *Op Cit*, hal. 21.

Dalam upaya mewujudkan *Good Publik Governance* dan *Good Corporate Governance* yang inovatif perlu dikembangkan suatu sistem pelayanan publik yang transparan, terbuka, cepat, tanggap, fleksibel dan terdesentralisasi tetapi tekoordinasi. Apabila izin usaha memerlukan waktu berbulan-bulan dan dengan pengurusan yang berbelit-belit tentunya para pengusaha akan menghadapi berbagai kesulitan. Faktor kecepatan waktu secara langsung akan mempengaruhi daya saing dan waktu adalah satu-satunya yang tidak pernah bisa digantikan.

Bagi pelayanan publik dibutuhkan aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan mampu memahami sumbangan dan meraih peluang yang inovatif dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sehingga tercipta masyarakat madani yang sejahtera. Aparat yang dimaksud tentu akan mampu mengantisipasi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima. Tuntutan sebagai konsekuensi logis munculnya paradigma baru dalam manajemen pelayanan publik yang transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap keinginan masyarakat dari perspektif pelayanan sebuah lembaga pemerintah dinilai baik dilihat dari segi kelembagaan dan proses mestinya bisa melayani semua stakeholder.

Ditinjau dari segi pemberdayaan ekonomi masyarakat pemerintah daerah harus produktif, dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut sehingga peranan penanaman modal asing dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat benar-benar memberikan makna dan dampak positif yang berarti dalam mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Segala potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya harus dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetiap kabupaten dan kota dan pola kemitraan baik dengan pengusaha dalam maupun luar negeri harus banyak dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada serta kreatifitas dan prakarsa masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan tuntutan demokratisasi dan ciri masyarakat sipil (*Civil Society*), kerana keikutsertaan potensi masyarakat dalam penyusunan kegiatan publik harus dilakukan oleh pemerintahan daerah.

2.2. Perkembangan Pelaksanaan Penanaman Modal Asing dengan Adanya Undang-Undang Otonomi daerah

Perkembangan penanaman modal asing merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan serius apalagi pelaksanaan penanaman modal asing di daerah, karena perkembangan penanaman modal yang pesat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetap hanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, menimbulkan kestabilan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur kepercayaan dunia usaha terhadap suatu negara pada umumnya dan daerah pada khususnya.

Dalam perkembangan kegiatan penanaman modal terutama sejak diundangkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan UU No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sampai dengan tahun 1997 senantiasa mengalami kenaikan meskipun kadang-kadang mengalami fluktuasi. Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak negatif atau penurunan cukup tajam terhadap perkembangan PMDN dan PMA ke Indonesia dan baru

pada awal tahun 2000 menunjukkan arah menuju perbaikan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan semakin memburuknya perkembangan ekonomi makro Indonesia tapi nilai persetujuan PMDN dan PMA selama tahun 2000 mengalami peningkatan. Kecenderungan meningkatnya minat PMDN dan PMA selama tahun 2000 ternyata tidak berkelanjutan pada tahun 2001 dan pada 7 bulan pertama di tahun 2002. Hal ini disebabkan karena iklim penanaman modal di Indonesia masih belum cukup kondusif.

Pada saat ini seluruh komponen bangsa sedang berusaha keras untuk memulihkan keadaan ekonomi yang masih terpuruk ini. Yang dimulai dari krisis moneter yang melanda negara-negara Asia dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan dampak yang cukup luas termasuk terhentinya sebagian besar aktivitas produksi dan usaha, sehingga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, kelangkaan persediaan bahan-bahan pokok dan obat-obatan, kelangkaan likuiditas perbankan nasional serta penurunan daya beli masyarakat. Bahwa saat ini dan waktu-waktu yang akan datang tugas untuk menarik atau mengundang penanaman modal kenegara Indonesia masih sangat berat.

Namun dalam era global seperti saat ini upaya untuk menarik penanaman modal tentu tidak mudah. Terlebih apalagi mencari beberapa indikator dari lembaga ranting dunia yang senantiasa menempatkan Indonesia pada posisi daya saing yang jauh dibelakang. Jika dibandingkan negara-negara pesaing Indonesia seperti Malaysia, China, Singapura, Thailand dan Vietnam. Tetapi berbagai langkah kebijakan dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing dan mengembalikan negara Indonesia sebagai negara yang tetap diminati oleh para Investor.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mana daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam mengelola kegiatan-kegiatan pembangunan didaerahnya masing-masing. Bahwa potensi-potensi yang ada didaerah dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sehingga pelaksanaan penanaman modal asing didaerah semakin banyak diminati oleh para investor lokal maupun asing. Karena peluang usaha yang dimiliki daerah memberi dampak positif bagi perekonomian daerah tersebut.

Pelaksanaan penanaman modal merupakan salah satu faktor penentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang mana pelaksanaan penanaman modal tersebut dilakukan berbagai sektor baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Non PMDN dan PMA. Bahwa pelaksanaan penanaman modal pada beberapa sektor akan menghasilkan peningkatan nilai tambah dari suatu produk dari suatu pertumbuhan lapangan kerja serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Pelaksanaan otonomi daerah hendaknya tidak merugikan bagi perkembangan ekonomi maupun penanaman modal didaerah dengan menghindari berbagai akses yang kurang baik misalnya :

1. Munculnya semangat kedaerahan yang sangat tinggi, karena hal ini akan menimbulkan potensi konflik antar etnis akibat egoisme dan kecemburuan yang berlebihan. Lebih lanjut hal ini akan mengganggu upaya untuk menciptakan rasa aman untuk menanamkan modal dan berusaha.

2. Munculnya peraturan daerah justru menghambat perkembangan daerah itu sendiri, hanya karena obsesi daerah yang sangat tinggi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam perkembangan dibidang penanaman modal sekarang ini adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Kebijakan baru tersebut merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka reformasi kebijakan dibidang penanaman modal mengantisipasi kecendrungan nasional dan internasional yang terjadi dalam menarik minat investor asing. Pada saat ini sedang dibahas rancangan Undang-Undang baru mengenai penanaman modal sebagai pengganti UU No. 1 tahun 1967 serta No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, hal ini menunjukkan adanya perkembangan pelaksanaan penanaman modal asing yang disesuaikan dengan reformasi yang terjadi.

Rancangan Undang-Undang mengenai PMA merupakan penggabungan sejumlah peraturan mengenai PMA dan PMDN dan terdapat beberapa klausula baru antara lain mengenai perlakuan sama antara PMA dan PMDN sesuai Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, penyesuaian sengketa dan kepemilikan dan pengalihan saham. Disamping itu dalam Pasal 15 ayat 1 dan 4 RUU tersebut, persetujuan penanaman modal dan ijin-ijin pelaksanaannya di keluarkan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat Propinsi atau Kabupaten/Kota dan dilaksanakan dalam pelayanan satu atap yang ditetapkan dalam keputusan Presiden.

Dengan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka otonomi daerah, saat ini juga sedang dibahas tiga rancangan Keputusan Presiden yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kewenangan dan pelayanan dibidang penanaman modal oleh instansi yang menangani penanaman modal baik ditingkat pusat, propinsi maupun Kabupaten/Kota yaitu :⁹³

1. Rancangan Keputusan Presiden tentang penyelenggaraan kewenangan tentang penanaman modal dalam rangka otonomi daerah.
2. Rancangan Keputusan Presiden tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA.
3. Rancangan Keputusan Presiden tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Rancangan Keputusan Presiden tersebut merupakan kewenangan BKPM dalam memberikan persetujuan PMA tidak terbatas sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000 mengenai otonomi daerah. Dalam rancangan Kepres yang pertama BKPM memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan baru, perubahan dan perluasan proyek PMA, Persetujuan pendirian kantor perwakilan perusahaan asing dan persetujuan proyek baru dan perluasan PMDN untuk proyek-proyek atau bidang-bidang usaha tertentu seperti bidang usaha berteknologi strategis yang memiliki derajat kecanggihan tinggi dan berisiko tinggi dalam penerapannya meliputi persenjataan, nuklir, dan rekayasa genetika.

⁹³. Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Op cit*, hal. 35.

Dalam rancangan Keppres yang pertama tersebut juga dirinci kewenangan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat dalam menyelenggarakan pelayanan dibidang penanaman modal yang dikelompokkan kedalam 5 bidang utama yaitu bidang-bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan promosi dan kerja sama internasional, pelayanan perizinan, pengendalian serta sistem informasi penanaman modal sedangkan rancangan Keppres kedua dan ketiga merupakan penjabahan lebih lanjut dari Keppres pertama yang memuat secara khusus pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Guna meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada investor asing, BKPM koordinasi penanaman modal akan akan membentuk 4 lembaga pendukung dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal yaitu :⁹⁴

1. *Interdepartmental ad-hoc team* yang akan terdiri dari wakil-wakil dari berbagai departemen dan badan terkait untuk dapat menghasilkan tindakan-tindakan nyata.
2. *Investment Advisory Council* yang terdiri dari wakil-wakil kadin maupun asosiasi-asosiasi perusahaan.
3. *Indonesia Investment and Financial Society* yang terdiri dari wakil-wakil perusahaan domestik maupun asing untuk memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada BKPM.
4. *Investment Service Center* sebagai pusat pelayanan informasi mengenai masalah penanaman modal.

⁹⁴. Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Op cit*, hal. 36.

2.3. Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Pelaksanaan penanaman modal asing di daerah merupakan suatu langkah awal bagi pemerintah daerah untuk membangun perekonomian di daerahnya dengan memperhatikan dan berpedoman kepada kebijakan nasional di bidang penanaman modal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1995 tentang pedoman Perencanaan Penanaman Modal Daerah adalah untuk memberikan arahan dan dorongan kepada pemerintah daerah agar kegiatan penanaman modal dapat ditingkatkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Bahwa tujuan diadakan penanaman modal di daerah adalah :

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi penanaman modal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
2. Terarahnya bidang usaha yang akan dipromosikan.
3. Mantapnya usulan proyek-proyek pemerintah sebagai penunjang kegiatan penanaman modal daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah memungkinkan untuk dilaksanakan penanaman modal terutama investor asing yang tertarik dengan suatu daerah memiliki keindahan dan potensi alam yang dapat diandalkan dan potensi-potensi lain menunjang peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaan penanaman modal asing di daerah tersebut.

Faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan dalam penanaman modal di daerah adalah potensi sumber daya ekonomi daerah dan visi, misi pembangunan daerah. Disamping itu yang paling

dominan adalah kesiapan daerah, karena daerah yang bisa menciptakan iklim yang kondusif dan menarik para investor tentu akan mendatangkan daya saing antara daerah dan meningkatnya penanaman modal di daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, begitu luasnya urusan pemerintah pada satu sisi dapat merupakan keuntungan dan disisi lain merupakan beban yang menuntut kesiapan dari daerah untuk melaksanakannya yang berarti bahwa daerah berfikir dan bekerja keras agar urusan-urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah yang dapat dilaksanakan seccara baik walaupun adanya kewenagnan baru merupakan suatu hal yang menguntungkan.

Potensi-potensi yang dapat diandalkan dan dipersiapkan demi terlaksananya penanaman modal didaerah berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta organisasi dan manajemennya untuk menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan cepatnya potensi sumber daya manusia merupakan kesiapan yang diprioritaskan dari pada potensi sumber daya lainnya. Karena pentingnya sumber daya manusia tertuju kepada kualitas manusia sebagai pelaksana aparatur daerah dari pada persoalan kuantitasnya. Mengingat aparatur daerah memegang peran sentral sebagai perencana, pelaksana sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pada saat otonomi daerah ini pembinaan dan pengembangan aparatur daerah merupakan kebutuhan yang diutamakan untuk dikerjakan dengan melakukan pembinaan melalui program pendidikan dan pelatihan baik seara formal maupun informal.

Menurut Yosef Riwu Kaho arah pendidikan dan pelatihan sebaiknya lebih banyak diarahkan pada sistem pengelolaan pemerintah yang meliputi teknik perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan daerah. Untuk mendapatkan aparatur daerah yang berkualitas pada saat penerimaan dan rekrutmen perlu dilakukan secara selektif dan sistematis dan diperlukan juga penggalakan sistem pengembangan staf dan pemberian kompensasi yang memadai untuk menumbuhkan motivasi kerja yang tinggi terhadap aparatur daerah.⁹⁵

Kualitas dari aparatur pemerintah daerah yang handal dan berbobot, J. Kristiadi sebagai mana dikutip oleh S.H. Sarundajang memberikan tolah ukur penilainya dengan cara memberikan ciri-ciri dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai aparatur pemerintah daerah adalah:⁹⁶

1. Tanggungjawab.

Berkenaan dengan meningkatnya kesadaran tentang keinginan aparatur negara untuk memberikan pertanggung jawaban (*Accountability*) dan kewenangan memegang tanggung gugat. Dalam hal ini aparatur negara harus bertindak tetapi dalam cara bertindak tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan kewenangannya.

2. Transparan (*Transparancy*)

Keterbukaan yang bertalian dengan keinginan menyelenggarakan administrasi negara yang terbuka dan mudah dijabarkan yang berlandaskan susunan konstitusional dan keabsahannya.

⁹⁵. Yosef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, dalam Krisna D. Darumurti dan Uumbu Rauta, *Op cit*, hal. 68.

⁹⁶. Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta 199, Dalam Krishna D. Darumurti dan Umri Rauta, *Op cit*, hal. 69.

3. Efisien dan efektif (*Efficien and Effective*)

Berhubungan dengan kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan kemanfaatan segala sumber daya dan dana tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan sejauh mana pelaksanaan tugas tercapai untuk secara maksimal.

4. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Ikut menciptakan kondisi masyarakat dimana masyarakat dan aparatur negara yang melaksanakan tugas memberikan dukungan kepada kelembagaan masyarakat tentang hasil-hasil dari tugas sosialnya.

5. Partisipasi (*Participation*)

Jaminan bahwa perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat didalam masyarakat keseluruhan telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyatakan keinginan-keinginan dan harapan-harapan mereka terhadap pemerintah.

6. Keadilan (*Equity*)

Berkaitan dengan suatu jaminan bahwa terdapat keadilan dan pendistribusian yang cukup atas sumber-sumber bagi mereka yang berhak menerimanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sesuai dengan metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi pustaka yang didukung dengan studi lapangan, maka hasil penelitian mengenai pelaksanaan penanaman modal asing setelah dikeluarkan undang-undang otonomi daerah di Sumatera Barat, data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder dengan cara menelaah berbagai literatur, dokumen dan peraturan-peraturan yang ada serta pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dilokasi penelitian pada kantor Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal daerah propinsi Sumatera Barat dan perusahaan penanaman modal asing yang dijadikan objek penelitian yaitu PT. AMP, Plantation, PT. Gersindo Minang Plantation, PT. Incasi Raya, PT. Permata Hijau Pasaman, dan PT. Sumber Andalas Kencana di Padang. Hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkan Undang-undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat

1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Penanaman Modal Asing

1.1. Tata cara dan Prosedur Penanaman Modal Asing

Dalam pelaksanaan penanaman modal asing sebelum dan sesudah dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat terdapatnya perbedaan, dimana sebelum UU Otonomi Daerah dikeluarkan Surat Persetujuan (SP) tidak boleh diterbitkan di daerah, tapi sekarang dengan adanya undang-undang tersebut Surat

Persetujuan boleh diterbitkan di daerah, begitu juga dengan tatacara dan prosedur, perijinan atau persetujuan penanaman modal asing dilaksanakan secara nasional baik penanaman modal asing yang dilaksanakan di negara-negara maupun di daerah-daerah yang ditentukan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Guna memperlancar pelaksanaan penanaman modal, ketentuan tata cara dan prosedur penanaman modal yang diatur dengan Keppres. No. 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal yang telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/SK/1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal, telah ditentukan prosedur yang harus ditempuh dalam melayani permohonan untuk diizinkan melaksanakan penanaman modal asing.

Dalam SK Meninves No. 38/SK/1999 ditentukan sebagai berikut :

1. Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka UU No. 1 Tahun 1967 jo UU No. 11 Tahun 1970 harus mengajukan permohonan kepada Meninves/Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing.
2. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh keputusan.

3. Persetujuan dan penolakan Presiden mengenai penanaman modal disampaikan kepada Ketua BKPM.
4. Apabila permohonan mendapat persetujuan Presiden maka BKPM menyampaikan Keputusan Presiden tersebut kepada calon investor yang juga berlaku sebagai persetujuan prinsip.
5. Untuk memperlancar penanaman modal meninves/ketua BKPM menyampaikan rekaman Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden kepada instansi terkait.
6. Apabila penanaman modal telah memperoleh keputusan Presiden berupa persetujuan penanaman modal dan telah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan maka meninves/ketua BKPM mengeluarkan :
 - a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 - b. Keputusan pembelian fasilitas/keinginan biaya masuk dan pungutan impor lainnya.
 - c. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi ketua BKPMD untuk menerbitkan izin kerja bagi tenaga kerja asing pendatang.
 - d. Izin Usaha Tetap (IUT) atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang.
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengeluarkan izin lokasi sesuai Rencana Tata Ruang, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati atau Walikota yang bersangkutan mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian juga dikeluarkan izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) oleh Sekwilda Tingkat II atas nama Bupati atau Walikota yang bersangkutan.
9. Setelah memperoleh surat persetujuan penanaman modal dari ketua BKPM, investor dalam waktu yang telah ditetapkan menyampaikan barang-barang modal dan bahan baku serta bahan penolong yang akan diimpor. Berdasarkan penilaian terhadap daftar induk maka ketua BKPM mengeluarkan ketetapan mengenai fasilitas atau keringanan biaya masuk dan pungutan impor lainnya.
10. Setiap perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan presiden, termasuk perubahan modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan oleh ketua BKPM.

1.2. Perijinan Penanaman Modal Asing

Bahwa penanaman modal merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional dan penyediaan lapangan kerja sehingga sudah merupakan tekad bersama agar pelayanan penanaman modal dapat dilaksanakan secara cepat dan efisien sebagaimana yang diinginkan dengan memperhatikan sifat atau

karakteristik dunia usaha. Apalagi dengan pelaksanaan kewenangan penanaman modal di era otonomi daerah dimana Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK), Instansi Penanaman Modal Propinsi (IPMP), dan BKPM akan memberikan persetujuan perijinan pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Persetujuan/perijinan penanaman modal merupakan instrumen pelayanan publik agar dapat terjadi dan dilaksanakannya penanaman modal yang direncanakan. Keputusan administrasi dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal merupakan persetujuan awal dan persetujuan prinsip untuk penyelenggaraan penanaman modal dan merupakan rencana yang belum direalisasi, baik mengenai lokasi produksi pemasaran, penggunaan tenaga kerja, penggunaan tanah, penanaman modal maupun permodalan, termasuk fasilitas penanaman modal yang akan diberikan oleh pemerintah, hal tersebut betul-betul diperhatikan, mengingat betapa penting dan strategisnya peranan penanaman modal untuk pengembangan wilayah dan perekonomian di daerah itu sendiri maupun pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Dalam perusahaan yang akan merealisasikan penanaman modal antara lain apabila sudah mengurus persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal dan bahan baku, perijinan tenaga kerja asing dan perijinan daerah seperti izin lokasi, izin HO/UUG,

IMB, sertifikat hak atas tanah. Untuk mengurus izin-izin daerah tersebut, selama ini perusahaan membayar retribusi kepada Pemda sesuai dengan Ketentuan/Perda yang berlaku, sedangkan persetujuan/perijinan penanaman modal lainnya selama ini tidak ada pungutan apapun kecuali untuk perijinan tenaga kerja asing yang harus membayar dana pengembangan keahlian dan keterampilan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan persetujuan/perijinan penanaman modal tidak dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi sebaiknya harus dapat diperlancar, disederhanakan dan dipercepat, sehingga para investor merasa terbantu dan dapat mempercepat realisasi penanaman modalnya yang tentunya akan dapat menampung tenaga kerja, memproduksi barang/jasa, menumbuh kembangkan usaha penunjang yang merupakan efek ganda dari penanaman moda tersebut dan Pemerintah termasuk Pemda akan mendapatkan berbagai sumber pajak dan berbagai retribusi didaerah.

Apabila penanaman modal telah memperoleh surat persetujuan penanaman modal asing dari Kepala Perwakilan RI wajib mengajukan permohonan perijinan pelaksanaan kepada Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKMD yang mana pemberian

perijinan seperti izin lokasi, hak guna pembangunan, hak guna usaha, izin mendirikan bangunan dan izin undang-undang gangguan/HO, dilaksanakan melalui pelayanan satu atap sesuai dengan kewenangan masing-masing di bawah koordinasi Bupati/Walikota, Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Petunjuk pelaksanaan koordinasi pelayanan satu atap diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.

Perijinan penanaman modal bagi investor memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yaitu memberikan kepastian hukum, mengingat perijinan penanaman modal merupakan keputusan administrasi Pemerintah yang memberikan legalitas kepada investor untuk merealisasikan proyeknya atau beroperasi secara komersial dan merupakan ketetapan untuk memanfaatkan hak atas fasilitas yang diperoleh dari Pemerintah serta sebagai kewajiban untuk mematuhi ketentuan proyek⁹⁷ dan ketentuan fasilitas maupun semua peraturan perundang-perundangan sektoral yang terkait. Pemberian fasilitas fiskal baik fasilitas bea masuk maupun fasilitas perpajakan hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

⁹⁷. Hasil Wawancara dengan Staf Bidang Perijinan Kantor Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Propinsi Sumatera Barat Tanggal 26 Agustus 2002.

Bagi Pemerintah perijinan memiliki fungsi dan peran sebagai alat kontrol untuk melakukan evaluasi dan pengendalian serta pengawasan yang selanjutnya dapat dijadikan ukuran/rujukan untuk pengukuran efektifitas serta perencanaan kebijakan Pemerintah secara makro ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Pemerintah dalam perijinan ini yang menerapkan fungsi pelayanan pra investasi, pelaksanaan investasi maupun paska investasi. Dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada penanam modal secara maksimal.⁹⁸

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibidang perijinan sangat diperlukan keterpaduan pelayanan dan koordinasi pelayanan antar instansi tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Tingkat Pusat, sehingga masalah yang timbul dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing dapat diselesaikan dan direalisasikan sesuai dengan yang telah disetujui Pemerintah diharapkan pada akhirnya Instansi Penanaman Modal yang prima dan baik kepada masyarakat dunia usaha secara transparan, konsisten, efisien, mudah, sederhana, murah, cepat dan tepat.

1.3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Asing

Bahwa realisasi penanaman modal dari proyek-proyek penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing sebenarnya jauh lebih besar, untuk itu diperlukan upaya yang lebih

⁹⁸. Hasil Wawancara dengan Staf Bidang Perijinan Kantor Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Propinsi Sumatera Barat Tanggal 26 Agustus 2002.

intensif dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang antara lain dilaksanakan melalui upaya meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan perusahaan. Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal serta usaha-usaha lain agar pengendalian pelaksanaan penanaman modal dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengendalian atau control pelaksanaan kegiatan penanaman modal merupakan suatu hal penting untuk dilaksanakan supaya kegiatan penanaman modal yang telah diizinkan atau persetujuan telah dikeluarkan dapat dilaksanakan sesuai dengan realisasi yang diinginkan atau disetujui, maka pengendalian atau control sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan proyek-proyek penanaman modal tersebut. Karena para investor menjalankan proyek-proyek atau bidang usaha yang berbeda dari persetujuan dengan realisasinya, atau persetujuan tidak sebanding dengan realisasi yang dilaksanakan .

Apalagi perkembangan penanaman modal di Indonesia sejak terjadinya krisis moneter telah mengalami kelesuan yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional, salah satu indikator dapat dilihat dari turunnya jumlah proyek dan mulai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang telah disetujui dan realisasinya. Bahwa penanaman modal

dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pembangunan perekonomian Indonesia. Tetapi gambaran sukses penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya persetujuan yang diterbitkan melainkan lebih kepada besarnya realisasi yang dilaksanakan atas persetujuan tersebut.

Pengendalian atau control merupakan salah satu fungsi dalam manajemen pemerintah dan pembangunan yang bertugas untuk mendorong dan mengembangkan agar suatu kegiatan pemerintah ataupun program pembangunan dapat terlaksana dengan lancar, dapat mencapai tujuan yang diharapkan sehingga mampu menghasilkan dampak positif maksimal seperti yang dikehendaki dan dengan mencegah timbulnya dampak negatif yang merugikan/membahayakan ataupun memperkecil/meminimalkan penyimpangan dari tujuan pembangunan. Sedangkan dalam bidang penanaman modal pengendalian dapat bermakna :⁹⁹

1. Dalam konteks makro : mendorong lancarnya kegiatan penanaman modal yang dilakukan para investor sehingga kegiatan penanaman modal yang terjadi dapat segera menghasilkan dampak peningkatan ekonomi secara nyata/efektif, tanpa menimbulkan kerugian, gangguan dan keluhan dari/bagi masyarakat, kepentingan bangsa/negara maupun investasi sendiri.

⁹⁹ Pusat Penelitian dan Pelatihan BKPM, *Materi Pelatihan Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, (Selanjutnya Bagian III)*, Jakarta, 2002, hal. 2.

2. Dalam konteks makro (investor proyek per proyek) : membantu investor atau sesuai dengan bidang kompetensi BKPM/Instansi Penanaman Modal di daerah agar implementasi pembangunan proyek berjalan lancar cepat, aman dan efisien sehingga proyek dapat segera beroperasi komersial tanpa menimbulkan kerugian, keluhan maupun gangguan akibat dibangunnya dan beroperasinya proyek terhadap masyarakat atau kepentingan umum, kepentingan negara maupun kepentingan investor sendiri.

Dengan adanya pengendalian dalam kegiatan penanaman modal akan dapat membantu untuk meningkatkan pelaksanaan penanaman modal tersebut, supaya realisasi dilaksanakan melebihi dari persetujuan yang telah diperoleh, sehingga mampu mendorong perekonomian terutama di bidang penanaman modal, pengendalian juga bisa mencegah timbulnya kerugian dan penyimpangan yang membawa dampak negatif. Dalam hal ini kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi :

1. Pemantauan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai realisasi atas kegiatan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan.
2. Bimbingan diberikan dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dengan tujuan agar perusahaan modal dapat melaksanakan proyeknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Bahwa dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal antara pemantauan, bimbingan dan pengawasan harus ada saling berhubungan dan saling berkaitan. Dimana pemantauan dalam memberikan kegiatan penanaman modal yang akan dikembangkan terutama dalam melaksanakan proyek-proyek perusahaan. Apabila timbulnya perselisihan atau permasalahan dalam kegiatan perusahaan akan bisa didukung dengan adanya bimbingan untuk penyelesaian perselisihan tersebut. Untuk itulah dalam melakukan proyek-proyek pada perusahaan agar dapat menghasilkan yang melebihi dari yang direncanakan dan berjalan dengan baik, efektif dan efisien diperlukan sekali pengawasan dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal tersebut.

Pengendalian penanaman modal dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai peranan sebagai berikut :¹⁰⁰

1. Evaluasi

Evaluasi terhadap hasil pembangunan yang diterima baik berupa data realisasi tiap proyek laporan kegiatan penanaman modal ataupun dari sumber-sumber lainnya perlu dilakukan untuk

¹⁰⁰. Ibid, hal. 3.

mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi :

- a. Pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan dan atau perijinan lainnya.
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal.
- c. Bahan kajian lebih dalam untuk mendapatkan gambaran kegiatan usaha yang ada di Indonesia yang perijinannya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Instansi Penanaman Modal selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan dibidang penanaman modal selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan di bidang penanaman modal.

2. Fasilitas Pemerintah Bagi Peningkatan Realisasi Penanaman Modal

Bahwa tidak semua investor dapat melaksanakan rencananya dengan mudah, baik dalam hal penyelesaian yang berkaitan dengan pelaksanaan secara administratif maupun yang berkaitan penyelesaian secara fisik, untuk itu peranan distribusi pemerintah melalui pengendalian sangat besar dalam mendorong terjadinya :

- a. Kelancaran dan kecakapan penyelesaian kegiatan penanaman modal.

- b. Efisiensi kegiatan penanaman modal termasuk meminimalisasi penggunaan sumber daya (beban biaya dan waktu) yang sangat memberatkan investor.
 - c. Efektivitas kegiatan pembangunan atau penanaman modal agar hasil dan dampak positif yang diinginkan dalam kegiatan penanaman modal dapat benar-benar terwujud.
3. Deteksi deviasi dan penindakan atas pelanggaran pengawasan mempunyai peranan yang penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat menghambat/menjauhkan/menggagalkan pencapaian tujuan pembangunan serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu/merugikan/membahayakan kepentingan umum, investor maupun kepentingan negara.

Pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan atau deviasi dalam pelaksanaan penanaman modal.

Lemahnya pengawasan dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, bahkan apabila hal ini terjadi, maka tidak hanya negara yang dirugikan tetapi masyarakat akan ikut menanggung beban atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin sulit dan lama waktu yang diperlukan untuk penyelesaiannya akan semakin banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat dan negara maupun investor itu sendiri. Deteksi atas terjadinya

penyimpangan selanjutnya harus ditindak lanjuti dengan penindakan baik yang dilakukan oleh investor maupun oleh aparat pemerintah secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan namun demikian diperlukan pula pertimbangan yang didasari oleh kebijaksanaan yang adil dan mendidik.

2. Kebijakan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat

2.1. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat

Dalam rangka meningkatkan pembangunan penanaman modal, pemerintah telah berupaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan melakukan berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi secara terus menerus. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, yang berlanjut pada krisis ekonomi dan sosial politik berlangsung terus belum ada tanda-tanda berakhir, mengakibatkan perekonomian Indonesia terpuruk dan dibarengi pula dengan menurunnya kegiatan penanaman modal.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat memulihkan ekonomi khususnya sektor riil dan meningkatkan serta mengarahkan kegiatan penanaman modal asing melalui Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Surat Keputusan No. 37/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Gubernur Propinsi dalam hal ini ketua BKPM memberikan persetujuan, persetujuan fasilitas dan perijinan pelaksanaan penanaman modal. Dengan

dikeluarkan Surat Keputusan Meninvest tersebut merupakan suatu kemudahan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal asing, yang mana dulu segala masalah pelaksanaannya dilakukan di Pusat atau Surat Persetujuan telah boleh diterbitkan di daerah dengan biaya murah dan pelayanannya cepat. Hal ini merupakan salah satu merupakan salah satu dampak dari undang-undang otonomi daerah.¹⁰¹

Untuk mendorong pengembangan penanaman modal di suatu negara maupun daerah diperlukan beberapa kebijakan yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Bahwa investor menanamkan modalnya di daerah saat ini masih sangat berat walaupun telah dikeluarkan beberapa kebijakan oleh Pemerintah. Ada beberapa alasan diantaranya :

1. Swasta Nasional maupun di daerah masih menghadapi beberapa permasalahan internal di masing-masing perusahaannya sendiri, seperti hutang perbankan, rendahnya tingkat produksi dan pemasaran, masalah perburuhan dan sebagainya. Sementara itu kalangan perbankan masih sibuk dengan masalah restrukturisasi perbankan, sehingga belum banyak berperan kembali seperti biasanya dalam mendukung pembiayaan kegiatan penanaman modal.

¹⁰¹. Hasil wawancara dengan staf Bidang Perijinan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat, tanggal 28 Agustus 2002.

2. Sebagai dampak dari globalisasi ekonomi, persaingan dalam menarik minat penanaman modal tidak saja terjadi antara negara berkembang dengan negara maju, tetapi juga negara dengan daerah.
3. Sebagai akibat perkembangan ekonomi sosial politik dan keamanan di tanah air akhir-akhir ini, maka para investor masih enggan melaksanakan penanaman modalnya di Indonesia dan penilaian terhadap peringkat daya saing global Indonesia masih cukup memprihatinkan.

Apabila pemulihan kepercayaan dan minat para investor lokal maupun asing dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Indonesia dimulai dan ditunjang terus dengan perkembangan perekonomian nasional dan perkembangan politik dan keamanan di dalam negeri yang semakin membaik diharapkan hal ini dapat menjadi titik awal bangkitnya kembali perekonomian nasional dalam memperhatikan perkembangan keadaan perekonomian nasional dewasa ini, dalam menjalankan kegiatan di bidang penanaman modal diarahkan untuk :

1. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat yang didukung oleh transparansi dan konsistensi kebijakan penanaman modal dan pengembangan penanaman modal.
2. Memperluas pemerataan kesempatan berusaha dengan memberikan peluang yang sama pada semua pelaku ekonomi.

3. Meningkatkan peran usaha terutama usaha kecil, menengah dan koperasi dengan memberikan kesempatan untuk bermitra usaha dengan pengusaha besar.
4. Memperluas basis dan peningkatan daya saing perekonomian menuju kemandirian ekonomi dan memberikan perhatian pada sektor-sektor yang tidak banyak ketergantungannya dengan komponen impor seperti agrobisnis, bidang kegiatan yang berbasis sumber daya alam (*Resources Based Industry*) dan sektor yang berorientasi ekspor dengan tetap mengutamakan peningkatan produksi.
5. Menganut prinsip-prinsip mekanisme pasar terkelola dimana kegiatan ekonomi terutama diserahkan kepada prakarsa dan partisipasi masyarakat (dengan pengendalian Pemerintah) yang ditunjang oleh dukungan dan kendali sosial dan masyarakat menurut prosedur konstitusional yang berlaku.
6. Memperkecil kesenjangan baik antara pelaku ekonomi, antar wilayah dan antar skala usaha.
7. Mendorong kerjasama internasional yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
8. Mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, termasuk memelihara keselarasan dan kelestarian lingkungan.

Berbagai cara dilakukan untuk memulihkan perekonomian nasional, begitu juga dengan penanaman modal, untuk menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing dan mengembalikan citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal ditingkat nasional sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan penanaman dengan “*One stop service*”.
2. Revitalisasi organisasi BKPM sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan masyarakat.
3. Peningkatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri dalam menarik investor.
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor Indonesia.
5. Melindungi dan mempertahankan penanaman modal yang telah ada agar tidak mengalihkan usahanya keluar Indonesia.
6. Meningkatkan jaringan informasi penanaman modal di dalam dan luar negeri.

Sehubungan dengan kebijaksanaan nasional dan memperhatikan kondisi kebijaksanaan yang ada di daerah, maka disusun pula berbagai kebijaksanaan nasional dalam mendorong pengembangan dan peningkatan penanaman modal di Sumatera Barat. Adapun beberapa kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah :¹⁰²

1. Pengembangan sumber daya aparatur penanaman modal untuk memberikan layanan prima kepada dunia usaha dan masyarakat.

¹⁰². Hasil Wawancara dengan staf Bidang Perencanaan Kantor Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat, tanggal 29 Agustus 2002.

2. Melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap potensi yang dapat dikembangkan untuk penanaman modal.
3. Menyusun data dasar sebagai pedoman dalam menyusun rencana kedepan, pengembangan penanaman modal.
4. Pengembangan sistem pelayanan perijinan kepada pihak PMA/PMDN yang cepat, tepat dan transparan.
5. Pengembangan sistem promosi yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya baik PMA/PMDN.
6. Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan pihak dalam dan luar negeri.
7. Peningkatan kerjasama penanaman modal antara pihak PMA dan PMDN dengan usaha kecil, menengah dan koperasi.
8. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan penanaman modal dengan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat, karena faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah penanaman modal untuk itu sangat diperlukan pelaksanaannya, rencana strategi tersebut akan dituangkan dalam beberapa program yang dapat mengembangkan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam perkembangan

penanaman modal, peningkatan pelayanan kepada investor perlu dilakukan baik oleh birokrasi pemerintah maupun oleh pelaku usaha lainnya, terutama kepada investor dari luar Sumatera Barat serta kebijaksanaan dalam pengembangan penanaman modal hendaknya ditetapkan untuk mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya.

Apalagi sekarang ini dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut membawa konsekwensi bahwa daerah Otonom diberi kebebasan untuk menentukan arah kebijaksanaan yang akan dilakukan untuk melaksanakan pembangunan didaerahnya, khusus untuk penanaman modal diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa urusan penanaman modal termasuk urusan pemerintahan daerah, maka pelaksanaannya dalam hal ini ditentukan oleh pemerintahan daerah sendiri melalui DPRD nya sebagai akibat dari Otonomi Daerah ini masing-masing daerah melalui Badan Legislatif membentuk Struktur dan susunan Badan-badan atau Lembaga yang akan mengakomodir kepentingan daerah termasuk badan yang mengurus pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah. Hal ini menyebabkan timbulnya bermacam-macam nama untuk sebutan Lembaga penanaman modal di tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota.¹⁰³

¹⁰³ BKPPMD Propinsi Sumatera Barat, *Kebijakan Penanaman Modal di Propinsi Sumatera Barat*, Makalah Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Rangka Otonomi Daerah, Padang, 2001, hal. 2.

Untuk Propinsi Sumatera Barat yang juga harus menyesuaikan dengan Otonomi Daerah urusan penanaman modal ini harus pula disesuaikan dengan kondisi dan sifat layanan yang akan diberikan pada investor. Sesuai dengan pola pemikiran-pemikiran yang mengacu kepada kepentingan-kepentingan daerah dan tugas-tugas yang akan diemban oleh Instansi/Badan sebagai perangkat Otonomi Daerah, maka untuk Propinsi Sumatera Barat badan yang mengatur urusan penanaman modal bernama Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah diatur dengan Perda No. 6 Tahun 2001 jo SK Gubernur No. 3 Tahun 2001.¹⁰⁴

Ditengah berbagai perkembangan tersebut, pemerintah telah memfokuskan upaya untuk melaksanakan reformasi di segala bidang dengan fokus utama mewujudkan masyarakat madani (*Civil Society*) dalam kehidupan berpemerintah, bermasyarakat dan bernegara salah satu aspek dari tekad tersebut adalah dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk berperan serta dalam proses pembangunan melalui pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah dengan diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, maka perkembangan penanaman modal banyak diarahkan ke daerah dan persaingan antar daerah terjadi karena kedua undang-undang

¹⁰⁴ *Ibid.* hal. 3

hanya menguntungkan bagi daerah yang berpotensi tinggi, baik di bidang sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dimana daerah yang berpotensi menjadi sangat berkembang, sedangkan daerah yang minus akan mengalami kemiskinan dan tidak berkembang begitu juga dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah cukup mengandung risiko terutama bagi daerah yang kurang memiliki sumber daya alam dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Untuk itu diperlukan sekali aparatur pemerintah yang handal, efisiensi, kreatifitas, disiplin dan produktivitas kerja yang tinggi, serta diperlukan juga pengawasan dari pemerintah pusat.

Disamping itu sangat dibutuhkan peran serta dan dukungan masyarakatnya dalam membangun dan mengembangkan potensi daerahnya, agar kedua undang-undang tersebut akan membawa perkembangan yang berarti. Apalagi adanya peluang dan minat para investor asing untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut. Hal ini semua tidak lepas dari pada kewenangan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayah daerahnya.

2.2. Peluang dan Prospek Penanaman Modal di Sumatera Barat

Dunia usaha pada semua tingkatan sedang mengalami kesulitan baik untuk mempertahankan eksistensi apalagi untuk mengembangkan sikap bisnisnya karena adanya tekanan resesi yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, tetapi ada beberapa faktor ekonomi tertentu seperti pertanian, perkebunan, pertambangan non mineral dan pariwisata serta beberapa bidang usaha yang berkaitan dengan perdagangan ekspor, masih memperhatikan kinerja dan prospek yang cukup menggembirakan serta mempunyai peluang yang cukup besar dalam dunia usaha. Apalagi perusahaan-perusahaan yang mengelola sektor-sektor tersebut mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengembangkan hasil produksinya.

Perkembangan sektor-sektor tersebut juga ditunjang oleh kesediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sudah berpengalaman dan terampil dibidangnya. Bahwa potensi sumber daya manusia merupakan faktor pendorong untuk melakukan kegiatan usaha terutama daerah-daerah yang memiliki potensi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Berarti adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya keuangan, sumber daya sarana prasarana dan lain-lainnya.

Dengan menggunakan beberapa kriteria untuk menilai potensi yang ada pada beberapa bidang usaha antara lainnya kesediaan lahan tenaga kerja, dukungan prasarana, tenaga listrik, sumber air, bahan baku dan tentu masih terbuka peluang penanaman modal, terutama daerah Sumatera Barat yang masih banyak potensi daerahnya untuk dikembangkan dan dilaksanakan penanaman modal asing, dan daerah tersebut juga mempunyai peluang di bidang pariwisata yang dapat diandalkan.

Bahwa semakin terbatasnya lahan dan sumber daya alam untuk dikembangkan di Sumatera Barat, maka pemilihan potensi penanaman modal harus benar-benar tepat dan menarik bagi investor yang mana potensi yang diharapkan dengan kondisi tersebut adalah sektor pertanian atau sektor perkebunan secara umum dan sektor pariwisata. Hal ini cukup didukung dengan ketersediaan lahan terutama pada lahan-lahan dataran tinggi serta pariwisata yang ditunjang dengan kondisi alam, budaya dan adat Minangkabau. Potensi penanaman modal yang diprioritaskan untuk dapat menarik minat investor adalah :¹⁰⁵

1. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. Usaha pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam dan budaya.

¹⁰⁵. Syahril Syarif, Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat, Makalah Seminar Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat, Padang, 2002 hal 5.

3. Agribisnis yang tidak memerlukan lahan yang luas seperti peternakan, perkebunan, perikanan, pertanian organik dan pertanian campuran.
4. Industri pengolahan dan perdagangan komoditi spesifik daerah.

Pemanfaatan potensi yang ada sangat perlu didukung dengan pembangunan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Ketersediaan sarana prasarana yang cukup seperti jalan, listrik, pelabuhan dan sebagainya akan mendukung pihak investor untuk menanamkan modalnya. Keinginan investor untuk melaksanakan modalnya akan memperhitungkan hal tersebut terutama dalam transportasi bahan baku, peralatan dan mesin serta untuk pemasaran hasil produksi yang diperolehnya.

Dimana sesuai dengan kondisi, morfologis daerah Sumatera Barat yang bersifat homogen pada saat ini memang potensi ekonomi yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan penanaman modal yang didominasi oleh sektor ekonomi dan pertambangan seperti berikut :¹⁰⁶

1. Sektor Pertanian.

Pada sektor ini potensi ekonomi yang memiliki prospektif meliputi sub sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang sebenarnya hampir setiap daerah, terutama daerah kabupaten.

¹⁰⁶. Muchlis Anwar. *Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota Dalam Pengembangan Investasi di Daerah*, Makalah Diskusi Panel untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan modal di Sumatera Barat, Padang, 2002, hal 14.

2. Sektor Industri

Pada sektor perindustrian potensi yang dapat dikembangkan meliputi industri pengolahan kelapa sawit, karet, pengolahan brikets dan industri garmen serta industri semen dan batu kapur.

3. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata ini pada dasarnya masih belum banyak dikelola, sementara potensi yang memiliki nilai ekonomi hanya meliputi wisata alam dan hunting, sementara untuk wisata budaya dinilai kurang prospektif.

4. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan yang memiliki potensi dan prospektif ekonomis adalah pertambangan batu bara, granit, marmer dan emas.

5. Sektor Konstruksi

Meliputi pembangunan proyek-proyek strategis seperti pembangunan Bandara Ketaping, Kelok Sembilan dan lain-lain. Dilihat dari komposisi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masing-masing daerah sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor lainnya.

Khusus dalam rangka mengatur dan mengembangkan peluang usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan/pengelolaan jenis sumber daya alam dan pelaksanaannya pada kegiatan penanaman

modal, Kantor BPM-PBUMN pada saat ini sedang meninjau kembali beberapa paket kebijaksanaan sebagai berikut :¹⁰⁷

1. Perubahan Peraturan Pemerintah No. 20 / 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA dengan menghapuskan persyaratan “*rescue*” bagi pembelian saham oleh investor asing dari perusahaan yang sudah berdiri.
2. Penyusunan Daftar Negatif Investasi (DNI) baru yang merupakan penyederhanaan dari DNI yang berlaku sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 1998 melalui Keppres No. 96 tahun 1998, sehingga lebih memberikan kekuasaan kepada calon investor untuk memilih bidang usaha yang akan dijalankan.
3. Penyusunan daftar bidang usaha yang khusus diladangkan untuk usaha kecil dan bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar/menengah dengan syarat melakukan kemitraan dengan usaha kecil untuk menyempurnakan ketentuan yang berlaku sebelumnya yang telah ditetapkan melalui Keppres No. 99 Tahun 1998.

Apalagi dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas mendatang, persaingan antar daerah dalam menjual potensinya dan merebut calon investor potensial akan semakin terbuka. Dalam

¹⁰⁷. Hidayatullah Suralaga, *Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman modal Daerah Sumatera Barat*, Makalah Pengarahan Deputy Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal Menteri Negara Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Padang, 200, hal 6.

kaitan ini, kesiapan daerah terutama sumber daya manusia, pengelola dan infrastruktur yang tersedia akan sangat mendukung dalam merebut minat para investor untuk bersedia menanamkan modalnya di daerah. Disamping itu faktor keamanan, kepastian hukum, pelayanan publik tidak kalah pentingnya untuk menarik minat calon investor potensial.

Dengan memperhatikan peluang dan prospek penanaman modal di suatu daerah, para pemilik modal akan mempertimbangkan dengan sangat hati-hati, faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pada penanaman modal dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya, maka adanya pertimbangan-pertimbangan seperti keamanan berusaha, kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dan keuntungan. Dari pertimbangan tersebut dapat dipahami kondisi Indonesia pada umumnya dan daerah pada khususnya saat ini masih mengalami perekomian yang tidak stabil, tentu keadaan ini bisa berakibat menurunnya minat investor untuk menanamkan modalnya.

Bahwa besarnya pengaruh faktor non ekonomi seperti politik dan keamanan dalam kehidupan bernegara saat ini membawa implikasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan regional atau daerah, yang mana kondisi ini sangat menyulitkan untuk menyusun prediksi pertumbuhan penanaman modal, khususnya pada daerah Sumatera Barat untuk beberapa tahun ke

depan. Maka sangat penting untuk mencegah terjadinya faktor non ekonomi tersebut, agar rencana dan proyeksi mengenai pertumbuhan perekonomian dan kegiatan penanaman modal daerah Sumatera Barat untuk yang akan datang terlaksana dengan cepat dan baik.

2.3. Peningkatan Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat

Pada dewasa ini bangsa-bangsa di dunia tengah memasuki era perdagangan bebas masing-masing dengan kesadaran tinggi berupaya untuk mengoptimalkan manfaat dari perkembangan "*Borderless World Economy*" dengan meningkatkan daya saing. Apalagi dalam era sekarang ini kekuatan pasar sangat dominan sehingga setiap negara harus mampu mengakomodasi pasar secara lebih efektif sesuai dengan ketentuan *World Trade Organization (WTO)* arus barang dan jasa harus bebas tanpa hambatan antar negara dan begitu pula untuk berbagai sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, teknologi dan modal akan mengalir cepat dari dan ke berbagai wilayah.¹⁰⁸

Bersamaan dengan integrasi perdagangan dunia juga terjadi proses integrasi keuangan dunia yang mana arus dana terkait dengan proses globalisasi dalam pasar modal internasional. Maka arus dana di negara-negara maju yang sebelumnya hanya berputar di antara negara-negara maju kini telah mengalir ke negara-negara

¹⁰⁸ Direktur Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Prasarana BKPM, *Kebijakan Penanaman Modal dalam Era Otonomi Daerah*, Makalah Forum Perencanaan dan Peningkatan Profesi Penanaman Modal, Padang, 2002, hal. 3.

berkembang, termasuk ke negara Indonesia. Aliran masuknya modal internasional dapat melalui penanaman modal langsung, perbankan maupun pasar modal dalam negeri.

Dalam hal inilah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak mudah, apalagi mengingat faktor-faktor yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, misalnya kemampuan untuk meningkatkan konsumsi domestik dan penerimaan devisa ekspor sangat terbatas, sehingga tidak ada cara lain kecuali dengan meningkatkan kegiatan penanaman modal tersebut. Untuk itu sangat diperlukan strategi yang mampu untuk menciptakan iklim yang lebih menarik bagi penanaman modal asing dalam merebut arus penanaman modal di era globalisasi ini.

Seiring dengan perkembangan arus globalisasi, bangsa-bangsa menghadapinya dengan langkah-langkah yang terarah dengan peningkatan daya saing melalui transformasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, modernisasi manajemen usaha serta pembaharuan kelembagaan birokrasi, deregulasi dan debirokratisasi pengembangan e-commerce yang pada dasarnya mengacu pada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan produk dan distribusi barang dan jasa dalam pasar domestik regional dan global.

Apabila negara Indonesia mampu menciptakan dan meningkatkan daya saing yang lebih tinggi dari negara-negara lain dan semua kegiatan untuk meningkatkan penanaman modal terlaksana dengan baik dan cepat serta adanya strategi menghadapi ekonomi global. Maka Indonesia pastilah menjadi incaran para investor asing untuk menanamkan modalnya, sehingga ada kecenderungan bagi investor untuk merelokasi ke negara-negara yang lebih kompetitif tidak akan terjadi.

Salah satu strategi untuk peningkatan penanaman modal adalah dengan diadakan perlindungan terhadap penanaman modal tersebut dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi peningkatan arus penanaman modal dari sektor swasta dan khusus bagi investor asing bermaksud untuk meningkatkan kerjasama antar bangsa dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat internasional. Dalam hal ini kedua pihak berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki iklim penanaman modal, memberikan perlakuan yang adil, perlindungan dan pengaman kepada penanaman modal asing yang masuk kedaerahnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan keamanan baik ditingkat nasional maupun daerah serta dengan dilaksanakannya ekonomi daerah secara efektif tahun 2001, yang mana pemerintah propinsi Sumatera Barat telah bertekad untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan mengacu kepada paradigma baru yang akan mendorong peningkatan peran serta

masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan ekonomi, menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator dan meningkatkan kompetensi administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰⁹

Bahwa peningkatan penanaman modal sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, juga mendapat perhatian utama dalam menyusun strategi yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi perekonomian daerah disamping memperhatikan dan berpedoman kepada strategi kebijakan peningkatan penanaman modal secara nasional. Adanya strategi kebijakan peningkatan penanaman modal asing merupakan suatu langkah yang perlu dilaksanakan agar para investor asing dapat menjalankan kegiatan pananaman modal dan mempunyai arah dan aturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping adanya perlindungan dalam peningkatan penanaman modal asing, juga telah disusun berbagai kebijaksanaan penunjang untuk dapat meningkatkan dan mendorong minat calon investor untuk melakukan kegiatan penanaman modal di daerah Sumatera Barat, usaha yang dilakukan untuk menarik minat investor tersebut adalah dengan meningkatkan promosi baik di dalam maupun di luar negeri.

¹⁰⁹. Hasil wawancara dengan Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat, 24 Oktober 2002.

Kegiatan promosi dilaksanakan dengan melihat kepada hasil-hasil kajian yang disusun dalam bentuk profil-profil peluang penanaman modal terhadap bidang-bidang usaha yang merupakan hasil dari proses penentuan prioritas yang terdapat dalam daftar negative investasi. Bahwa bahan-bahan promosi penanaman modal akan disebarakan baik di dalam maupun di luar negeri dengan bentuk dan format penyajian bahan promosi yang akan dibuat oleh unit promosi semenarik mungkin agar para investor dengan melihat saja sudah mengundang untuk membacanya.

3. Pengembangan Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Di Sumatera Barat.

3.1. Pemberdayaan Potensi Ekonomi Daerah

Keterkaitan potensi ekonomi dengan pertumbuhan penanaman modal di suatu daerah diyakini oleh banyak pihak memiliki hubungan yang positif dalam arti bahwa semakin banyak atau besar potensi yang dimiliki oleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan penanaman modal di daerah tersebut begitu juga sebaliknya semakin sedikit potensi ekonomi, maka semakin rendah pertumbuhan penanaman modal, bahkan dalam produksi yang lebih jauh ketersediaan potensi ekonomi sering dinilai memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Bahwa perbaikan kondisi perekonomian nasional setelah terjadinya krisis juga dirasakan ditingkat regional yang mana gejala perbaikan ekonomi tersebut ditunjukkan oleh perkembangan positif beberapa indikator ekonomi makro. Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan kinerja perekonomian adalah laju inflasi dimana angka laju inflasi daerah Sumatera Barat pada akhir tahun 1999 4,23 persen lebih baik apabila dibandingkan dengan angka inflasi sebelum krisis. Walaupun secara keseluruhan tidak semua sektor yang membaik, karena masih ada sektor yang belum bangkit dari keterpurukan akibat terjadinya krisis.¹¹⁰

Dalam perkembangan perekonomian daerah yang masih mengalami penurunan adalah bidang ekspor dan impor. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kinerja perekonomian melalui ekspor dan impor belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena penurunan nilai tukar rupiah yang mana nilai ekspor rupiah belum menunjukkan kestabilan serta masih belum pulihnya iklim usaha dan penanaman modal apabila dibandingkan dengan sebelum terjadinya krisis yang melanda Indonesia.

Daerah Sumatera Barat pada kondisi makro ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang positif, kecuali pada indikator ekspor dan impor yang pertumbuhannya negatif. Begitu juga dengan

¹¹⁰. Muchlis Anwar, *Op Cit*, hal 6.

pertumbuhan penanaman modal yang mengalami penurunan yang sangat besar baik yang berasal dari PMDN dan PAM. Penurunan penanaman modal tersebut tidak saja di Sumatera Barat, di daerah-daerah diluar Sumatera Barat juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Apabila diperhatikan antara pertumbuhan ekspor dan impor dengan pertumbuhan penanaman modal mempunyai hubungan yang sangat penting karena ekspor impor merupakan indikator makro ekonomi yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan penanaman modal di suatu daerah.¹¹¹

Dengan adanya usaha perbaikan dan meningkatkan perekonomian dengan mengembangkan potensi daerah, maka daerah-daerah berusaha untuk dapat merperdayakan segala potensi yang ada di daerahnya. Apalagi pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, agar pendapatan daerah dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Bahwa memperdayakan potensi daerah harus dikembangkan dengan semaksimal mungkin, terutama pada sektor-sektor yang banyak memberikan peluang untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki daerah tersebut yang mana pertumbuhan ekonomi

¹¹¹. Muchlis Anwar, *Op Cit*, hal 8.

Sumatera Barat dengan potensi yang besar dan terdapat sejumlah sektor banyak mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan potensi kecil dan sektor yang sedikit. Dimana sektor pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pariwisata serta sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah Sumatera Barat.

Disamping sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pariwisata dan sektor jasa-jasa masih ada beberapa sektor yang belum mampu untuk bangkit dari krisis multidimensi yang melanda Indonesia, seperti sektor bangunan, sektor pertambangan dan penggalan, sektor keuangan, sektor persewaan dan jasa perusahaan dan sektor lainnya yang masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Tetapi tetap diadakan usaha dan peningkatan agar pertumbuhan sejumlah sektor-sektor yang ada dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian.

Dalam hal penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, sektor yang paling diminati oleh para investor meliputi sektor pertanian, sektor industri, sektor perhotelan, sektor pariwisata dan sektor jasa-jasa lainnya. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalan paling banyak diminati oleh investor daerah atau lokal dalam pelaksanaan penanaman modal dalam negeri, karena investor lokal lebih mengetahui daerah-daerah yang banyak potensi bahan tambangnya untuk dapat digali, dikelola,

dimanfaatkan dan dikembangkan daripada investor asing. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa investor asing juga meminati sektor pertambangan dan penggalian tersebut.

Bahwa sekarang ini adanya kecenderungan bagi investor lokal dan investor asing dalam melaksanakan penanaman modalnya paling banyak diminati sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dan dipastikan dengan sebutan penanaman modal yang tidak merata pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, baik terhadap penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, karena mengingat potensi ekonomi disektor pertanian dna sektor pertambangan dan penggalian lebih didominasi oleh beberapa daerah kabupaten. Dimana sektor pertanian lebih didominasi oleh beberapa daerah seperti kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, Pasaman, Solok, Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian di dominasi oleh Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, Pasaman, Padang Pariaman, Agam dan 50 kota.¹¹²

3.2. Pemberdayaan Penanaman Modal Asing dalam Otonomi Daerah.

Berbagai upaya dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik, begitu juga dalam menghadapi dan mengatasi krisis

¹¹². Hasil wawancara dengan Staf Bidang Perencanaan Kantor Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat, Tanggal 26 Oktober 2002.

multidimensi dan berbagai masalah yang timbul dalam negara Indonesia. Segala usaha dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian, terutama dalam usaha memperdayakan potensi ekonomi. Termasuk memperdayakan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Menghadapi era globalisasi dalam perdagangan bebas tanpa hambatan, kekuatan ekonomi diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih baik, mandiri dan berkembang lebih cepat serta mampu bersaing dengan negara-negara maju dalam perekonomian dunia. Apalagi sekarang ini dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah segala potensi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dilaksanakan seoptimal mungkin.

Dalam memperdayakan perekonomian daerah, pemerintah daerah harus produktif dalam mengarahkan sumber-sumber potensial yang terdapat di daerah. Dimana kekuatan ekonomi potensial daerah baik berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah yang lebih baik.

Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan suatu hal untuk mendorong pelaksanaannya kegiatan penanaman modal terutama penanaman modal asing disamping

modal dalam negeri. Karena potensi yang ada di daerah tersebut mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya, apalagi kesiapan daerah mendukung terlaksananya hal tersebut, sehingga menimbulkan persaingan antar daerah dalam mengejar pendapatan asli daerahnya dan kewenangan pemerintah daerah semakin luas karena otonomi daerah.

Pengembangan potensi daerah yang semakin meningkat dan memperdayakan penanaman modal asing dengan sumber daya produktif di suatu daerah. Hal ini akan membawa dampak negatif dengan munculnya ketimbang sosial-ekonomi dimana kelompok masyarakat dengan kepemilikan faktor produksi terbatas dan produktivitas rendah akan menghasilkan tingkat kesejahteraan rendah dan sebaliknya kelompok masyarakat dengan kepemilikan faktor produksi banyak dan produktivitas tinggi akan menghasilkan tingkat kesejahteraan meningkat atau tinggi dan perekonomian semakin kuat. Maka dengan perkembangan waktu kesenjangan semakin lebar dan munculnya pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta adanya daerah maju dan daerah terbelakang dalam pembangunan perekonomian.

Untuk itulah pembangunan ekonomi pada daerah otonomi dituntut untuk lebih memiliki sifat-sifat yang peka dalam dimensi profesionalisme, efisiensi dan akuntabilitasnya serta pengelolaan fasilitas pelayanan yang cepat dan tepat menjadi suatu keharusan,

apabila tidak dilaksanakan, akan kehilangan peluang penanaman modal secara global. Pelayanan yang efisien hanya tercapai jika dilakukan oleh banyak pilihan pelaku yang bersaing tanpa diskriminasi. Hal ini berarti peran serta para pelaku ekonomi apapun skalanya ikut mempengaruhi kualitas pengelolaan fasilitas pelayanan.¹¹³

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah adanya daerah otonomi propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, latar belakang budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan untuk terselenggaranya pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonomi dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Maka diharapkan sekali pada daerah-daerah untuk mampu memperdayakan segala potensi yang dimilikinya dan mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk memperdayakan kegiatan penanaman modal asing pada setiap daerah. Apabila terlaksananya hal tersebut dengan baik bisa mencegah timbulnya daerah maju dan daerah terbelakang.

Dalam meningkatkan fasilitas pelayanan ini sangat diharapkan terlaksananya pelayanan satu atap atau one stop service agency. Dimana memberikan kemudahan bagi para investor lokal

¹¹³. Direktorat Jenderal multilateral Ekonomi Keuangan dan pembangunan Departemen Luar Negeri, *Op Cit*, hal. 13.

maupun investor asing dalam menerbitkan surat persetujuan, surat persetujuan fasilitas dan perijinan untuk melaksanakan penanaman modal asing ke daerah tentu menginginkan pelayanan yang mudah, cepat dan efisien.

Agar terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing dan mengembalikan citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal maka pemerintah akan terus melakukan berbagai kebijakan yang bersifat pro-bisnis sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 pemerintah telah menyederhanakan prosedur perijinan penanaman modal dengan menambah titik-titik pelayanan pemberian persetujuan PMDN dan PMA. Begitu dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 pemerintah harus dapat melaksanakan hal tersebut dalam waktu dekat ini, sehingga minat para investor asing untuk menanamkan modalnya ke daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

3.3. Strategi Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah Di Sumatera Barat

Bahwa pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional. Karena perkembangan tersebut akan bergerak cepat dan dinamis serta membuka peluang bagi pelaksanaan otonomi

daerah. Dengan adanya reformasi merupakan saat yang tepat bagi realisasi otonomi daerah dan mempunyai kesempatan untuk menentukan pilihan yang tepat mengenai bentuk pemerintahan di daerah serta mengupayakan pengembangan potensi sumber daya daerah agar dapat terangkat dan berpacu dalam era globalisasi.

Dengan diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000, dimana persaingan dalam menarik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing tidak saja terjadi hanya antar propinsi tetapi juga antar daerah kabupaten/kota yang semakin meningkat. Yang mana daerah-daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dapat memberikan pelayanan penanaman modal yang baik yang akan menjadi pilihan utama bagi para investor dalam melakukan penanaman modal untuk itu sangat diperlukan adanya peningkatan daya saing Indonesia secara keseluruhan dalam menarik dalam menarik minat penanaman modal baik PMDN maupun PMA.

Bahwa adanya penanaman modal asing di Sumatera Barat sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah tersebut karena PMA merupakan sebagai modal pelengkap yang berpartner usaha dengan pengusaha daerah ini, yang mana pengusaha ini sebelumnya tidak sepenuhnya dapat mencukupi modalnya dalam melakukan kegiatan usaha. Dengan adanya proyek penanaman modal asing tersebut akan memenuhi kebutuhan bagi pembangunan yang telah

direncanakan dan pengolahan potensi alam jelas akan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor yang tentunya akan mendatangkan income dan devisa dalam pembanguann daerah Sumatera Barat.

Dengan semakin meningkatnya penanaman modal di daerah, disamping adanya kebijakan penanaman modal pada tingkat nasional, sangat diperlukan pula adanya strategi kebijakan penanaman modal pada tingkat daerah, karena mengingat pada dasarnya kewenangan penanganan penanaman modal seperti yang diamalkan oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 berada di tingkat Kabupaten/Kota. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif di daerah adalah sebagai berikut :¹¹⁴

1. Mengembangkan atau mengidentifikasikan potensi penanaman modal di daerah yang dituangkan dalam bentuk peta investasi daerah dan profil-profil proyek investasi.
2. Menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif di daerah, antara lain dengan menyediakan insentif atau kemudahan menghapus dan mengurangi pungutan-pungutan dan memberikan pelayanan "one stop service".
3. Mempercepat pembangunan dan penyediaan infra struktur penunjang kegiatan penanaman modal di daerah.

¹¹⁴. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, *Op Cit*, hal. 12.

4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparat pemerintah maupun pelaku bisnis di daerah, antara lain melalui pelatihan-pelatihan.
5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, melalui antar lain penganeka-ragaman jenis dan mutu layanan, informasi, kerjasama, promosi dan layanan informasi melalui internet.
6. Meningkatkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antara daerah kabupaten/kota dan dengan atau antar propinsi atau dengan pusat.

Bahwa dengan berbagai kebijakan penanaman modal yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah diharapkan sekali untuk dapat meningkatkan iklim penanaman modal, agar segala potensi yang dimiliki oleh suatu negara atau suatu daerah dapat dimanfaatkan, dikembangkan dan didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat pula meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya pembangunan perekonomian dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan mandiri.

Dalam pengembangan penanaman modal asing di daerah, terutama daerah Sumatera Barat. Disamping memiliki potensi alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan, dan daerah Sumatera Barat juga memiliki daerah pariwisata yang banyak untuk dikembangkan serta dengan adanya PMA di Sumatera Barat memberikan dampak

positif dan dampak lain yang terdapat di daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mengarah pada peningkatan perekonomian daerah masing-masing.

Dengan peningkatan daya saing secara nasional dan daerah merupakan suatu hal yang harus dikembangkan dan terus diupayakan dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan penanaman modal baik PMDN maupun PMA yang dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Terutama pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang semakin luas karena adanya otonomi daerah, dimana harus mampu menjadi pelopor dalam upaya peningkatan daya saing tersebut yang disertai dengan penerapan penyenggaraan pemerintahan good governance.

2. Manfaat Yang Diperoleh Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

Bahwa manfaat yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan penanaman modal asing sebelum dan setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat pada prinsipnya sama, dengan tujuannya untuk dapat dinikmati dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh daerah tersebut. Namun manfaat yang jelas sekali dapat dirasakan dengan adanya UU Otonomi Daerah adalah pelayanan yang cepat dan efektif dimana sebelum UU Otonomi Daerah hal tersebut tidak ada.

Mendorong meningkatkan kegiatan modal yang memegang peranan penting karena dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Bahwa peningkatan penanaman modal dapat dicapai dengan melalui kegiatan seperti promosi yang intensif dari semua peluang penanaman modal dan potensi ekonomi serta didukung dengan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif.

Segala upaya untuk meningkatkan penanaman modal akan lebih efektif bila pihak pemerintah dapat memberikan insentif yang dapat mendorong kegiatan penanaman modal yang dilakukan pihak swasta. Apalagi sejak tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja perekonomian, hal ini terlihat antara lain merosotnya laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran dan tingkat inflasi. Maka untuk menggulirkan kembali roda perekonomian diperlukan penanaman modal baik berasal dari pemerintah maupun swasta atau dunia usaha, namun mengingat dana pemerintah terbatas maka diharapkan swasta atau dunia usaha dapat lebih berperan dan memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi.¹¹⁵

Salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan dengan cara merelapdayakan dan memasyarakatkan kegiatan penanaman modal adalah dengan melakukan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah secara khusus

¹¹⁵. Hasil wawancara dengan Kepala BKPPMD Propinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Oktober 2002.

dan dunia usaha pada umumnya terutama yang berada di Sumatera Barat yang mengadakan pelatihan internal untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal asing.¹¹⁶

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Otonomi Daerah tiap-tiap daerah tidak banyak melakukan upaya peningkatan penanaman modal asing, tapi PMDN tergantung dari daerah tersebut karena semua pelaksanaan dan manfaat dari penanaman modal tersebut diserahkan Pemerintah Pusat. Dengan kata lain Pemerintah Pusatlah yang mengatur segalanya seperti menetapkan surat persetujuan perijinan dengan manfaat pelayanan yang lambat dan tidak efisien terutama pelaksanaan penanaman modal asing, sedangkan bagi kegiatan PMDN cukup dilakukan di tingkat propinsi dan pusat yang mengetahui serta memberikan laporan dari kegiatan PMDN tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, masing-masing daerah berpacu untuk meningkatkan penanaman modal baik PMDN maupun PMA, dengan manfaat pelayanan yang cepat dan efisien, karena daerah boleh menerbitkan Surat Persetujuan Perijinan. Apalagi suatu daerah yang memiliki banyak potensi ekonomi dan potensi lainnya untuk dikembangkan tentu akan mendapatkan manfaat yang besar bagi daerah tersebut. Tetapi sebaliknya suatu daerah yang kurang memiliki potensi ekonomi dan potensi lainnya untuk dapat dikembangkan, tentu akan mendapatkan manfaat yang kecil bagi daerahnya.

¹¹⁶. Hasil wawancara dengan Staf Kantor BKPPMD Propinsi Sumatera Barat tanggal 24 Oktober 2002.

Jika suatu daerah memiliki potensi ekonomi yang banyak, namun apabila tidak ada pengkajian dan perencanaan yang baik mengenai pemanfaatannya dan tidak pula dipromosikan kepada pihak calon investor, maka potensi yang dimiliki tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimum untuk kepentingan penanaman modal terutama yang bersumber dari luar negeri dewasa ini, bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena harus bersaing dengan negara lain terutama negara maju yang juga berupaya untuk menarik investasi asing sebanyak-banyaknya ke negara masing-masing.

Bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan meningkatkan daya saing harus mampu memainkan peranannya dalam tiga aspek pokok.¹¹⁷

1. Tetap melakukan kajian potensi ekonomi, peluang investasi dan mempromosikannya secara efektif kepada calon investor.
2. Memberikan pelayanan perijinan dengan cara yang transparan, cepat, mudah dan murah.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan penanaman modal di lapangan sehingga kegiatan penanaman modal dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membawa manfaat kepada semua pihak yang terkait atau *Stake Holders*.

¹¹⁷. Syahril Syarif, *Peran Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal Dalam Peningkatan Investasi*, Makalah Seminar Upaya Peningkatan Investasi dan Peranan P4M, Non Alligment Movement Center, Deplu, 2000, hal. 5.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dilandasi oleh amanat dalam UUD 1945, dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat ini dapat diperoleh dengan menumbuhkembangkan kehidupan yang demokratis, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, memperkuat pemerintah daerah, memperdayakan potensi ekonomi, meningkatkan penanaman modal dan meningkatkan mutu pelayanan umum serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi ini daerah yang efektif, maka diperlukan kelembagaan yang demokratis, efisien pengelolaan sumberdaya, aparatur yang berkualitas, potensi ekonomi daerah yang dapat digerakkan sebagai sumber pendapatan daerah dan pemberian insentif fiskal/non fiskal guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku ekonomi (BUMN, BUMD, Koperasi dan Swasta) serta pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang adil, merata dan proporsional.¹¹⁸

Bahwa dalam peningkatan pelaksanaan penanaman modal baik PMDN maupun PMA dengan penyelenggaraan otonomi daerah dijumpai beberapa aspek yang satu dengan lainnya saling berkaitan dalam berbagai aktivitas perekonomian, seperti budaya masyarakat setempat, ketersediaan lahan,

¹¹⁸. Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, *Op Cit*, hal. 14.

pengadaan bahan, sumber pembiayaan, sumber daya manusia dan aspek lainnya di daerah. Maka keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi dengan adanya kesesuaian, keserasian dan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah, kekayaan alam, kondisi ekonomi, latar belakang sosial budaya sumber daya manusia.

3. Kendala-Kendala yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

Dari sisi internal sejak reformasi sampai diberlakukan UU Otonomi Daerah berbagai hambatan telah muncul di permukaan, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti pada media cetak Jakarta beberapa waktu yang lalu yaitu :

“Masih kecilnya penanaman modal yang masuk ke Indonesia akibat masih adanya kendala yang menyangkut sistem perpajakan, kepastian, prosedural birokrasi, administrasi daerah dan soal perburuhan. Selain itu juga faktor premanisme dan juga kriminalitas serta menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik yang merupakan salah satu kunci proses reformasi disamping pemulihan ekonomi”¹¹⁹

Adanya beberapa pandangan mendukung pelaksanaan UU Otonomi Daerah, tapi ada juga sebagian pandangan menganggap sebagai kendala atau hambatan untuk meningkatkan penanaman modal. Dukungan terhadap Undang-undang tersebut karena otonomi daerah memberikan peluang kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menentukan kebijakan dalam bidang

¹¹⁹ Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, *Op Cit*, hal. 31.

penanaman modal dan kebijakan penanaman modal sangat berkaitan erat dengan kebijakan fiskal dan hubungan internasional. Bahwa kedua kebijakan tersebut masih merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dari sisi eksternal, adanya perubahan tatanan dunia seperti globalisasi, perdagangan bebas, teknologi informasi, tidak dapat dilakukan dan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan penanaman modal, disamping itu pula kita terkait dengan perjanjian internasional seperti *Bilateral Investment Treaties (BITs)* dimana saat ini kita sudah terikat perjanjian dengan 55 negara, *Multilateral Investment Guaranty Agreement (MIGA)* dan juga terikat perjanjian dalam rangka WTO. Dengan demikian untuk menarik penanaman modal asing, perjanjian internasional menjadi acuan calon investor karena di dalamnya berisi jaminan penanaman modal.¹²⁰

Kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari bidang ekonomi, maka dalam pelaksanaannya tanpa hambatan tidak akan secara serta-merta menyentuh sumber-sumber daya ekonomi karena struktur dan komponen perekonomian yang membedakannya. Perbedaan kapasitas perekonomian ditandai dengan adanya kesenjangan ekonomi yang merupakan refleksi dari keberadaan pemilikan sumber daya produktif di antara daerah-daerah atau negara. Dengan adanya kesenjangan atau perbedaan ekonomi inilah

¹²⁰ · Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, *Op Cit*, hal. 32.

merupakan faktor timbulnya hambatan atau kendala dalam dunia perekonomian, apalagi dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal asing.

Bahwa iklim penanaman modal pada suatu daerah atau negara ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya perkembangan stabilitas ekonomi, sosial dan politik di negara tersebut. Iklim penanaman modal asing di Indonesia belakangan ini mengalami kurang kondusif atau *unfavorable* terutama bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi, sosial, moneter, dan keamanan yang kurang stabil. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mengembalikan pemulihan ekonomi dan menciptakan iklim penanaman modal asing ke arah yang lebih baik dan mandiri.

Dalam dunia persaingan antar negara dalam menarik aliran masuk modal asing dan perdagangan yang semakin tajam, maka menurut Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Hongkong dalam laporannya pada bulan Maret 2002 juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang tingkat kenyamanan berbisnisnya kurang atau hanya sedikit lebih dari pada India. Namun berada jauh di bawah negara-negara pesaing Indonesia seperti Malaysia, Thailand, Philipina, Vietnam dan Cina.¹²¹

Untuk meningkatkan daya saing dan mengembalikan citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik, maka pemerintah berusaha untuk mendapatkan masukan dari berbagai forum seminar, temu

¹²¹. Direktur Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Prasarana BKPM, *Opcit*, hal. 6.

usaha dan dialog langsung dengan pengusaha dan asosiasi dagang asing termasuk dengan pemerintah daerah (BKPM) seluruh Indonesia mengenai kendala dalam pelaksanaan penanaman modal. Masukan yang disampaikan tersebut telah dijadikan bahan dalam memperbaiki iklim penanaman modal.

Bahwa meningkatkan daya saing dalam kegiatan penanaman modal merupakan suatu hal penting, karena adanya daya saing antar negara atau antar daerah membuat negarat tersebut berpacu dalam mendatangkan para investor untuk menanamkan modalnya, apalagi kondisi dari negara memungkinkan untuk pelaksanaan penanaman modal. Kondisi yang diinginkan oleh para investor terutama penanaman modal asing dalam menanamkan modal pada suatu negara atau daerah seperti perlakuan yang sama dalam hukum, konsistensi dalam pelaksanaan peraturan-peraturan, adanya jaminan keamanan dalam penanaman modal, kebijakan yang transparan, kemudahan dan kesederhanaan prosedur perijinan.

Mengingat melakukan kegiatan penanaman modal terutama penanaman modal secara langsung mempunyai risiko yang sangat besar, maka investor asing dalam melakukan kegiatan penamaan modal asing pada umumnya mengharapkan adanya :¹²²

1. Peraturan-peraturan kebijaksanaan yang tetap atau konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum, karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka.

¹²². Erman Rajagukguk, *Op Cit*, hal. 11.

2. Prosedur perijinan yang tidak berbelit-belit.
3. Jaminan terhadap penanaman modal mereka serta proteksi hukum atas intelektual milik investor.
4. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya penanaman modal mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, pengangkutan, perbankan dan perasuransian.

Setiap pemilik modal akan mempertimbangkan dengan komprehensif dan sangat hati-hati sebelum mengambil keputusan untuk melaksanakan penanaman modalnya di suatu negara atau daerah, meskipun pemulihan ekonomi telah disusun berdasarkan pertimbangan yang hati-hati pula dan telah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya akan menemui banyak kendala apabila kondisi sosial dan keamanan tidak dapat diperbaiki sesegera mungkin. Untuk itulah sangat perlu diadakan pertimbangan tersebut yang pada dasarnya akan meliputi keamanan berusaha (*secured*), keselamatan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha (*comfort*) dan pengembalian dari uang yang ditanamkan pada suatu proyek penanaman modal atau dengan kata lain adanya keuntungan (*profitable*).

Sehubungan dengan adanya pertimbangan penanaman modal tersebut, secara objektif dapat dilihat kondisi dan iklim penanaman modal di Indonesia pada saat ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan penanaman modal dapat dikelompokkan atas dua aspek yaitu :¹²³

1. Aspek Non Ekonomi

Bahwa kemelut politik, kerusuhan sosial di berbagai daerah dan tindakan kekerasan yang tidak pernah berhenti dan diberitakan secara luas oleh

¹²³. Syahril Syarif, *Op Cit*, hal. 4.

media oasing dan sering tendensius ke arah negataif dan berlebih-lebihan. Disamping itu supremeasi hukum masih diragukan dan masih banyaknya tindakan melanggar hukum yang tidak diproses dengan tuntas.

2. Aspek Ekonomi

Bahwa adanya keraguan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan isu kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta birokrasi yang berbelit akan berpindah ke daerah.

Dalam menghadapi era Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat dan juga daerah Propinsi lainnya di Indonesia sudah harus dengan segera mempersiapkan diri agar dapat melepaskan atau mengurangi ketergantungannya secara bertahap kepada Pemerintah Pusat baik di bidang ekonomi, keamanan dan politik. Maka Pemerintah Daerah harus bisa membuat perencanaan dengan baik untuk mempergunakan, mengembangkan dan pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut dan dapat dipromosikan kepada calon investor serta diberikan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan penanaman modalnya.

Apabila perencanaan tidak dibuat dengan baik, potensi yang telah ada tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, daerah dan negara. Apabila potensi ekonomi daerah Sumatera Barat pada saat ini cukup besar, penanaman modal asing terutama pada sektor pertanian dan pariwisata dimana potensi penanaman modal yang ada tersebut juga didukung dengan persediaannya sarana dan prasarana ekonomi yang cukup memadai seperti jalan pelabuhan dan jaringan telekomunikasi yang telah menjangkau seluruh daerah pedesaan dengan lancar dan baik.

Dalam pelaksanaan PMA ditemui adanya kendala-kendala baik sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah, tidak saja terdapat di daerah Sumatera Barat, daerah lain juga mengalami hal tersebut, terutama mengenai retribusi dan pungutan-pungutan semakin banyak yang dikenal dengan istilah sumbangan pihak ke tiga dan diikuti dengan adanya peraturan-peraturan liar disamping Perda resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Yang mana sebelum dikeluarkan UU Otonomi Daerah pungutan-pungutan yang dilakukan terbatas tetapi setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah pungutan-pungutan tidak terbatas. Apalagi sekarang ini dikeluarkan Keputusan Menteri No. 150 Tahun 2000 tentang pesangon, merupakan hal yang memberatkan bagi penanaman modal, disamping pungutan-pungutan tersebut.¹²⁴

Kendala yang banyak juga dialami daerah Sumatera Barat sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah mengenai tanah ulayat. Bahwa tanah ulayat atau tanah kaum merupakan tanah yang dimiliki oleh kaum adat yang digunakan untuk kepentingan umum atau fasilitas umum, tapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan hanya digunakan untuk kepentingan pihak ketiga. Walaupun pada kenyataannya dapat juga dimanfaatkan oleh kepentingan masyarakat, terutama membuka lapangan pekerjaan dengan adanya perusahaan penanaman modal asing di daerah tersebut, namun penyimpangan dari tujuan semula telah disalahgunakan.¹²⁵

¹²⁴. Hasil Wawancara Dengan Kepala Personalia PT. Incasi Raya dan PT. SAK, Padang, tanggal 13 Januari 2003.

¹²⁵. Hasil Wawancara Dengan Kepala Personlia PT. AMP Plantation, Tepian Kandis, Kabupaten Agam, tanggal 10 April 2003.

Peningkatan potensi ekonomi yang ada dengan pengembangan penanaman modal di daerah merupakan salah satu prioritas dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Upaya ini masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam pengembangan PMA di era otonomi daerah pada daerah Sumatera Barat.

B. Pembahasan

Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Propinsi Sumatera Barat dan PT. AMP Plantation, PT. Gersindo Minang Plantation, PT. Incasi Raya, PT. Permata Hijau Pasaman, PT. Sumber Kencana Andalas di Padang, maka pembahasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Di Sumatera Barat.

1. Tata Cara dan Prosedur Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat

Dalam pelaksanaan tata cara dan prosedur penanaman modal asing di Sumatera Barat yang diatur dengan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal yang Didirikan dalam rangka PMA maupun PMDN yang berlaku secara nasional. Namun dengan dikeluarkannya UU Otonomi Daerah terdapatnya perbedaan, di mana sebelum UU Otonomi Daerah Surat Persetujuan (SP) tidak boleh diterbitkan di daerah sedangkan setelah UU Otonomi Daerah Surat Persetujuan (SP) boleh diterbitkan di daerah.

Tata cara dan prosedur yang ditempuh oleh investor asing di Sumatera Barat adalah mengajukan Surat Permohonan Penanaman Modal Asing (SPPMA) dengan menggunakan model /PMA yang ditujukan kepada Meninves/Kepala BKPM beserta lampiran yang dikirim kepada BKPMMD yang disertai dengan :

- 1). Untuk para peserta dari Indonesia : Fotocopi sertifikat perusahaan penyelenggaraan bagi perusahaan pertanggung jawaban terbatas, perusahaan kepemilikan negara/perusahaan pemerintah daerah, Firma dan lain-lain. Dokumen tersebut mencakup fotocopi Anggaran Dasar Perkumpulan Koperasi yang telah dilegalisir, Fotocopi Kartu Tanda Pengenal Pribadi, Fotocopi Kode Nomor Registrasi Pajak.
- 2). Untuk para peserta dari luar negeri : Fotocopi sertifikat perusahaan penyelenggara beserta terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
- 3). Deskripsi proses produksi yang disertai proses flowchart dan tiper bahan mentah/bahan pembantu untuk pemrosesan industri dan deskripsi kegiatan bisnis perusahaan untuk pelayanan.
- 4). Konsep persetujuan Joint Venture dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh semua anggota Joint Venture.
- 5). Kekuasaan/wewenang pengacara ketika penandatanganan tidak dilakukan oleh pengaju.

Berdasarkan evaluasi (pengkajian ulang) dan penilaian terhadap permohonan penanaman modal, Kepala BKPM mengajukan permohonan

kepada Presiden yang disertai pertimbangan yang bertujuan untuk mengukuhkan pembuktian.

Apabila permohonan tersebut telah disetujui Presiden, Kepala BKPM akan mengeluarkan pengumuman atas pembuktian dari Presiden yang akan diberikan kepada pemohon beserta lampiran untuk instansi yang dituju. Jangka waktu pemrosesan pengumuman atas pembuktian dari presiden yang diputuskan tidak lebih dari 41 hari kerja, mulai dari waktu permohonan tersebut diterima sepenuhnya. Jangka waktu pemrosesan pengumuman atas pembuktian dari presiden berlaku untuk 3 tahun dari tanggal dikeluarkan kecuali adanya tuntutan lain dari kepala BKPM untuk bidang tertentu penanaman modal.

Permohonan untuk perluasan penanaman modal adalah permohonan peningkatan penanaman modal beserta fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan atau tipe produksi barang/bantuan yang dilengkapi oleh perusahaan yang mana telah mendapatkan pembuktian dalam penanaman modal asing. Persyaratan untuk memperluas penanaman modal asing adalah sebagai berikut :

- 1). Permohonan perluasan di maksudkan untuk perusahaan penanaman modal yang mana telah mendapatkan izin usaha tetap atau izin tetap bisnis.
- 2). Permohonan ditulis dengan disertai oleh Model I/PMDN atau Model II/PMA yang ditujukan kepada Menteri Penanaman Modal/Kepala

BKPM dengan tembusan dikirim ke Ketua BKPM – SU dilampiri dengan :

- Fotocopi izin tetap bisnis atau izin usaha tetap.
 - Deskripsi perluasan proses produksi/kegiatan bisnis untuk lahan operasi yang mana tidak merupakan jenis yang sama dari suatu bisnis yang disebutkan dalam izin tetap bisnis.
- 3). Pembuktian perluasan penanaman modal asing tersebut dikeluarkan oleh Kepala BKPM dalam bentuk surat pembuktian.
- 4). Batas periode surat bukti perluasan adalah 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya surat tersebut, kecuali adanya beberapa tuntutan yang lain kepada BKPM pada bidang penanaman modal tertentu.

Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan penanaman modal dalam/luar negeri adalah sebagai berikut :

- 1). Penundaan pembayaran jumlah ditambah pajak dan jumlah ditambah pajak untuk tugas impor dalam mengimpor barang modal tertentu atau pelayanan tidak termasuk barang pengganti kerusakan selama barang utama digunakan sepenuhnya atau tidak ditransfer.
- 2). Permohonan untuk penundaan pembayaran jumlah tersebut di tambahkan pajak/jumlah di tambahkan pajak kegiatan impor di tunjukkan secara tertulis dan disertai dengan formulir jumlah di tambahkan pajak yang mana telah di mulai dan di alamatkan kepada kepala BKPM yang disertai dengan :
 - a. Fotocopi konfirmasi kemampuan Pajak Bina Usaha yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak setempat.

- b. Kontrak membeli penjualan barang utama tertentu dengan penjual/supplier atau daftar orang dagangan/faktur.
- c. Surat klasifikasi teknik hubungan antara mesin/atau benda yang dipergunakan dan proses produksi.
- d. Pembuktian penundaan pembayaran ditambahkan jumlah dengan pajak dan/atau jumlah ditambahkan pajak untuk tugas impor yang dikeluarkan Kepala BKPM dalam bentuk surat bukti penundaan pembayaran.

Kemudian kepala BKPM akan mengeluarkan dokumen-dokumen penanaman modal yakni APIT (Akte Pelaku Impor Terbatas) mengenai keputusan pemberian fasilitas/dispensasi pajak impor dan kegiatan impor lainnya, pembuktian perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang mana diperlukan sebagai dasar Kepala BKPM untuk mengeluarkan surat izin bekerja untuk tenaga kerja asing dan surat izin bisnis permanen atas nama menteri yang khusus dalam lahan bisnis yang berdasarkan delegasi wilayah.

Sementara itu, pemerintah daerah mengeluarkan dokumen-dokumen penanaman modal adalah sebagai berikut :

- 1). Surat izin daerah oleh Kepala Kantor Agraria Daerah di Kabupaten/Kotamadya yang berhubungan dengan perencanaan daerah.

- 2). Hak guna bangunan hak sewa jangka panjang dan pemungutan hasil oleh kepala kantor pertanah di Kabupaten/Kotamadya, seperti yang dinyatakan dalam peraturan/Kepala Lembaga Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993. Jangka waktu hak guna bangunan dinyatakan tidak lebih dari 30 tahun dan hak sewa jangka panjang adalah 35 tahun. Tanggal akhir penggunaan dapat diperbaharui.
- 3). Izin bangunan oleh Kepala Pelayanan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kotamadya setempat atau kekuatan pajak secara teknis atas nama Bupati/walikota yang bersangkutan.
- 4). Surat izin UUG/HO oleh Sekretaris Wilayah Tingkat II/daerah atas nama Bupati atau Walikota.
- 5). Surat izin UUG/HO tidak diwajibkan untuk perusahaan perindustrian yang mana dimiliki AMDAL atau berlokasi di kawasan industri atau daerah kontrak.
- 6). Surat izin bekerja untuk para pekerja dari luar negeri oleh BKPMMD. Permohonan izin kerja untuk para pekerja luar negeri yang dibuat fertilis ditujukan ke Kepala BKPMMD-SU yang disertakan persyaratan sebagai berikut :
 - a). Pas foto 4 x 6 cm.
 - b). Fotocopi lengkap paspor.
 - c). Fotocopi kartu izin masuk sementara.

- d). Nama dan pendidikan dan program pelatihan untuk menyertakan pekerja-pekerja Indonesia yang akan menggantikan posisi pekerja-pekerja asing.
- e). Fotocopi surat perencanaan pemakaian pekerja asing.
- f). Pembuktian izin kerja untuk pekerja yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM – SU dalam bentuk surat izin kerja/tenaga kerja asing yang diberikan kepada pemohon beserta lampiran ke Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

2. Perijinan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat

Sebelum dikeluarkan UU Otonomi Daerah dan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 37/SK/1999 Pemerintah telah menyederhanakan prosedur perijinan penanaman modal yaitu dengan menambah titik-titik pelayanan pemberian persetujuan seperti PMA dapat mengajukan permohonan penanaman modalnya melalui Kepala-kepala Perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri, mempersingkat waktu proses penyelesaian, pembelian, persetujuan dan ijin-ijin penanaman modal menjadi 3 sampai dengan 10 hari serta menghapuskan berbagai rekomendasi dari instansi pusat/daerah.

Perijinan penanaman modal di daerah berpedoman kepada SK meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 yang berlaku secara nasional. Dalam pelaksanaan ketentuan ini masih belum memasyarakat di kalangan

calon investor, sehingga menyebabkan permohonan penanaman modal yang diajukan investor belum memenuhi kriteria-kriteria standar yang ditetapkan. Untuk itu calon investor yang ingin mengajukan permohonan penanaman modal yang diajukan investor belum memenuhi kriteria-kriteria standar yang ditetapkan. Untuk itu calon investor yang ingin mengajukan permohonan penanaman modal harus dituntun dan dipandu dalam teknik pengisian aplikasi yang disampaikan, sehingga dapat diciptakan keseragaman di antara pemerintah daerah yang satu dengan lainnya dalam menilai suatu aplikasi penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun PMA serta membawa dampak terhadap kegiatan penanaman modal khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.

Bagi penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) dari Kepala Perwakilan RI wajib mengajukan permohonan perijinan pelaksana kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua BKPM, disamping telah mendapat fasilitas dan kemudahan dari pemerintah berupa fasilitas bebas impor barang modal, pembebasan dan penangguhan pembayaran PPh/PPn, izin perluasan, Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Perubahan, Izin Import Barang Modal, Bahan Baku/Penolong, Izin Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) dan Izin Tenaga Kerja Asing serta diharuskan juga untuk memenuhi kewajibannya antara lain

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala setiap semester.

Seorang investor sebelum menanamkan modalnya dan mengoperasikan usahanya terlebih dahulu mengurus kelengkapan izin-izin pada BKPM. Untuk penanaman modal asing ada jenis izin yang harus dilengkapi oleh investor :

- 1). Izin HO/Undang-Undang gangguan yang pengurusannya dilakukan pada Kantor Ketertiban Umum.
- 2). Izin mendirikan bangunan yang pengurusannya dapat dilakukan pada Kantor Tata Kota.
- 3). Izin lokasi, izin untuk menggunakan suatu aral dalam rangka penanaman modal asing.
- 4). Izin usaha tetap, bila perusahaan penanaman modal asing telah berproduksi komersil wajib melengkapi izin usaha tetap yang pengurusannya dapat dilakukan pada kantor BKPM.
- 5). Izin penggunaan tenaga kerja asing, apabila suatu perusahaan penanaman modal asing dalam rangka pengoperasiannya mempekerjakan tenaga kerja asing wajib mempunyai Surat Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SPRPTKA) yang pengurusannya dilakukan di kantor BKPM.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan SK Meninves No. 38/SK/1999 semua pengurusan izin bagi perusahaan penanaman modal asing sepenuhnya dilakukan pada kantor BKPM atau

tembusan dari BKPM ke BKPMD. Namun setelah keluarnya Undang-Undang dan keputusan tersebut ketua BKPMD ditugasi untuk mengawasi dan mengendalikan serta membantu kelancaran proses dan penyelesaian IMB serta izin UUG di Kabupaten/Kotamadya. Jadi artinya adanya pelimpahan wewenang kepada daerah tingkat II untuk mengurus izin tersebut, sedangkan instansi BKPM hanyalah berwenang mengawasi dan mengendalikan saja.

Dengan adanya pelaksanaan penanaman modal asing di daerah dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, maka pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan penanaman modal, termasuk dalam pemberian perijinan penanaman modal baik PMDN maupun PMA dan sebagainya, sementara itu kewenangan Pemerintah Pusat cq BKPM di bidang penanaman modal hanya mencakup hal-hal antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemberian izin dan pengendalian kegiatan/bidang usaha yang berteknologi strategis dengan derajat kecanggihan tinggi dan berisiko tinggi dalam penerapannya meliputi persenjataan.
2. Penetapan kebijakan dan penyusunan rencana nasional secara makro.
3. Penetapan, kebijakan sistem informasi nasional dan penetapan standar pemberian izin oleh daerah.

Dalam rangka penyederhanaan prosedur perijinan penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan antara lain:¹²⁶

1. Mengupayakan kembali pelayanan di bawah “satu atap” di kantor BPM-PBMN, untuk pemberian persetujuan daftar induk barang modal dan bahan baku/penolong impor untuk proyek-proyek penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing dalam rangka pengembangan dan restrukturisasi.
2. Mengupayakan pelayanan di bawah satu atap di daerah kabupaten/kota yang menyangkut pemberian ijin lokasi IMB dan HO sesuai kewenangan masing-masing instansi yang bersangkutan di bawah koordinasi Bupati/Walikota.
3. Penghapusan keharusan memiliki persetujuan prinsip dari gubernur atau Bupati/Walikota sebelum dapat merealisasikan proyeknya.
4. Penghapusan berbagai surat rekomendasi dari departemen teknis dalam rangka aplikasi PMDN/PMA, karena pengaturan bidang usaha penanaman modal telah tercantum dalam daftar negative investasi.
5. Memberikan keleluasaan kepada perusahaan PMA untuk memilih lokasi proyek sesuai dengan tata ruang setempat dengan harga yang bersaing.
6. Mempersingkat waktu proses penyelesaian pemberian persetujuan dan izin-izin penanaman modal.

¹²⁶. Hidayatullah Suralaga, *Log Cit*, hal. 6.

7. Memberikan kemudahan kepada para investor untuk memilih pelayanan dalam rangka memperoleh persetujuan penanaman modal untuk PMA investor dapat memilih kantor BPM-PBUMN, BKPPMD atau Perwakilan RI di luar negeri tanpa batasan nilai penanaman modal. Sedangkan untuk PMDN investor dapat memilih pelayanan dari BPM-PBUMN atau BKPPMD dimana proyek berlokasi tanpa adanya batasan nilai penanaman modal.

Dengan adanya berbagai langkah reformasi kebijakan penanaman tersebut diatas diharapkan dapat memperbaiki iklim penanaman modal serta memulihkan kepercayaan investor baik dari dalam maupun luar negeri dengan harapan aliran modal investasi ke dalam negeri akan semakin meningkat, sehingga krisis ekonomi dapat segera teratasi dan dapat mendorong terwujudnya perekonomian nasional yang andal dan semakin mandiri serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara lebih adil dan merata.

Dalam pelaksanaan pembelian izin sebagaimana telah diatur oleh surat keputusan meninves/kepala BKPM hendak memperlihatkan hasil yang sangat baik, diharapkan dari tahun ke tahun semakin bertambahnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat dan begitu juga bagi perusahaan penanaman modal asing dapat berjalan dengan baik, karena kelengkapan izin yang dimilikinya. Bahwa kegiatan penanam modal menempati posisi dan memainkan peranan kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi.

Namun dalam pemberian izin tersebut ada beberapa kasus yang dijumpai yakni adanya ketidaktahuan para investor dan tidak lengkapnya izin yang dimiliki oleh perusahaan penanaman modal asing dikarenakan ada dari beberapa perusahaan tersebut yang pengurusan izinnya langsung dilakukan pada BKPM pusat dengan tidak mengirimkan tembusan surat-surat izin tersebut pada BKPM, sehingga apabila ada pemeriksaan atau cheking dari tim pusat akan merugikan perusahaan mereka sendiri. Dalam hal ini tugas BKPM adalah memonitoring dan mengingatkan agar mereka melengkapi bahan-bahan sehingga tidak dirugikan di kemudian hari yang mungkin berakibat pencabutan atas izin usahanya.

3. Kebijakan Penanaman Modal Di Sumatera Barat

3.1. Perkembangan Penanaman Modal di Sumatera Barat

Dengan adanya kebijaksanaan deregulasi dan reformasi yang dilakukan pada tingkat nasional, maka pada tingkat daerah juga perlu disusun berbagai kebijaksanaan penunjang untuk dapat meningkatkan dan mendorong minat calon investor dalam melakukan penanaman modal di suatu daerah. Agar potensi ekonomi yang terdapat di daerah dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Perkembangan penanaman modal di Sumatera Barat baik PMDN dan PMA mengalami fluktuasi yang cukup berarti, hal ini disebabkan berbagai faktor seperti krisis ekonomi dan gejolak politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Dengan kondisi

yang belum kondusif betul masih terdapat beberapa potensi dan prospek penanaman modal di Sumatera Barat dalam bentuk pengembangan penanaman modal sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang dilaksanakan baik oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat akan dapat menggerakkan sektor riil dan ini berarti akan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat Sumatera Barat.

Dalam rangka meningkatkan usaha kegiatan penanaman modal di Propinsi Sumatera Barat, telah disusun konsep kebijaksanaan daerah yang dalam pelaksanaannya diarahkan sebagai berikut :¹²⁷

1. Penanaman modal diarahkan kepada kegiatan yang memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di daerah.
2. Memanfaatkan secara optimal sumber dana daerah/dalam negeri untuk kegiatan penanaman modal, sedangkan dana luar negeri tetap diperlakukan sebagai penunjang.
3. Penanaman modal diarahkan untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja dan meningkatkan kemampuan berwira swasta bagi masyarakat setempat.

¹²⁷. BKPPMD Propinsi Sumatera Barat, *Loc cit.* hal. 3.

4. Penanaman modal diupaya agar menyebar secara seimbang ke daerah-daerah Kabupaten/Kota dan mengutamakan kepentingan daerah.
5. Penanaman modal diarahkan untuk terciptanya keterkaitan usaha antara sektor dan sub sektor antara sektor usaha besar, menengah dan kecil/koperasi berdasarkan kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan.
6. Penanaman modal diarahkan menjadi wahana pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan serta penguasaan teknologi.
7. Upaya meningkatkan peran serta daerah dan nasional untuk meningkatkan penanaman modal daerah serta melaksanakan kebijaksanaan menoleh keluar (*Out Ward Looking*) dalam rangka meraih penanaman modal Asia ke Sumatera Barat.
8. Ikut serta secara aktif dalam rangka menjalin hubungan kerja sama ekonomi sub regional IMT – GT dan IMS – GT untuk menarik penanaman modal asing ke Sumatera Barat.
9. Menjamin hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti Japan International Cooperation Agency dalam upaya menarik penanaman modal asing Jepang ke Sumatera Barat.

Dalam hal ini pemerintah propinsi Sumatera Barat merasa perlu memberi arahan kebijaksanaan penanaman modal yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat, agar kegiatan penanaman modal benar-benar terarah dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Bahwa dalam tahun 1998 – 1999 yang lalu, adanya kecenderungan menurunnya minat dan persetujuan penanaman modal asing. Namun sejalan dengan dengan membainya perkembangan makro ekonomi nasional akhir-akhir ini, maka minat penanaman modal asing tersebut menunjukkan peningkatan kembali, perkembangan penanaman modal asing di Sumatera Barat pada lima tahun terakhir (1998 – 2002) menunjukkan perkembangan naik dan turun, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA
Tahun 1996 – 2002

No.	Tahun	Persetujuan (US\$. 000)	Realisasi (US\$. 000)
1.	1998	177, 296. 80	42, 285. 06
2.	1999	37, 850. 42	81, 154. 02
3.	2000	4, 417. 74	61, 325. 92
4.	2001	41, 097. 09	107, 590. 89
5.	2002	4, 354. 60	118, 551. 84
Jumlah		264, 916. 65	410, 907. 73

Sumber : BKPPMD Propinsi Sumatera Barat

Dengan pengembangan penanaman modal akan membawa pengaruh yang berarti dan berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat untuk itu peningkatan penanaman modal baik penanaman modal

dalam negeri dan penanaman modal asing diharapkan sekali dalam bentuk penanaman modal komersil maupun penanaman modal publik atau prasarana.

Perencanaan pengembangan penanaman modal juga diarahkan pada tercapainya keseimbangan pertumbuhan antar sektor sehingga dapat memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya kepada daerah Sumatera Barat. Sebagai contoh, perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit juga harus diimbangi dengan perkembangan yang seimbang pada sektor industri pengolahan hasil-hasil perkebunan kelapa sawit tersebut. Dalam kaitan inilah BKPPMD akan memberikan advis dan rekomendasi kepada para calon investor yang memasukkan *enquiry* tentang peluang penanaman modal yang terbuka dan menjadi prioritas pembangunan daerah saat ini.

Dari penanaman modal asing di Sumatera Barat ada beberapa sektor yang cukup menonjol seperti uraian tabel berikut ini :

Tabel 2
Persetujuan dan Realisasi Penanaman Modal Asing Beberapa
Sektor Investasi Sampai Desember 2002

No.	Sektor	Persetujuan (US\$. 000)	Realisasi (US\$. 000)
1.	Perkebunan	421, 786. 57	446, 903. 96
2.	Tanaman Pangan	86, 260. 15	37, 158. 72
3.	Industri Kayu	34, 488.24	34, 095. 04
4.	Industri Makanan	32, 693. 95	33, 189. 85
5.	Jasa Lainnya	29, 320. 68	2, 462. 35
6.	Pengangkutan	24, 394. 60	45, 138. 00
7.	Pertambangan	800. 00	57, 958.29
Jumlah		629, 744. 195	656, 907. 21

Sumber : BKPPMD Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa minat penanaman modal terbesar dalam rangka penanaman modal asing terdapat pada sektor pertanian (primer), sektor industri (sekunder) dan sektor jasa (tersier). Pada hal selama ini sektor usaha yang diminat penanaman modal asing, dalam pembangunan lebih bertumpu pada sektor industri yang lebih banyak ketergantungan pada bahan baku impor dan baru saat-saat terakhir mulai berkembang kepada sektor jasa dan sektor primer, tapi sekarang sektor primer memiliki keunggulan komparatif yang lebih besar dari kedua sektor usaha yang lain. Maka hal ini menjadi indikasi bahwa industri yang dikembangkan selama ini kurang berakar pada potensi dalam negeri (resource base) sehingga terbukti sangat rapuh menghadapi gejolak krisis.

Untuk kedepan pengembangan penanaman modal terutama penanaman modal asing lebih diarahkan kepada sektor-sektor andalan Sumatera Barat seperti sektor pertanian secara umum dan sektor pariwisata beserta sektor-sektor pendukung lainnya, bukan berarti meninggalkan sektor lain yang masih berpotensi dan diminati oleh para investor.

3.2. Peluang dan Prospek Penanaman Modal di Sumatera Barat

Bahwa perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan dalam hal penyusunan perencanaan penanaman modal

PMDN maupun PMN di daerah yang telah dilaksanakan secara bottom up yang mana lingkup perencanaan penanaman modal di daerah selain penentuan tujuan dan sasaran hal yang sangat penting adalah penentuan prioritas dan penetapan strategisnya berdasarkan kondisi dan lingkungan strategis yang ada.

Maka perencanaan penanaman modal asing di daerah di mulai dari kegiatan identifikasi potensi sumber daya berdasarkan informasi sektor-sektor terkait di daerah tentang profil potensi, dilanjutkan pemilihan bidang usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Daftar Negatif Investasi (DNI) serta mengacu pada visi dan misi dari daerahnya masing-masing sekaligus penyusunan profil bidang-bidang usaha unggulan sampai dengan penetapan langkah-langkah operasional yang diambil untuk mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, termasuk koordinasi dengan instansi terkait dalam penyiapan sarana dan pra sarana yang diperlukan.

Dalam pemulihan bidang-bidang usaha unggulan atau peluang usaha yang layak dikembangkan harus sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan mengacu pada prioritas rencana pembangunan daerah dengan maksud agar dapat disinkronkan dengan rencana pembangunan pada umumnya terutama pembangunan yang menunjang terlaksananya kegiatan penanaman

modal di daerah setelah ditentukannya bidang-bidang usaha unggulan yang akan dikembangkan perlu tersedianya anggaran untuk pembuatan profil penanaman modal asing yang dilengkapi dengan kajian mikro maupun makro. Kelayakan usaha serta kesiapan aparat dan sistem pelayanan penanaman modal di daerah dengan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan transparan.

Dengan pemberian kewenangan di bidang penanaman modal asing kepada daerah dalam undang-undang otonomi daerah, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah, penggalan potensi sumber daya diharapkan dapat berdampak terhadap terbukannya peluang-peluang penanaman modal unggulan yang akan dikembangkan secara demokratis sesuai dengan aspirasi dan prioritas pembangunan daerah dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah itu sendiri. Selain tersedianya informasi potensi sumber daya, yang antara lain berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana dan juga lembaga pendanaan tentu mampu menjadi daya tarik khusus bagi investor dalam mempertimbangkan pilihan rencana penanaman modalnya.

Potensi dan peluang penanaman modal baik PMDN maupun PMA di daerah Sumatera Barat pada saat ini masih cukup besar. Dimana potensi dan peluang tersebut yang ada juga didukung oleh

tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang cukup memadai seperti jalan dan jaringan listrik dan telekomunikasi yang telah menjangkau seluruh daerah pedesaan dengan baik serta dukungan faktor produksi lainnya. Maka untuk daerah Sumatera Barat masih terbuka potensi dan peluang penanaman modal seperti berikut ini :¹²⁸

1. Sektor Pertanian

a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Sumatera Barat beriklim basah dengan curah hujan lebih dari 2000 mm/tahun, topografi datar dan bergelombang. Dataran tinggi yang cukup luas cocok untuk tanaman hortikultura, peluang penanaman modal yang dapat dikembangkan antara lain : kol, kubis, tomat, kentang, wortel, markisa, asparagus, brokoli, kacang ercis, bunga-bunga dan lain-lain yang tidak terlalu banyak memerlukan lahan.

b. Sub Sektor Perkebunan

Usaha perkebunan yang berpeluang untuk dikembangkan antara lain :

- 1). Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Agam, Pasaman, Pesisir Selatan dan Sawahlunto/Sijunjung.
- 2). Perkebunan dan pengolahan gambir di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten 50 kota.

¹²⁸. Kepala BKPPMD Propinsi Sumatera Barat, *Pengembangan dan Prospek Investasi di Sumatera Barat*, Makalah Rapat Koordinasi Pembangunan Kota Padang Tahun 2002, Padang, 2002, hal. 6.

3). Perkebunan Kakao di Kabupaten Agam, Pasaman, 50 Kota dan Padang Pariaman.

4). Perkebunan kelapa di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

5). Perkebunan Kopi Arabica di Kabupaten Solok, Tanah Datar dan Agam.

c. Sub Sektor Peternakan

Sumatera Barat mempunyai peluang penanaman modal yang cukup potensial untuk diusahakan antara lain :

1). Peternakan sapi di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Agam, Pasaman, 50 kota dan Kabupaten Solok.

2). Penggemukan sapi di Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Agam, Pasaman, dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

3). Peternakan dan pembibitan ayam rasi di Kabupaten 50 Kota, Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

d. Sub Sektor Perikanan

Sumatera Barat memiliki garis pantai 450 Km dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang cukup luas, sehingga merupakan potensi handal yang hingga saat ini belum

dimanfaatkan secara optimal. Peluang penanaman modal yang dapat dikembangkan antara lain :

- 1). Penangkapan dan pengolahan ikan terpadu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Agam dan Kabupaten Pasaman.
- 2). Budidaya ikan kerapu di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3). Penangkapan ikan lepas pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti tuna dan cakalang.
- 4). Penangkapan dan pengolahan ikan teri terpadu di Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam dan Kabupaten Pasaman.

2. Sektor Industri

- a. Industri Kelapa Terpadu di Kabupaten Padang Pariaman dan Agam.
- b. Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Industri Kokas dan Briket di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kota Sawahlunto.
- d. Pengolahan Kopi Arabica di Kabupaten Solok dan Tanah Datar.

- e. Industri Garment di Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.
- f. Industri Pengolahan Ikan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman.
- g. Industri Pengolahan Nilam di Kabupaten Pasaman.

3. Sektor Pariwisata

- a. Pengelolaan obyek wisata bahari (Surfing, Driving/Snorkeling, Fishing, Jet Sky, Restoran dan Coltge).
- b. Pengelolaan obyek wisata Danau di atas dan Danau di bawah serta Agro City di Kabupaten Solok.
- c. Pengelolaan kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Pengelolaan wisata Air Panas Resort di Kota Padang.

4. Sektor Pertambangan

- a. Pertambangan Batu bara di Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.
- b. Penambangan Biji Mineral (An dan Ag) di Kabupaten Pasaman.
- c. Penambangan Biji Besi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

d. Penambangan dan pengolahan Batu Setengah Permata di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Penambangan dan pengolahan Batu Marmer di Kabupaten Sawah Lunto, 50 Kota, Tanah Datar, Agam dan Pasaman.

5. Sektor Pembangunan/Konstruksi

Pembangunan dan pengelolaan jembatan tol kelok sembilan batas propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Riau yang sangat berdampak bagi kelancaran angkutan darat bermuatan berat (\pm 30 ton).

Dalam rangka memperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal, maka kegiatan promosi penanaman modal akan selalu dilaksanakan secara lebih profesional dan proaktif dengan didukung oleh tersedianya bahan promosi yang lebih rinci dan komprehensif, antara lain berupa profil peluang penanaman modal yang telah dikaji baik dari aspek pasar maupun sumber bahan bakunya berdasarkan potensi keunggulan yang dimiliki dan mengacu kepada prioritas sektor dan jenis industri/usaha yang akan dikembangkan.

Bahwa prospek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang diharapkan menjadi andalan di daerah Sumatera Barat sekarang ini antara lain :¹²⁹

a. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura dataran tinggi yang tidak terlalu banyak memerlukan lahan seperti sayuran, kentang, asparagus, kopi arabica murni dan lain-lain.

¹²⁹. *Ibid*, hal. 9.

- b. Peningkatan perkebunan dan tanaman pangan, yang diarahkan dengan pola kemitraan antara pengusaha besar/menengah dengan usaha kecil dan koperasi.
- c. Industri pengolahan dan perdagangan ekspor dari beberapa komoditi tradisional dan spesifik daerah Sumatera Barat seperti cassiavera, pinang, minya nilam, gambir, karet, kopra dan lain-lain.
- d. Usaha dengan bisnis yang tidak memerlukan lahan luas seperti peternakan, perikanan laut dan air tawar, perkebunan hidroponik dan penangkaran mixfarming dan sebagainya.
- e. Usaha pariwisata terutama yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kawasan gunung Padang dan Kepulauan Mentawai, Lembah Harau, Danau serta obyek wisata alam lainnya dan wisata budaya.
- f. Kelautan diarahkan pada budidaya rumput laut, budi daya ikan kerapu, budi daya karamba serta ikan peri olahan dengan kualitas ekspor dan juga akan air tawar.
- g. Perdagangan, diarahkan pada perdagangan antar daerah, antara propinsi dan ekspor.
- h. Agrobisnis yang dapat menunjang industri untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian dengan mengutamakan untuk orientasi ekspor.

Sedangkan yang menjadi andalan prospek penanaman modal bagi investor lokal dan investor asing pada Kota Padang adalah :

1. Sektor Perikanan dan Kelautan
 - a. Pengembangan pelabuhan Bungus.
 - b. Pengembangan budidaya ikan kerapu, kepiting dan udang galah.
 - c. Pengembangan usaha perikanan air tawar.
2. Sektor Industri
 - a. Industri pengolahan ikan laut (pengalengan).
 - b. Pengeringan dan pengasapan ikan.
3. Sektor Jasa dan Perdagangan
 - a. Pengembangan pusat perbelanjaan.
 - b. Pembanguann Trading House.
4. Sektor Pariwisata
 - a. Wisata Pantai Marina Muara
 - b. Objek wisata Air dekat Minang Plaza.
 - c. Wisata Kota Tua
 - d. Pembangunan Resort Gunung Padang.

Dengan adanya pengembangan kemitraan usaha di Sumatera Barat dalam prospek penanaman modal merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan usaha kecil koperasi ke arah yang lebih baik,

mantap dan mandiri. Dalam upaya pengembangan usaha kecil/koperasi di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya sangat diperlukan keikutsertaan usaha besar/menengah, dalam membantu dan mendorong serta bekerjasama dalam pengembangan usaha baik di bidang permodalan, manajemen, teknologi dan pemasaran.

Untuk pengembangan usaha kecil dan koperasi melalui kemitraan dalam rangka penanaman modal ditetapkan suatu Surat Keputusan Bersama antara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi Nomor $\frac{22/SK/1998}{07\ SKB/14/VII/1998}$ dengan adanya Keputusan Bersama ini diharapkan setiap adanya penanaman modal melalui PMA dan PMDN dapat bermitra dengan pengusaha lokal dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹³⁰

Kemitraan usaha yang telah berjalan selama ini adalah :

1. Pola Inti Plasma

Pada pola ini usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma.

2. Pola Sub Kontrak

Usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah/usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

¹³⁰. Syahril Syarif, *Op Cit*, hal. 9.

3. Pola Dagang Umum

Dalam pola dagang umum usaha menengah/usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan usaha menengah/usaha besar.

4. Pola Waralaba

Usaha menengah/usaha besar sebagai pemberi Waralaba memberikan hak penggunaan lesensi, merk dagang dan saluran distribusi perusahaannya dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

5. Pola Keagenan

Usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah dan besar, usaha kecil ditunjuk sebagai agen/distributor.

6. Pola Saham

Usaha menengah/besar melakukan kemitraan dengan usaha kecil dalam kepemilikan saham dengan harga yang wajar dengan sistem pembayaran yang wajar dan ringan.

3.3. Peningkatan Penanaman Modal Di Sumatera Barat

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) di bidang

pembangunan ekonomi bahwa perlunya meningkatkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui kegiatan :

1. Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusif seperti : deregulasi peraturan penanaman modal, termasuk penyempurnaan sistem intensif, desentralisasi, kewenangan perijinan penanaman modal dan penyempurnaan undang-undang penanaman modal.
2. Melakukan peninjauan Daftar Negatif Investasi (DNI) secara berkala sesuai dengan perkembangan keadaan.
3. Memperkuat kelembagaan dan profesionalisme baik di pusat maupun di daerah.
4. Meningkatkan promosi di dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi secara saling menguntungkan.
6. Meningkatkan negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral.

Sehubungan dengan BKPM dalam menindaklanjuti program-program penanaman modal yang tertuang dalam PROPENAS dan berdasarkan pada visi dan misi serta dengan mencermati posisi Indonesia dalam konstelasi ekonomi global saat ini, maka BKPM menjabarkan dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana sebagai berikut :¹³¹

¹³¹. Direktur Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Prasarana BKPM, *Op Cit*, hal. 5.

1. Program peningkatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai penanaman modal secara signifikan sasarannya adalah terciptanya kepastian iklim penanaman modal yang kondusif antara lain melalui meningkatnya transparansi peraturan perundang-undangan penanaman modal dan kepastian berusaha, terciptanya sistem pelayanan, penanaman modal yang efektif dan efisien, melalui tata cara penanaman modal yang lebih sederhana dan transparan serta menurunkan waktu proses pelayanan penanaman modal.

Dalam kaitan itu, strategi kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri adalah :

- a. Menciptakan iklim penanaman modal dan usaha yang kondusif.
- b. Meningkatkan kerjasama dan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- c. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- d. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan profesionalisme aparatur BKPM.
- e. Mempercepat pelaksanaan desentralisasi kewenangan penanaman modal.

f. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

g. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi penanaman modal.

Adapun rencana kerja dalam upaya untuk menciptakan iklim penanaman dan usaha yang lebih kondusif adalah :

a. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

b. Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perijinan penanaman modal.

c. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang lebih proaktif dan efektif.

d. Pengembangan insentif penanaman modal.

e. Penggalangan potensi sumber daya nasional.

2. Program peningkatan ekonomi wilayah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah khususnya melalui peningkatan penanaman modal swasta. Pengembangan kemitraan antar pengusaha asing/nasional dengan antara pelaku ekonomi daerah dalam kegiatan penanaman modal dan pengembangan penanaman modal ke daerah-daerah tertinggal.

3. Program pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah dan koperasi berunggulan kompetitif.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing usaha kecil, menengah dan koperasi. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan peran pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam kegiatan penanaman modal. Untuk itu strategi kebijakan yang ditempuh dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan pengusaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah serta koperasi dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia.

4. Program pembentukan peraturan perundang-undangan.

Program ini bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal yang lebih transparan dan mendukung adanya kepastian berusaha. Sasaran program ini adalah meningkatkan transparansi dan kepastian berusaha antara lain melalui penyiapan rancangan undang-undang penanaman modal yang baru sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

5. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan aparat BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal. Sasaran program ini adalah terwujudnya aparatur BKPM yang profesional dan berkualitas melalui terwujudnya peningkatan kinerja aparatur BKPM, strategi kebijakan ditempuh dalam pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan aparatur BKPM dalam bidang penanaman modal.

6. Program pengawasan aparatur negara.

Tujuan program ini adalah mewujudkan aparatur BKPM yang bersih, berwibawa dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Sasaran program ini adalah meningkatnya kinerja aparatur BKPM dan meningkatnya kinerja instansi BKPM dalam meningkatkan penanaman modal yang didukung dengan penegakan peraturan peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur BKPM. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pembinaan aparatur di bidang penanaman modal.

7. Program mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana fisik.

Tujuan program ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana Kantor BKPM agar tingkat pelayanan kantor BKPM dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kualitas yang memadai serta tetap dapat dioperasikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menunjang berbagai pelayanan kepada para investor/calon investor dan instansi terkait.

8. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Tujuan program ini untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparatur instansi penanaman modal di daerah guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Sasaran program ini adalah tersedianya kualitas tenaga aparatur instansi penanaman modal di daerah yang profesional dengan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas serta wewenang pelayanan penanaman modal di daerah propinsi, kabupaten dan kota. Dalam kaitan ini strategi kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah di bidang penanaman modal dengan rencana kerja penyelenggaraan pendidikan dan latihan di bidang penanaman modal bagi aparatur instansi penanaman modal daerah.

Dengan adanya kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab utama BKPPMD untuk mengembangkan dan meningkatkan arus penanaman modal baik asing maupun domestik masuk ke daerah Sumatera Barat dan menarik minat calon investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut berkaitan dengan otonomi daerah yang mana urusan pemerintah akan dilimpahkan dari daerah Propinsi ke daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian kebijakan peningkatan penanaman modal di masa datang akan menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota dimana kegiatan penanaman modal tersebut dilaksanakan. Maka pemerintah daerah pada semua tingkatan sudah harus mempersiapkan diri dengan segera untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan tersebut dengan baik bahkan lebih baik dari yang sebelumnya.

Peningkatan penanaman modal sebagai penunjang pengembangan ekonomi mendapat perhatian utama dalam menyusun strategi yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi perekonomian daerah. Untuk mengokohkan peran dan fungsi BKPPMD dalam promosi potensi ekonomi dan peluang penanaman modal, pelayanan perijinan dan pengawasan serta pembinaan kegiatan penanaman modal di lapangan, disusun pula beberapa kebijakan tambahan sebagai berikut.¹³²

¹³². Syahril Syarif, *Op Cit*, hal. 7.

1. Melakukan re-orientasi promosi penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal skala kecil dan menengah. Untuk itu akan dilakukan berbagai kajian terhadap peluang penanaman modal yang sesuai untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) baik sebagai kegiatan penanaman modal mandiri, berkelompok maupun sebagai kegiatan kemitraan dengan usaha skala yang lebih besar.
2. Pada peringkat kedua, promosi penanaman modal diarahkan pada investor domestik/nasional termasuk pada perantau asal Sumatera Barat yang telah berhasil mengembangkan usaha atau karirnya di tempat lain. Untuk promosi luar negeri akan diletakkan fokus pada negara tetangga ASEAN (antara lain melalui forum IMS-GT, IMT-GT dan kerjasama bilateral serta cross border trade) dan negara Asia lainnya.
3. Kegiatan promosi dilakukan dengan mengadakan kontak langsung dengan para pengusaha dan calon investor melalui kegiatan temu usaha, kunjungan bisnis dan bimbingan lapangan terhadap pengusaha yang mempunyai potensi besar untuk berkembang. Mengundang delegasi dagang dan pariwisata dari negara lain lebih diutamakan dari pada mengirim delegasi daerah ke luar negeri karena cara tersebut dipercaya lebih efektif.

4. Memberikan kemudahan kepada pengusaha dan calon investor dalam bentuk penyediaan informasi dasar tentang potensi ekonomi dan peluang penanaman modal di daerah Sumatera Barat sehingga dapat mempercepat dan mempermudah investor dalam pengambilan keputusan.
5. Mendorong penggunaan media elektronik dalam pertukaran informasi dan pembangunan network di antara pengusaha, asosiasi dagang, instansi pemerintah dalam bentuk e-network, e-commerce dan penggunaan audio visual interaktif dalam promosi penanaman modal.
6. Memberikan bimbingan secara intensif kepada calon investor mulai dari tahap awal seperti pengkajian potensi ekonomi, mencari mitra usaha negosiasi dengan masyarakat setempat berhubungan dengan instansi pemberi izin dan memberikan informasi mengenai kondisi lokal secara lengkap.
7. Memberikan perlindungan terhadap kegiatan penanaman modal dan terhadap investor dan pekerja asing yang melakukan kegiatan di daerah Sumatera Barat yang juga termasuk dalam kerangka Persetujuan Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M).

Melihat perkembangan perekonomian Indonesia yang sulit diduga dan mengalami resesi yang berkepanjangan, apalagi terjadinya insiden di Bali dan Manado mempengaruhi perekonomian

nasional dan berdampak terhadap perekonomian Sumatera Barat, termasuk pertumbuhan penanaman modal di daerah tersebut, maka mengharapkan terjadinya peningkatan penanaman modal dalam waktu dekat sangat sulit. Namun kegiatan promosi peluang penanaman modal dalam rangka meningkatkan minat investor perlu digalakan. Tetapi tanpa adanya penambahan penanaman modal baru maupun penambahan atau perluasan dari penanaman modal yang sudah berjalan, maka pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang rendah sekali pun akan sulit dicapai.

Dalam keadaan demikian segala bentuk upaya mendorong peningkatan penanaman modal baik dalam bentuk PMA, PMDN dan non fasilitas maupun penanaman modal rumah tangga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Begitu juga dengan penanaman modal berskala kecil dan menengah harus dapat ditingkatkan. Segala upaya dan usaha harus dilakukan agar pembangunan penanaman modal di masa yang akan datang tercapai dengan baik disamping itu supaya peningkatan realisasi penanaman modal baik PMA maupun PMDN perlu menjadi perhatian diantaranya :

1. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
2. Melanjutkan program reformasi di bidang penanaman modal.
3. Meningkatkan profesional para investor dan mitra terkait.
4. Membantu investor dalam mengatasi hambatan kegiatan penanaman modal.

5. Meningkatkan bimbingan dan pembinaan kegiatan penanaman modal.
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral.
7. Meningkatkan penerimaan laporan kegiatan penanaman modal.
8. Pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif.

Dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan investasi di daerah, pemerintah telah mengeluarkan berbagai Undang-Undang, peraturan dan kebijakan. Arah kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan penanaman modal di daerah antara lain meliputi :

1. Menyederhanakan tata cara/prosedur penanaman modal.
2. Memberikan berbagai fasilitas, antara lain :
 - a. Membebaskan bea masuk terhadap impor barang modal
 - b. Menunda pembayaran PPh dan PPn bagi PMA/PMDN sampai perusahaan tersebut dapat melakukan produksi komersil.
 - c. Memperpanjang pemberian izin operasi.
 - d. Memberikan insentif berupa Tax Holiday bagi perusahaan yang memproduksi komponen/komoditi tertentu.
 - e. Mempermudah pemberian izin pendirian perusahaan PMA/PMDN baru bagi perusahaan yang telah berhasil.
3. Menjaga kepastian hukum dan ketertiban.
4. Peningkatan fasilitas umum.

4. Pengembangan Penanaman Modal Asing Sehubungan Dengan Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat

4.1. Pemberdayaan Potensi Ekonomi Daerah Sumatera Barat

Dalam upaya mempercepat kinerja ekonomi Indonesia tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu sektor penting yang perlu ditingkatkan melalui berbagai cara dan strategi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka diperlukan suatu upaya terpadu untuk menghadapi tantangan dan sekaligus peluang yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut, khususnya pemberdayaan potensi daerah. Bahwa penanaman modal daerah yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja.

Upaya pemberdayaan potensi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen pemerintah, masyarakat dan swasta, untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas dan inisiatif dalam melakukan proses pemberdayaan potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya secara lebih efektif dan produktif yang terdapat pada daerah Sumatera Barat adalah :

a. Kondisi Wilayah

Propinsi Sumatera Barat terletak antar $0^{\circ} 54^1$ lintang utara dan $3^{\circ} 30^1$ lintang selatan serta $98^{\circ} 36^1$ dan $101^{\circ} 53^1$ bujur timur

dengan luas 42. 229, 36 Km atau 2,17 % dari luas Indonesia. Secara administrasi pemerintahan terdiri dari 15 Kabupaten dan Kota dengan topografi bervariasi antara datar, gelombang dan berbukit serta ketinggian antara 2 sampai 927 m dari permukaan laut. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun dengan rata-rata perbulan 200 mm dengan curah hujan mencapai 3.000 mm/tahun dan banyaknya hari hujan selama 120 hari/tahun dan sebagian besar wilayah Sumatera Barat beriklim basah.

Luas Propinsi Sumatera Barat terdiri dari lahan hutan dan non hutan, lahan hutan terbagi menjadi hutan lindung seluas 1.206.624 Ha, hutan suaka alam seluas 599. 694 Ha, hutan produksi tetap seluas 596.844 Ha, dan hutan produksi terbatas 539.707 Ha. Lahan non hutan terdiri dari tanah sawah dan lahan kering, masing-masing seluas 227.600 Ha dan 1.625.100 Ha. Dari luas hutan tersebut di atas masih berpeluang untuk diusahakan diberbagai sektor dan bidang usaha potensial yang cukup menjanjikan tingkat keuntungan kepada para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya antara lain, sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, jasa dan pariwisata yang tersebar di daerah Kabupaten dan Kota.

b. Sarana dan Prasarana

- Sarana Jalan

Sampai saat ini di Propinsi Sumatera Barat telah berhasil dibangun jalan sepanjang 11.973,88 km yang menghubungkan beberapa kota dalam daerah Sumatera Barat. Panjang jalan tersebut terbagi atas jalan negara sepanjang 703,66 Km, jalan Propinsi sepanjang 1.472,92 km dan jalan Kabupaten Kota sepanjang 9.797,3 Km, kondisi permukaannya sebagian besar merupakan jalan aspal dan hanya sebagian kecil jalan kerikil dan jalan tanah.

Disamping jaringan jalan tersebut di atas juga terdapat jaringan jalan kereta api yang menghubungkan Kota Padang, Sawahlunto, Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman dan Solok sepanjang 196 km. Jasa angkutan kereta api pada umumnya digunakan untuk pengangkutan batu bara, semen dan minyak kelapa sawit. Disamping itu trayek Padang Pariaman dan Padang Lembah Anai digunakan untuk angkutan wisata pada setiap hari minggu dan hari libur lainnya.

- Pelabuhan Laut

Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan yang cukup representatif dan besar di Pantai Barat pulau Sumatera yang digunakan sebagai tempat persinggahan kapal

barang dan penumpang antar pulau nusantara dan merupakan pelabuhan ekspor dan impor serta dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat dan peti kemas, disamping itu juga terdapat pelabuhan kecil dan dilabui oleh kapal-kapal kecil, sedang dan fery dengan tonase sampai 50 ton dan memiliki fasilitas untuk merapat dan pemberangkatan kapal untuk pelayaran inter insuler.

- Pelabuhan Udara

Bandar Udara Tabing merupakan satu-satunya pelabuhan udara di Propinsi Sumatera Barat yang terletak \pm 8 km sebelah utara Kota Padang dan menghubungkan beberapa kota besar di Indonesia dan Malaka antara lain Padang dan Medan, Palembang, Jakarta, Batam, Kuala Lumpur dan Singapura. Saat ini tengah dilaksanakan pembangunan Bandara Internasional Ketaping yang akan dilengkapi dengan fasilitas penerbangan bertaraf internasional dan mampu didarati oleh pesawat berbadan lebar dan sejenis MD.II/A 300. Bandara ini diharapkan akan dapat menunjang pengembangan sektor pariwisata Sumatera Barat nantinya.

- Listrik

Penyediaan tenaga listrik yang dikelola oleh PT PLN (Persero) dengan sistem interkoneksi dengan jaringan listrik telah menjangkau sampai pelosok pedesaan di semua

Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Penyediaan tenaga listrik baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri cukup tersedia di Sumatera Barat dengan mesin pembangkit tenaga listrik yang cukup besar diantaranya PLTA Batang Agam dan Maninjau di Kabupaten Agam dan PLTU Salak di Kota Sawahlunto serta PLTA Singkarak dan Koto Panjang.

- Kawasan Industri

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam menunjang persediaan prasarana untuk pembangunan pabrik, telah menyediakan tanah seluas 500 Ha berlokasi di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman \pm 24 km dari Pusat Kota Padang dan yang dikelola oleh PT. Padang Industrial Park, telah dibangun beberapa buah industri sebagian diantaranya telah berproduksi komersial.

- Perbankan

Sampai pada semester I tahun 2000, jumlah bank umum di Propinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 13 buah bank dengan 114 buah kantor yang terdiri dari 37 buah kantor bank umum pemerintah, 50 kantor bank pembangunan Sumatera Barat dan 27 buah kantor bank umum swasta. Dari

jumlah diatas tidak termasuk kantor unit PT Bank Rakyat Indonesia sebanyak 102 buah kantor yang tersebar di seluruh daerah sumatera barat.

- Eksportir

Berdasarkan data dari Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat, saat ini tercatat sebanyak 39 eksportir yang masih aktif dan mengekspor berbagai komoditi unggulan Sumatera Barat ke berbagai negara tujuan ekspor. Ruang lingkup usaha para eksportir daerah tersebut di atas meliputi cassiavera, crumb rubber, batu bara, rotan olahan, gambir, CPO, kopi, teh, bungkil kopra, minyak pala, biji kakao, pinang dan sebagainya. Para eksportir daerah tersebut siap untuk membantu para investor yang membutuhkan berbagai informasi yang dibutuhkan.¹³³

c. Perkembangan Penanaman Modal Asing

Berdasarkan lima perusahaan PMA yang dilakukan penelitian pada perusahaan kelapa sawit maka dua dari perusahaan tersebut yang bisa diperoleh data yang lengkap tahun anggaran 2002 bergerak pada bidang usaha perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi sawit dan inti sawit

¹³³ Direktorat Jenderal Multilatera Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, *Op Cit*, hal. 67.

pada PT. Incasi Raya : rencana investasi sebesar US\$ 37.158,72 ribu, Luas lahan inti \pm 6.000 Ha, Kapasitas produksi pertahun sebanyak \pm 21.900 ton CPO, Minyak inti sawit pada perusahaan ini dijual dan PT. AMP Plantation : Rencana investasi sebesar US\$ 54.570.000 ribu, luas lahan inti 7922 Ha, plasma 230 Ha (rencana), 3,5 Ha (realisasi), kapasitas produksi pertahun sebanyak 51.000 ton CPO dan inti sawit 11.000 PKO.

Sedangkan dua perusahaan bergerak pada perkebunan kepala sawit pada PT. Gersindo Minang Plantation dengan rencana investasi sebesar US\$ 28.000.000 ribu, luas lahan inti 3600 Ha, plasma 2400 Ha dan PT. Permata Hijau Pasaman rencana investasi US\$ 5.362,72 ribu, luas lahan 5300 Ha, Plasma 5400 Ha serta satu perusahaan belum bisa memberikan hasil yang pasti masih dalam bentuk data baku. Perusahaan-perusahaan tersebut di atas siap untuk bermitra dengan pengusaha kecil dan koperasi untuk membangun kebun plasma.

Upaya dalam meningkatkan investasi menurut pelaku dan skala usaha dalam rangka memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk memanfaatkan kesempatan bermitra dengan pengusaha menengah dan besar dengan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari beberapa Kabupaten dan Kota untuk

tahun 2000 terdapat sebanyak 17 buah usaha kecil dan koperasi yang berminat bermitra dengan pengusaha menengah dan besar yang bergerak pada beberapa bidang usaha antara lain, 5 buah bergerak pada bidang usaha perbengkelan, 10 buah pada bidang usaha industri dan 1 usaha pada bidang usaha pertambangan batu kapur serta 1 buah lagi pada bidang usaha kerajinan dan kaca. Sementara bentuk kemitraan yang diinginkan oleh usaha kecil dan koperasi tersebut di atas pada umumnya berbentuk pola dagang umum.¹³⁴

d. Perkembangan Potensi Pembangunan

Pembangunan daerah Sumatera Barat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan telah dilaksanakan secara bertahap di seluruh aspek kehidupan sejak Pelita I sampai sekarang. Program pembangunan yang disusun tersebut memperhatikan potensi dan kondisi daerah dan dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Daerah sebagai penjabaran dari GBHN dan Repelita Nasional.

Sebagian besar masyarakat Sumatera Barat hidup dan bergantung pada sektor pertanian rakyat (80 %) dan sisanya dari sektor industri kecil/kerajinan dan sektor perdagangan berskala kecil dan tradisional. Di sisi lain di Sumatera Barat juga terdapat pengusaha kuat (Investor dan BUMN) yang berusaha di bidang

¹³⁴. Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, *Op Cit*, hal 70.

perkebunan, perhotelan, pertambangan, industri, keuangan dan angkutan. Menyadari hal itu, maka diterapkan strategi pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan bagi kedua golongan tersebut. Bagi yang maju, diberikan keleluasaan atau peluang yang besar serta iklim usaha yang merangsang agar mereka tetap maju dan mandiri, serta iklim usaha yang merangsang agar mereka tetap maju dan mandiri, sedangkan bagi yang termasuk golongan ekonomi berskala kecil perlu dilakukan upaya pemberdayaan seoptimal mungkin agar mampu mengejar ketinggalannya. Dengan demikian akan dapat diperkecil dan dicegah melebarnya jurang antara kedua golongan ini.

Strategi pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan golongan ekonomi kuat dan lemah di atas diharapkan dapat membentuk pola hubungan kemitraan yang saling menguntungkan agar tercipta struktur ekonomi dan masyarakat yang sinergis menuju ke arah pembangunan yang berkesimbangan dan merata, disamping itu strategi tersebut dapat memberikan peningkatan pada setiap sektor pembangunan yang dilaksanakan di Sumatera Barat. Adapun kondisi perkembangan pembangunan Sumatera Barat selama 10 tahun terakhir ini dapat dilihat pada uraian berikut ini :¹³⁵

¹³⁵. *Op Cit.*, hal 71.

1. Potensi Geografis

Daratan Sumatera Barat, sebagian besar adalah tanah berkemiringan tinggi hingga sedang, mempunyai gunung-gunung, ngarai dan lembah, serta kawasan hutan yang perlu dijaga kelestariannya. Curah hujan yang tinggi dan hampir merata sepanjang tahun merupakan salah satu potensi alamiah Sumatera Barat, namun juga terkait dengan pengelolaan lingkungan. Adanya lima buah danau dan 230 sungai besar dan kecil, adalah potensi tersendiri dalam proses pembangunan pembangkit tenaga listrik, prasarana lalu lintas, usaha perikanan, penyediaan air, pariwisata dan lain-lain, tetapi juga merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan lingkungan. Gunung-gunung berapi memperkaya lahan dengan bahan-bahan vulkanis, tetapi juga memberikan indikasi situasi stabilitas dan labilitas terhadap bahaya erosi.

Sebagai daerah yang terletak di sepanjang bukit barisan beriklim tropis dan bertanah subur, Sumatera Barat memiliki luas hutan yang memadai dengan kualitas yang baik. Sebagian dari kawasan hutan tersebut dapat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan sebagian lagi perlu dipelihara sebagai kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi keperluan

yang terakhir ini, sekitar 30 % dari kawasan hutan Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam bentuk taman nasional, kawasan hutan lindung, maupun cagar alam yang dilindungi. Diantaranya ialah :

- a. Taman Nasional Kerinci Seblat (bersama Jambi, Bengkulu dan Sumsel).
- b. Taman Nasional di kepulauan Mentawai.
- c. Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kotamadya Padang.
- d. Cagar Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman.
- e. Cagar Alam Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar dan Padang Panjang.
- f. Cagar Alam Lembah Harau di Kabupaten 50 kota dan
- g. Kawasan Konservasi dan hutan lindung yang tersebar di semua kabupaten.

2. Pertanian dan Kelautan

Melalui program Ekstensifikasi, Intensifikasi, Pasca Panen dan Diversifikasi perkembangan dan kemajuan yang dicapai sub sektor Pertanian Tanaman Pangan yang mana produksi padi, palawija, sayuran dan buah-buahan pada tahun terakhir ini mengalami peningkatan begitu juga terhadap luas panen bertambah.

3. Perikanan dan Kelautan

Propinsi Sumatera Barat juga mempunyai sumber daya kelautan (maritim) yang cukup besar. Propinsi Sumatear Barat memiliki garis pantai yang membentang sepanjang 375 kilometer, meliputi kawasan pantai daerah tingkat II Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Padang dan Pesisir Selatan. Bila diperhitungkan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil dari garis pantai, maka luas lautan Sumatera Barat 8,99 juga km² atau lebih dua kali lipat luas daratannya.

Khususnya sumber daya kelautan ini, hingga dewasa ini baru sebagian kecil yang berhasil diusahakan, berupa usaha penangkapan ikan dan pengolahannya. Laut adalah kekayaan Sumatera Barat yang masih berpotensi besar dan sangat prospektif untuk dikelola bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya di masa depan.

4. Kehutanan

Pembangunan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung lahan, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya pembangunan lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di

Sumatera Barat dilakukan melalui program pembangunan kehutanan yang kondisinya saat ini sebagai berikut : perkembangan hutan PPA di Sumatera Barat meningkat, hutan lindung cenderung berkurang, hutan produksi di Sumatera Barat terbatas dan perkembangannya cenderung menurun, bagi jumlah kawasan hutan di Sumatera Barat juga cenderung berkurang.

Sedangkan kota-kota yang mendapat penghargaan kota terbersih atau Adipura di Sumatera Barat selama beberapa tahun terakhir ini adalah Kotamadya Padang, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh, Kota Administratif Pariaman, Batusangkar, Painan, Padang Panjang, Sawahlunto dan Muara Sijunjung. Disamping itu diantaranya dua kotamadya berhasil memperoleh penghargaan Adipura Kencana yaitu Kotamadya Padang dan Bukittinggi karena berhasil lima kali berturut-turut mempertahankan kota terbersih atau Adipura.

Perkembangan produksi kayu bulat di Sumatera Barat mengalami peningkatan, begitu juga terhadap produksi kayu gergajian, produksi kayu lapis dan produksi sarang burung mengalami peningkatan tetapi produksi rotan mengalami penurunan.

Selain sebagai kawasan konservasi untuk pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem, semua tanaman nasional, cagar alam dan hutan lindung tersebut juga memiliki kekayaan alam flora dan fauna yang tidak ternilai. Karena kekayaan yang dilindungi tersebut juga merupakan potensi pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Potensi hutan yang cukup besar tersebut, selain untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, cadangan air, juga memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar sebagai penghasil berbagai komoditi seperti kayu, damar, rotan, manau dan lain-lain yang tidak hanya digunakan untuk keperluan industri dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, akan tetapi hasil hutan dan hasil industri pengolahannya merupakan penyumbang terbesar ekspor Sumatera Barat.

5. Pertambangan

Tanah, hutan, air serta flora dan fauna, adalah sumber daya daratan Sumatera Barat yang sangat berarti bagi pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Kekayaan alam lainnya yang juga dimiliki ini adalah bahan tambang dan bahan galian seperti batu bara, batu kapur (untuk industri

semen) marmer, pasir kuarsa, timah hitam, dolomit, obsidian (batu bintang) batu granit dan emas, di samping pasir, batu krikil dan bahan galian golongan C lainnya.

Hingga dewasa ini Sumatera Barat masih memiliki deposit batubara dalam jumlah besar, yakni sekitar 200 juta ton cadangan terukur di daerah Sawahlunto, Sijunjung, sekitar 4 juta ton di Pesisir Selatan, disamping cadangan terduga yang terdapat di kabupaten 50 kota. Sedangkan cadangan batu kapur (lime stone) terdapat hampir di semua daerah, seperti di Padang, Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kodya Padang Panjang, serta di Kabupaten 50 Kota, Agam, Pesisir Selatan dan Pasaman. Cadangan terbesar yang sudah terukur terdapat di Indarung. Padang yakni mencapai 1,5 miliar ton yang telah dieksploitasi sejak tahun 1910 untuk keperluan pabrik semen PT Semen Padang.

Meskipun belum ditemukan cadangan gas dan minyak bumi yang memadai untuk dieksploitasi, namun diperkirakan sumber daya alam tersebut juga terdapat di Sumatera Barat. Selain itu, diduga masih terdapat berbagai sumber daya mineral lainnya baik di darat maupun di wilayah lautannya.

Namun perlu diakui pula, walaupun semua sumber daya dan kekayaan alam itu secara relatif telah banyak memberikan kemajuan bagi ekonomi daerah dan masyarakat, namun belumlah tergarap secara optimal. Untuk dapat dikelola agar memberikan manfaat dan nilai ekonomi yang lebih besar, diperlukan modal yang besar serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang maju dan canggih pula. Selama 10 tahun terakhir, telah dilakukan berbagai usaha untuk mengelola kekayaan alam tersebut di hampir semua sektor pembangunan. Namun diperlukan usaha, kerja keras, modal dan iptek yang lebih baik di masa-masa mendatang agar dapat terwujudnya pembangunan perekonomian yang lebih mantap dan mandiri di Sumatera Barat.

4.2. Pemberdayaan Penanaman Modal Asing dalam Otonomi Daerah

Bahwa perlu adanya persepsi yang sama terhadap pelaksanaan otonomi daerah selama ini, baik yang terdapat dalam materi undang-undang maupun dalam pelaksanaannya pada berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, karena penyerahan urusan otonomi kepada daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan seluruhnya, mengingat masih ada urusan-urusan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Begitu pula halnya penyerahan wewenang dan

urusan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota juga akan dilakukan secara bertahap. Disamping itu harus pula dipertimbangkan kemampuan dan kesiapan daerah untuk dapat menerima dan melaksanakannya.

Dalam konteks ini arahan yang penting adalah pemberdayaan penanaman modal dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena otonomi daerah merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan masyarakat dan mempunyai suatu daerah untuk berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah, dalam arti daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Sesuai dengan amanat konstitusi melalui TAP MPR No. IV Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah antara lain mengatur bagi daerah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan BUMN yang ada di daerah yang bersangkutan dan bagian dari pajak penghasilan perusahaan yang beroperasi. Dalam hal ini BUMN perlu mempersiapkan diri untuk bisa mengakomodasikan harapan dari pemerintah daerah sebagai salah satu perilaku ekonomi daerah yang dituntut berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerahnya. Kebijakan pemberian bagian laba BUMN di atas adalah

sebagai upaya untuk menciptakan sense of ownership daerah terhadap keberadaan BUMN termasuk BUMN pengelola sumber daya alam.¹³⁶

Pelaksanaan otonomi daerah, adanya Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang esensial bagi daerah, yang akan digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini tentu sangat erat hubungannya dengan kegiatan penanaman modal swasta non fasilitas maupun penanaman modal dalam bentuk PMDN dan PMA, disamping itu penanaman modal dalam skala kecil/menengah dan penanaman modal rumah tangga serta kehidupan perkoperasian juga harus mendapat perhatian, karena akan memberikan sumbangan pula terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Dalam kajian otonomi ini, setiap daerah perlu melakukan revitalisasi dari seluruh potensi yang dimiliki, baik yang belum digali maupun yang sudah digali dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain adalah :¹³⁷

1. Kondisi geografis, dalam hal ini kondisi letak daerah yang dapat memberikan peluang/manfaat untuk maju dan berkembang dengan mengadakan komunikasi kultural yang seluas-luasnya dan menjalin perdagangan dengan daerah lain.

¹³⁶. Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, *Op Cit*, hal. 23.

¹³⁷. Syahrial Syaraif, *Perkembangan Penanaman Modal di Sumatera Barat*, Makalah Seminar BKPPM/BI, Padang, 2002, hal. 4.

2. Kondisi sumber daya alam, yakni keaneka ragaman sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, mengundang keinginan dari pada investor untuk memanfaatkannya sehingga dapat menaikkan pendapatan daerah.
3. Aspek demografi yaitu jumlah penduduk yang tersedia yang mudah didapat di daerah dengan seragam keterampilan yang dapat dimanfaatkan dan merupakan potensi dan dinamika sosial yang dapat diandalkan untuk maju di kemudian hari.
4. Aspek politik dan hukum yaitu restrukturisasi kehidupan politik agar terbuka proses demokratisasi masyarakat melalui saluran komunikasi politik antara rakyat dengan lembaga perwakilan dan instansi pemerintah. Sedangkan dari aspek hukum sangat diperlukan adanya kepastian hukum dan pencapaian keadilan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Aspek sosial budaya, dalam hal ini meliputi agama, bahasa dan kekayaan, adat istiadat yang dimiliki masyarakat setempat merupakan faktor yang sangat berperan pula dalam kegiatan-kegiatan penelitian sosial budaya yang bernilai historis serta pengembangan usaha-usaha pariwisata di daerah.
6. Aspek ekonomi yang perlu dimaksimalkan terletak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD, APBD dan PDRB daerah, sehingga pembangunan ekonomi benar-benar dapat membawa dampak yang positif dan dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Dengan menyikapi beberapa contoh faktor-faktor yang dikemukakan di atas, hendaknya daerah akan lebih berperan membudayakan penanaman modal di daerah dalam upaya pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diselesaikan kepada daerah. Kegiatan penanaman modal menjadi ujung tombak yang perlu segera dibenahi baik dari segi perencanaan, peningkatan promosi, pelayanan perijinan dan pengawasan kegiatan penanaman modal di lapangan.

Era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan Kota, membawa konsekuensi pada upaya untuk memperdayakan pelayanan penanaman modal di tingkat kabupaten dan kota, sesuai dengan perlimpahan kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga daerah tidak hanya sekedar menyajikan bidang-bidang usaha yang ada di daerah, tetapi sudah harus dipersiapkan untuk dapat memproses segala jenis perijinan penanaman modal yang diperlukan oleh investor asing maupun investor lokal.

Dalam hal ini perlu diperhatikan serta ditingkatkan upaya dan kesiapan perangkat daerah baik di bidang kemampuan personel maupun institusional dalam proses penyelesaian dan pemberian fasilitas perijinan maupun menyangkut prosedural yang akan memperlancar proses perijinan penanaman modal di daerah

nantinya. Dengan berkembangnya penanaman modal diharapkan akan membawa dampak terhadap pertumbuhan perekonomian daerah sebagai bagian dari perekonomian nasional.

Untuk menciptakan iklim penanaman modal terutama yang PMA lebih kompetitif dan sekaligus meningkatkan daya saing, maka langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah adalah :

1. Menyamakan visi, misi dan persepsi penanaman modal baik antara instansi pusat dan atau dengan daerah, sehingga masing-masing instansi mampu menterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan sektor atau daerah masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan maupun penafsiran dalam implementasinya, sehingga akan mendukung kecepatannya terciptanya transparansi dan kepastian hukum.
2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal seperti penyusunan RUU-PM sebagai UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 8 tahun 1968 tentang PMDN, pembaharuan DNI dan kebijakan lain di bidang penanaman modal. Dengan langkah ini diharapkan peraturan perundang-undangan penanaman modal dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi dengan sangat cepat dan dinamis.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan khususnya di bidang-bidang yang berkaitan dengan penanaman modal. Dalam melaksanakan kegiatan ini BKPM bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.
4. Melakukan deregulasi peraturan dalam rangka penciptakan peluang-peluang usaha dengan menghapuskan hambatan-hambatan penanaman modal, sekaligus untuk mempercepat tersedianya bangunan sarana dan pra sarana penanaman modal.

Sedangkan langkah-langkah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kompetitif dan memiliki daya saing adalah :

1. Menempatkan dan menetapkan visi dan misi penanaman modal daerah dengan mengacu pada visi penanaman modal nasional.
2. Pemetaan (mapping) tentang wilayah yang akan dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki sesuai Program Pembangunan Daerah.
3. Identifikasi berbagai peluang usaha yang memiliki daya comparative advantage sesuai dengan potensi sumber daya alam (*resource based*) yang dimiliki untuk kemudian dituangkan dalam bentuk profil-profil proyek penanaman modal sebagai bahan promosi.

4. Melakukan deregulasi untuk menghapuskan hambatan-hambatan dalam kegiatan penanaman modal/usaha bahkan jika mungkin memberikan fasilitas atau insentif tambahan dan kemudahan lain kepada investor sesuai kewenangan yang dimiliki.
5. Memberikan pelayanan prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas dengan prinsip pelayanan satu atap agar tingkat efisiensi pelayanan perijinan dapat ditingkatkan.
6. Secara proaktif membantu penyelesaian masalah yang dihadapi investor dalam melaksanakan, proyeknya, baik investor yang sudah ada (sudah beroperasi) maupun bagi investor baru.
7. Mengembangkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah baik aparatur daerah maupun pelaku bisnis melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
8. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar daerah kabupaten/kota dan dengan atau antar propinsi atau dengan pusat serta antar badan/dinas di daerah dalam rangka mempermudah pelayanan penanaman modal.

4.3. Strategi Penanaman Modal Asing Sehubungan dengan Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Di Sumatera Barat

Perkembangan penanaman modal asing akan berjalan dengan baik dan lancar, apabila didukung dengan strategi yang mantap, karena perkembangan strategi bergerak cepat dan dinamis serta

membuka peluang bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini kesiapan daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal asing dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Strategi-strategi yang diperlukan dalam rangka meningkatkan penanaman modal asing ke daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah :¹³⁸

1. Permasalahan utama yang timbul dalam penerapan otonomi daerah adalah adanya diferensiasi kapasitas perekonomian yang ditandai dengan kesenjangan ekonomi spasial dalam hal kepemilikan sumber daya produktif antara daerah satu dengan lainnya. Untuk itu guna lebih memberdayakan penanaman modal asing di daerah, daerah dituntut untuk menyediakan jasa pelayanan yang cepat dan tepat yang disebut one stop service untuk memberi kemudahan dalam pengurusan perijinan di bidang penanaman modal.
2. Dalam rangka memaksimalkan upaya promosi penanaman modal, daerah juga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang cepat dan akurat serta mudah diakses publik, upaya tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang unggul yang dapat menjadi daya tarik bagi investor asing. Daerah otonomi

¹³⁸. Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, *Op Cit*, hal. 83.

yang berhasil akan dapat menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi daerah dengan memanfaatkan data spesial sosial ekonomi daerah, serta penataan ruang baik fisik maupun sosial ekonomi sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pemerintah perlu menyadari bahwa untuk lebih memberdayakan potensi daerah, perlu dilakukan pendelegasian tanggung jawab di bidang penanaman modal. Namun demikian, beberapa masalah seperti pembagian hasil sumber daya alam, hak kepemilikan, penentuan batas-batas wilayah serta perizin perlu di bahas lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah. Berkaitan dengan hak tersebut, BKPM merencanakan akan menganggarkan untuk tahun 2003. Kegiatan promosi penanaman modal akan lebih disosialisasikan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota).
4. Pemberlakuan otonomi daerah sering disebut sebagai salah satu penyebab menurunnya penanaman modal asing ke Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain tidak harmonisan peraturan antara pusat daerah yang menyebabkan pengenaan pajak berganda dan hidup tinggi pada pengisian perijinan penanaman modal asing yang hendak. Hal ini sangat disayangkan karena penerapan otonomi daerah seharusnya bukan malah menciptakan ekonomi biaya tinggi, melainkan dapat memacu persaingan yang sehat antar daerah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat daerah.

5. Untuk itu pemerintah daerah perlu mempunyai pendekatan ekonomi yang bersifat makro tidak hanya berpikiran mengenai APBD semua lebih menguntungkan untuk memberi pajak pada hasil penanaman modal dair pada di pintu gerbang masuknya penanaman modal asing. Selain itu pemerintah pusat juga diminta untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang bersifat investor friendly yang mengandung insentif. Kepastian berusaha, keamanan dan penerimaan oleh masyarakat sekitarnya.
6. Untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal asing perlu di tawarkan berbagai fasilitas penanaman modal yang menarik kepada pada investor dengan berdasarkan :
 - a. Peraturan penanaman modal yang bebas, liberal, tidak berubah-ubah dan transparan.
 - b. Peraturan perdagangan bebas hambatan.
 - c. Asas non-diskriminan terhadap investor asing.
 - d. Kebebasan arus keluar masuk modal.
 - e. Tingkat pajak yang rendah, sederhana dn dapat dikalkulasikan secara dini.
 - f. Pertaruran yang tegas terhadap perlindungan hak asasi manusia.
 - g. Sikap birokrasi yang terbuka dan ramah.

7. Dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan bagi investor asing, maka perlu dibentuk badan khusus yang mengarah masalah penanaman modal dengan orientasi pemecahan masalah promosi penanaman modal, fasilitasi dan pelayanan jasa kepada investor pasca penanaman modal seperti invest HK di Hongkong. Invest HK dirancang sebagai “One stop shop for investment support service” dengan visi memperkuat Hongkong sebagai lokasi bisnis internasional terkemuka di Asia dan misinya menciptakan Hongkong sebagai tempat penanaman modal penting yang menarik secara ekonomis dan strategis. Dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut diupayakan agar para calon investor secara mudah dapat mengurus langsung kepentingannya sejak dari tahap awal sampai tahap pengoperasian dan perpanjangan kontrak penanaman modalnya di Hongkong melalui penyajian informasi tepat guna dan menghindari informasi yang over loaded.
8. Selain itu guna mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan promosi penanaman modal secara komprehensif, perlu memanfaatkan, pengusaha keturunan negara investor (seperti pengusaha keturunan Cina di Indonesia). Untuk itu mempromosikan iklim penanaman modal Indonesia, khususnya di negara-negara investor mengingat ikatan kultural pengusahaan tersebut dengan para investor dari negara mitra dapat lebih mencapai sasaran upaya promosi penanaman modal tersebut.

2. Manfaat yang Diperoleh dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

Kekayaan alam yang besar dan cukup potensial belum banyak dapat dikembangkan dikelola dan keadaan masyarakat yang bisa dikatakan masih kurang memiliki keahlian dan keterampilan diberbagai bidang seperti teknologi, pendidikan, pertanian, industri, pertambangan dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap pembangunan terutama perkembangan perekonomian di Sumatera Barat. Kekayaan alam yang ada tidak dapat dimaksimalkan guna kesejahteraan masyarakat dikarenakan hal-hal tersebut seperti pada bidang perindustrian yang mengolah bahan-bahan mentah tidak dapat berkembang dan juga kurangnya dukungan yang serius dari pemerinth, yang mana faktor utama penyebabnya adalah kekurangan dan keterbatasan modal yang miliki.

Keterbatasan modal untuk diinvestasikan dikarenakan hubungan dan simpanan masyarakat yang rendah yang mana pendapatan rendah merupakan cermin dari produktifitas yang rendah. Produktifitas rendah adalah akibat kurangnya modal untuk melakukan investasi menyebabkan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut usaha-usaha industri sehingga hasil produksi tidak dapat lagi memanfaatkan.

Keberadaan modal asing ke Sumatera Barat sedikitnya banyaknya telah membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam peningkatan perekonomian dan pengadaan kesempatan kerja. Dengan adanya modal asing tetap sebagai modal pelengkap disamping modal dalam negeri yang juga dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat.

Sehubungan dengan otonomi daerah setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dimana manfaat sebelum dan setelah UU Otonomi Daerah pada prinsipnya sama, tetapi manfaat sebelum UU Otonomi Daerah mengenai pelayanan yang cepat, efektif dan efisien tidak pernah dilaksanakan sedangkan setelah UU Otonomi Daerah hal tersebut dapat terlaksana. Begitu juga dengan manfaat lain yang dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan setiap potensi sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat

Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian bangsa maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing. Pengembangan dan pengolahan hasil-hasil kekayaan alam di Sumatera Barat belum dapat dimaksimalkan karena keterbatasan pada modal, teknologi, dan ketrampilan yang dimiliki. Hal ini juga didukung oleh mempunyai modal besar untuk mengolah sektor ekonomi yang dapat diekspor guna menambah pendapatann daerah.

Di lain pihak adanya pengusaha daerah yang belum mau mengambil risiko dalam sektor industri karena lemahnya kemampuan atas penguasaan teknologi. Inilah yang mengakibatkan perlu adanya Penanaman Modal Asing di daerah. Bahwa dalam melakukan kegiatan penanaman modal tentu mengandung banyak risiko baik dari pihak yang memiliki modal maupun pihak yang menerima modal.

Dalam GBHN dituangkan bahwa dalam pemanfaatan penanaman modal asing ini bukan berarti selalu bergantung pada kemampuan yang ada di luar negeri, sebab pembangunan ekonomi yang diharapkan dengan mengolah kekuatan ekonomi. Potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui pemanfaatan penanaman modal asing yang mempergunakan teknologi serta ketrampilan modern. Dengan mengurangi faktor ketergantungan yang terus menerus agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang mempunyai latar belakang tradisi dan kebudayaan serta karya seni kerajinan kerajinan tangan yang telah ada sejak dahulunya. Sekalipun tidak mempunyai kesangsian bahwa latar belakang tersebut dalam hal ketrampilan, kemampuan seni tradisi dan jangkauan luas bahan mentah sebagai dasar untuk produksi adalah modal awal yang memadai serta masih menggunakan teknologi.

Namun pengembangan teknologi tradisional yang menghasilkan teknologi berskala kecil tersebut belum dapat berkembang menuju teknologi yang dapat. Pengembangan ekonomi, hal ini dapat saja karena :

1. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan.
2. Tidak adanya pengusaha pembaharu atau interpreneur inovator.
3. Mobilisasi tenaga kerja Sumatera Barat secara tradisional adalah rendah.

4. Tidak adanya wadah teknologi atau jalur-jalur pengembangan sebagai hasil perjuangan manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Daerah Sumatera Barat adalah daerah agraris dengan struktur tradisional pada masyarakatnya sangat dominan yang masih terdapat pada daerah-daerah tertentu di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa mengimpor teknologi secara langsung tidaklah otomatis berdiri memperbaiki kondisi sosial. Untuk itu strategi pembangunan dengan cara alih teknologi dan ketrampilan melalui penanaman modal asing adalah penting sekali. Pemerintah daerah tetap mengharapkan struktur tradisional pada masyarakat tersebut menjadi struktur yang modern mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dalam era globalisasi dewasa ini.

Keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, membawa proses teknologi dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menunjang pembangunan nasional, maka manfaat bagi Pemerintah Daerah adalah :

1. Dengan adanya modal asing dapat memanfaatkan modal tersebut untuk mengolah sumber daya alam sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus dan tidak merugikan kepentingan nasional.
2. Adanya PMA secara langsung dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan keuntungan lainnya dari PMA tersebut.

3. PMA secara tidak langsung membantu melaksanakan program pemerataan pembangunan melalui pembangunan melalui pembukaan lapangan kerja dan pelatihan bagi tenaga kerja.
4. Adanya kemudahan dalam pelaksanaan PMA dengan pelayanan lebih cepat, efektif dan efisien.

2. Manfaat Penanaman Modal Asing Bagi Kuantitas Pembangunan.

Perkembangan PMA di Sumatera Barat berdasarkan syarat persetujuan Pemerintah adalah sebagai berikut :

- Tahun 1969-1974 : Jumlah proyek 5, perluasan tidak ada, rencana investasi (US\$) 12.000.000.
- Tahun 1975-1979 : Jumlah proyek 2, perluasan tidak ada, rencana investasi (US\$) 23.200.000.
- Tahun 1980-1984 : Jumlah proyek 2, perluasan 3, rencana investasi (US\$) 43.541.625.
- Tahun 1985-1989 : Jumlah proyek 4, perluasan 7, rencana investasi (US\$) 126.506.315.
- Tahun 1990-1994 : Jumlah proyek 6, perluasan 1, rencana investasi (US\$) 325.713.200.
- Tahun 1995-1999 : Jumlah proyek 9, perluasan 2, rencana investasi (US\$) 128.850.289.

(Sumber data : BKPPMD Propinsi Sumatera Barat).

Dari data tersebut di atas bahwa manfaat PMA bagi kuantitas pembangunan yang dapat terlihat dari tahun 1969 – 1999 dengan jumlah proyek PMA, perluasan dan rencana investasi yang ditanamkan di daerah Sumatera Barat mengalami peningkatan yang dihitung sekali 5 tahun.

Namun pada periode 1995 – 1999 penanaman modal yang diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah 6,49% per tahun dibutuhkan penanaman modal tidak kurang dari RP.8,945 Triliyun yang terdiri dari :

- a. Pemerintah Rp. 4,040 Triliyun (49,19 %).
- b. Swasta Rp. 4,905 Triliyun (51, 81 %).

Adanya PMA di Sumatera Barat selain dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah, dapat pula mendorong dan mempercepat pembangunan dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa proyek penanaman modal asing tidak dapat terlaksana atau dengan kata lain ditangguhkan. Hal ini disebabkan oleh adanya krisis moneter yang melanda Indonesia yang mengakibatkan perekonomian terpuruk dan dibarengi dengan menurunnya kegiatan penanaman modal secara tujuan serta kondisi negara yang tidak menentu.

3. Manfaat Bagi Pengembangan Dunia Usaha.

Bahwa bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal diatur dengan Keppres 31 Tahun 1995 yang telah dilakukan penyempurnaan lebih lanjut dan diganti dengan Kepres No. 96 Tahun 2000 jo No. 118 Tahun 2000 yang menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal atau Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan pengganti Daftar Skala Prioritas (DSP) yang selama ini digunakan.

Daftar negatif investasi lebih membuka kesempatan berusaha bagi dunia usaha untuk menanamkan modalnya dan memperluas kesempatan

kerja, sebab didalamnya telah dinyatakan 3 kriteria suatu bidang usaha yang tertutup yaitu :

1. Komoditi yang dilarang atau diproses untuk menghasilkan komoditi yang dapat membahayakan lingkungan.
2. Pemasaran memerlukan pola pengaturan yang tepat.
3. Investasi yang diperuntukkan bagi BUMN atau kerja sama dengan BUMN.

Bagi Sumatera Barat sesuai dengan potensi yang ada, bidang-bidang usaha yang dapat dikembangkan bagi penanaman modal baik berupa PMA maupun PMDN adalah sebagaimana yang terdapat pada Daftar Negative Investasi.

Mengingat kebijaksanaan pemerintah maka faktor industri dalam penanaman modal sangat diutamakan sehingga keikutsertaan modal pemerintah daerah Sumatera Barat dapat dialihkan dan memberikan kesempatan kepada pihak swasta dalam melakukan usaha patungan dengan perusahaan swasta luar daerah dan investor asing, dimana yang menjadi perhatian dan dapat menunjang pertumbuhan penanaman modal ada 5 faktor yaitu :¹³⁹

1. Sektor Pertanian

Meliputi sub sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan hampir setiap daerah memiliki potensi ini terutama daerah kabupaten.

2. Sektor Industri

Meliputi industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan brikets, industri garmen dan industri semen serta batu kapur.

3. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata meliputi wisata alam dan hunting sedangkan wisata budaya dinilai kurang prospektif.

4. Sektor Pertambangan

Meliputi pertambangan batu bara, granit, marmer dan emas.

5. Sektor Konstruksi

Meliputi pembangunan proyek-proyek strategis seperti pembangunan bandara Ketaping, Kelok Sembilan dan lain-lain.

Bahwa masing-masing sektor pada tiap-tiap daerah dilihat dari PDRB atau (Produk Domestik Regional Bruto) memberikan manfaat terbesar dibandingkan sektor yang lain. Dalam rangka mewujudkan dan menunjang sektor-sektor pembangunan maka penanaman modal diharapkan dapat menambah laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

4. Manfaat Bagi Tenaga Kerja

Bahwa proses pengembangan teknologi dilakukan secara bertahap, merubah cara kerja masyarakat yang bersifat tradisional menuju cara kerja dengan menggunakan teknologi modern. Di dalam penerapan teknologi modern untuk menunjang pembangunan pada dasarnya adalah mempertemukan 2 aspek yaitu :

1. Teknologi yang menyebabkan pemakaian teknologi.
2. Teknologi secara maksimal menyerap tenaga kerja.

Bahwa adanya penanaman modal asing di daerah akan membawa pengembangan teknologi secara bertahap. Hal ini merupakan pertimbangan pentingnya modal asing di daerah Sumatera Barat demi pembangunan nasional dan daerah.

¹³⁹. Muchlis Anwar, *Loc Cit*, hal. 14.

Manfaat PMA di Sumatera Barat dilihat dari segi tenaga kerja seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 di implementasikan pada penciptaan lapangan kerja, yang mana diharapkan terjadinya penyerapan teknologi atau transfer perpindahan keterampilan dari pihak asing kepada tenaga kerja Indonesia dengan tidak menimbulkan atau dapat mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Jumlah atau penyerapan tenaga kerja pada proyek PMA selama lima tahun terakhir (1998 – 2002) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Penyerapan Tenaga Kerja Pada Proyek PMA Tahun (1998 – 2002)

No.	Tahun	Persetujuan			Realisasi		
		IND	AS	JML	IND	AS	JML
1.	1998	16.572	74	16.646	1.023	6	1.029
2.	1999	5.551	15	5.566	827	6	833
3.	2000	3.452	27	3.479	809	21	830
4.	2001	6.954	40	6.994	4.327	24	4.351
5.	2002	479	16	495	384	12	396
Jumlah		33.008	172	33.180	7.334	69	7.403

(Sumber : data BKPPMD Propinsi Sumatera Barat)

Dari tabel tersebut tampak bahwa sejak adanya aktifitas modal asing di Sumatera Barat mampu menyerap jumlah tenaga kerja lokal dan juga mempunyai manfaat yang besar dalam hal pengenalan terhadap teknologi modern. Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya PMA di Sumatera Barat adalah :

1. Terbukanya kesempatan kerja bagi rakyat atau masyarakat sekitarnya.
2. Masuknya teknologi asing ke daerah Sumatera Barat, yang mana hal-hal tersebut dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.

3. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Di Sumatera Barat.

1. Di Bidang Perencanaan dan Promosi

Perencanaan penanaman modal masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan resesi ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang lalu. Yang mana perencanaan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan rincian menurut daerah relatif sulit dibuat karena besarnya fluktuasi nilai tukar mata uang yang membawa pengaruh kepada stabilitas perekonomian. Dengan tidak adanya kepastian arah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, maka perencanaan penanaman modal sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi juga sulit dilakukan.

Ketidak akurat data base yang tersedia tentang potensi ekonomi karena data potensi ekonomi yang ada sebahagian besar baru berupa data perkiraan yang belum didapat melalui kajian/penelitian yang sistimatis, terarah dan terukur. Rendahnya tingkat validitas data yang ada menyebabkan data tersebut kurang tepat untuk digunakan oleh calon investor dalam menyusun perencanaan penanaman modal.

Bahwa perencanaan penanaman baik secara nasional maupun daerah tidak terlepas dari kendala mulai dari proses awal penyusunan sampai dengan penyelesaiannya. Kendala yang terdapat dalam proses penyusunan perencanaan penanaman modal adalah sebagai berikut :¹⁴⁰

1. Pada tahap identifikasi potensi, dialami kesulitan untuk memperoleh data informasi yang akurat karena instansi sektoral atau dinas-dinas terkait belum memiliki data dan informasi secara baik dan lengkap.

Keadaan ini menyebabkan usulan peluang bidang usaha yang akan dikembangkan tidak mendukung tersediannya data potensi yang dapat dipercaya sehingga perencanaan penanaman modal tidak dapat dijadikan acuan atau tidak dapat mewujudkan dalam bentuk kegiatan yang nyata.

2. Tingkat kepedulian aparaturnya pada unit perencanaan masih belum sepenuhnya dapat mencurahkan khususnya untuk kegiatan ini. Alasannya adalah karena kegiatan perencanaan masih dipandang sebagai pekerjaan yang sulit dan membosankan.
3. Pelaksanaan fungsi koordinasi antar instansi yang terkait kurang berjalan seperti yang diharapkan. Karena masih menonjolkan sikap dan sikap ego sektoral dari masing-masing instansi atau dinas.
4. Kesulitan untuk memperoleh anggaran yang cukup karena kegiatan perencanaan penanaman modal tidak dapat segera menunjukkan hasil atau kegiatan yang nyata karena hal ini juga sangat bergantung pada kesediaan dari calon investor untuk menanamkan modalnya dengan segera yang juga sangat dipengaruhi oleh keadaan politik, keamanan dan lain-lainnya.

Menurunnya tingkat kepercayaan investor asing terhadap stabilitas politik, ekonomi dan moneter serta jaminan keamanan bagi kelangsungan penanaman modal dalam jangka panjang, juga telah menyebabkan berkurangnya minat penanaman modal terutama dari investor asing. Sedangkan kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan selama ini juga dihadapkan dengan berbagai kendala antara lain kurangnya dukungan

¹⁴⁰. Pusat Penelitian dan Pelatihan BKPM Bagian I, *Op Cit*, hal. 17.

anggaran, kemampuan personil serta bahan dan publikasi sebagai alat promosi. Penggunaan media elektronik juga masih kurang dan promosi melalui internet belum juga dapat dilakukan.

2. Birokrasi Yang Tidak Efektif Dan Efisien

Kendala yang dirasakan adanya perbedaan persepsi dan ekspektasi antara penyedia jasa (aparatur pemerintah) dan pengguna jasa (investor) sehingga pengguna jasa merasa dipersulit dan pelayanan birokrasi yang diberikan berbelit-belit dalam pengurusan izin-izin yang diperlukan investor dalam melaksanakan berbagai kegiatan penanaman modal, mulai dari persiapan pembangunan maupun pada tahap operasional. Untuk pengurusan sebuah izin bagi calon investor diperlukan 5 (lima) sampai 8 (delapan) pada instansi yang berbeda dengan jangka waktu yang berbulan-bulan dan biaya tak terduga besarnya. Bahkan ketidakjelasan otoritas penerbitan suatu izin juga sering menimbulkan masalah, baik antar dinas yang ada di daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah tingkat atas.

Sehubungan dengan perijinan ini juga dirasakan kurangnya sosialisasi proses dan prosedur perijinan penanaman modal secara detail sehingga pemahaman dan ekspektasi investor belum dapat disamakan dengan kenyataan yang akan dihadapinya dalam pengurusan perijinan. Untuk itulah para investor mengharapkan layanan satu atap untuk mendapatkan semua perijinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya serta dapat memberikan pelayanan dengan cara yang baik, cepat, efektif dan efisien.

Disamping itu kendala dalam pelayanan administrasi juga dirasakan oleh pihak investor dimana sebelum UU Otonomi Daerah masalah administrasi mengenai retribusi atau pungutan-pungutan terbatas tetapi setelah otonomi daerah ini pungutan-pungutan tersebut semakin banyak yang dikenal dengan istilah sumbangan pihak ketiga, begitu juga dengan banyaknya peraturan-peraturan yang dikeluarkan disamping Perda resmi. Apalagi sekarang dikeluarkan Keputusan Menteri No. 150 tahun 2000 tentang Pesangon merupakan hal yang memberatkan bagi investor dalam pelaksanaan penanaman modal asing.

3. Rendahnya Penguasaan Informasi dan Teknologi

Dalam era globalisasi ini penguasaan terhadap informasi dan teknologi merupakan salah satu kekuatan untuk dapat memenangkan kompetisi di dalam persaingan global termasuk dalam menarik penanaman modal terutama PMA. Penguasaan terhadap informasi bisa terlihat dari kemampuan berbahasa dan ketersediaan media informasi. Sedangkan penguasaan teknologi antara lain ditentukan oleh ketrampilan, mengoperasionalkan dan memanfaatkan kemampuan untuk memiliki teknologi.

Bahwa teknologi itu terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan. Organisasi dan operasi dari suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktivitasnya. Jadi teknologi tidak hanya terdiri dari scientific, knowledge. Tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi. Dengan demikian teknologi itu dapat berupa paten (patents atau invention), desain industri utility models, and new plant variety serta know how.

Penguasaan teknologi menjadi penting artinya untuk pengembangan dan pembangunan suatu negara, karena teknologi mencakup aspek yang sangat luas dan pada hakekatnya telah menjadi komoditi yang mahal karena langka dan banyak diminati. Untuk mendapatkan manfaat dari banyak diminati. Untuk mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut berbagai cara dapat dipakai untuk mengalihkannya. Dalam hal alih teknologi, peranan PMA dapat diambil pengalaman kemampuan dalam menguasai teknologi tinggi di mana sebelumnya belum dimengerti atau masih menggunakan cara-cara tradisional, juga dalam hal manajemen dan pemasaran juga lebih baik.

Adanya penanaman modal asing ditujukan agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pembangunan nasional Indonesia. Yang mana penguasaan informasi dan teknologi merupakan kendala yang serius bagi daerah dalam, bidang penanaman modal asing. Karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan untuk memiliki teknologi menyebabkan posisi PMA daerah dalam bidang informasi dan teknologi menjadi rendah.

4. Skala Potensi Yang Kurang Ekonomis

Persediaan potensi yang tidak memusat dan kondisi alam yang sulit dijangkau, menjadikan potensi tersebut kurang ekonomis untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi. Kendala seperti ini banyak ditemukan terutama pada sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan kendala pada sektor dan pertanian yang sering ditemui adalah skala persediaan lahan yang terbatas, topografi dan kondisi iklim.

Dengan munculnya ketimpangan sosial ekonomi dapat menyebabkan terjadinya kendala. Dimana kelompok masyarakat dengan kepemilikan faktor produksi terbatas dan produktivitas rendah menghasilkan tingkat kesejahteraan rendah dihadapkan kepada kelompok pelaku ekonomi kuat. Dengan mengikuti waktu, kesenjangan semakin melebar sehingga muncul pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta daerah maju dan daerah terbelakang.

5. Rendahnya Jaminan Keamanan Atas Penanaman Modal dan Perlindungan Hukum.

Rendahnya jaminan keamanan atas penanaman modal disebabkan terjadinya kerusuhan sosial, tuntutan kaum buruh dan pekerja. Konflik antar kelompok di seluruh lokasi penanaman modal dan gejolak lainnya yang terjadi dalam masyarakat tentu akan bermuara pada gangguan keamanan dan tuntutan kepada pihak perusahaan agar ikut serta menyelesaikan dan menanggung beban sosial yang ditimbulkannya. Maka hal itu dapat dipahami karena perusahaan adalah titik lemah yang dapat ditekan karena menghadapi risiko rugi bila operasi perusahaan dihentikan oleh masyarakat atau pekerjanya sendiri. Kesalahan tersebut akan bertambah terus mengingat aparat pemerintah tidak bisa lagi bersikap keras dan tegas dalam menghadapi massa.

Dalam keadaan demikianlah diharapkan adanya jaminan terhadap keamanan dan keselamatan investor dan asetnya, memang merupakan suatu yang amat diperlukan untuk menjaga kelanjutan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dan juga untuk menarik investor baru untuk melakukan pengembangan usaha sesuai dengan potensi yang ada.

Rendahnya perlindungan hukum terhadap kegiatan dan aset serta tenaga kerja asing dari penanaman modal luar negeri selama beberapa waktu ini menyebabkan kurangnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya pada negara maupun daerah. Adanya upaya peningkatan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memberi jaminan kepada penanaman modal asing telah membawa perubahan dalam upaya mempromosikan potensi dan peluang penanam modal kepada kalangan pengusaha di luar negeri.

Perlindungan penanaman modal merupakan isu yang sangat mengemukakan (*prominent issue*) dewasa ini terutama untuk kegiatan penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal asing dan adanya Persetujuan Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) bukan merupakan suatu yang dapat mendorong meningkatkan penanaman modal dalam waktu singkat, akan tetapi hanya merupakan jalan keluar dan langkah penyelamatan yang dapat dijalankan untuk mempertahankan penanaman modal asing serta perlindungan hukum dalam bentuk *Investment Guarantee Agreement (IGA)* juga merupakan langkah konkret yang dinantikan pihak investor asing untuk kembali menanamkan modal di Indonesia.

6. Ketidakpastian Hukum

Supremasi hukum merupakan salah satu kata kunci yang dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum bagi calon investor. Ketidakberpihakan penerapan hukum terhadap kebenaran sangat mempengaruhi

minat investor dalam penanaman modal baik PMDN maupun PMA. Bahwa tajamnya sorotan terhadap kinerja penegak hukum akhir-akhir ini merupakan salah satu kondisi yang harus dibenahi pemerintah dalam rangka menarik minat investor asing dalam penanaman modalnya di Indonesia.

7. Adat Istiadat, Nilai Budaya dan Kebiasaan Masyarakat

Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya minat investor di suatu negara atau daerah. Seperti di Bali, adat istiadat, nilai budaya dan kebiasaan masyarakat yang dianut masyarakat mampu menjadi faktor pendukung tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya dipropinsi tersebut.

Di Sumatera Barat keberadaan tanah ulayat sebagaimana diatur di dalam nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tidak jarang menjadi faktor penghambat masuknya investor ke daerah tersebut. Sehubungan dengan otonomi daerah ini persoalan tanah ulayat merupakan wacana publik yang menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Minang.

Dengan adanya PMA khusus ditujukan kepada para investor atau tenaga kerja asing yang berasal dari Eropa yang mempunyai latar belakang nilai budaya dan kebiasaan masyarakat yang sama sekali berbeda dengan Indonesia khususnya Sumatera Barat yang mana masyarakatnya sangat peka terhadap jenis kebudayaan yang berasal dari Eropa tersebut.

Hal ini juga merupakan kendala bagi investor asing ke Sumatera Barat karena terlihat dari tata cara perpakaian dan yang lebih esensial terlihat dampaknya pada agama yakni dengan adanya kawin kontrak yang menurut agama Islam jelas dilarang dan tidak ada pengaturannya apalagi daerah Sumatera Barat selalu menjunjung tinggi Adat Basandi Sara', Sara' Basandi Kitabullah baik mengenai adat istiadat, nilai budaya dan kebiasaan.

8. Sumber Daya Manusia

Bahwa ketidaktersediaan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas secara memadai merupakan salah satu kendala yang dapat mengurangi minat investor dalam penanaman modal di suatu daerah. Daerah yang mempunyai tenaga kerja dalam jumlah yang besar relatif lebih diminati dibanding daerah yang sedikit tenaga kerja. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pada daerah yang padat tenaga kerja akan sangat ketat, yang menyebabkan posisi penyediaan jasa atau investor akan kuat, sehingga investor akan mendapatkan tenaga kerja lebih murah.

Kekurangan tenaga dan kemampuan personil dalam melakukan pengawasan kegiatan investasi di lapangan. Keadaan tersebut diperburuk lagi dengan kenyataan rendahnya tingkat kesadaran investor untuk memenuhi semua kewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan ketentuan lain yang dibebankan kepada perusahaan. Dengan demikian,

maka banyak kegiatan penanaman modal yang tidak terawasi dan terkendali dengan baik, misalnya risiko gangguan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari aktifitas bisnis yang dilakukan di suatu tempat tertentu.

Apabila suatu kegiatan investasi membawa dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, maka akan timbul berbagai masalah dilapangan. Idealnya, suatu kegiatan investasi dapat memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemilik modal sekaligus memberikan manfaat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya untuk berpartisipasi di dalam kegiatan investasi tersebut. Disamping itu, para investor juga diharapkan untuk dapat menjaga kelestarian alam disekitarnya.

Walaupun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan penanaman modal asing para investor masih berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat seperti pembangunan minuman air mineral, pabrik arang aktif dari tempurung kelapa dan pengembangan pariwisata.

Untuk mengatasi kendala pelaksanaan penanaman modal asing maka Pemerintah Daerah dan masyarakat di Sumatera Barat harus mampu menyatukan tekad untuk meningkatkan fungsi kerja dan mutu pelayanan dari instansi pemberi ijin di bidang penanaman modal. Perbaikan prosedur dan tata cara pemberian izin penanaman modal harus diarahkan kepada sistim

pelayanan satu pintu atau *One Stop Service*, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.

Bagi perlindungan penanaman modal asing menjadi tidak penting apalagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing tersebut dapat dikendalikan dengan baik, sejak awal dan secara nyata dapat memberi manfaat kepada semua pihak terkait. Bila tidak ada yang dirugikan dalam suatu kegiatan penanaman modal asing maka tingkat penanaman modal juga semakin tinggi.

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penanam modal asing mengenai tatacara dan prosedur serta perizinan yang diatur dengan SK Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK 1999 yang berlaku secara nasional. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dimana terdapatnya perbedaan dalam pelaksanaan PMA bahwa sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah, Surat Persetujuan (SP) tidak boleh diterbitkan di daerah dan setelah Undang-Undang Otonomi Daerah surat persetujuan boleh diterbitkan di daerah serta adanya penyederhanaan dalam prosedur perijinan dengan SK Meninves/Kepala BKPM No. 37/SK 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Propinsi dalam hal ini ketua BKPM Daerah memberi persetujuan, fasilitas dan perizinan pelaksanaan penanaman modal. Ini merupakan suatu kemudahan dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing setelah dikeluarkan UU Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

Upaya penciptaan dan pengembangan iklim penanaman modal asing menjadi lebih kondusif dengan segala peluang dan potensi ekonomi yang dimiliki dapat dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya. Bahwa perumusan strategi kebijakan dalam penciptaan iklim penanaman modal asing tersebut harus mengacu pada visi dan misi di bidang penanaman modal. Oleh karena itulah visi, misi penanaman modal nasional dan daerah harus pada track atau jalan yang sama agar dapat saling menopang mencapai sasaran akhir yang telah ditentukan.

Pelaksanaan penanaman modal asing dalam era otonomi daerah ini merasa sebagai suatu momentum untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas dan insiatif dalam melaksanakan proses pemberdayaan potensi daerah, terutama kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara lebih efektif dan produktif yang terdapat pada daerah Sumatera Barat.

2. Manfaat yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan penanaman modal asing setelah dan sebelum dikeluarkan undang-undang otonomi daerah di Sumatera Barat pada prinsipnya sama namun terdapat perbedaan dalam segi pelayanan dimana sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah pelayanan lambat dan berbelit-belit dan setelah otonomi daerah pelayanan cepat, efisien dan efektif, disamping itu adanya :

1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

- a. Dengan adanya modal asing dapat memanfaatkan modal tersebut untuk mengolah sumber daya alam sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus dan tidak merugikan kepentingan nasional.
- b. Adanya Penanaman Modal Asing secara langsung dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan keuntungan lainnya dari penanaman modal asing tersebut.
- c. Penanaman Modal Asing secara tidak langsung membantu melaksanakan program pemerataan pembangunan melalui pembangunan pembukaan lapangan kerja dan pelatihan bagi tenaga kerja.

2. Manfaat Bagi Kuantitas Pembangunan.

Adanya Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat selain dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah, dapat pula mendorong dan mempercepat pembangunan dalam mencapai adil dan makmur.

3. Manfaat Bagi Pengembangan Dunia Usaha.

Daftar negatif investasi lebih membuka kesempatan berusaha bagi dunia usaha untuk menanamkan modalnya dan memperluas kesempatan kerja. Di Sumatera Barat sesuai dengan potensi yang ada, bidang-bidang usaha yang dapat dikembangkan bagi Penanaman Modal Asing adalah sebagaimana yang terdapat pada daftar negatif investasi.

4. Manfaat Bagi Tenaga Kerja.

Terbukanya kesempatan kerja bagi rakyat atau masyarakat sekitarnya dan masuknya teknologi asing ke daerah Sumatera Barat, yang mana hal-hal tersebut dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

3. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing setelah dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

1. Di Bidang Perencanaan dan Promosi.

Dengan terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang membawa pengaruh kepada stabilitas perekonomian dan mengakibatkan tidak adanya kepastian arah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, maka perencanaan penanam modal sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi sulit dilakukan. Apalagi ketidak akurat data abse yang tersedia tentang potensi

ekonomi sebab sebahagian besar masih berupa data perkiraan yang belum ada penelitian yang sistimatis, terarah dan terukur. Sedangkan kegiatan promosi penanaman modal dihadapkan pada kendala kurangnya dukungan anggaran, kemampuan personil serta bahan dan publikasi sebagai alat promosi.

2. Birokrasi Yang Tidak Efektif dan Efisien.

Investor merasa dipersulit dan pelayanan birokrasi yang diberikan berbelit-belit dalam pengurusan izin-izin yang diperlukan investor dalam meaksanakan berbagai kegiatan penanaman modal. Karena kurangnya sosialisasi roses dan prosedur perizinan Penanaman Modal Asing, maka para investor mengharapkan layanan satu atap untuk mendapatkan semua perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

Disamping itu kendala dalam pelayanan administrasi juga dirasakan oleh investor, dimana sebelum otonomi daerah masalah administrasi mengenai retribusi atau pungutan-pungutan semakin banyak yang lebih dikenal dengan sumbangan pihak ketiga. Apalagi sekarang telah dikeluarkan Keputusan Menteri No. 150 Tahun 2000 tentang Pesangon, merupakan hal yang memberatkan bagi investor disamping pungutan-pungutan tersebut.

3. Rendahnya Penguasaan Informasi dan Teknologi

Dalam era globalisasi penguasaan informasi dan teknologi merupakan salah satu kekuatan untuk dapat memenangkan kompetiti di dalam persaingan global termasuk dalam menarik penanaman modal terutama PMA. Penguasaan informasi bisa terlihat dari kemampuan berbahasa dan ketersediaan media informasi sedangkan penguasaan teknologi antara lain

ditentukan oleh keterampilan, mengoperasionalkan dan memanfaatkan kemampuan untuk memiliki teknologi. Apalagi teknologi mencakup aspek yang sangat luas dan pada hakekatnya telah menjadi komoditi yang mahal karena langka dan banyak diminati. Penguasaan informasi dan teknologi merupakan kendala yang serius bagi daerah dalam bidang PMA.

4. Skala Potensi yang Kurang Ekonomis

Kondisi alam yang sulit, ketersediaan potensi yang tidak memusat menjadikan potensi tersebut kurang ekonomis untuk diekspolarasi dan eksploitasi. Kendala ini banyak ditemukan pada sektor pertambangan, penggalian dan di sektor pertanian sering ditemui skala ketersediaan lahan topografi dan kondisi iklim serta munculnya ketimpangan sosial ekonomi juga menyebabkan terjadi kendala.

5. Rendahnya Jaminan Keamanan atas Penanaman Modal dan Perlindungan Hukum.

Rendahnya jaminan keamanan atas penanaman modal atas penanaman modal disebabkan terjadinya kerusuhan sosial, tuntutan kaum buruh dan pekerja. Konflik antar kelompok dilokasi penanaman modal dan gejala lainnya dalam masyarakat akan bermuara pada gangguan keamanan dan begitu juga terhadap rendahnya perlindungan hukum terhadap kegiatan dan aset serta tenaga kerja asing akan menyebabkan kurangnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya pada negara maupun daerah, untuk diharapkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap investor, aset dan tenaga kerja dalam kegiatan penanaman modal. Abkan adanya P4M yang merupakan langkah dan jalan keluar penyelamatan dan mempertahankan PMA.

6. Ketidakpastian Hukum

Supremasi hukum merupakan salah satu kata kunci yang dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum bagi calon investor. Ketidakberpihakan penerapan hukum terhadap kebenaran sangat mempengaruhi minat investor dalam penanaman modal baik PMDN maupun PMA. Tajamnya sorotan terhadap kinerja penegak hukum akhir-akhir ini merupakan salah satu kondisi yang harus dibenahi pemerintah dalam rangka menarik minat investor asing dalam penanam modalnya di Indonesia.

7. Adat Istiadat, Nilai Budaya, Kebiasaan Masyarakat.

Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya minat investor di suatu negara atau daerah. Seperti di Bali, adat istiadat, nilai budaya dan kebiasaan masyarakat yang dianut, masyarakat mampu menjadi faktor pendukung tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di provinsi tersebut. Di Sumatera Barat keberadaan tanah ulayat sebagaimana diatur di dalam nilai-nilai adat dan budaya minangkabau tidak jarang menjadi faktor penghambat masuknya investor kedaerah tersebut, sehubungan dengan otonomi daerah persoalan tanah ulayat merupakan wacana publik yang menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Minang.

8. Sumber Daya Manusia

Bahwa ketidaktersediaan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas secara memadai merupakan salah satu kendala yang dapat mengurangi minat investor dalam penanaman modal di suatu daerah. Daerah yang mempunyai tenaga kerja besar relatif diminati daripada daerah

yang sedikit tenaga kerjanya, karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pada daerah yang padat tenaga kerja akan sangat ketat, yang menyebabkan posisi penyediaan jasa dan investor akan kuat, sehingga investor akan mendapatkan tenaga kerja lebih murah kekurangan tenaga dan kemampuan personil dalam melakukan pengawasan kegiatan penanaman modal di lapangan menyebabkan banyak kegiatan penanaman modal yang tidak terawasi dan terkendali dengan baik

B. REKOMENDASI

1. Dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan pelayanan satu atap dengan layanan yang cepat, efektif dan efisien agar kemudahan ada setelah UU Otonomi Daerah ini betul-betul dapat dilaksanakan oleh para investor dan dapat meningkatkan pelaksanaan penanaman modal asing dari tahun ke tahun.
2. Daftar pelaksanaan Penanaman Modal Asing dapat memperluas pemerataan kesempatan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan memberikan peluang yang sama bagi perilaku ekonomi dan menggerakkan kembali usaha kecil dan menengah serta memperbesar kesempatan bermitra bagi UKM dan Koperasi di daerah Sumatera Barat.
3. Agar Pemerintah Daerah dapat mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing terutama persoalan pertanahan yang sering terjadi di lapangan dan diharapkan untuk tidak merugikan posisi rakyat sebagai pemegang hak miliki dalam masalah tanah ulayat di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Adolf, Huala; *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- , *Ilmu Ekonomi Internasional*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Amrizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Bagien Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Black Henry, Campbell. MA, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, The Publisher's Editorial Staff, Boston College, St. Paul Minn, West Publishing CO, 1979.
- Brannen, Julia, *Mixing Methods : Qualitative and Quantitative Research*, Avebury, Brookfield, USA, 1992.
- , Alih Bahasa : Nuktah Arfawie, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah, IAIN Antasari Samarinda, Penerbit Pustaka Palajar, Yogyakarta, 1994.
- Darumarti, D. Krishna dan Rauta Umbu, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- David, Ren , *Arbitration in Intenational Trade Netherlands*, Kluwer, 1985.
- Dirjosisworo, Soejono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*.PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gunadi, K., *Penanaman Modal Asing dan Kesempatan Kerja*, Prisma, Jakarta, 1976.

- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1972.
- , *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Penerbit CV. Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999.
- Hartono, Sri Rejeki, *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada FH UNDIP, Semarang, 1995.
- Jatmika Sidik, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Kartasapoetra G. dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Bandung, 1985.
- Keraf Gorys, *Eksposisi dan Deskripsi*, Nusa Indah, Flores, 1982.
- , *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores, 1993.
- , *Diksi dan Gaya Bahasa Sari Retoretika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- , *Eksposisi, Komposisi*, Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta, 1995.
- Koesoemahatmadja R.D.H., *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Lauterpacht, Oppenheim, *International Law, Atreaty Vol. 1 Disputes Was And Neutrality*.
- , *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*, Pusat Penelitian dan Pelatihan BKPM, Jakarta, 2002.
- Lubis, T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- , dan Magnar Kuntara, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Miles, Mathew B. dan Huberman A Michael, *Penterjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1992.

- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Muslimin, Amral, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Nasution, S. dan Thomas M, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Pakpahan, Normin. S, *Pembinaan Ekonomi Dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, BPHN, Jakarta, 1995.
- Panitia Penulisan, *Sejarah Departemen Luar Negeri 25 Tahun Departemen Luar Negeri*, Penerbit Yayasan Kesejahteraan Karyawan DEPLU, Jakarta, 1973.
- Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, *Pedoman Penulisan Penelitian Untuk Tesis*, Semarang, 2001.
- , *Pedoman Penulisan Tesis*, Semarang, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1990.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Investasi I*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1995.
- , *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1996.
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuatan Pusat ke Daerah Pustaka*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Soebekti, R., *Abitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind - Hill - Co, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, 1989.
- , *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993.

Sunny, Ismail, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

-----, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.

-----, *Kegiatan Perusahaan Multinasional Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, Gramedia, Jakarta, 1987.

-----, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal (Problems of Investment in Equities in Securities)*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.

Suroso, P.C., *Perekonomian Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1993.

Syarif, Syahril, *Statistik Penanaman Modal Propinsi Sumatera Barat Tahun 2002*, BKPPMD Propinsi Sumatera Barat, 2002.

Wajong, J., *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jakarta, 1975.

Wijaya. I. G. Rai, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

-----, *Penanaman Modal Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, 1990.

Makalah

Aini, Nurul, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Demokratisasi Pemerintah daerah*, Seminar Dalam Rangka Loka Karya (Workshop) Kerjasama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan Partnership For Government in Indonesia dan UNDIP, Semarang, 2002.

Anwar, Muchlis, *Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Investasi di Daerah*, Seminar Diskusi Panel Untuk Mendapatkan Masukan Dalam Penyusunan Kebijakan Dan Pengembangan Modal di Sumatera Barat, Padang, 2002.

Badrussaman, Irham, *Paradigma Hubungan Antar Pusat dan Daerah Dalam Perspektif Kekinian*, Seminar Bersama di Bidang Ilmu Hukum, Kerjasama, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti dengan APTISI, Padang.

BKPPMD, *Kepastian Investasi di Sumatera Barat (Dilihat Dari Segi Hukum Legalitas Dan Keamanan Berusaha Bagi Investor*, Seminar Nasional Perhumas, Padang, 2001.

BKPPMD Propinsi Sumatera Barat, *Kebijakan Penanaman Modal di Propinsi Sumatera Barat*, Makalah Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dalam Rangka Otonomi Daerah, Padang, 2001.

Direktorat Jendral Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, *Laporan Peningkatan Penanaman Modal Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah*, DEPLU, Jakarta, 2002.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal, *Kebijakan Penanaman Modal Mendukung Penerapan Otonomi Daerah*, Seminar Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Era Otonomi Daerah di Propinsi Sumatera Barat, BKPM, 2002.

Direktur Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Prasarana BKPPMD, *Kebijakan Penanaman Modal dalam Era Otonomi Daerah*, Makalah Forum Perencanaan dan Pengkajian Potensi dan Penanaman Modal, Padang, 2002.

Ibrahim, Eviandri, *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum*, Seminar Bersama di Bidang Ilmu Hukum Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Dengan APTISI, Padang, 2002.

Kepala BKPPMD Propinsi Sumatera Barat, *Pengembangan dan Prospek Investasi di Sumatera Barat*, Makalah Rapat Koordinasi Pembangunan Kota Padang Tahun 2002, Padang, 2002.

Pusat Penelitian dan Pelatihan BKPM, *Materi Pelatihan Pelayanan Penanaman Modal, Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal Bagian I*, Jakarta, 2002.

-----, *Materi Pelatihan Pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Bagian II*, Jakarta, 2002.

-----, *Materi Pelatihan Pelayanan Penanaman Modal, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Bagian III*, Jakarta, 2002.

-----, *Materi Pelatihan Pelayanan Penanaman Modal, Aspek Hukum Penanaman Modal Bagian IV*, Jakarta, 2002.

Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (PSHE) Fakultas Hukum UI BKPM, *Kerjasama Pemindahan Teknologi*, Jakarta, 1989.

Ratnawati Tri, *Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dalam Jurnal Otonomi*, Vol. 1, Jakarta, 2000.

R. Ibrahim, *Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Mewujudkan Pemerataan Pembangunan*, Materi Ceramah, Denpasar, 1997.

Sumantoro, *Program Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Asing*, Perspektif Sosial, Seminar Sosiologi Hukum, UMS, Surakarta, 1996.

Syarif Syahrial, *Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat*, Seminar Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat, Padang, 2002.

-----, *Perkembangan Penanaman Modal di Sumatera Barat*, Seminar BKPPMD/BI, Padang, 2002.

Syarif, Syahrial, *Peranan Persetujuan Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal dalam Peningkatan Investasi*, Seminar Upaya Peningkatan Investasi Asing dan Peranan P4M, Non Allignment Movement Center, Deplu, Jakarta, 2000.

Suralaga, Hidayatullah, *Makalah Pengarahan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah Sumatera Barat*, Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Padang, 2000.

-----, *Sambutan Deputi Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal*, Seminar Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Sewilayah Sumatera Barat, Padang, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1968 Tentang PMDN.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan PMA.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan PMA.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Majalah

Soemitro, Ronny Hanitidjo, *Penelitian Hukum Normatif*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 Tahun 1988, halaman 13 – 23.

-----, *Teori-Teori Dalam Ilmu Hukum*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 1 tahun 1989, halaman 32 – 39.

-----, *Fungsi Teori Dalam Penelitian Empiris*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 7 Tahun 1991, halaman 21 – 26.

-----, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 Tahun 1991, halaman 44 – 50.

-----, *Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 Tahun 1992, halaman 32 – 40.

-----, *"Grounded Research" Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 Tahun 1993, halaman 28 – 37.